



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0122);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V . . .

BAB V	RENCANA	KERJA	DAN	PENDANAAN
	DAERAH			
BAB VI	KINERJA		PENYELENGGARAAN	
	PEMERINTAHAN	DAERAH		
BAB VII	PENUTUP			

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menyusun:
 - a. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 selain menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Program dan Kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak tertuang dalam RKPD Tahun 2023, dapat dimasukkan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sepanjang mendapatkan persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dituangkan ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, priritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana ayat (3) kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran dan kegiatan dan indikator kinerja masing masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dalam ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2023.

Pasal 8 . . .

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2023.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.
NIP. 19670611 200212 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 6
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I - 9
1.4 Maksud dan Tujuan	I - 10
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I - 11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 13
2.1 Data dan Informasi Kondisi Umum Daerah	II - 13
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II - 13
2.1.1.1 Karakteristik lokasi dan Wilayah	II - 14
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II - 22
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II - 28
2.1.1.4 Demografi	II - 31
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II - 37
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 37
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II - 55
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II - 71
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II - 71
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	II - 71
2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II - 119
2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	II - 146
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II - 154
2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	II - 154
2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur.....	II - 156
2.1.4.4 Fasilitas Bank dan non Bank	II - 157
2.2 Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan.....	II - 157
2.2.1 Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD.....	II - 158
2.2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan	II - 163

2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II - 196
2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	II - 196
2.3.2	Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.....	II - 196
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH..	III - 205
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 205
3.1.1	Arah Kebijakan Ekonomi Global dan Nasional.....	III - 205
3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Banten.....	III - 208
3.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tangerang.....	III - 221
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 241
3.2.1	Pendapatan Daerah	III - 242
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III - 245
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III - 249
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV - 250
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 251
4.1.1	Telaahan Tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV- 251
4.1.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023	IV - 255
4.1.3	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2023	IV - 261
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2023.....	IV - 266
4.2.1	Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV - 267
4.2.2	Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023 ..	IV - 289
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2023....	IV - 289
4.2.4	Arah Kebijakan Pemulihan Dampak Ekonomi	IV - 294
4.3	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV - 298
4.4	Keselarasn RKPD Tahun 2023	IV - 300
4.4.1	Keselarasn Tema Pembangunan antara dokumen RKP, RKPD Provinsi Banten dengan RKPD Kabupaten Tangerang	IV- 300
4.4.2	Keselarasn Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Banten dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tangerang	IV- 301

BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V - 303
5.1	Rencana Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2023	V - 303
5.2	Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023.....	V - 340
5.3	Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan Bersumber dari APBN Tahun 2023	V - 348
5.4	Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Tangerang Tahun 2023	V - 355
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI - 356
BAB VII	PENUTUP	VII - 375

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 2021, hasil Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Curug	II - 17
Tabel 2.2	Kecepatan dan Tekanan Angin di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 17
Tabel 2.3	Curah Hujan, Hari Hujan dan Lama Penyinaran Matahari di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 17
Tabel 2.4	Luas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang	II - 20
Tabel 2.5	Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang Dalam Revisi RTRW Kabupaten Tangerang 2011 - 2031	II - 23
Tabel 2.6	Kawasan Peruntukan Lindung di Wilayah Kabupaten Tangerang.....	II - 27
Tabel 2.7	Potensi Bencana di Kabupaten Tangerang	II - 29
Tabel 2.8	Kajian Pra Bencana Kabupaten Tangerang.....	II - 30
Tabel 2.9	Tabel Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2021.....	II - 33
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 35
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2015-2021 .	II - 38
Tabel 2.12	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang, 2017-2021 (miliar Rp.).....	II - 42
Tabel 2.13	PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021 (Miliar Rupiah)	II - 43
Tabel 2.14	PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah).....	II - 44
Tabel 2.15	Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2021	II - 45
Tabel 2.16	Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga konstan Tahun 2016 - 2021 (dalam persen).....	II - 46
Tabel 2.17	Perkembangan Inflasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021.....	II - 47
Tabel 2.18	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020	II - 52
Tabel 2.19	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021	II - 53
Tabel 2.20	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan.....	II - 53
Tabel 2.21	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021	II - 54
Tabel 2.22	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021	II - 55

Tabel 2.23	Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021	II - 56
Tabel 2.24	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021	II - 56
Tabel 2.25	Gambaran Status Gizi Pada Balita Di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021	II - 58
Tabel 2.26	Perkembangan TPAK Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020	II - 58
Tabel 2.27	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2021	II - 59
Tabel 2.28	Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021	II - 63
Tabel 2.29	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021	II - 64
Tabel 2.30	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021	II - 65
Tabel 2.31	Penguatan Cadangan Pangan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 66
Tabel 2.32	Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021	II - 67
Tabel 2.33	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021	II - 67
Tabel 2.34	Produktivitas Sektor Padi dan Palawija Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 68
Tabel 2.35	Jumlah Produksi Padi Per Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 69
Tabel 2.36	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021	II - 70
Tabel 2.37	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021	II - 70
Tabel 2.38	Jumlah Sanggar Seni dan Budaya di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021	II - 71
Tabel 2.39	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021	II - 72
Tabel 2.40	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tangerang Tahun 2015 - 2021	II - 72
Tabel 2.41	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2020	II - 73
Tabel 2.42	Jumlah Usia Siswa TK/RA/PAUD di Kabupaten Tangerang Tahun 2020/2021	II - 73
Tabel 2.43	Rasio Guru/Murid Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020	II - 74

Tabel 2.44	Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2020	II - 74
Tabel 2.45	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 75
Tabel 2.46	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 76
Tabel 2.47	Persentase Guru SD Memenuhi Pendidikan S1 Tahun 2017-2020	II - 76
Tabel 2.48	Persentase Guru SMP Memenuhi Pendidikan S1 Tahun 2017-2021 ...	II - 76
Tabel 2.49	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021	II - 77
Tabel 2.50	Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021 ..	II - 78
Tabel 2.51	Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021	II - 78
Tabel 2.52	Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 80
Tabel 2.53	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021.....	II - 81
Tabel 2.54	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Klinik Di Kabupaten Tangerang Tahun 2021.....	II - 82
Tabel 2.55	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021	II - 83
Tabel 2.56	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021	II - 83
Tabel 2.57	Rasio Tenaga Medis Bidan dan Perawat per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021	II - 84
Tabel 2.58	Distribusi Penyakit Menular lainnya Potensial Wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) Tahun 2021	II - 89
Tabel 2.59	Gambaran Status Gizi Pada Balita Di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 97
Tabel 2.60	Cakupan Imunisasi dasar pada bayi 0-11 bulan Di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 98
Tabel 2.61	Universal Child Immunization (UCI) Desa Di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021	II - 99
Tabel 2.62	Jumlah Peserta JKN Terintegrasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021	II - 100
Tabel 2.63	Jumlah Jenis Peserta JKN Terintegrasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 100
Tabel 2.64	Rekapitulasi Pasien Jamkesda Per Rumah Sakit dan Puskesmas Di Kabupaten Tangerang Tahun 2021.....	II - 101
Tabel 2.65	Kondisi Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 103

Tabel 2.66	Daerah Irigasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2020.....	II - 103
Tabel 2.67	Panjang dan Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 104
Tabel 2.68	Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020	II - 107
Tabel 2.69	Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020 (lanjutan).....	II - 107
Tabel 2.70	Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun 2015-2021	II - 107
Tabel 2.71	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2020	II - 108
Tabel 2.72	Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2015-2021 (Dalam Persen)	II - 109
Tabel 2.73	Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang digunakan Rumah tangga, Tahun 2015-2021 (Dalam Persen).....	II - 109
Tabel 2.74	Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2015-2021 (Dalam Persen).....	II - 110
Tabel 2.75	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 110
Tabel 2.76	Persentase Rumah Tinggal menurut Jenis Atap Terlulus di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020	II - 112
Tabel 2.77	Persentase Rumah Tinggal menurut Dinding yang digunakan di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020	II - 112
Tabel 2.78	Persentase Rumah Tinggal menurut Jenis Lantai di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020	II - 112
Tabel 2.79	Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021	II - 114
Tabel 2.80	Jenis Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tangerang Tahun 2020	II - 114
Tabel 2.81	Jenis Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 114
Tabel 2.82	Karakteristik Anak/Keterlantaran di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 115
Tabel 2.83	Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di Kabupaten Tangerang Tahun 2020	II - 115
Tabel 2.84	Jumlah Keluarga Fakir Miskin di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 116
Tabel 2.85	Karakter Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 117

Tabel 2.86	Penyandang disabilitas di Kabupaten Tangerang Tahun 2021.....	II - 117
Tabel 2.87	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 118
Tabel 2.88	Rekapitulasi Hasil Pendataan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Tangerang Tahun 2021.....	II - 118
Tabel 2.89	Jumlah Angkatan Kerja dan Bekerja Sesuai Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Tangerang Tahun 2020	II - 119
Tabel 2.90	Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021	II - 120
Tabel 2.91	Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 121
Tabel 2.92	Pekerja Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021.....	II - 121
Tabel 2.93	Jumlah anak dan perempuan Korban Kekerasan Mendapat Bantuan Hukum di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021	II - 122
Tabel 2.94	Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2020	II - 122
Tabel 2.95	Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tangerang Tahun 2021.....	II - 123
Tabel 2.96	Jumlah Pengaduan/Laporan Tentang Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021	II - 124
Tabel 2.97	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 124
Tabel 2.98	Sampah yang terangkut di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 125
Tabel 2.99	Perekaman KTP di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 126
Tabel 2.100	Jumlah Penduduk Wajib KTP di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 127
Tabel 2.101	Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 128
Tabel 2.102	Jumlah Keluarga dan Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021.....	II - 129
Tabel 2.103	Peserta Keluarga Berencana Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 130
Tabel 2.104	Peserta Keluarga Berencana Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 130
Tabel 2.105	Jumlah Klinik, Petugas Penyuluh Lapangan KB, PKB, PPKBD dan Sub PPKBD Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 131
Tabel 2.106	Jumlah Klinik, Petugas Penyuluh Lapangan KB, PKB, PPKBD dan Sub PPKBD Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021 (lanjutan)...	II - 132

Tabel 2.107	Jumlah Pasangan Subur Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 133
Tabel 2.108	Jumlah Pasangan Subur Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021 (lanjutan)	II - 134
Tabel 2.109	Jumlah Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 135
Tabel 2.110	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian Penduduk di Kabupaten Tangerang 2017-2021.....	II - 135
Tabel 2.111	Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 136
Tabel 2.112	Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 137
Tabel 2.113	Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 138
Tabel 2.114	Jumlah Kendaraan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 139
Tabel 2.115	Rasio Ijin Trayek Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021	II - 139
Tabel 2.116	Perkembangan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021 .	II - 140
Tabel 2.117	Perkembangan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021 .	II - 141
Tabel 2.118	Banyaknya Desa/Kelurahan dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler, 2020 dan 2021	II - 142
Tabel 2.119	Perkembangan Koperasi di Kabupaten Tangerang 2018-2021	II - 143
Tabel 2.120	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021	II - 144
Tabel 2.121	Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021	II - 144
Tabel 2.122	Data Kepemudaan Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 145
Tabel 2.123	Kondisi Perpustakaan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021	II - 146
Tabel 2.124	Jumlah Konsumsi Ikan per Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021	II - 147
Tabel 2.125	Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Penangkapan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021	II - 148
Tabel 2.126	Kontibusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB di Kabupaten Tangerang 2018-2021.....	II - 149

Tabel 2.127	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021	II - 150
Tabel 2.128	Ekspor Bersih di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020	II - 152
Tabel 2.129	Ekspor Bersih di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 153
Tabel 2.130	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah tangga Kabupaten Tangerang, Tahun 2016 - 2021.....	II - 156
Tabel 2.131	Jenis Perkerasan Jaringan Jalan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020	II - 157
Tabel 2.132	Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang Diberikan dari Bank Umum dan BPR di Kabupaten Tangerang dan Jenis Penggunaan (juta rupiah)	II - 157
Tabel 2.133	Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 158
Tabel 2.134	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 160
Tabel 2.135	Pencapaian Kinerja Kabupaten Tangerang Tahun 2020	II - 162
Tabel 2.136	Pencapaian Sasaran Strategis Kabupaten Tangerang Tahun 2021 ...	II - 162
Tabel 2.137	Capaian Program Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 164
Tabel 3.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2023	III - 207
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Makro Nasional Tahun 2022 dan 2023	III - 208
Tabel 3.3	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020	III - 209
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2017-2020	III - 211
Tabel 3.5	Realisasi dan Target Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2023....	III - 221
Tabel 3.6	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018-2021.....	III - 223
Tabel 3.7	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang, 2017-2021 (miliar Rp.).....	III - 226
Tabel 3.8	PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2021 (Miliar Rupiah)	III - 227
Tabel 3.9	PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)	III - 228
Tabel 3.10	Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2021	III - 229
Tabel 3.11	Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga konstan Tahun 2016 - 2021 (dalam persen)	III - 230

Tabel 3.12 Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2021	III - 232
Tabel 3.13 Pendapatan Penduduk 40% terendah dan Gini Rasio di Kabupaten Tangerang, Tahun 2010-2020	III - 235
Tabel 3.14 Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023	III - 241
Tabel 3.15 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023	III - 245
Tabel 3.16 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023	III - 249
Tabel 3.17 Proyeksi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	III - 249
Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan sasaran.....	IV - 256
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023	IV - 261
Tabel 4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang	IV - 281
Tabel 4.4 Rekapitulasi Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2023.....	IV - 298
Tabel 5.1 Rekapitulasi Program Prioritas Kabupaten Tangerang Tahun 2023....	V - 303
Tabel 5.2 Program Unggulan Daerah disertai Indikasi Kegiatan.....	V - 334
Tabel 5.3 Capaian dan Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023.....	V - 340
Tabel 5.4 Usulan Daerah Rakortekbang Tahun 2023 Kabupaten Tangerang.....	V - 353
Tabel 6.1 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2023	VI - 356
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2023	VI - 357
Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang Tahun 2022	VI - 359

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004	I - 10
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Tangerang	II - 15
Gambar 2.2	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang	II - 22
Gambar 2.3	Peta Pola Ruang Kabupaten Tangerang	II - 27
Gambar 2.4	Peta Jalur Evakuasi Bencana Tsunami	II - 30
Gambar 2.5	Peta Kawasan Rawan Bencana.....	II - 31
Gambar 2.6	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020	II - 34
Gambar 2.7	Jumlah Penduduk dari tahun 2014-2021	II - 35
Gambar 2.8	Piramida Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2020.....	II - 36
Gambar 2.9	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2016-2020	II - 40
Gambar 2.10	Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2021 (000 rupiah)	II - 48
Gambar 2.11	Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2021 (000 rupiah)	II - 49
Gambar 2.12	Gini Rasio Kabupaten tangerang Tahun 2013-2020	II - 49
Gambar 2.13	Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021.....	II - 50
Gambar 2.14	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2013-2021	II - 51
Gambar 2.15	Diagram Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021	II - 54
Gambar 2.16	Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021 ...	II - 57
Gambar 2.17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021	II - 59
Gambar 2.18	Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021	II - 62
Gambar 2.19	Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021	II - 78
Gambar 2.20	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021...	II - 80
Gambar 2.21	IR (Incidence Rate) DBD di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021.....	II - 85
Gambar 2.22	Grafik Case Fatality Rate / Angka kematian (CFR) DBD di Kabupaten Tangerang.....	II - 85

Gambar 2.23 Penemuan Kasus Diare Semua Umur Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021	II - 86
Gambar 2.24 Persentase Cakupan Kasus Diare Semua Umur Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021	II - 87
Gambar 2.25 Jumlah Kasus Tuberkulosis Tercatat dan Diobati di Kabupaten Tangerang Tahun 2014 - 2021	II - 87
Gambar 2.26 Angka Kesembuhan dan Keberhasilan Pengobatan TB Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021	II - 88
Gambar 2.27 Distribusi Kasus HIV/ AIDS di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021.....	II - 88
Gambar 2.28 Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	II - 89
Gambar 2.29 Cakupan (Dalam %) Pemeriksaan Ibu Hamil (K1) Tahun 2015-2021.....	II - 80
Gambar 2.30 Cakupan Pemeriksaan Ibu Hamil (K4) Tahun 2015-2021	II - 91
Gambar 2.31 Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021.....	II - 91
Gambar 2.32 Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020	II - 92
Gambar 2.33 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021	II - 92
Gambar 2.34 Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021.....	II - 93
Gambar 2.35 Cakupan Kunjungan Neonatus KN1 dan KN Lengkap di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021	II - 94
Gambar 2.36 Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021	II - 94
Gambar 2.37 Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021.....	II - 95
Gambar 2.38 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Tangerang Tahun 2015 - 2021	II - 95
Gambar 2.39 Cakupan Sekolah Yang Mendapatkan Pelayanan Penjangkaran Kesehatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021.....	II - 96
Gambar 2.40 Hasil Penjangkaran Siswa/I kelas 1, 7 dan 10 SD, SMP dan SMA sederajat.....	II - 96
Gambar 2.41 Trend Gizi Buruk dan Gizi Kurang Berdasarkan Metode (BB/U) di Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021	II - 97
Gambar 2.42 Jumlah balita yang Mendapatkan PMT Balita APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020	II - 98
Gambar 2.43 Kondisi Jalan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020	II - 102

Gambar 2.44	Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 ..	II - 105
Gambar 2.45	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kondisi Kelayakan Bangunan di Kabupaten Tangerang Tahun 2019	II - 113
Gambar 2.46	Persentase penduduk 5 tahun keatas yang memiliki HP Tahun 2015-2021 di Kabupaten Tangerang	II - 142
Gambar 2.47	Persentase penduduk 5 tahun keatas yang menggunakan Akses internet Tahun 2015-2021 di Kabupaten Tangerang	II - 143
Gambar 3.1	Proyeksi Pertumbuhan Global	III - 207
Gambar 3.2	Tingkat Penggangguran Terbuka Agustus 2021	III - 212
Gambar 3.4	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Agustus 2020-Agustus 2021	III - 213
Gambar 3.5	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020-Agustus 2021	III - 214
Gambar 3.6	Tingkat Penggangguran Terbuka Agustus 2021	III - 215
Gambar 3.7	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Agustus 2020-Agustus 2021	III - 216
Gambar 3.8	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020-Agustus 2021	III - 216
Gambar 3.9	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2020 - Agustus 2021.....	III - 217
Gambar 3.10	TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal dan TPT Menurut Pendidikan	III - 218
Gambar 3.11	Tingkat Inflasi Provinsi Banten	III - 218
Gambar 3.12	Tingkat Kemiskinan	III - 219
Gambar 3.13	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Banten, Maret 2012 - Maret 2021	III - 219
Gambar 3.14	Proyeksi Ekonomi	III - 221
Gambar 3.15	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2016-2021	III - 225
Gambar 3.16	Perkembangan Inflasi di Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2015-2021	III - 232
Gambar 3.17	Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2021 (000 rupiah)	III - 233
Gambar 3.18	Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2021 (000 rupiah)	III - 234
Gambar 3.19	Rasio Gini Kabupaten Tangerang, Banten, dan Nasional Tahun 2016-2020	III - 236

Gambar 3.20	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021	III - 237
Gambar 3.21	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2013-2021	III - 238
Gambar 3.22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021	III - 240
Gambar 4.1	Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional RKP Tahun 2023.....	IV - 277
Gambar 4.2	Penyelarasan Tema Pembangunan.....	IV - 300
Gambar 4.3	Keselarasn dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Banten.....	IV - 301

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dokumen RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 mengacu pada Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, yang mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 meliputi :

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
 - c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
5. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, menggunakan pendekatan :

- a. teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
- c. politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala

Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD dengan memperhatikan pula pokok pokok pikiran yang berasal dari DPRD;

6. atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan bottom-up (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan, kecamatan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan top-down (atas-bawah) dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan juga arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi Banten.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- b. integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
- c. spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, terkait pengembangan kawasan berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa/kelurahan dan kecamatan.

Sesuai pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan

RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri.

Dengan seluruh pendekatan perencanaan yang ditunjang penerapan sistem informasi perencanaan dan penganggaran terpadu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka RKPD Tahun 2023 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, Program Pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan daerah lainnya.

Dokumen RKPD memiliki substansi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Tangerang untuk pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi isu-isu strategis, masalah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat Spesifik (Spesific), Terukur (Measurable), dapat

dicapai (Achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (Resources Availability), dan tepat waktu (Time). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. RKPD Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sehingga, RKPD diharapkan dapat memberikan arah yang tepat, akurat dan benar-benar menopang kebutuhan pembangunan ditengah terbatasnya kemampuan anggaran Daerah.

Prinsip-prinsip tersebut sekaligus menjadi dasar pembangunan tahun 2023, dalam upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023, yaitu : “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”, yang diimplementasikan dalam 6 (enam) Misi, yaitu :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Seiring terjadinya Corona Virus Disease atau COVID-19 yang telah ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020 yang telah menyebar di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia dan masih berlanjut hingga saat ini, telah memberikan tekanan besar terhadap hampir semua

aspek kehidupan. Perkembangan penyebaran yang ada mendorong dilakukannya kebijakan social distancing dan pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*) yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi. Oleh karenanya, penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi daerah pasca Covid-19.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKPD 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan , Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 28. Surat Edaran Bersama Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 1)

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

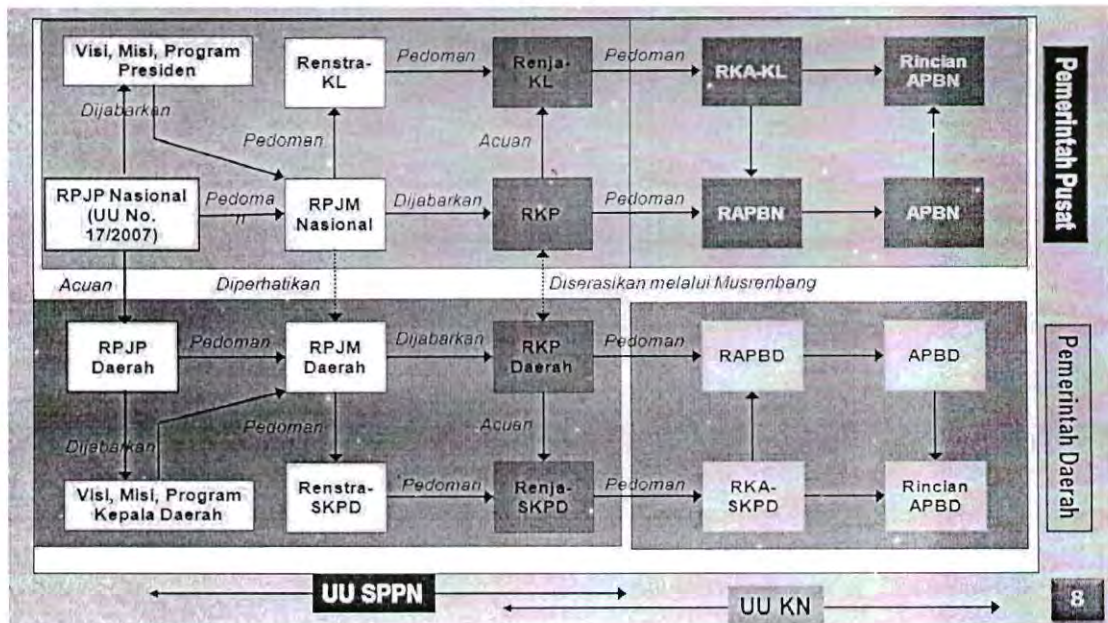
RKPD mempedomani dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025, Revisi RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011- 2031 dan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat mengikat. Lebih lanjut hubungan RKPD dengan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yaitu RKPD memuat program, kegiatan dan sub kegiatan PD, penjabaran Renstra PD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja PD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Hubungan antara RKPD Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 disusun seiring dengan perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 yaitu melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- b. RKPD Tahun 2023 disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yang dilakukan melalui penyelarasan

sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

- c. RKPD Tahun 2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011- 2031.
- d. RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan menurut UU Nomor 25 Tahun 2004



1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. RKPD

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai bahan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran;

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Penyajian RKPD disusun menurut sistematika sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagaimana dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan mengenai Latar Belakang Penyusunan Dokumen RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2023

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan mengenai Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang mengemukakan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Menjelaskan mengenai Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang didalamnya terkait dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta prioritas Pembangunan Daerah pada tahun

anggaran 2023 yang akan datang.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan mengenai Sistem Pengukuran Kinerja yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Dan Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

BAB VII PENUTUP

Memuat hal-hal penting dan perlu dilakukan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Data dan Informasi Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah Kabupaten Tangerang yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah bagian Timur Provinsi Banten. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Tangerang berdekatan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat yang strategis bagi perkembangan wilayah. Dengan posisinya yang berbatasan dengan DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah penyangga Ibukota Jakarta. Sementara itu, ditinjau dari segi transportasi, Kabupaten Tangerang dilalui oleh Jalan Raya Serang – Jakarta dan Jalan Tol Merak – Jakarta, *Double Track* Kereta Api Jakarta – Rangkas Bitung, serta akses alternatif ke Bandara Internasional Soekarno – Hatta. Kebutuhan akses yang sangat cepat bagi industri dan perdagangan membutuhkan kawasan pergudangan dan industri untuk mendistribusikan produk industri dan perdagangan, sehingga kemudahan akses terhadap pelabuhan dan bandara menjadi kebutuhan utama. Selain itu, perkembangan sektor properti semakin meningkat terutama di daerah sekitar Bandara Soekarno-Hatta, seperti daerah Cisauk, dan Pagedangan sehingga membutuhkan lahan yang sangat luas bagi Kawasan pemukiman warga *commuter* Jakarta – Tangerang.

Kondisi geografis dan demografi Kabupaten Tangerang menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Tangerang terutama untuk mengatasi dampak dari beban wilayah yang sangat besar ke depannya. Perluasan *Run Way* Bandara Soekarno – Hatta, pembangunan Tol Serpong – Balaraja, Tol Bandara – Balaraja, penataan Stasiun Kereta Api Cisauk dan Tigaraksa, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, banjir, kawasan kumuh, serta pengangguran.

Secara geografis Kabupaten Tangerang berada di antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Tangerang merupakan pintu gerbang di perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini

menimbulkan interaksi yang menumbuhkan saling ketergantungan yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah melalui proses *trickle down effect* dan *backwash effect*. Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai pendukung.

2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°44' Bujur Timur dan 5°58'-6°21' Lintang Selatan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis dengan batas-batas.

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan DKI Jakarta
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak

Luas Kabupaten Tangerang adalah 959,6 Km². Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Gambar 2.1

Peta Orientasi Kabupaten Tangerang



Kedudukan geografis yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah urban. Secara geografis menjadi pintu gerbang untuk hubungan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Kedekatan dengan Ibukota dan sebagai pintu gerbang antara Banten dan DKI Jakarta maka akan menimbulkan interaksi yang menumbuhkan fenomena interdependensi yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah. Sebagai bentuk efek pertumbuhan wilayah, *trickling down* dan *backwash effect*, sehingga terjadi bentuk hubungan yang sinergis.

Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainnya sebagai pendukung. Dalam era otonomi daerah, pembangunan diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

b. Topografi

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter diatas permukaan laut yang meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek,

Kronjo, Pakuhaji, dan Sepatan. Sedangkan dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 25 meter diatas permukaan laut terletak di bagian tengah ke arah selatan. Kemiringan tanah rata-rata 0-3% menurun ke utara sedangkan daerah pesisir pantainya sepanjang kurang lebih 50 km.

c. Geologi / Jenis Tanah

Jenis tanah Kabupaten Tangerang secara keseluruhan terdiri dari *aluvial* kelabu, *aluvial* kelabu tua, asosiasi *aluvial* kelabu tua dan *glei* humus rendah, asosiasi *glei* humus, dan *planosol*, *regosol* coklat, asosiasi *latosol* merah dan *latosol* merah kecoklatan, *padsolic* kuning, asosiasi *padsolic* kuning, asosiasi *padsolic* kuning dan *hidromorf* kelabu. Dengan jenis tanah demikian memungkinkan untuk pengembangan pertanian dan budidaya. Proses terjadinya tanah aluvial ini berlangsung karena adanya endapan sungai dan danau di daerah pedataran dan daerah cekungan. Di wilayah dataran rendah dijumpai pula jenis tanah *glei regosol* dan sedikit *padsolic* yaitu asosiasinya. Efektif tanah adalah tebalnya lapisan tanah dari permukaan tanah atau suatu lapisan di mana perakaran tanaman dapat menerobosnya. Kedalaman efektif tanah berpengaruh terhadap erosi dan pemilihan jenis tanaman yang cocok di suatu wilayah. Kabupaten Tangerang terbagi atas 3 kelas kedalaman efektif tanah, meliputi :

1. Kedalaman 30-60 cm seluas 33 Ha (0,03 %)
2. Kedalaman 60-90 cm seluas 2.598 Ha (2,34 %)
3. Kedalaman > 90 cm seluas 101.777 Ha (91,66 %)

d. Klimatologi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dengan kelembaban yang tinggi. Temperatur udara berdasarkan penelitian di Stasiun Meteorologi Budiarto Curug rata-rata berkisar antara 22,8 - 33,9 0C, suhu maksimum tertinggi pada bulan April yaitu 34,9 °C dan suhu minimum terendah pada bulan Juli yaitu 20,1 °C. Rata-rata kelembaban udara, minimum dibulan Agustus sebesar 37%, dan maksimum dibulan Mei, September, dan Desember sebesar 100%. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 533.5, dengan jumlah hari hujan sebanyak 22 hari. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Data Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 2021, hasil Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Curug

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks
Januari	22.6	26.2	32.4	56	86.1	98
Februari	22.4	26.6	33.5	55	85.8	99
Maret	21.6	27.1	35.4	52	82.7	98
April	22.4	27.3	34.9	47	82	99
Mei	23.3	27.7	35.5	46	82.2	100
Juni	22.3	26.6	34.6	48	85.3	99
Juli	20.1	26.9	34.4	38	79.5	99
Agustus	21.2	26.8	34.7	37	81	99
September	21.3	27.1	35.4	40	80.8	100
Oktober	20.8	27.1	35	45	82.3	99
November	22.2	26.8	34.4	44	82.7	100
Desember	20.9	26.8	34.3	51	83.9	100

Tabel 2. 2
Kecepatan dan Tekanan Angin di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Bulan	Kecepatan Angin			Tekanan (mbar)		
	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks
Januari	Calm	3.9	15	998.4	1003.9	1007.5
Februari	Calm	4.3	20	998.9	1004.5	1008.3
Maret	Calm	3.5	15	998	1004.1	1008.4
April	Calm	3.2	27	999.3	1005	1008.6
Mei	Calm	2.6	18	999.6	1003.9	1007.7
Juni	Calm	2.4	22	1000.5	1005.4	1009.9
Juli	Calm	2.5	17	1000.4	1005	1008.6
Agustus	Calm	2.8	20	1000.6	1005.5	1009.5
September	Calm	2.9	14	1000.6	1005	1009.4
Oktober	Calm	2.9	35	1000	1004.7	1010.4
November	Calm	5.2	28	998.5	1003.6	1007.7
Desember	Calm	3.7	17	1000.1	1004.9	1008.6

Tabel 2. 3
Curah Hujan, Hari Hujan dan Lama Penyinaran Matahari di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari	Penyinaran
Januari	326.4	20	12.8
Februari	533.5	22	27.5
Maret	104.4	14	26.3
April	203.3	18	9999
Mei	279.1	20	9999
Juni	236.8	18	9999
Juli	98.1	8	9999
Agustus	251.4	10	10.8

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari	Penyinaran
September	259.8	17	9999
Oktober	278.1	16	30.8
November	116.9	15	22.3
Desember	328.5	21	14.2

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang 2021

e. Hidrogeologi

Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Kebutuhan air ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah.

Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi, meskipun di beberapa Kecamatan (Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi) terindikasi intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dengan Puskom dan IT FMIPA UI (2003) diketahui bahwa di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang (meliputi enam kecamatan yaitu : Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Cikupa, Curug dan Legok) terdapat tiga lapisan akifer meliputi :

1. Akifer dangkal dengan kedalaman < 20 m yang didominasi oleh lapisan pasir;
2. Akifer menengah dengan kedalaman 20 – 70 m yang merupakan lapisan lempung formasi Bantam Atas;
3. Akifer dalam dengan kedalaman > 70 m yang merupakan bagian dari formasi Genteng dan formasi Bojongmanik;
4. Recharge akifer dangkal dan menengah berasal dari air hujan dan sungai/danau, sedang recharge akifer dalam melalui batuan formasi Bojongmanik di sebelah selatan yang tersingkap (outcropped) dengan elevasi yang lebih tinggi dibanding lokasi penelitian.

f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budi daya perikanan darat, semak belukar dan hutan.

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan permukiman di Wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, danau/situ, dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan, dan lain-lain.

Karakter perkembangan kawasan terbangun Kabupaten Tangerang tidak lepas dari keberadaan Kabupaten Tangerang yang berada pada perlintasan pergerakan antarwilayah serta jaringan jalan regional yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebagai konsekuensinya kawasan terbangun yang mencakup permukiman perkotaan, permukiman perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri industri dan fasilitas umum cenderung berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama (linier).

Sejalan kondisi tersebut maka perkembangan Kabupaten Tangerang terjadi secara linier dengan titik orientasi perkembangan pada simpul poros jalur Lintas Tengah (poros Serang – Grogol) (terkonsentrasi pada pusat kota), sehingga distribusi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tidak merata. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kota (kesenjangan perkembangan kegiatan di bagian Tengah (pusat kabupaten) dan selatan dengan bagian utara, terjadi konflik pemanfaatan ruang terbangun dan sebagainya.

Pola pengembangan fisik/tata guna lahan saat ini berupa pola ekstensifikasi dan intensifikasi. Pola intensifikasi lebih banyak dijumpai pada

daerah terbangun di pusat-pusat kegiatan/pusat kota, sedangkan pola ekstensifikasi dijumpai pada daerah-daerah pinggiran kota atau daerah transisi.

Melihat progresifitas pembangunan Kabupaten Tangerang serta fungsi yang berkembang saat ini yang menekankan kepada kegiatan industri akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk di Kabupaten Tangerang. Peningkatan kegiatan tanpa diimbangi dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya permasalahan transportasi. Hal ini perlu diantisipasi dalam proses revisi RTRW Kabupaten Tangerang.

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan permukiman di wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, danau/situ, dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan, dan lain-lain.

Penggunaan tanah eksisting di Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2016 menurut hasil Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang saat ini merupakan data dasar yang digunakan untuk pemetaan Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1: 5.000 dan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Perubahan RTRW Kabupaten Tangerang 2011-2031, terdiri dari :

Tabel 2.4
Luas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang

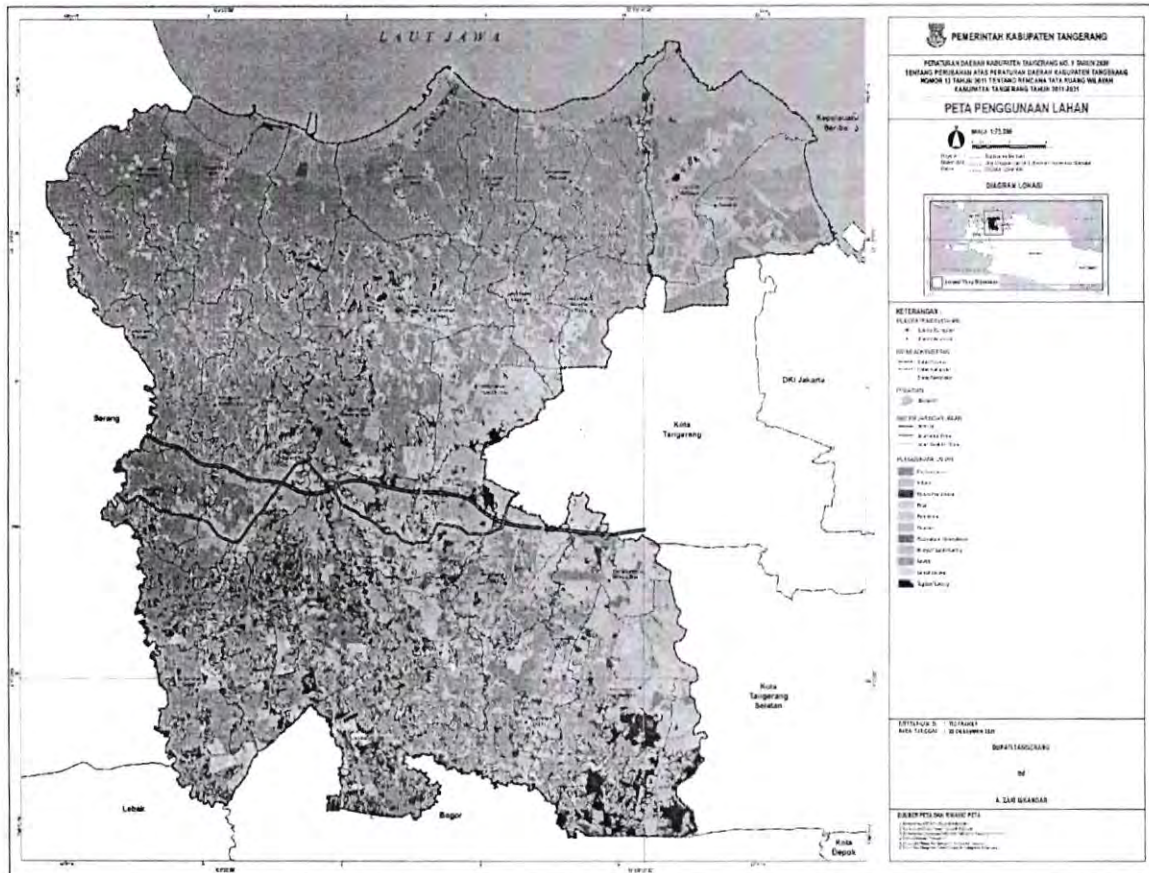
NO.	TUTUPAN LAHAN	GUNA LAHAN	LUAS (HA)
1	Fasilitas Umum	Hotel/Motel/Hostel/Losmen	9,336
		Kantor Pos Besar	0,382
		Pusat Perdagangan Tradisional	3,614
		Stasiun Pompa Bahan Bakar Gas	0,926

NO.	TUTUPAN LAHAN	GUNA LAHAN	LUAS (HA)
		Tempat Hiburan	1,470
		Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya	0,697
		Pelabuhan Udara Non Reguler	559,005
		Pariwisata/Seni/Budaya/Olah Raga Lainnya	18,401
		Pusat Pergudangan/Terminal Peti Kemas/Cargo	271,120
		Pusat Perdagangan dan Niaga Kota (Mal/Toserba)	251,919
		Stasiun Kereta Api	0,464
2	Industri	Industri Bahan Dasar Kimia	1,001
		Industri Maritim	2,743
		Industri Bahan Dasar Bangunan	5,609
		Industri Elektronik	60,456
		Industri Manufaktur Lainnya	3.744,921
		Pengolahan Air Minum	4,931
		Industri	38,733
3	Kebun/ Perkebunan	Kebun/ Perkebunan	12.752,221
4	Kesehatan	Rumah Sakit Umum	13,991
5	Pasir	Pasir/Bukit Pasir Darat	17,939
		Pasir/Bukit Pasir Laut	2,488
6	Pemukiman	Pemukiman dan Tempat Kegiatan	19.071,920
		Rumah Komplek/Properti Real Estate	2.245,332
7	Pendidikan	Pendidikan Agama Islam	42,630
		Pendidikan Dasar	10,731
		Pendidikan Menengah Pertama	13,869
		Pendidikan Menengah Umum	52,198
		Pendidikan Tinggi	51,612
8	Perairan	Air Danau/Situ	708,909
		Air Empang	217,529
		Air Laut	452,451
		Air Rawa	101,991
		Air Tawar Sungai	5.835,362
9	Perkantoran/ Pemerintahan	Lembaga Pemasarakatan	2,039
		Kantor Camat	1,229
		Kantor Lembaga Negara	174,868
		Pusat Bisnis Lainnya	574,267
		Pusat Perkantoran Bisnis/Komersial Terpadu	49,252
10	Peternakan/ Penangkaran	Peternakan/ Penangkaran	285,480
11	Pusat Listrik	Instalasi TNI (AD/AL/AU)	14,928
		Gardu Induk Listrik Tegangan Tinggi	13,835
		Pembangkit Listrik Tenaga Uap	41,298
12	Rumput/ Tanah Kosong	Tanah Kosong/ Gundul	5.437,083
13	Sawah	Sawah	46.386,978
14	Semak Belukar	Semak Belukar	45,983
		Semak Belukar/Alang-alang	269,826

NO.	TUTUPAN LAHAN	GUNA LAHAN	LUAS (HA)
15	Tegalan/ Ladang	Tegalan/ Ladang	3.589,746
		TOTAL	103.453,711

Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, Tahun 2019-2023

Gambar 2.2
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang



Sumber : Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, Tahun 2019-2023

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang sesuai Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031, arahan potensi di Kabupaten Tangerang meliputi kawasan peruntuan lindung, dan kawasan budidaya.

Guna melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan tetap melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, maka dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 diatur pola ruang dalam Kabupaten Tangerang sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang
Dalam Revisi RTRW Kabupaten Tangerang 2011 – 2031

Uraian	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Kabupaten
A. Kawasan Peruntukan Lindung		
Kawasan peruntukan lindung:		
1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya:		
1. Kawasan Hutan Lindung	1.555,32	
2. Kawasan Resapan Air	1.555	
Kawasan Perlindungan Setempat :		
1. Sempadan Pantai	325	
2. Sempadan Sungai	559	
3. Kawasan sekitar situ/sungai	310	
Kawasan cagar budaya :		
situs Makam Pangeran Suriadiwangsa II berada di Kecamatan Cisoka;b. situs Makam Gajah Barong, situs Makam Nyi Mas Gamparan, situs Makam Syech Mubarak, situs Makam Buyut Sanadi, situs Makam uyut Mah, situs Makam Nyi Saritinem, situs Makam Ki Mas Laeng, situs Makam Raden Mas Kuncung, situs Makam Nyi Mas Bajra, situs Langlang Buana, dan situs Makam Wali Ahmad berada di Kecamatan Tigaraksa; situs Makam Buyut Siyam berada di Kecamatan Kresek; sisa Fosil-Fosil Elephant Maximus, situs Makam Pangeran Mas Kalimangun Jaya Kusumah (Ki Mawuk), situs Bangunan Pekong Soekong, dan situs makam Dewi Neng berada di Kecamatan Mauk; situs Sumur Tujuh, situs Makam Ki Buyut Petal dan situs Makam Nyi Mas Aulia berada di Kecamatan Cikupa; situs Sumur Tua dan situs Rawa Kidang berada di Kecamatan Sukadiri; situs Makam Panjang Syech Daud dan situs Makam Wali Riman berada di Kecamatan Pakuhaji; situs Penggilingan Tebu berada di Kecamatan Teluknaga; situs Makam Jaga Laut berada di Kecamatan Kronjo; situs Makam Solear berada di Kecamatan Solear; situs Makam Panjang Dadap berada di Kecamatan Kosambi; situs Makam Buyut Mijah, situs Makam Buyut Akhir (Kyai Jebeng), situs Makam Kepuh, dan situs Makam Buyut Resem berada di Kecamatan Sepatan; situs Makam Mede berada di Kecamatan Curug; situs Makam Tubagus Taram, situs Makam Ki Buyut Golokgok berada di Kecamatan Cisauk; situs Makam Nyi Mas Melati dan situs Makom Pangeran Jayakarta berada di Kecamatan Sukamulya; situs Makam Syekh Waliyudin berada di Kecamatan Kelapa Dua;		

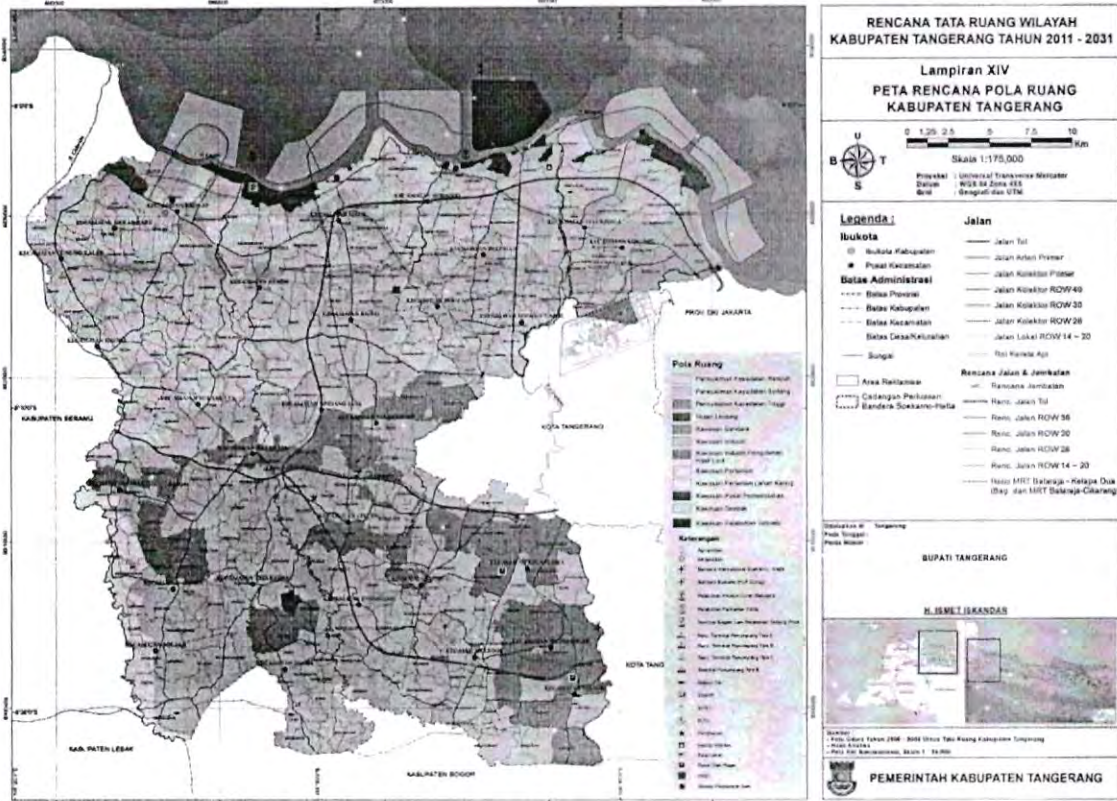
Uraian	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Kabupaten
situs Makam Raden Aria Wangsakara, situs Makam Ki Yunus, situs Makam Ki Muttaqin, dan situs Makam Raden Aria Dwipa Wira Kencana berada di Kecamatan Pagedangan; situs wisata religi berada di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jayanti; wisata belanja dan kuliner berada di Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Balaraja; wisata akomodasi berada di Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Mauk; l. wisata danau Pusat Pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa; Makam Ki Buyut Mansyur berada di Kecamatan Panongan; dan situs Makam Syekh Anbiya dan situs Makam Syekh Yusuf (Mbah Karinding) berada di Kecamatan Balaraja.	-	-
Sub jumlah		
B. Kawasan Peruntukan Budidaya		
kawasan pertanian :		
kawasan tanaman pangan	14.094	
1. KP2B	13.931	
- LP2B	12.628	
- LCP2B	1.303	
Kawasan peternakan	49	
Kawasan peruntukan perikanan :		
- Kawasan perikanan tangkap	-	-
- Kawasan perikanan budi daya	151	
Kawasan pertambangan dan energi	95	
Kawasan hutan lindung/kawasan pertambangan dan energi	25	
Kawasan peruntukan industri :	14.878	
- Kawasan peruntukan industri		
- Sentra Industri kecil dan menengah		
- industri sedang	-	
- industri kecil dan/atau industri rumah tangga	-	-
Kawasan pariwisata :		
- pariwisata alam		
Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Tanjung Pasir berada di Kecamatan Teluknaga; Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Muara berada di Kecamatan Teluknaga; Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Tanjung Kait berada di Kecamatan Mauk; Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Dadap berada di Kecamatan Kosambi;		

Uraian	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Kabupaten
<p>Kawasan Pariwisata Bahari Pulau Cangkir berada di Kecamatan Kronjo; Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Karang Serang berada di Kecamatan Sukadiri; Kawasan Pariwisata Alam Solear berada di Kecamatan Solear; Kawasan Pariwisata Situ Kelapa Dua berada di Kecamatan Kelapa Dua; Kawasan Pariwisata Situ Cihuni berada di Kecamatan Pagedangan; Kawasan Pariwisata Situ Pondok berada di Kecamatan Pasar Kemis; Kawasan Pariwisata Situ Garukgak berada di Kecamatan Kresek; Kawasan Pariwisata Situ Patrasana berada di Kecamatan Kresek; Kawasan Pariwisata Situ Cilongok berada di Kecamatan Pasar Kemis; Kawasan Pariwisata Tangerang Mangrove Center berada di seluruh wilayah pantai utara; dan Kawasan Pariwisata bahari lainnya disepanjang pantai utara.</p> <p>- pariwisata budaya Rumah Asli Peninggalan Raden Aria Wangsakara, situs Makam Raden Aria Wangsakara, situs Makam Buyut Onang, situs Makam Ki Muttaqin, situs Makam Ki Yunus, dan situs Makam Ki Musa berada di Kecamatan Pagedangan; Rumah Kebaya Tempo Dulu, situs Makam Nyi Mas Melati, dan situs Makam Pangeran Jayakarta berada di Kecamatan Sukamulya; situs Makam Gajah Barong, sisa fosil-fosil Elephant Maximus, situs Bangunan Pekong Soekong, dan situs Makam Dewi Neng berada di Kecamatan Mauk; situs Sumur Tujuh dan situs Makam Nyi Mas Aulia berada di Kecamatan Cikupa; situs Sumur Tua dan situs Rawa Kidang berada di Kecamatan Sukadiri; situs Makam Panjang Syech Daud dan situs Makam Wali Riman berada di Kecamatan Pakuhaji; situs Penggilingan Tebu berada di Kecamatan Teluknaga; situs Makam Jaga Laut berada di Kecamatan Kronjo; situs Makam Solear berada di Kecamatan Solear; situs Makam Panjang dadap berada di Kecamatan Kosambi; situs Makam Buyut Mijah, situs Makam Buyut Akhir (Kyai Jebeng), situs Makam Kepuh, dan Situs Makam Buyut Resem berada di Kecamatan Sepatan; situs Makam Mede, situs Makam Tubagus Taram, situs Makam Ki Buyut Golokgog, dan situs Makam Ki Buyut Demang berada di Kecamatan Cisauk; Vihara Tjoe Soe Kong Bio berada di Kecamatan Mauk; dan situs Makam Kepuh Keramat Buyut Jago berada di Kecamatan Sepatan.</p>	-	-

Uraian	Luas (Ha)	% Terhadap Luas Kabupaten
<p>- pariwisata buatan wisata edukasi terletak berada di Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Cisoka; wisata Penangkaran Buaya berada di Kecamatan Teluknaga; wisata Bumi Perkemahan Kitri Bhakti berada di Kecamatan Curug; wisata olahraga berada di seluruh Daerah; wisata Telaga Biru Cigaru berada di Kecamatan Cisoka; wisata Rekreasi World Of Wonders berada di citra raya Kecamatan Cikupa; wisata Teluknaga Mas berada di Kecamatan Teluknaga; wisata Mancing Muara Ujung berada di Kecamatan Teluknaga; wisata religi berada di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jayanti; wisata belanja dan kuliner berada di Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Balaraja; wisata akomodasi berada di Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Mauk; l. wisata danau Pusat Pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa ; m. wisata Telaga Tebing Koja berada di Kecamatan Cisoka; wisata Taman Edukasi Lalu Lintas Sentiong berada di Kecamatan Balaraja; pusat kaligrafi berada di Kecamatan Pagedangan; desa wisata yang tersebar di seluruh Daerah; dan kampung kreatif yang tersebar di seluruh Daerah.</p>	-	-
Kawasan Permukiman :		
- permukiman perkotaan	66.543	
- permukiman perdesaan	2.900	
<p>- Kawasan pertahanan dan keamanan negara Makorem-052/Wijayakrama berada di Kecamatan Kelapa Dua; Makodim-0510/Tigaraksa berada di Kecamatan Tigaraksa; Komplek Datasemen Arhanud Rudal 003 (Denrudal-003/Akosa Dakca Ksatria) Cikupa Tangerang Banten Falatehan berada di Kecamatan Cikupa; Pos Angkatan Laut Tipe C berada di Kecamatan Kronjo; Radar Tni AU berada di Kecamatan Mauk; Komando Garnisun Tetap I/Jakarta, Garnisun 0506 Tangerang berada di Kecamatan Panongan;</p>		
<p>Polres Metropolitan Tigaraksa berada di Kecamatan Tigaraksa; Polsek tersebar di seluruh Daerah; dan Koramil tersebar di seluruh Daerah.</p>		
Kawasan transportasi :		
kawasan bandar udara Soekarno-Hatta	482	
kawasan bandar udara Budiarto	465	
Sub jumlah		
Jumlah		
Luas Menurut UU No.4 Tahun 2002 (Km2)		

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Tangerang 2012 - 2032, 2021

Gambar 2.3
Peta Pola Ruang Kabupaten Tangerang



Tabel 2.6
Kawasan Peruntukan Lindung di Wilayah Kabupaten Tangerang

NO.	PERUNTUKAN RUANG	LOKASI	LUAS (M2)	
			PERDA 13/2011	PERDA 9/2020
1	Hutan Lindung	Kecamatan Kronjo	1.330.322	1.265.769
		Kecamatan Kemiri	3.158.327	3.136.172
		Kecamatan Mauk	2.336.238	2.376.039
		Kecamatan Pakuhaji	3.260.153	3.255.561
		Kecamatan Teluknaga	5.254.778	5.338.481
		Kecamatan Kosambi	419.787	429.943
		TOTAL		15.759.605
2	Resapan Air Kawasan Sekitar Danau atau Waduk (Sempadan Situ)	Kecamatan Cikupa	-	178.628
		Kecamatan Gunung Kaler	-	186.415
		Kecamatan Kelapa Dua	-	171.393
		Kecamatan Kemiri	-	46.823
		Kecamatan Kresek	-	1.088.237
		Kecamatan Kronjo	-	85.042
		Kecamatan Mekarbaru	-	101.019
		Kecamatan Pagedangan	-	126.107
		Kecamatan Pakuhaji	-	99.669
		Kecamatan Pasar Kemis	-	208.530
		Kecamatan Rajeg	-	270.932
		Kecamatan Sepatan	-	71.854
		Kecamatan Sindang Jaya	-	272.986
		Kecamatan Solear	-	52.146

NO.	PERUNTUKAN RUANG	LOKASI	LUAS (M2)	
			PERDA 13/2011	PERDA 9/2020
		Kecamatan Sukadiri	-	42.286
		Kecamatan Sukamulya	-	102.849
		TOTAL	-	3.104.915
	Sempadan Sungai	Kecamatan Balaraja	-	153.286
		Kecamatan Cikupa	-	223.553
		Kecamatan Cisauk	-	411.951
		Kecamatan Cisoka	-	283.466
		Kecamatan Gunung Kaler	-	215.528
		Kecamatan Jambe	-	178.589
		Kecamatan Jayanti	-	319.442
		Kecamatan Kelapa Dua	-	102.351
		Kecamatan Kemiri	-	267.693
		Kecamatan Kresek	-	282.515
		Kecamatan Kronjo	-	118.253
		Kecamatan Legok	-	194.580
		Kecamatan Pagedangan	-	262.418
		Kecamatan Pakuhaji	-	336.822
		Kecamatan Panongan	-	331.100
			Kecamatan Rajeg	-
		Kecamatan Sepatan Timur	-	230.517
		Kecamatan Sindang Jaya	-	198.501
		Kecamatan Solear	-	515.366
		Kecamatan Sukamulya	-	54.533
		Kecamatan Teluknaga	-	426.620
		Kecamatan Tigaraksa	-	445.311
		TOTAL	-	5.588.016
3	Sempadan Pantai	Kecamatan Kronjo	-	307.054
		Kecamatan Kemiri	-	71.589
		Kecamatan Sukadiri	-	601.392
		Kecamatan Mauk	-	868.568
		Kecamatan Pakuhaji	-	601.392
		Kecamatan Teluknaga	-	644.014
		Kecamatan Kosambi	-	547.078
		TOTAL	-	3.641.087

Sumber : Perda 9/2020

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Jika dilihat dari kondisi fisik wilayah Kabupaten Tangerang, masih terdapat beberapa jenis bencana yang berpotensi memberikan ancaman diseluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Potensi bencana dilihat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan belum terjadi. Untuk bencana yang pernah terjadi berpedoman pada DIBI, sedangkan bencana yang belum terjadi berpedoman pada metodologi pengkajian risiko bencana yaitu berdasarkan

Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Berdasarkan pedoman tersebut, maka dapat ditentukan potensi bencana yang mengancam di Kabupaten Tangerang. Dari DIBI tercatat 4 (empat) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Tangerang. Bencana yang pernah terjadi tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi. Adapun potensi bencana di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan berdasarkan DIBI, metodologi pengkajian risiko bencana, dan telah disepakati daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

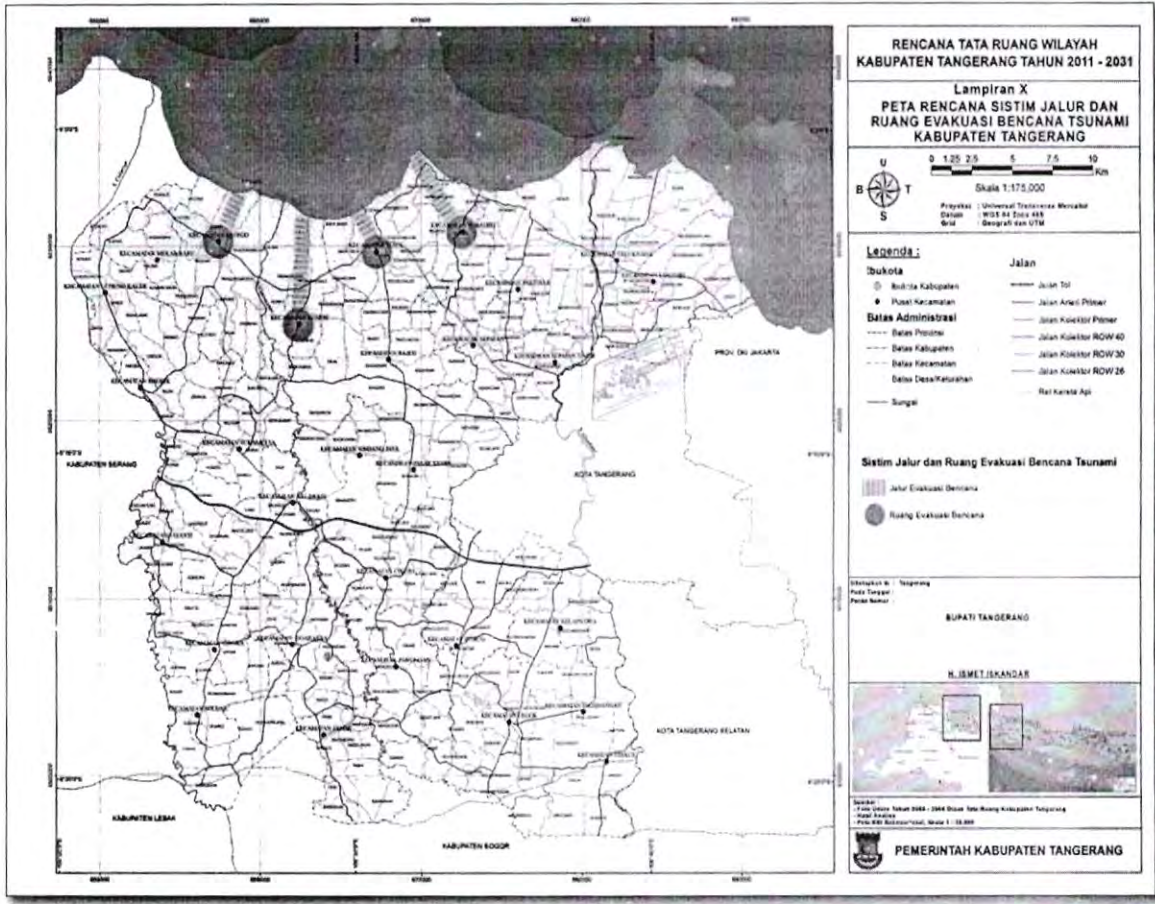
Tabel 2.7
Potensi Bencana di Kabupaten Tangerang

POTENSI BENCANA DALAM KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN TANGERANG	
1. CUACA EKSTRIM	5. BANJIR BANDANG
2. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	6. GEMPABUMI
3. KEKERINGAN	7. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
4. BANJIR	8. TSUNAMI

Sumber: DIBI dan Hasil Analisa Tahun 2016

Menurut dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tangerang Tahun 2017 – 2021, pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji dan memetakan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian dan indeks kapasitas. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi luas paparan bahaya, jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Gambar 2.4
Peta Jalur Evakuasi Bencana Tsunami



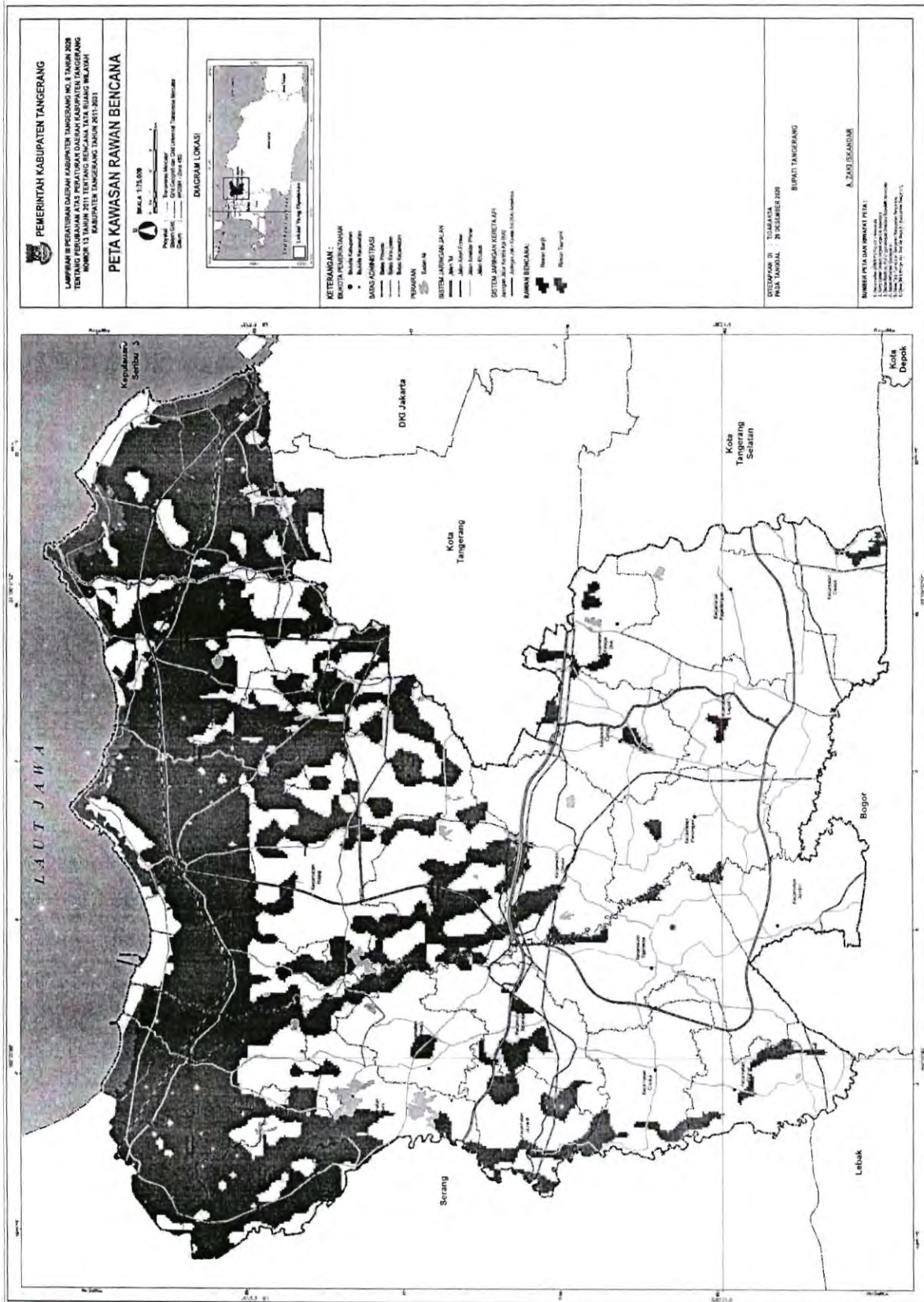
Pengkajian risiko bencana di Kabupaten Tangerang meliputi 8 (delapan) jenis bencana yang teridentifikasi memiliki potensi terjadi. Bencana tersebut meliputi bencana cuaca ekstrim, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan tsunami.

Tabel 2.8
Kajian Pra Bencana Kabupaten Tangerang

Jenis Bencana	Potensi							
	Bahaya		Kerentanan		Kapasitas		Risiko	
	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Luas
Banjir	Sedang-Tinggi	63.526 Ha	Sedang	99.780 Ha	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	89.379
Gempa Bumi	Sedang-Tinggi	42.025	Sedang	11.923	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	94.349
			Tinggi	88.429				
Kekeringan	Sedang-Tinggi	0	Tinggi	708	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	0
Tsunami	Sedang-Tinggi	4.461	Sedang	5722	Sedang	8 Kecamatan	Sedang-Tinggi	3.389
Multi bahaya	Sedang-Tinggi	104.061	Sedang	99.780	Sedang	29 Kecamatan	Sedang-Tinggi	104.042
	Sedang-Tinggi		Tinggi	100.072				

Sumber : inarisk.go.id

Gambar 2.5
Peta Kawasan Rawan Bencana



2.1.1.4 Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Menurut BPS Provinsi Banten salah satu sumber data

kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020.

Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan "SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA".

SP2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun yang tadinya ditentukan 6 bulan. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen antar provinsi). Proyeksi penduduk interim 2020-2023 dihitung menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data Administrasi Kependudukan dan SP2020 dengan menggunakan asumsi Angka Kelahiran Total sejak tahun 2020 konstan 2,1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015-2045), Angka Kematian Bayi (AKB) meneruskan hasil Proyeksi SUPAS 2015-2045, dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi hasil SUPAS 2015. Dalam publikasi ini, data yang disajikan merupakan hasil SP2020 (September), dan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni).

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berjumlah 3,293,533 jiwa yang terdiri dari 1.714.318 jiwa penduduk laki-laki dan 1.641.886 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten meningkat sebanyak, dengan kenaikan dari tahun 2020-2021 sebanyak 47.914 jiwa penduduk, atau dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,47%, dengan kepadatan penduduk per Km² sebesar 3.432,16.

Sedangkan Data DKB (Data Konsolidasi Bersih) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester II tahun 2021, jumlah penduduk yang ber-NIK Kabupaten Tangerang berjumlah Rp. 3.185.552 jiwa, dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 2.295.725 jiwa, sedangkan yang sudah punya KTP berjumlah 2.226.573 jiwa, yang belum terekam 69.152 jiwa.

Perbedaan jumlah penduduk karena konsep penghitungan, baik yang dilaksanakan Didukcapil maupun BPS Kabupaten Tangerang, kalau BPS berdasarkan proyeksi, Disdukcapil berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) hasilnya memberikan gambaran banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan, baik untuk keperluan bekerja, sekolah, maupun alasan lainnya, hal ini didukung lokasi Kabupaten Tangerang yang merupakan daerah strategis yang berbatasan langsung dengan ibukota DKI Jakarta.

Tabel 2.9
Tabel Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan
1	Cisoka	98,285	111	3,642.88
2	Solear	97,880	107	3,374.01
3	Tigaraksa	159,539	104	3,273.27
4	Jambe	52,319	106	2,010.72
5	Cikupa	208,208	105	4,878.35
6	Panongan	134,311	105	3,845.15
7	Curug	175,690	103	6,409.70
8	Kelapa Dua	169,264	100	6,942.74
9	Legok	120,502	105	3,430.17
10	Pagedangan	109,164	104	2,389.23
11	Cisauk	93,924	105	3,382.21
12	Pasar Kemis	277,214	104	10,694.98
13	Sindang Jaya	92,628	103	2,493.35
14	Balaraja	120,152	105	3,580.21
15	Jayanti	65,717	104	2,750.82
16	Sukamulya	70,325	104	2,610.43
17	Kresek	68,760	104	2,647.67
18	Gunung Kaler	51,421	103	1,735.44
19	Kronjo	62,366	100	1,410.04
20	Mekar Baru	41,932	103	1,760.37
21	Mauk	86,348	105	1,679.27
22	Kemiri	48,829	104	1,493.24
23	Sukadiri	64,567	105	2,674.69
24	Rajeg	197,619	106	3,680.06
25	Sepatan	119,308	107	6,888.45

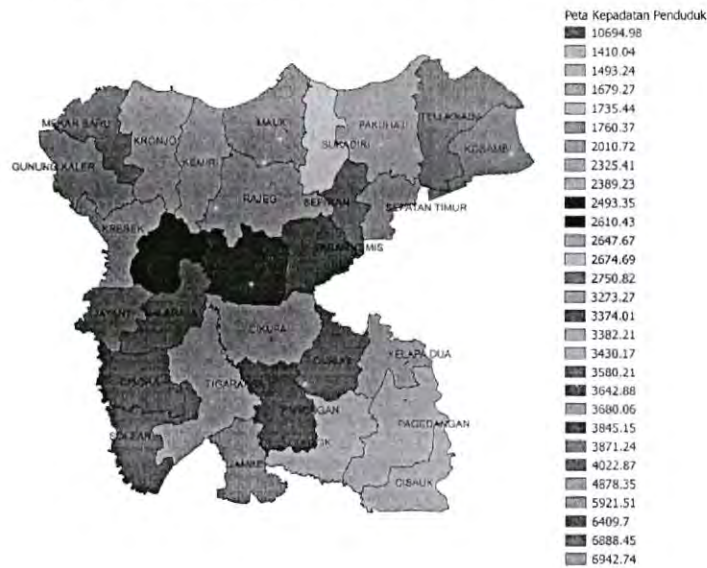
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan
26	Sepatan Timur	108,186	107	5,921.51
27	Pakuhaji	120,619	107	2,325.41
28	Teluknaga	163,248	106	4,022.87
29	Kosambi	115,208	106	3,871.24
Jumlah/Total		3.245.619	105	3,432.16

Sumber : BPS 2021 (SP2020)

Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang adalah 105 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 105 laki-laki. *Sex Ratio* terbesar terdapat di Kecamatan Cisoka yakni sebesar 111 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Kronjo yakni sebesar 100.

Apabila ditinjau dari kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tangerang, berikut adalah peta kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.6.
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang, 2021

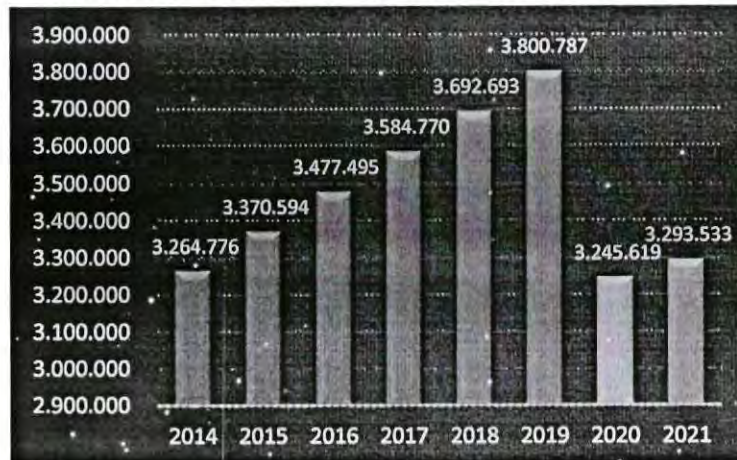


Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2021. diolah

Dari gambar di atas terlihat bahwa kecamatan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi atau berwarna merah ada di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Curug, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Sepatan, dan Kecamatan Sepatan Timur. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk rendah adalah Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk, dan Kecamatan Kemeru.

Berdasarkan gambar 2.12. jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang baik berdasarkan hasil registrasi dan Sensus Penduduk Tahun 2020 menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021. Perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2013-2021 dapat dilihat pada gambar 2.13.

Gambar 2.7.
Jumlah Penduduk dari tahun 2014-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2021
*Proyeksi BPS
** Hasil SP2020 (September)

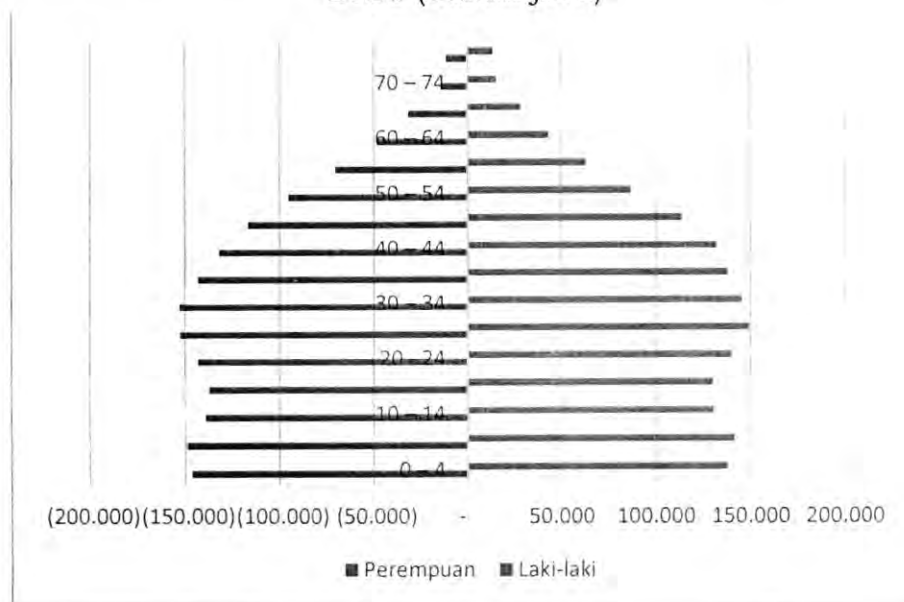
Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak pada kisaran umur 25-29 tahun yaitu sebesar 301.789 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 152,564 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 149,225 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berdasarkan kelompok umur terdapat pada kisaran umur 75 tahun keatas yaitu sebanyak 25,457 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 11,526 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 13,931 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 dapat dilihat table dan pada gambar 2.14.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	146,275	137,746	284,021
2	5 - 9	148,967	141,770	290,737
3	10 - 14	139,179	130,536	269,715
4	15 - 19	137,425	130,133	267,558
5	20 -24	143,119	139,957	283,076
6	25 - 29	152,564	149,225	301,789
7	30 - 34	152,880	145,420	298,300
8	35 - 39	143,164	137,746	280,910
9	40 - 44	132,067	131,918	263,985
10	45 - 49	116,764	113,915	230,679
11	50 - 54	95,548	87,004	182,552
12	55 - 59	70,498	62,872	133,370
13	60 - 64	48,268	43,392	91,660
14	65 - 69	31,698	28,409	60,107
15	70 - 74	14,386	15,231	29,617
16	75+	11,526	13,931	25,457
	Jumlah	1,684,328	1,609,205	3,293,533

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang

Gambar 2.8
Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (dalam jiwa)



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

Distribusi penduduk menurut usia juga mampu menggambarkan angka beban ketergantungan di suatu wilayah. Melalui struktur umur penduduk dapat dilihat apakah penduduk pada wilayah tersebut penduduk usia produktifnya lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif atau sebaliknya. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Angka ini menunjukkan seberapa besar penduduk usia produktif menanggung beban ekonomi penduduk usia tidak produktif dimana usia produktif ini diharapkan masih mampu bekerja untuk mendukung perekonomian wilayah. Kabupaten Tangerang memiliki sekitar 69 persen penduduk usia produktif dibandingkan dengan total penduduk di tahun 2021. Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk usia produktif perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki di Kabupaten Tangerang tahun 2021.

Distribusi penduduk menurut usia juga mampu menggambarkan angka beban ketergantungan di suatu wilayah. Melalui struktur umur penduduk dapat dilihat apakah penduduk pada wilayah tersebut penduduk usia produktifnya lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif atau sebaliknya. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk

65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Angka ini menunjukkan seberapa besar penduduk usia produktif menanggung beban ekonomi penduduk usia tidak produktif dimana usia produktif ini diharapkan masih mampu bekerja untuk mendukung perekonomian wilayah. Kabupaten Tangerang memiliki sekitar 69 persen penduduk usia produktif dibandingkan dengan total penduduk di tahun 2021. Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk usia produktif perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki di Kabupaten Tangerang tahun 2021.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2021 kembali pulih yang sebelumnya mengalami kontraksi dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berada -3,75 persen di tahun 2020, tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang kembali pulih dengan pertumbuhan sekitar 4,63 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan Banten dan angka laju pertumbuhan ekonomi Nasional.

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2021 mengalami kenaikan setelah pandemic Covid-19 yang tadinya mengalami kontraksi di tahun 2020 sekitar 3,75%, tumbuh positif di tahun 2021 menjadi 4,63%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,96%, dan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,70%. Dari 17 sektor lapangan usaha yang ada sebanyak 5 sektor lapangan mengalami penurunan yaitu sector lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sector Pertambangan dan Penggalian, sector Jasa Perusahaan, sector Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, dan sector Jasa Pendidikan. Sebanyak 12 sektor lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan yang positif di tahun 2021 yaitu sector lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, sector Pengadaan Air.

Apabila dilihat berdasarkan kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, pada tahun 2021, kontribusi terbesar pada tahun 2021 dicapai oleh lapangan usaha industry pengolahan sebesar 34,087.80 miliar rupiah, sector lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,984.82 miliar rupiah, sector lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,449.47 miliar rupiah, sector lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,051.09 miliar rupiah, dan sector lapangan Real Estat sebesar 8,838.91 miliar rupiah. Menurut PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2021 kontribusi sector lapangan usaha yang paling besar dari sector lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 34,087.80 miliar rupiah, sector lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,984.82 miliar rupiah, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,449.47 miliar rupiah, dan sector lapangan usaha Real Estat sebesar 8,838.91 miliar rupiah. Untuk lebih jelasnya lihat table laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang ADHK Tahun 2018-2021.

Tabel 2.11

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2015-2021

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,98	2,25	2,82	(0,84)
B	Pertambangan dan Penggalian	5,72	2,30	(5,90)	(9,45)
C	Industri Pengolahan	2,66	3,20	(8,74)	4,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,82	(4,23)	(12,35)	11,70
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,19	6,71	8,60	5,62
F	Konstruksi	8,18	9,44	(3,29)	11,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,69	6,22	(3,70)	1,83
H	Transportasi dan Pergudangan	9,60	9,55	(5,32)	9,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,62	7,86	(5,63)	4,25
J	Informasi dan Komunikasi	8,35	9,69	9,12	5,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,16	0,72	1,58	6,07
L	Real Estat	9,44	9,49	1,96	3,07
M,N	Jasa Perusahaan	6,02	9,20	(6,00)	(2,25)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,48	8,75	(0,38)	(0,81)
P	Jasa Pendidikan	8,25	8,30	0,69	(1,04)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,68	11,13	4,41	9,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,69	9,36	(6,11)	1,39

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021
Produk Domestik Regional Bruto	5,80	5,56	(3,75)	4,63

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2021

Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, sector Konstruksi, sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sector Transportasi dan Pergudangan, sector Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sector Informasi dan Komunikasi, sector Jasa Keuangan dan Asuransi, sector Real Estat, sector Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sector lapangan usaha Jasa Lainnya.

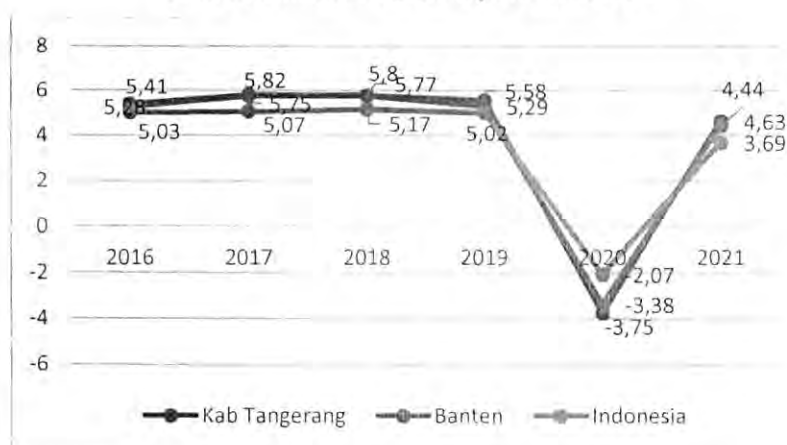
Di tahun 2021, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) sebesar 145,210.12 miliar rupiah atau meningkat sebesar 6,98 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 135,737.06 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun yang sama, PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 97,809.90 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 4,63 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 93,482.49 miliar rupiah. Kondisi tersebut mulai menunjukkan peningkatan setelah tahun 2020 yang menyebabkan PDRB Kabupaten Tangerang baik ADHB maupun ADK terganggu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurut PDRB harga konstan relatif sedikit berfluktuasi sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 sebesar 5,41%, tahun 2017 meningkat menjadi 5,82% yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,80% dan kembali menurun di tahun 2019 mencapai 5,58%. Memasuki tahun 2020 gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun drastis ke angka -3,75%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dalam empat tahun terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,00% dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasional dari tahun 2016-2019. Sayangnya, pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurun hingga angka yang lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten maupun Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi nasional, Banten dan Kabupaten Tangerang mulai pulih dengan ditunjukkan dengan mulai tumbuh positif, pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat di angka 4,63%, begitu juga dengan Provinsi Banten yang mulai tumbuh sekitar 4,44%.

Di tahun 2021, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) sebesar 145.210,12 miliar atau naik sekitar 9.473,06 miliar dari tahun 2020 yang sebesar 135.737,06 miliar. Sedangkan pada tahun yang sama,

PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 97.809,90 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 4,63 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 93.481,49 miliar rupiah ditahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurut PDRB harga konstan relatif sedikit berfluktuasi sejak tahun 2016 dan tahun 2020. Pada tahun 2016 sebesar 5,41%, tahun 2017 meningkat menjadi 5,82% yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,80% dan kembali menurun di tahun 2019 mencapai 5,58%. Memasuki tahun 2020 gejala ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun drastis ke angka -3,75%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dalam empat tahun terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,00% dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasional dari tahun 2016-2019. Sayangnya, pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurun hingga angka yang lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten maupun Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang baik secara Nasional mulai bangkit kembali dari kontraksi, sehingga tahun 2021 mulai pulih kembali ke kondisi new normal dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,64 persen.

Gambar 2.9

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang, 2021

Disamping menggunakan pendekatan lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Tangerang, perekonomian suatu wilayah menggunakan juga pendekatan PDRB dengan pengeluaran, yang menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan (output) dalam wilayah domestik yang digunakan

sebagai konsumsi akhir oleh masyarakat , yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah tangga (PK-LNPRT) , Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen ekspor barang dan jasa.

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Sektor lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LPNRT) berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislative, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lainya yang berada dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau Negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Aktivitas investasi merupakan salah satu factor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Aktivitas ekspor impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan.

Nilai PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku selama periode 2017-2021 menunjukkan peningkatan signifikan dari Peningkatan nilai PDRB yang terus meningkat akhirnya tertahan di tahun 2020, karena nilainya turun dibanding tahun sebelumnya. Selain dinilai atas harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010.

Tabel 2.12

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang, 2017-2021 (miliar Rp.)

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	49,408.52	52,000.18	54,496.20	53,122.77	54,753.28
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	438.90	468.26	521.97	480.02	473.93
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,129.68	3,237.70	3,426.47	3,097.36	3,143.37
Pembentukan Modal Tetap Bruto	19,527.91	20,783.59	22,278.58	22,056.56	23,147.61
Perubahan Inventori	8.48	8.64	6.40	1.10	0.08
Ekspor Barang dan Jasa	73,901.40	77,259.58	80,968.19	78,205.47	84,601.17
Dikurangi: Impor Barang dan Jasa	59,450.87	61,746.54	64,568.64	63,480.80	68,309.54
Produk Domestik Regional Bruto	86,964.03	92,011.41	97,129.17	93,482.49	97,809.90

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2021

PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2017-2021, gambaran tentang perekonomian Kabupaten Tangerang berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel diatas. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari 86.964,03 miliar rupiah ditahun 2017, meningkat lagi menjadi 92.011,41 miliar rupiah di tahun 2018, meningkat kembali menjadi 97.129,17 miliar rupiah ditahun 2019, mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 93.482,49 miliar rupiah dan kembali meningkat ditahun 2021 menjadi 97,809.90 miliar rupiah.

Apabila dilihat berdasarkan kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usahanya, pada tahun 2021, lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan sumbangan tertinggi sebesar 34.85 persen, kemudian disusul lapangan usaha Konstruksi sebesar 14.30 persen, lapangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11.71 persen. Selanjutnya lapangan usaha Real Estate menyumbang

9.04 persen dan lapangan usaha informasi dan komunikasi memberikan sumbangan sebesar 6.19 persen. Sedangkan pada tahun 2020, lapangan usaha Industri Pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi yaitu sebesar 35.04 persen, meskipun persentasenya menurun dibandingkan tahun 2019, kemudian disusul lapangan usaha Konstruksi sebesar 13.36 persen, lapangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12.03 persen. Selanjutnya lapangan usaha real estate menyumbang 9.17 persen dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangan sebesar 6.18 persen.

Tabel 2.13

PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	5,339.40	5,498.45	5,622.08	5,780.75	5,731.96
B	Pertambangan dan Penggalia	35.87	37.92	38.79	36.50	33.05
C	Industri Pengolahan	33,877.15	34,778.08	35,890.71	32,752.30	34,087.80
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	1,408.41	1,490.37	1,427.30	1,251.07	1,397.42
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	70.53	74.19	79.17	85.98	90.81
F	Konstruksi	10,909.63	11,802.04	12,916.15	12,491.21	13,984.82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,113.12	10,991.87	11,675.61	11,244.17	11,449.47
H	Transportasi dan Pergudangan	2,461.27	2,697.43	2,955.03	2,797.73	3,074.81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,302.58	1,414.83	1,525.99	1,440.15	1,501.32
J	Informasi dan Komunikasi	4,436.55	4,807.00	5,272.80	5,753.68	6,051.09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,347.71	4,659.19	4,692.76	4,766.98	5,056.55
L	Real Estat	7,019.03	7,681.62	8,410.61	8,575.46	8,838.91
M N	Jasa Perusahaan	823.60	873.19	953.52	896.31	876.19
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,251.11	1,332.18	1,448.75	1,443.24	1,431.56
P	Jasa Pendidikan	1,982.45	2,146.00	2,324.12	2,340.16	2,315.89

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	365.41	400.78	445.38	465.03	507.52
R S T U	Jasa Lainnya	1,220.22	1,326.26	1,450.39	1,361.78	1,380.73
	Produk Domestik Regional Bruto	86,964.03	92,011.41	97,129.17	93,482.49	97,809.90

*Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2021

Tabel 2.14

PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/ Industry		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,151.59	8,678.39	9,045.55	9,434.71	9,478.49
B	Pertambangan dan Penggalian	51.56	56.53	58.54	55.54	50.93
C	Industri Pengolahan	43,841.07	46,552.10	49,164.34	45,198.21	48,029.60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,769.27	4,947.79	4,693.53	4,096.17	4,630.78
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	74.50	79.67	85.48	93.49	100.07
F	Konstruksi	16,202.51	18,448.09	20,797.30	20,163.35	23,462.79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,138.61	14,742.54	16,234.31	15,934.12	16,403.08
H	Transportasi dan Pergudangan	3,449.70	3,865.87	4,320.45	4,145.89	4,651.08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,786.71	1,960.20	2,133.60	2,023.94	2,122.18
J	Informasi dan Komunikasi	3,907.54	4 136.44	4,505.50	4,898.70	5,144.91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,344.54	7,081.15	7,290.26	7,413.70	8,241.82
L	Real Estat	8,688.00	9,698.31	10,957.41	11,392.27	11,860.24
M,N	Jasa Perusahaan	1,240.18	1,357.31	1,537.09	1,470.01	1,454.87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,027.46	2,200.72	2,469.16	2,571.45	2,616.72
P	Jasa Pendidikan	3,011.68	3,444.99	3,899.57	3,983.80	3,963.05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	496.31	570.59	656.87	695.57	774.43
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1,812.85	2,005.27	2,240.33	2,166.13	2,225.07
	Produk Domestik Regional Bruto	118,994.08	129,825.98	140,089.29	135,737.06	145,210.12

*Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2021

Tabel 2.15

Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2021

Lapangan Usaha	Tahun (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,92	6,85	6,68	6,46	6,95	6,53
Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Industri Pengolahan	37,47	36,85	35,86	35,21	33,30	33,08
Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	4,02	3,81	3,34	3,02	3,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
Konstruksi	13,08	13,63	14,21	14,82	14,85	16,16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,76	11,00	11,36	11,57	11,74	11,30
Transportasi dan Pergudangan	2,85	2,90	2,98	3,08	3,05	3,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,49	1,50	1,51	1,52	1,49	1,46
Informasi dan Komunikasi	3,20	3,28	3,19	3,21	3,61	3,54
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,28	5,33	5,45	5,19	5,46	5,68
Real Estate	6,92	7,30	7,47	7,81	8,39	8,17
Jasa Perusahaan	1,01	1,05	1,05	1,10	1,08	1,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,68	1,70	1,70	1,76	1,89	1,80
Jasa Pendidikan	2,46	2,53	2,65	2,78	2,93	2,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,40	0,42	0,44	0,47	0,51	0,53
Jasa Lainnya	1,46	1,52	1,54	1,60	1,60	1,53

*Catatan / Note: * Angka sementara / Preliminary figures*

*** Angka sangat sementara / Very preliminary figures*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2021

Sementara itu, berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha, Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2021 sekitar 6,53%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang sekitar 6,53%, sementara pada tahun 2017-2018 kontribusi sektor pertanian sebesar 6,85% dan 6,68%. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terkecil yang mana berkontribusi sebesar 0,04% pertahun terhadap PDRB Kabupaten Tangerang, sedangkan sektor Industri pengolahan mempunyai kontribusi sebesar yaitu 35,08% pada tahun 2021, yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar yaitu sebesar 36,30%. Sedangkan sektor Perdagangan pada tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Kontribusi sektor Perdagangan pada tahun 2021 sebesar 11,30 persen, turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 11,74% lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 11,59%.

Tabel 2.16
Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga konstan Tahun 2016
– 2021 (dalam persen)

KATEGORI	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,17	6,14	5,98	5,79	6,18	5,86
B	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
C	Industri Pengolahan	39,84	38,96	37,80	36,96	35,04	34,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,86	1,62	1,62	1,47	1,34	1,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
F	Konstruksi	12,10	12,54	12,83	13,30	13,36	14,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,54	11,63	11,95	12,02	12,03	11,71
H	Transportasi dan Pergudangan	2,76	2,83	2,93	3,04	2,99	3,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,46	1,50	1,54	1,57	1,54	1,53
J	Informasi dan Komunikasi	4,99	5,10	5,22	5,43	6,15	6,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,02	5,00	5,06	4,83	5,10	5,17
L	Real Estate	7,77	8,07	8,35	8,66	9,17	9,04
M,N	Jasa Perusahaan	0,93	0,95	0,95	0,98	0,96	0,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,43	1,44	1,45	1,49	1,54	1,46
P	Jasa Pendidikan	2,24	2,28	2,33	2,39	2,50	2,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,41	0,42	0,44	0,46	0,50	0,52
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,35	1,40	1,44	1,49	1,46	1,41

Catatan / Note: * Angka sementara / Preliminary figures

** Angka sangat sementara / Very preliminary figures

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2021

b. Laju Inflasi

Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2018 di Kota Serang, Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan, diketahui selama tahun 2021 ini sebanyak 355 komoditas mengalami perubahan harga. Rincian lengkapnya adalah 281 komoditas mengalami kenaikan harga dan sisanya sebanyak 74 komoditas mengalami penurunan

harga. Kenaikan harga tertinggi selama tahun 2021 dibandingkan harga tahun 2020 terjadi pada komoditas buah semangka yang mengalami perubahan harga selama setahun sebesar 31,44 persen, kemudian komoditas minyak goreng 29,40 persen, angkutan udara 27,41 persen, cabai rawit 24,17 persen, dan melon 24,11 persen. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga selama tahun 2021 dibandingkan dengan harga yang tercatat pada tahun 2020 adalah komoditas bawang merang sebesar -20,99 persen, jengkol -20,14 persen, telur puyuh -15,60 persen dan lotion anti nyamuk -13,27 persen. Jika dilihat dari kontribusi masing-masing komoditas terhadap besarnya angka inflasi umum, maka komoditas yang memberikan andil tertinggi adalah kenaikan minyak goreng sebesar 0,31 persen, sewa rumah 0,18 persen, rokok kretek filter 0,11 persen, angkutan udara sebesar 0,10 persen dan tempe, tahu, daging ayam ras serta jeruk 0,06 persen. Sementara, beberapa komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain bawang merah sebesar -0,09 persen, cabai merah -0,05 persen, dan air kemasan -0,04 persen. Sementara laju Inflasi tahun kalender dan Inflasi year on year tiga kota IHK di provinsi Banten dibandingkan dengan 26 Kota IHK dipulau jawa adalah peringkat ke 5 (lima) untuk Kota Serang, peringkat 6 (enam) untuk Kota Cilegon dan peringkat 14 (empat belas) untuk Kota Tangerang.

Tabel 2.17
Perkembangan Inflasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

Uraian	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Tangerang	3,94	2,65	3,50	3,46	3,31	1,17	1,79
Provinsi	4,29	2,94	3,98	3,42	3,30	1,45	1,51
Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87

Sumber : Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Banten, 2015 – 2021 (Inflasi Kota Tangerang)

Inflasi Kabupaten Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2021, laju inflasi di Kabupaten Tangerang sekitar 1,79% tahun 2021.

c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, PDRB per kapita menurut harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. PDRB per kapita mencapai titik tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 44.089 (000 rupiah). PDRB per kapita Kabupaten Tangerang menurut Harga Konstan tahun 2021 sebesar Rp. 29.698 (000 rupiah).

Gambar 2.10
Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten
Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2021 (000 rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

* Angka Sementara

* Angka sangat sementara

Gambar 2.11
Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten
Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2021 (000 rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

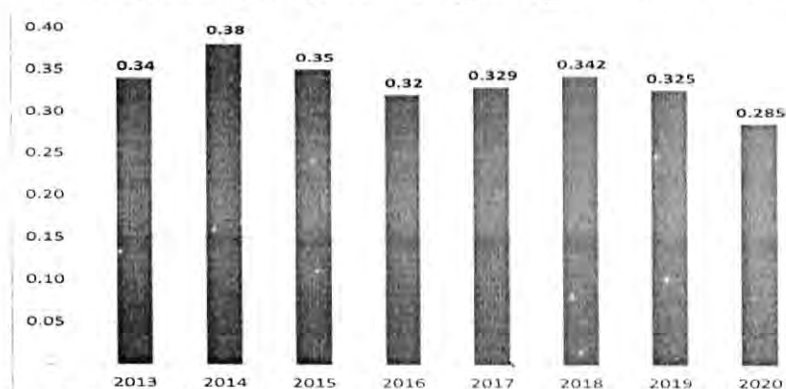
* Angka Sementara

* Angka sangat sementara

d. Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adanya penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh Gini Ratio. Gini Ratio dibagi atas tiga level. Level pertama, menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, yaitu berada pada kisaran 0 sampai 0,3. Level kedua, ketimpangan menengah, yaitu antara 0,3 hingga 0,5. Level ketiga, ketimpangan tinggi, yaitu berada di atas 0,5. Gini Rasio Kabupaten Tangerang tahun 2020 sebesar 0,285 angka ini menurun sebesar 0,040 poin dibandingkan dengan Gini Ratio 2019 yang sebesar 0,325. Ini menandakan ketimpangan orang kaya dan miskin di Indonesia semakin rendah, Ini dimungkinkan karena terjadinya penurunan pengeluaran atau daya beli pada kelompok penduduk, terutama yang menengah ke atas.

Gambar 2.12
Gini Rasio Kabupaten tangerang Tahun 2013-2020



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020, diolah.

e. Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.13
Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan (GK)
Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021

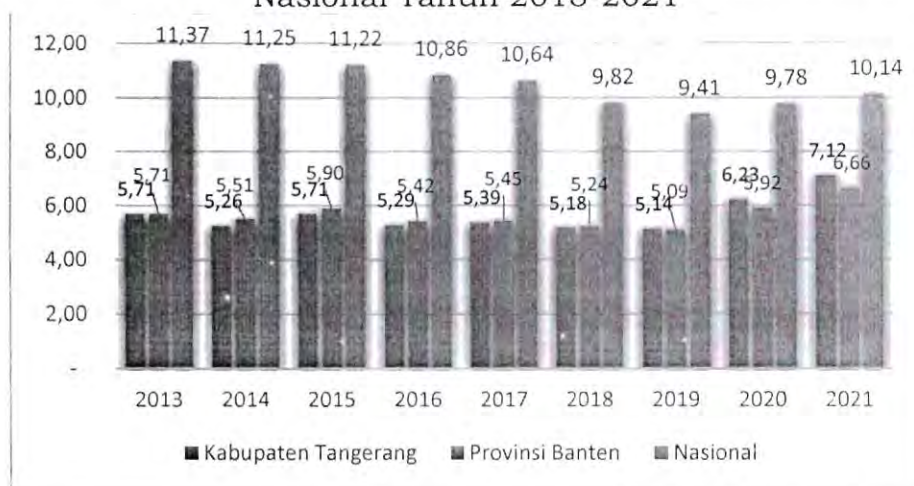


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang tahun 2019 sekitar 0,69 dan tahun 2020 meningkat hingga 0,95. Sedangkan pada tahun 2019 indeks keparahan kemiskinan (P2) mencapai 0,14 dan tahun 2020 mencapai 0,22. Sementara itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2020 sekitar 6,23% atau sebanyak 242.160 orang, mengalami peningkatan secara persentase dari tahun 2019 yang sebesar 5,14%, dan mengalami peningkatan dari segi jumlah yang semula 193.970 orang. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020 senilai Rp520.742,-/kapita/bulan.

Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang berfluktuasi nilainya, pada tahun 2018 mengalami penurunan mencapai nilai sebesar 5,18% kemudian persentase penduduk miskin tahun 2019 kembali menurun hingga mencapai 5,14%, tetapi kembali meningkat di tahun 2020-2021 hingga mencapai 6,25%-7,12%. Sementara itu, Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional pada Tahun 2013-2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.14
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2013-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data yang telah dirilis BPS, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang di Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 menurun, kemudian persentase penduduk miskin tahun 2015 mengalami kenaikan dan tahun 2016 kembali menurun, memasuki tahun 2017 persentase penduduk miskin kembali naik mencapai 5,39%, namun memasuki tahun 2018 dan 2019 persentase penduduk miskin mengalami penurunan mencapai angka 5,18% dan 5,14%. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan dengan menjalankan beberapa program yang berasal dari pemerintah pusat, antara lain seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan non tunai.

Selain itu, juga pembentukan tim reaksi cepat (TRC) untuk menanggulangi angka kemiskinan dengan memberikan pendampingan usaha bagi warga miskin¹. Sedangkan jika dilihat pada tiga tahun ke belakang, pada

¹ <https://indopos.co.id/read/2019/05/21/175893/tiap-tahun-warga-miskin-di-kabupaten-tangerang-bertambah/>

tahun 2017, 2018, dan 2019 persentase penduduk miskin di tingkat Provinsi Banten dan Nasional trennya juga cenderung mengalami penurunan.

Kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 turut memberikan dampak meningkatnya persentase penduduk miskin baik di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maupun di tingkat Nasional. Di Kabupaten Tangerang, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 6,23%, sedangkan di level Provinsi Banten, persentase penduduk miskin juga meningkat menjadi 6,63%. Di level nasional, persentase penduduk miskin meningkat hingga menjadi 10,19%.

Tahun 2020, Covid-19 melanda dunia secara global termasuk Kabupaten Tangerang, mengakibatkan angka kemiskinan bertambah baik secara nasional maupun di Banten. Angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang berada pada angka 6,23% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 242.020 jiwa, kondisi tahun 2021 belum pulih secara social angka kemiskinan meningkat menjadi 7,12% atau sebanyak 272.350 jiwa atau bertambah sebanyak 30.330 jiwa. Dengan melihat jumlah penduduk di bawah kemiskinan sesuai grafik di atas, berikut adalah perkembangan persentase penduduk Kabupaten Tangerang yang berada di atas Garis Kemiskinan tahun 2017-2020:

Tabel 2.18
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang
Tahun 2017-2020

No	Tahun	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan (%)
1	2017	94,61
2	2018	94,82
3	2019	94,86
4	2020	93,77

Sumber: BPS dan BPS Kabupaten Tangerang, 2021

Sementara itu, apabila dilihat dari gambar 2.31, tampak bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang jauh lebih rendah dari angka nasional, kondisi yang senada juga dapat dilihat dari tingkat keparahannya, penduduk miskin yang berada di Kabupaten Tangerang kondisinya sedikit lebih baik dibandingkan Provinsi Banten dan Nasional. Indeks kedalaman kemiskinan yang mengukur *gap* antara data observasi dan rata-rata penduduk miskin menunjukkan angka yang dicapai Kabupaten Tangerang lebih rendah dari Provinsi Banten maupun angka nasional

Tabel 2.19
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tangerang
Tahun 2013-2021

Tahun	Kedalaman Kemiskinan (P1)			Keparahan Kemiskinan (P2)		
	Kabupaten Tangerang	Provinsi Banten	Nasional	Kabupaten Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2013	0,78	0,95	1,88	0,21	0,28	0,48
2014	0,63	0,79	1,75	0,12	0,18	0,44
2015	0,82	0,94	1,84	0,18	0,23	0,51
2016	0,79	0,80	1,74	0,18	0,17	0,44
2017	0,68	0,86	1,79	0,13	0,19	0,46
2018	0,82	0,91	1,63	0,20	0,25	0,41
2019	0,69	0,80	1,50	0,14	0,23	0,36
2020	0,95	1,14	1,75	0,22	0,34	0,47
2021	1,21	1,09	1,71	0,29	0,26	0,42

Sumber: diolah dari Website BPS Pusat, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/kota

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021 dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 2.20
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

No	Tahun	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
1	2017	94,61
2	2018	94,82
3	2019	94,86
4	2020	92,54
5	2021	92,11

Sumber : BPS RI Tahun 2017-2021

f. Pengeluaran Per Kapita (PPP)

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019, dari tahun 2019 sebesar Rp.

12.476.000 turun di tahun 2020 menjadi Rp. 12.203.000, penurunan di tahun 2020 merupakan dampak pandemic covid-19, tahun 2021 pengeluaran per kapita mulai membaik seiring pemulihan ekonomi dengan angka 12,273,000 ada kenaikan sebesar 70,000.

Tabel 2.21
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021

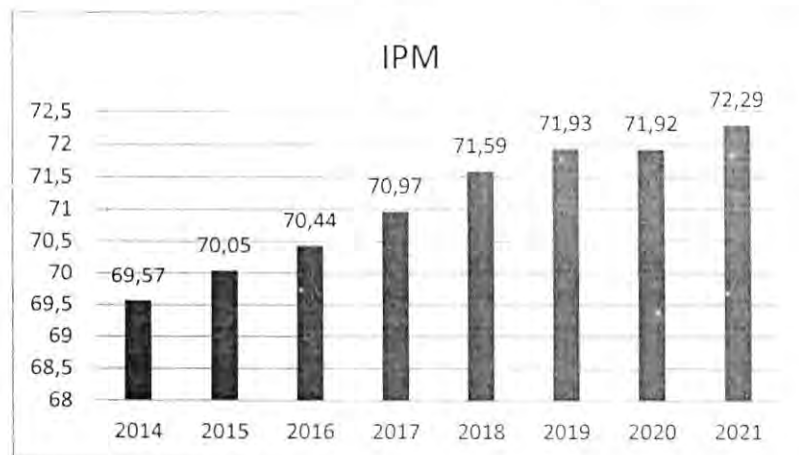
No.	Tahun	Purchasing Power Parity
1	2016	11,863,000
2	2017	11,914,000
3	2018	12,179,000
4	2019	12,476,000
5	2020	12,203,000
6	2021	12,273,000

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021

g. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian angka IPM yang relatif lambat dibandingkan tahun 2020 bersumber indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak, kontribusi daya beli yang menurun sekitar 273,000 dari tahun 2019 ke tahun 2020 . Pertumbuhan daya beli yang rendah itu terkait dengan dampak pandemic covid-19. Untuk 2021 pertumbuhan daya beli semakin meningkat dibandingkan tahun 2020.

Gambar 2.15
Diagram Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021



Sumber : BPS Provinsi Banten 2014-2021, diolah

Tabel 2.22
Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang
Tahun 2016-2021

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup Saat lahir (UHH, Tahun)	69.37	69.47	69.61	69.79	69.89	69.93
Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	12.11	12.51	12.8	12.81	12.82	12.84
Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	8.23	8.27	8.27	8.28	8.39	8.61
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP, Ribuan Rupiah)	11,863,000	11,914,000	12,179,000	12,476,000	12,203,000	12.273,000
IPM	70.44	70.97	71.59	71.93	71.92	72.29

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2016-2021

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu kebutuhan dasar penduduk untuk berkomunikasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Dimana hal ini merupakan ketrampilan minimum yang dibutuhkan penduduk dalam proses bermasyarakat, sehingga penduduk dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di Kabupaten Tangerang. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari indikator angka melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator pencapaian program pendidikan di Indonesia. Secara matematis, angka ini memperlihatkan rasio antara jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia lima belas tahun keatas dalam satuan ratusan.

Indikator tersebut penting mengingat melek huruf merupakan pintu dari segala ilmu pengetahuan. Pada tahun 2021 terdapat 97,24 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tangerang yang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin, sedangkan sisanya sebanyak 2,76 persen masih belum/tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

Tabel 2.23
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021

No.	Tahun	Angka Melek Huruf
1	2013	96,37
2	2014	97,25
3	2015	96,90
4	2016	96,07
5	2017	95,92
6	2018	98,90
7	2019	99,24
8	2020	97,62
9	2021	97,24

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

Pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas penduduk. Indikator atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan disuatu daerah antara lain adalah dengan melihat persentase harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kualitas sumber daya manusia sangatlah bergantung dari pembangunan di bidang pendidikan.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 mencapai 8,61 pertahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Tangerang baru dapat bersekolah hingga jenjang SMP kelas tiga.

Tabel 2.24
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021

No	Tahun	Angka rata-rata lama sekolah (RLS)
1	2014	8,20
2	2015	8,22
3	2016	8,23
4	2017	8,24
5	2018	8,27
6	2019	8,28
7	2020	8,39
8	2021	8,61

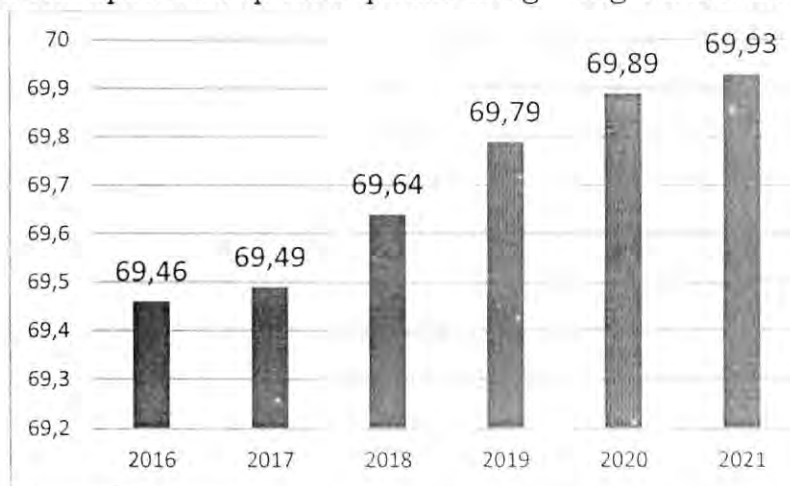
Sumber : BPS Kab. Tangerang, 2021

Peningkatan Rata-rata lama sekolah yang dicapai oleh Kabupaten Tangerang meningkat dari Tahun 2020 ke 2021 secara signifikan hanya sebesar 0,22/tahun. Rendahnya capaian kinerja pendidikan diduga terkait dengan relatif tingginya penduduk usia kerja yang telah memiliki pendidikan yang relatif rendah. Sementara itu kinerja pendidikan penduduk usia muda belum mampu mengimbangi kondisi pendidikan yang masih relative rendah.

c. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dipakai untuk mengukur dimensi kesehatan, sementara dimensi kesehatan dipakai sebagai salah satu dimensi dasar untuk pengukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 adalah 69,93 pertahun. Terjadi peningkatan sebesar 0,04 point dari tahun sebelumnya 2020 yang berada di angka 69,89 pertahun.

Gambar 2.16
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Banten 2016-2021, diolah

d. Persentase Balita Gizi Buruk

Kegiatan pemantauan status gizi secara aktif dilaksanakan oleh petugas gizi puskesmas melalui bulan penimbangan balita yang dilakukan setahun 2(dua) kali. Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Untuk 2021 Gizi buruk dan gizi kurang mengalami penurunan, untuk gizi baik dan gizi lebih mengalami kenaikan. Keadaan ini menunjukkan adanya komitmen menyeluruh dari lintas sektor dalam menanggulangi masalah gizi di Kabupaten Tangerang melalui

advokasi dan kegiatan gizi bersumberdaya masyarakat melalui Pos Gizi, KP ASI dan KERAMAS, karena sektor kesehatan saja tidak akan dapat secara maksimal menurunkan angka gizi buruk. Agar terus dapat meningkatkan kinerja daerah dalam penanggulangan masalah gizi, perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Gambaran status gizi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.25
Gambaran Status Gizi Pada Balita Di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021

Tahun	Jumlah Balita							
	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Gizi Baik		Gizi Lebih	
	N	%	N	%	N	%	N	%
2014	1.172	0,45	8.583	3,28	249.877	95,55	1.892	0,05
2015	1.091	0,39	8.099	2,86	271.407	95,89	2.227	0,79
2016	1.164	0,41	8.935	3,17	268.339	95,32	2.880	1,03
2017	1.161	0,38	9.644	3,14	294.027	95,69	2.479	0,81
2018	1.040	0,33	7.863	2,51	296.092	94,66	2.134	0,68
2019	870	0,22	2.959	2,74	32.680	82,1	3.296	0,83
2020	2.553	1,4	6.375	3,52	154325	85,2	17.857	9,86
2021	1.368	0,64	4992	2,34	187.040	87,59	20.136	9,43

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2014-2021, diolah

e. Angkatan Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah, semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK di Kabupaten Tangerang tahun 2020 sekitar 86,94% dengan angkatan kerja sebesar 1.836.726 orang dengan jumlah penduduk yang berkerja sebanyak 1.596.938 orang.

Tabel 2.26
Perkembangan TPAK Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020

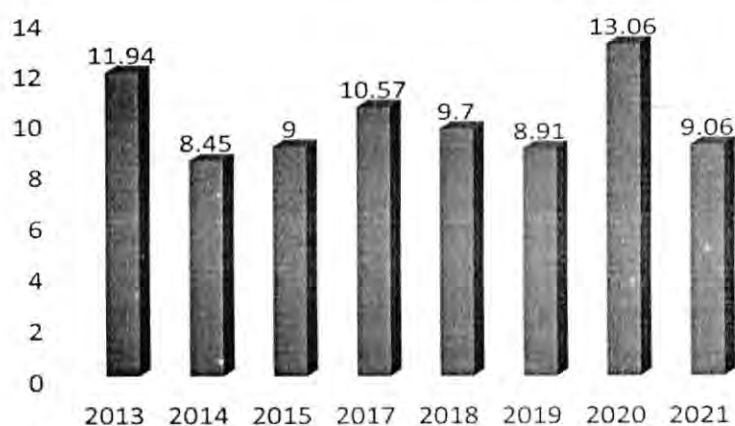
No.	Tahun	TPAK (000)	TPAK (%)
1	2015	1,377	62.46
2	2017	1,477	63.79
3	2018	1,532	63.50
4	2019	1,677	66.69
5	2020	1,596	86.94

Sumber : BPS Provisi Banten, 2015-2021

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran, angka TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu sebesar 9,06%. Penurunan angka pengangguran ini merupakan imbas dari pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 yang melanda di seluruh dunia.

Gambar 2.17
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang
Tahun 2013-2021



Sumber : BPS Provinsi Banten 2013-2020, diolah

g. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Jumlah sampel diambil berdasarkan hasil produk pelayanan publik yang dikeluarkan oleh setiap Perangkat Daerah (PD). Sehingga hasil dari SKM ini akan muncul perhitungan SKM per tabel yang didapatkan dari lapangan. Berikut adalah hasil dari SKM pada Tahun 2021 setiap Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.27
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2021

No	Nama Perangkat Daerah	Proses SKM		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Predikat
1	Sekretariat Daerah	90,23	91,87	(+)
2	Sekretariat DPRD Kab. Tangerang	82,00	89,26	(+)
3	Inspektorat Kab. Tangerang	88,70	87,50	(-)
4	Dinas Pendidikan	76,82	85,15	(+)

No	Nama Perangkat Daerah	Proses SKM		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Predikat
5	Dinas Kesehatan	88,04	88,86	(+)
6	Dinas Sosial	81,28	85,94	(+)
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	89,28	86,68	(-)
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85,18	90,03	(+)
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	88,62	85,51	(-)
10	Dinas Perhubungan	90,70	90,84	(+)
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	83,70	84,31	(+)
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,58	87,46	(+)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	80,98	86,81	(+)
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	95,04	90,94	(-)
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip	90,48	89,47	(-)
16	Satuan Polisi Pamong Praja	97,40	83,65	(-)
17	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	84,64	83,63	(-)
18	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	80,15	85,44	(+)
19	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman	98,59	82,94	(-)
20	Dinas Tenaga Kerja	94,04	82,16	(-)
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86,23	87,48	(+)
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	88,30	79,66	(-)
23	Dinas Perikanan	88,71	84,75	(-)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	91,00	83,02	(-)
25	Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	84,26	87,80	(+)
26	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	82,88	85,49	(+)
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	87,39	83,43	(-)
28	Badan Pendapatan Daerah	87,77	87,93	(+)
29	Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia	87,27	89,72	(+)
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90,68	87,76	(-)
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	78,33	79,47	(+)
32	RSU Kab. Tangerang	86,60	83,65	(-)
33	RSUD Pakuhaji	91,58	83,10	(-)

No	Nama Perangkat Daerah	Proses SKM		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Predikat
34	RSUD Balaraja	78,39	80,50	(+)
35	Kecamatan Tigaraksa	79,85	85,81	(+)
36	Kecamatan Cisoka	82,70	84,65	(+)
37	Kecamatan Solear	85,13	86,59	(+)
38	Kecamatan Pakuhaji	84,88	89,48	(+)
39	Kecamatan Jayanti	90,03	83,42	(-)
40	Kecamatan Jambe	86,53	79,20	(-)
41	Kecamatan Balaraja	82,77	90,85	(+)
42	Kecamatan Sukamulya	83,63	81,93	(-)
43	Kecamatan Kresek	82,92	89,50	(+)
44	Kecamatan Gunung Kaler	88,49	85,10	(-)
45	Kecamatan Mekar Baru	86,54	87,33	(+)
46	Kecamatan Kemiri	87,33	87,43	(+)
47	Kecamatan Kronjo	85,23	85,58	(+)
48	Kecamatan Mauk	92,45	91,26	(-)
49	Kecamatan Pasar Kemis	94,40	80,57	(-)
50	Kecamatan Rajeg	90,97	86,81	(-)
51	Kecamatan Sukadiri	84,43	89,67	(+)
52	Kecamatan Sepatan	81,66	86,70	(+)
53	Kecamatan Sepatan Timur	77,65	80,15	(+)
54	Kecamatan Sindang Jaya	81,73	85,46	(+)
55	Kecamatan Teluk Naga	88,18	84,88	(-)
56	Kecamatan Panongan	80,02	80,38	(+)
57	Kecamatan Kosambi	81,62	88,15	(+)
58	Kecamatan Cikupa	87,66	78,76	(-)
59	Kecamatan Curug	81,38	79,87	(-)
60	Kecamatan Kelapa Dua	94,42	92,38	(-)
61	Kecamatan Pagedangan	83,94	92,52	(+)
62	Kecamatan Cisauk	82,93	86,58	(+)
63	Kecamatan Legok	91,12	91,58	(+)
Jumlah		5.440,43	5.414,64	(-)
Rata - Rata IKM Kab. Tangerang		86,36	85,95	(-)

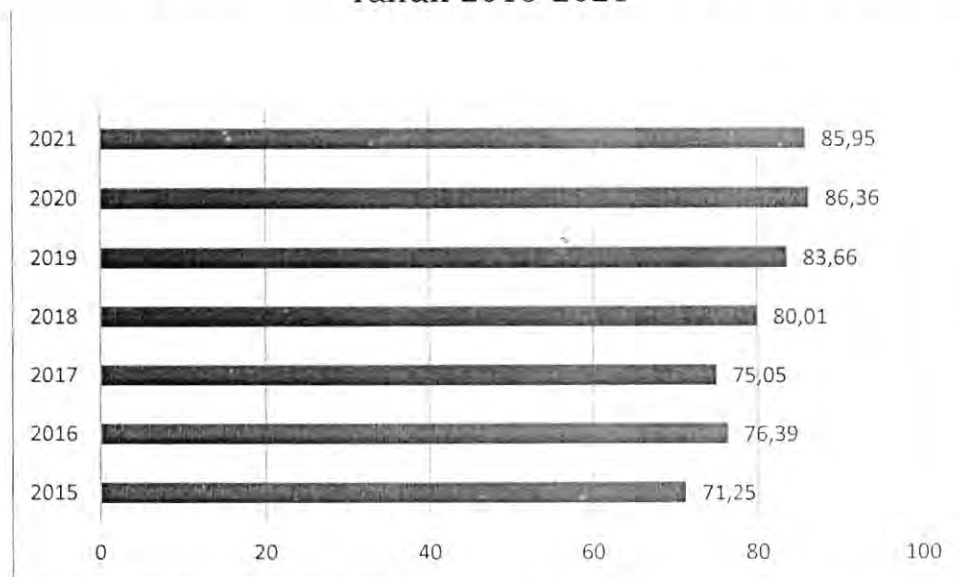
Sumber : Bagian Ortala, Setda Kab Tangerang Tahun 2021

Dari tabel di atas sebanyak 31 Perangkat Daerah yang meningkat predikatnya (+) atau sebesar 57,14 . Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang menurun dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan diakibatkan salah satunya adalah karena dampak pandemi Covid-19, dimana sebagian pelayanan publik diberlakukan *Work From Home* (WFH). Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tangerang 85,95 dengan kriteria mutu pelayanan “B” yang berarti bahwa hasil SKM ada penurunan sebesar 0,41. Berdasarkan data tersebut maka kinerja unit

pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Tangerang termasuk dalam kategori “Baik”.

Pelayanan yang paling tinggi diperoleh oleh Kecamatan Pagedangan dengan nilai 92,52, sedangkan nilai pelayanan yang paling rendah yaitu pelayanan Kecamatan Jambe pada dengan nilai 79,20. Hasil keseluruhan penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) Kabupaten Tangerang yang telah dilakukan di 60 (enam puluh) Perangkat Daerah dan 3 (tiga) unit layanan kesehatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang mendapatkan nilai 85,95 sehingga pelaksanaan pelayanan di Kabupaten Tangerang termasuk pada kategori kriteria Baik.

Gambar 2.18
Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tangerang
Tahun 2015-2021



Sumber : Bagian Ortala Setda, Kab Tangerang, diolah

h. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Kemandirian merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, dengan semakin tinggi peran dana perimbangan (subsidi dari pemerintah pusat) maka semakin rendah kemandirian keuangan daerah otonom, dan semakin kecil keleluasaan daerah otonom dalam melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat daerah. PAD yang dikelola oleh daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan dari pusat. Karena PAD diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah, maka pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah. Jika pengelolaan PAD dilakukan dengan baik, maka dalam membangun daerahnya

tidak hanya mengandalkan dana perimbangan yang besarnya ditentukan oleh pusat melainkan dengan potensi daerah yang dimiliki.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Tabel 2.28
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Tangerang
Tahun 2015-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan	Persentase
2015	1.851.294.336.930	4.229.034.302.499	43,78
2016	2.045.882.657.966	4.799.673.684.723	42,63
2017	2.870.584.791.584	5.314.690.504.688	54,01
2018	2.870.834.840.001	5.460.376.741.305	52,58
2019	2.809.191.136.332	5.843.457.960.531	48,07
2020	2.465.364.759.567	5.283.259.300.737	46,66
2021	2.451.382.599.948	5.736.671.084.317	42,74

Sumber : LKPJ Bupati Tangerang Tahun 2015-2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas diketahui rata-rata tingkat kontribusi Peningkatan Asli Daerah (PAD) dalam peningkatan pendapatan Kabupaten Tangerang Tahun 2015 sampai 2020 sebesar 47,95 persen yang digolongkan dalam kriteria kontribusi baik. Pada Tahun 2019 sampai 2021 kontribusi PAD dalam pendapatan mengalami penurunan yaitu tahun 2019 sebesar 48,07 persen. sedangkan tahun 2020 sekitar 46,66 persen. Untuk tahun 2021 sebesar 42,74persen Kontribusi PAD terhadap pendapatan tertinggi tahun 2017 sebesar 54,01 persen.

i. Opini BPK

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion :
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil

usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion : Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion : Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) : Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Tabel 2.29
Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

No	Tahun	Opini
1	2015	WTP
2	2016	WTP
3	2017	WTP
4	2018	WTP
5	2019	WTP
6	2020	WTP
7	2021	WTP

Sumber : BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2016-2021

Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2015-2021 meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK Perwakilan Provinsi Banten, atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015-2021. Opini WTP BPK bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tangerang tidak menemukan permasalahan yang berdampak terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tangerang.

j. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi

kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Tujuan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) berdasarkan : cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability).

Tabel 2.30
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021

Tahun	Skor Pola Pangan Harapan
2016	86,4
2017	85,1
2018	87,4
2019	84,3
2020	85,5
2021	86,3

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

Dengan adanya peningkatan Skor Pola harapan hidup di tahun 2021 mencapai 86,3, maka dapat disimpulkan kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) berdasarkan : cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability), menjadi jauh lebih baik.

Indeks akses pangan merupakan instrumen untuk mengukur tingkat keterjangkauan atau aksesibilitas pangan rumah tangga dilihat dari aspek fisik, ekonomi dan sosial. Indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks akses pangan adalah: (1) Proporsi jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan; (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara; (3) Proporsi rumah tangga tanpa akses listrik; (4) Proporsi penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah; (5) Proporsi jumlah rumah tangga memiliki aset; dan (6) Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah lembaga kemasyarakatan desa. Hasil analisis indeks akses pangan tahun 2019 menunjukkan 55 kabupaten dan 54 kota di 27 provinsi termasuk wilayah dengan aksesibilitas pangan sangat tinggi (prioritas 6). Kabupaten/Kota dengan nilai indeks tertinggi adalah Kota Palangkaraya, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor.

k. Penguatan Cadangan Pangan

Keberadaan Cadangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut diatas, perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menggunakan criteria jumlah penduduk, konsumsi beras per kapita per tahun, dan proporsi terhadap cadangan beras nasional.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, salah satu hal yang harus dikuatkan adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Kewajiban ini didasarkan pada UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP 17 Tahun 2015 tentang CPPD.

Tabel 2.31
Penguatan Cadangan Pangan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021

Tahun	Pengadaan Cadangan Pangan (Ton)
2017	17.080
2018	25.700
2019	12.800
2020	25.000
2021	18.725

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

Dengan adanya penurunan cadangan pangan di tahun 2021, maka perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengalami penurunan. Cadangan pangan menggunakan kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras per kapita per tahun, dan proporsi terhadap cadangan beras nasional. Penurunan cadangan pangan kemungkinan akibat Covid 19 yang mulai melanda Indonesia awal 2020.

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah secara optimal sangat penting untuk dilakukan, karena dalam penyelenggaraannya ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi kekurangan pangan, gejolak harga, dan/atau keadaan darurat.

l. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Untuk penanganan kerawanan pangan dibutuhkan intervensi berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis, untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat.

Penanganan daerah rawan pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan dan gizi yang dialami oleh rumah tangga. Upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi sangat penting diketahui siapa yang rentan pangan dan gizi, berapa banyak yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi serta dimana mereka tinggal, kemudian apa saja sebenarnya yang membuat mereka rentan.

Tabel 2.32
Penanganan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Tangerang
Tahun 2018-2021

Tahun	Desa Prioritas I dan II
2018	3
2019	10
2020	14
2021	14

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

Adanya kesamaan angka dalam indeks kerawanan pangan ditahun 2020 dengan 2021, menunjukkan upaya yang lebih serius lagi dalam mengurangi kerawanan pangan di Kabupaten tangerang

Lokus Penanganan Daerah Rawan Pangan ditetapkan berdasarkan Desa Prioritas I dan II pada Peta FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) Kabupaten Tangerang Tahun 2018 sejumlah 110 desa. Pada Tahun 2023 di targetkan sebanyak 60% desa prioritas I dan II atau sebanyak 66 desa sudah tertangani.

m. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian dilihat dari seberapa besar sumbangan produk unggulan komoditas pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tangerang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan wilayah Kabupaten Tangerang khususnya dibidang pertanian sebagai sektor dominan di wilayah ini.

Tabel 2.33
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Tangerang
Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Kontribusi PDRB ADHB (%)	Kontribusi PDRB ADHK (%)
1	2016	6,92	6,92
2	2017	6,85	6,86
3	2018	6,68	5,98

No.	Tahun	Kontribusi PDRB ADHB (%)	Kontribusi PDRB ADHK (%)
4	2019	6,46	5,79
5	2020	6,95	6,23
6	2021	6,53	5,8

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2021, diolah.

Pada tahun 2021 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB atas harga berlaku sebesar 6,53 persen, kondisi ini menurun bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 yang mencapai kontribusi 6,95 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 pada kategori ini sebesar -0,84 persen, menurun dibandingkan tahun 2020 yang tumbuh sebesar 2,82 persen.

n. Produksi sektor Pertanian

Produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan salah satu indikator ketersediaan pangan daerah. Jadi apabila nilai produksi padi dan palawija tinggi, maka ketersediaan pangan daerah juga tinggi dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di daerah sehingga memperkecil impor, namun apabila nilai produksi padi dan palawija rendah, maka ketersediaan pangan daerah juga rendah, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil kebijakan. Sehingga tidak terjadi kekurangan pangan di daerah.

Produktivitas padi dan Palawija di Kabupaten Tangerang mencapai 333,24 Kwi/Ha dengan produksi sekitar 338.457,20 ton.

Tabel 2.34
Produktivitas Sektor Padi dan Palawija Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

NO	Jenis Tanaman	Produktivitas		Produksi	
		2020	2021	2020	2021
1	Padi Sawah	48,37	48,85	336.094,00	354.881,00
2	Jagung	33,89	11,7	330,5	202,4
3	Ubi Kayu	132,94	132,36	1.584,60	974,3
4	Ubi Jalar	100,90	101,8	342,8	386,7
5	Kacang Tanah	17,14	7,7	105,3	29,5
Jumlah		333,24	302,41	336.872,60	356.473,90

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2021

Produksi padi di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun antara tahun 2020-2021, yaitu 48,85%.

Tabel 2.35
Jumlah Produksi Padi Per Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	Jumlah Produksi Padi/Bahan Pangan Utama Di Daerah (Ton)					Rata-rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Balaraja	12,151	8,281	10,400	10,788	10545	10,405.00
2	Cikupa	4,777	2,261	2,674	3,309	3031	3,255.25
3	Cisauk	3,354	2,648	2,556	2,855	2622	2,853.25
4	Cisoka	13,154	11,530	11,541	12,764	12127	12,247.25
5	Curug	3,058	2,468	2,763	2,779	3249	2,767.00
6	Gunung Kaler	29,452	22,981	20,656	24,202	23907	24,322.75
7	Jambe	8,982	6,586	6,342	9,081	6877	7,747.75
8	Jayanti	15,289	10,277	10,896	12,408	11735	12,217.50
9	Kelapa Dua	190	80	237	240	363	186.75
10	Kemiri	17,394	9,820	10,446	17,823	17605	13,870.75
11	Kosambi	2,790	2,009	1,343	1,985	1478	2,031.75
12	Kresek	21,434	16,679	14,344	17,735	16088	17,548.00
13	Kronjo	24,844	17,522	18,510	23,249	20419	21,031.25
14	Legok	10,820	7,439	7,518	7,682	8289	8,364.75
15	Mauk	33,424	25,692	22,835	24,592	21908	26,635.75
16	Mekar Baru	23,212	18,394	16,843	20,577	20.084	19,756.50
17	Pagedangan	5,259	3,668	3,699	3,503	3682	4,032.25
18	Pakuhaji	46,591	21,025	23,625	27,525	30745	29,691.50
19	Panongan	8,558	7,919	7,438	7,714	6508	7,907.25
20	Pasar Kemis	6,183	4,539	4,393	5,068	4682	5,045.75
21	Rajeg	35,599	24,947	19,795	27,474	36043	26,953.75
22	Sepatan	12,464	6,347	6,239	5,936	8238	7,746.50
23	Sepatan Timur	12,276	10,818	7,537	8,087	10638	9,679.50
24	Sindang Jaya	17,433	10,783	11,054	16,713	15585	13,995.75
25	Solear	12,662	10,760	10,547	11,235	11009	11,301.00
26	Sukadiri	25,241	19,510	16,933	16,403	20396	19,521.75
27	Sukamulya	16,628	14,117	13,510	14,367	11980	14,655.50
28	Teluknaga	11,356	6,080	7,679	10,147	9340	8,815.50
29	Tigaraksa	13,626	10,975	10,261	11,466	10829	11,582.00
	JUMLAH	448,201	316,152	302,614	357,704	360003	356,167.75

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

Untuk produksi padi di Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan produksi di tahun 2021, terutama di kecamatan Pakuhaji, Rajeg, Sukadiri, Sepatan Timur, Legok, dan Pagedangan.

o. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Dalam beberapa tahun terakhir, lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran menyumbang diatas 11 persen. Kategori ini terbesar ketiga setelah kategori industry pengolahan dan kategori Konstruksi. Pada tahun 2021,

kontribusi Lapangan usaha ini sebesar 11,30 persen. Pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan 1,83 persen mengalami pertumbuhan bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2020 yaitu sebesar -3,70 persen.

Tabel 2.36
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Tangerang
Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Kontribusi PDRB ADHB (%)	Kontribusi PDRB ADHK (%)
1	2016	10,76	10,76
2	2017	11,04	11
3	2018	11,36	11,95
4	2019	11,57	12,02
5	2020	11,50	11,80
6	2021	11,30	11,70

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, diolah.

p. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor Industri merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap PDRB di Kabupaten Tangerang setelah sektor konstruksi, dan sector perdagangan. Sektor industri merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, dengan laju pertumbuhan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya.

Pada tahun 2021, kondisi perekonomian di Kabupaten Tangerang mengalami keneikan , kondisi hal tersebut merupakan dampak dari sector industri di Kabupaten Tangerang yang paling terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sector industry terhadap PDRB Kabupaten Tangerang ditahun 2021 sekitar 33,08 persen, cenderung turun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 33,30 persen. Penurunan kontribusi industri terhadap PDRB merupakan dampak global covid-19.

Tabel 2.37
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Tangerang
Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Kontribusi PDRB ADHB (%)	Kontribusi PDRB ADHK (%)
1	2016	37,47	37,47
2	2017	36,84	36,85
3	2018	35,86	37,80
4	2019	35,21	36,96
5	2020	33,30	35,25
6	2021	33,08	34,85

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2016-2021, diolah.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Seni Budaya dan olahraga

Jumlah sanggar seni berupa tari, musik dan karawitan di Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sementara seni tradisional, tradisi masyarakat, seni modern, seniman, lembaga seni, galeri seni, dan kelompok/grup kesenian tetap tidak ada perubahan.

Tabel 2.38
Jumlah Sanggar Seni dan Budaya di Kabupaten Tangerang
Tahun 2015-2021

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sanggar Seni (Tari.Musik.Karawitan)	5	6	7	8	9	9	9
2	Seni Tradisional	23	23	23	23	23	23	23
3	Tradisi masyarakat	10	10	10	10	10	10	10
4	Seni Modern	4	4	4	4	4	4	4
5	Seniman	-	-	-	-	-	-	-
6	Lembaga Seni	2	2	2	2	2	2	2
8	Kelompok/Grup Kesenian	78	78	-	-	-	78	78

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2021

Untuk Sanggar seni budaya di Kabupaten Tangerang jumlahnya tetap, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang masih memegang dan menghargai adat dan seni budaya.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni

APM merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDG's dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dibidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun dan SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tangerang untuk tingkat SD/MI mencapai 99,65% mengalami kenaikan dan tingkat SMP/MTS mencapai angka 80,91%% juga mengalami penurunan.

Tabel 2.39

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SD/Sederajat	94.12	96.6	96.3	95.84	98.98	98.87	99,65
SMP/Sederajat	84.31	78.4	78.95	79.06	81.62	81.56	80,91

Sumber : Dinas Pendidikan 2021

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. berapapun usianya. yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2021 APK di Kabupaten Tangerang untuk tingkat SD/MI sebesar 107.04 menurun dari tahun 2020. APK tingkat SMP/MTs sebesar 101.98 meningkat dari tahun 2020. secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.33 :

Tabel 2.40

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tangerang Tahun 2015 - 2021

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	109.64	110.92	111,02	86.81	110,56	109,49	107,04
2	SMP/MTs	104,06	105,09	105,29	96,27	92,57	90.64	101,98

Sumber : Dinas Pendidikan 2021

c. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk. baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi. menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Indikator pendidikan ini bermanfaat untuk menunjukkan capaian hasil pembangunan pendidikan di suatu daerah. selain itu berguna pula untuk menyusun perencanaan penawaran tenaga kerja. terutama untuk mengetahui kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Tabel 2.41
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2020

No.	Pendidikan	Jumlah
1	≤ Sekolah Dasar (SD)	376.472
2	Sekolah Menengah Pertama	273.198
3	Sekolah Menengah Atas	280.606
4	Perguruan Tinggi	40.307
	Jumlah	970.583

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2021

Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tangerang tahun ajaran 2020/2021 untuk siswa TK sebanyak 18.396 siswa. tingkat RA sebanyak 12.437 siswa. penitipan anak sebanyak 101 anak. dan PAUD sebanyak 10.706 siswa. sehingga jumlah usia siswa PAUD se-Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 41.640 siswa. dengan jumlah usia penduduk 4-6 tahun sebanyak 266.021 siswa. Persentase partisipasi siswa PAUD yang ikut pendidikan dibandingkan dengan jumlah anak usia 4-6 tahun adalah sekitar 0.16%.

Tabel 2.42
Jumlah Usia Siswa TK/RA/PAUD di Kabupaten Tangerang
Tahun 2020/2021

URAIAN	SISWA
TK	19,806
KB	25,031
TPA	23
SPS	3,021
PKBM	9,899
SKB	89

Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id>

d. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Data jumlah sekolah di Kabupaten Tangerang sampai tahun ajaran 2020/2021 menurut data dapo.kemdikbud.go.id sebanyak 3.488 unit dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 3.245.619 jiwa dengan jumlah penduduk usia sekolah (4-18 tahun) sebanyak 993.819 jiwa. Rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Tangerang sebesar 0,003509693 (0,35%)

e. Rasio Guru-Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio Guru terhadap murid digunakan untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta melihat mutu pengajaran di kelas. Interpretasi dari Rasio guru terhadap murid menggambarkan semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Tabel 2.43
Rasio Guru/Murid Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	2016	22,953	634,061	0.0362
2	2017	22,532	563,750	0.039968
3	2018	23,160	553,747	0.041824
4	2019	23,276	563,750	0.041288
5	2020	28,114	634,061	0.04434

Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id>

f. Fasilitas Pendidikan

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam rangka mencapai keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di lingkungan sekolah. Penyediaan bangunan gedung yang memadai dan memenuhi standar merupakan salah satu upaya dalam memenuhi ketentuan minimum standar sarana prasarana yang disyaratkan oleh pemerintah.

Tabel 2.44
Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2020

Fasilitas Pendidikan	2020 Ganjil	2020 Genap
Ruang Kelas	21,372	21,397
Ruang Perpustakaan	1,360	1,373
Ruang Lab	1,601	1,593
Ruang Praktik	304	336
Ruang Pimpinan	2,099	2,118
Ruang Guru	2,802	2,858
Ruang Ibadah	977	972
Ruang UKS	744	730
Ruang Toilet	7,904	8,125
Ruang Gudang	1,138	1,147
Ruang sirkulasi	34	37
Tempat Bermain/Olahraga	316	324
Ruang TU	858	847

Fasilitas Pendidikan	2020 Ganjil	2020 Genap
Ruang konseling	114	112
Ruang OSIS	366	363
Ruang Bangunan	4,687	4,924

Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id>

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Tangerang menurut data yang diambil dari <https://dapo.kemdikbud.go.id> pada tahun ganjil 2020 meliputi ruang kelas sebanyak 21.372 unit, dengan kenaikan di tahun genap 2020 sebanyak 21.397 unit. Fasilitas berupa ruang perpustakaan sebanyak 1.360 unit di tahun ganjil 2020 dan meningkat di tahun genap 2020 menjadi 1.373 unit, fasilitas ruang guru juga bertambah ditahun 2020 genap sebanyak 2.858 unit, yang sebelumnya sekitar 2.802 unit. Fasilitas pendidikan di Kabupaten Tangerang meliputi Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dilengkapi dengan fasilitas Sanitasi Sekolah (Sanisek), fasilitas sanitasi ini merupakan perhatian Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap peningkatan kualitas sanitasi bagi usia sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.45
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	Jumlah
1	2017	2.632	4.701	392	245	271	8.241
2	2018	3.036	4.714	450	323	250	8.773
3	2019	3.268	4.566	536	481	0	8.851
4	2020	2.010	5.998	867	558	0	9.433
5	2021	4.291	5.476	13	9	0	9.789

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2021

Kondisi Bangunan Sekolah SD/MI di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2021 dengan kondisi baik sejumlah 4.291, kondisi rusak ringan sejumlah 5.476, kondisi rusak sedang sejumlah 13, dan kondisi rusak berat sejumlah 9. Dari data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang telah melakukan perbaikan terhadap bangunan Sekolah SD/MI.

Tabel 2.46
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik di Kabupaten Tangerang
Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	Jumlah
1	2017	61	88	10	7	7	173
2	2018	79	97	9	8	7	200
3	2019	99	99	8	14	8	228
4	2020	73	157	21	15	0	266
5	2021	2172	2262	16	4	0	4454

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2021

Dengan adanya data Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tangerang telah melakukan perbaikan terhadap bangunan Sekolah Pendidikan SMP/MTs. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 9 mengamanatkan setiap guru wajib memperoleh kualifikasi akademik minimal S1/D4. Selain kualifikasi akademik, UU tersebut mengamanatkan guru harus memiliki kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Tabel 2.47
Persentase Guru SD Memenuhi Pendidikan S1 Tahun 2017-2020

Guru	2017	2018	2019	2020
Guru > S1	11,216	11,240	11,610	11,761
Guru	12,588	12,462	12,638	12,677
Persentase S1	89	90	92	93

Sumber : <https://dapo.kemdikbud.go.id>

Tabel 2.48
Persentase Guru SMP Memenuhi Pendidikan S1 Tahun 2017-2021

Guru	2017	2018	2019	2020	2021
Guru > S1	4,15	4,394	4,636	4,718	4.730
Guru	4,56	4,74	4,921	5,089	5418
Persentase S1	91	93	94	93	87.30

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2021

Untuk 2021, kualitas guru mengalami peningkatan jenjang Strata 1 dibanding 2020. ini menunjukkan kesadaran para guru dalam menambah stratanya.

2. Kesehatan

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Dari tahun 2014 sampai dengan 2021 Angka Kelangsungan Hidup Bayi semakin meningkat.

Tabel 2.49
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kabupaten Tangerang
Tahun 2014-2021

No	Tahun	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
1	2014	0.711
2	2015	0.715
3	2016	0.753
4	2017	0.715
5	2018	0.753
6	2019	0.772
7	2020	0,997
8	2021	0,997

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Tangerang Tahun 2021

Untuk angka kematian bayi menunjukkan jumlah yang hampir sama dengan tahun sebelumnya.hal ini menandakan perlunya peningkatan edukasi ke masyarakat tentang cara merawat bayi dengan benar, termasuk kewajiban imunisasi.

b. Kematian Bayi

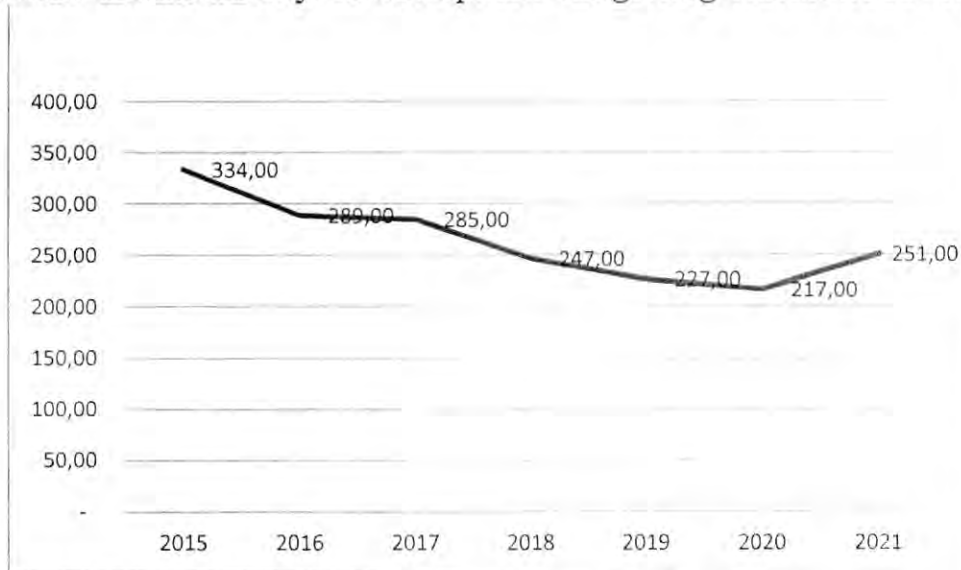
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tangerang sebesar 0.2/1000 kelahiran hidup. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah kematian bayi tahun 2015 s/d tahun 2021.

Tabel 2.50
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

Tahun	Nilai
2015	334
2016	289
2017	285
2018	247
2019	227
2020	217
2021	251

Sumber : Dinas Kesehatan 2021

Gambar 2.19
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021



Sumber Data: Profil Dinas Kesehatan 2021

Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah kematian bayi dibawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Pada gambar 2.6 terlihat jumlah kematian bayi di Kabupaten Tangerang menurun sejak Tahun 2017 sebesar 285 menjadi 247 pada tahun 2018 dan terus menurun pada tahun 2019 sebesar 227. Tahun 2020 jumlah kematian bayi menurun menjadi 203 jiwa .Tahun 2021 kematian bayi meningkat menjadi 251.

Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya angka kelahiran dan terjadinya covid 19 ditahun 2020.sehingga kesejahtraan keluarga muda mengalami penurunan.kurangnya perhatian ibu ibu dalam merawat anaknya. Penyebab kematian bayi pada tahun 2021. dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.51
Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021

No	Penyebab Kematian Bayi	Jumlah						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	BBLR	195	138	120	122	42	84	88
2	ASFIKSIA	68	65	70	42	67	50	76
3	TETANUS	3	2	3	2	1	1	1
4	SEPSIS	22	23	22	16	39	24	24
5	KELAINAN KONGINETAL	21	26	49	37	20	34	32
6	IKTERUS			1	1	2	1	0
7	PERDARAHAN INTRAKRANIAL			1			-	0
8	PNEUMONIA			2	4	3	-	2

No	Penyebab Kematian Bayi	Jumlah						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	DIARE			4	2	0	-	5
10	LAIN-LAIN	25	35	13	21	54	9	21
	Jumlah	334	289	285	247	228	203	251

Sumber :Kesga –Kesmas Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2013-2021

Dari data diatas menunjukkan peningkatan kematian bayi terbanyak dari Asfiksia, BBLR, dan Diare. Hal diatas menunjukkan perlunya edukasi kepada ibu ibu dan penambahan Puskesmas, penambahan jumlah tenaga kesehatan seperti Dokter anak, bidan.

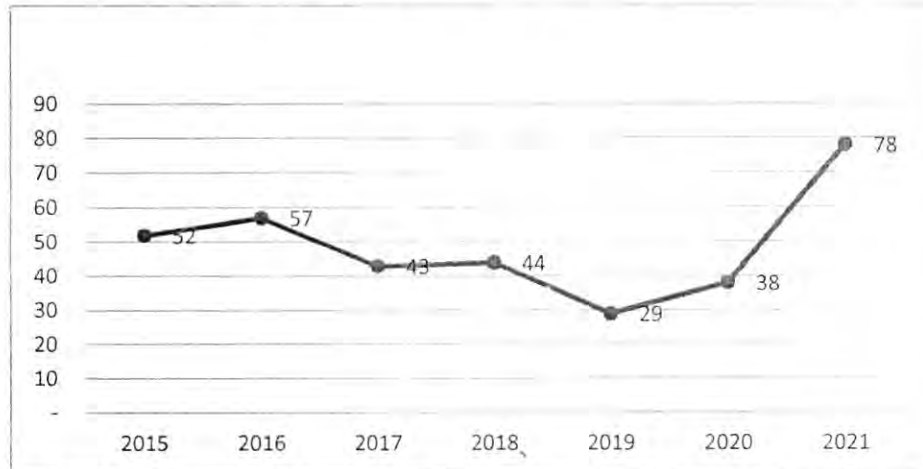
Penyebab terbanyak kematian Bayi pada tahun 2019 adalah asfiksia, dan urutan kedua adalah BBLR. Berbanding terbalik dengan kondisi di tahun 2018 yang menempatkan BBLR sebagai penyebab kasus kematian terbanyak. Tahun 2020 penyebab kematian bayi didominasi oleh BBLR. Hal ini disebabkan karena kesadaran ibu-ibu hamil yang mengikuti anjuran untuk memeriksakan kehamilannya secara berkala. Untuk tahun 2021 kematian bayi banyak disebabkan BBLR, Asfiksia, dan Diare.

c. Angka Kematian Ibu

AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia berdasarkan SDKI tahun 2012 sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup dan menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan SUPAS tahun 2015. Upaya menurunkan angka kematian ibu adalah salah satu prioritas dalam target SDGs yaitu pada tahun 2030 mengurangi angka kematian ibu hingga dibawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan RPJMN tahun 2024 target AKI menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini karena peran semua pihak dalam bergandengan tangan menyelamatkan ibu dan bayi di Kabupaten Tangerang. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah kematian ibu tahun 2015 s/d tahun 2020.

Gambar 2.20
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021



Sumber Data : Kesga –Kesmas Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

Penyebab kematian ibu di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.52
Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Penyebab Kematian Ibu	Jumlah
Perdarahan	22
Hipertensi dalam kehamilan, PEB/Eklamsia	11
Komplikasi non obstetri	2
Infeksi	1
Gangguan Sistem peredaran darah (Jantung, Stroke dll)	1
Metabolik	1
Covid 19	32
TB Paru	3
HIV	1
Dehidrasi	1
Keracunan	1
Cancer	1
Abortus Molahidatidosa	1
JUMLAH	78

Sumber Data: Kesga –Kesmas Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

Tahun 2021 penyebab terbanyak kematian adalah Covid-19. Dengan adanya Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 menyebabkan menjadi penyumbang kematian ibu nomor 1 di Kabupaten Tangerang, yaitu sebanyak 32 kasus kematian ibu hamil terkonfirmasi Positif Covid-19. Kami berupaya untuk mencegah penularan Covid-19 pada ibu hamil dengan gencar melakukan penyuluhan di masyarakat tentang WUS menunda kehamilan di masa Pandemi Covid-19 ini, dan pada ibu hamil diberikan pengertian betapa

pentingnya untuk berada di rumah saja, selalu menjalankan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pada ibu hamil resiko tinggi dilakukan pemeriksaan swab PCR Cito sebagai persyaratan untuk rujukan Ibu hamil ke Rumah Sakit, juga dilakukan pemeriksaan swab antigen pada ibu hamil yang sudah memasuki usia kehamilan 38 minggu sehingga dapat menjaring ibu hamil yang positif Covid 19 secara dini. Seluruh kasus kematian ibu (38 kasus) sudah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di tingkat kabupaten oleh tim AMP Kabupaten Tangerang sebagai pembelajaran untuk mencegah kematian serupa di masa yang akan datang.

d. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Rasio posyandu per satuan balita merupakan jumlah posyandu untuk setiap 1000 orang balita. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita tahun 2020 sebesar 0.6.

Tabel 2.53
Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita
Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021

No	Tahun	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita
1	2016	0,042361111
2	2017	-
3	2018	0,04375
4	2019	0,6
5	2020	0,6
6	2021	0,791

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2021

Adanya peningkatan rasio pelayanan posyandu, menandakan pelayanan posyandu berjalan dengan baik.

e. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/pustu). Seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang sudah memiliki puskesmas. bahkan di beberapa kecamatan memiliki 2 puskesmas dengan total sebanyak 44 unit. Jumlah ini terdiri dari puskesmas rawat inap 37 unit dan non rawat inap 46 unit sedangkan jumlah Kecamatan sebanyak 29 Kecamatan. Berdasarkan Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 1976. kapasitas layanan satu

puskesmas di satu kecamatan dengan jumlah penduduk antara 30.000 jiwa sampai 50.000 jiwa. Kabupaten Tangerang Tahun 2019 jumlah puskesmas sebanyak 44 unit yang tersebar diseluruh kecamatan.

Jumlah Puskesmas yang dibutuhkan didasarkan pada rata-rata penduduk 30.000 jiwa adalah sebanyak 71 unit untuk jumlah penduduk 3.800.787 jiwa. artinya Puskesmas yang tersedia masih kurang kebutuhan sebanyak 27 unit. jadi rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2021 adalah 1 : 6.351 Selain itu tingkat pelayanan dan fasilitasnya perlu ditingkatkan. Rasio Puskesmas. Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021. secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.54
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Klinik
di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No.	Fasilitas Kesehatan	2021
1	Puskesmas Rawat Inap	37
2	Puskesmas Non Rawat Inap	46
3	Puskesmas Pembantu	46
4	Klinik Pratama	469
5	Klinik Utama	58
	Total	656
	Jumlah Penduduk	3.245.617
	Rasio	1:4.947

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Tangerang, 2021

f. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio Rumah sakit per satuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk. penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2020 sebanyak 3.245.617 jiwa jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Tangerang sebanyak 20 unit yang terdiri dari Rumah sakit Umum pemerintah (3 unit). rumah sakit swasta dan rumah sakit ibu dan anak (21 unit), sehingga rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Tangerang tahun 2020 sebesar 0.7 artinya jumlah rumah sakit di Kabupaten Tangerang belum memenuhi dari sisi jumlah serta kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan, terutama untuk

RSU Tangerang dan RSUD Balaraja yang menjadi rumah sakit rujukan regional provinsi.

Tabel 2.55
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang
Tahun 2015-2021

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah RSU (Pemerintah)	2	2	2	3	3	3
2	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	19	20	23	24	17	27
3	Jumlah Penduduk	3.264.776	3.362.720	3.477.495	3.584.770	3.245.617	3.800.787
4	Rasio	1 : 155466	1 : 152851		1:149.365	1:162.281	1:140763

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2021

Adanya penambahan jumlah rumah sakit di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk, hal ini dapat dilihat dari rasio yg cenderung turun dibandingkan tahun 2020.

g. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan Dokter baik dokter umum ataupun spesialis dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk.

Tabel 2.56
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang
Tahun 2016-2021

No	Tahun	Rasio Dokter (spesialis+umum)/ 1000 penduduk	Rasio Dokter Gigi (termasuk Dokter Gigi Spesialis)/1000 penduduk
1	2016	0.0523958333	0.0672453704
2	2017	0.0531828704	0.0619328704
3	2018	-	-
4	2019	0.0490162037	0.0804976852
5	2020	0.0529513889	0.0701851852
6	2021	0,734836714	0,107837673

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2021

Dari perbandingan rasio jumlah Dokter Umum dan Dokter Spesialis antara tahun 2020 dan 2021, maka dapat disimpulkan jumlah Dokter Umum dan Dokter Spesialis makin meningkat.

h. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk.

Tabel 2.57
Rasio Tenaga Medis Bidan dan Perawat per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021

No	Tahun	Rasio Tenaga medis bidan/ 100.000 penduduk	Rasio tenaga medis perawat/ 100.000 penduduk
1	2016	44.98	47.62
2	2017	-	-
3	2018	73.95	61.57
4	2019	51.92	77,43
5	2020	56,34	98,7
6	2021	59,28	116,19

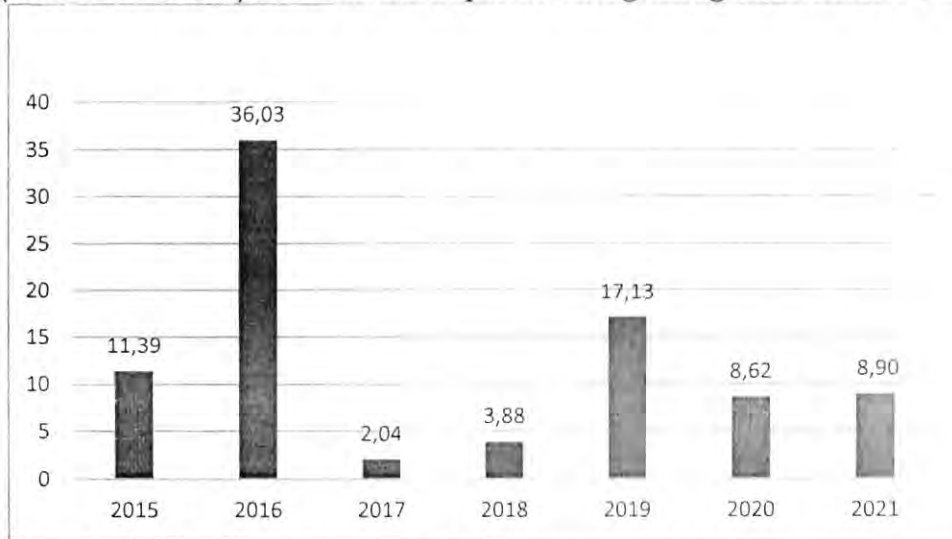
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2021

Untuk Ratio tenaga medis Bidan pada tahun 2021 mengalami jumlah peningkatan dibanding tahun 2020 yaitu 2,94. Sedangkan untuk Ratio tenaga medis Perawat pada tahun 2021 mengalami jumlah peningkatan dibanding tahun 2020 yaitu 17,49.

i. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD dititik beratkan pada kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di semua wilayah, dan pemantauan jentik berkala untuk mencapai angka bebas jentik sesuai target (>95%), kegiatannya dilakukan dengan melakukan Sosialisasi dan Pembinaan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik khususnya di wilayah –wilayah endemis DBD, melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan melaksanakan Fogging Fokus sesuai kriteria dari hasil penyelidikan Epidemiologi sebagai upaya untuk memutus rantai penularan DBD yang di dahului dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat ,Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Larvasidasi (pemberian abate untuk membunuh jentik nyamuk pada tempat –tempat penampungan air) dan dilanjutkan fogging fokus dengan radius 200 m.

Gambar 2.21
IR (Incidence Rate) DBD di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

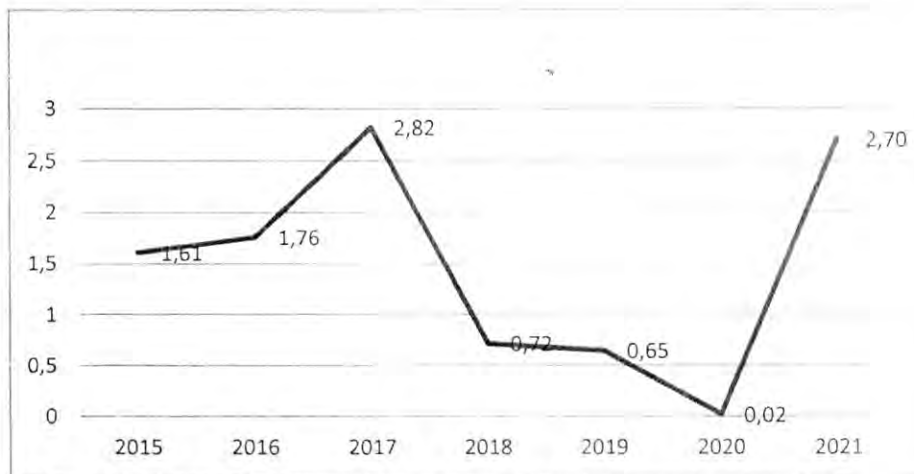


Sumber

Data: P2P Dinas Kesehatan Kab. Tangerang 2021

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa angka kesakitan akibat DBD tahun 2021 masih dalam batas normal yaitu $\leq 49 / 100.000$ penduduk ($8,9 / 100.000$ penduduk) sesuai dengan indikator renstra Kabupaten Tangerang $IR = \leq 49 / 100.000$ Penduduk.

Gambar 2.22
Grafik Case Fatality Rate /Angka kematian (CFR) DBD di Kabupaten Tangerang Tahun 2015 - 2021



Sumber : Data P2P Dinas Kesehatan Kab. Tangerang 2021

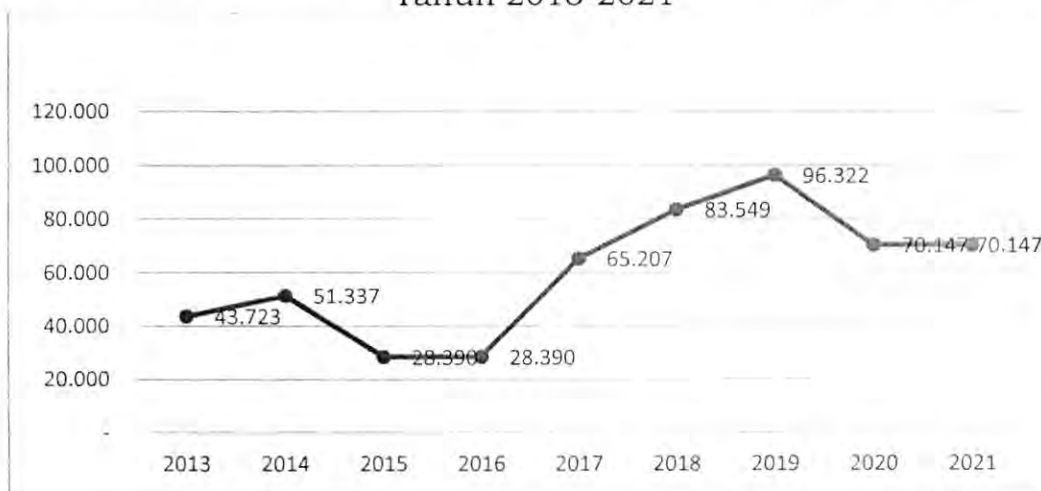
Angka Kematian (AK)/Case Fatality Rate (CFR) kasus DBD 1 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu mencapai 2,7 % pada tahun 2021. Dibandingkan tahun 2020 0.2%. Kemudian dari tahun tahun 2018 ke 2019 mulai menurun yaitu 0,1 % dan terus menurun sampai menjadi 0,02 % pada tahun 2020 . Angka kematian kasus DBD di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 di atas target nasional $>1\%$.

j. Penderita diare yang ditangani

Berdasarkan hasil kegiatan Rapid Survey Diare yang dilaksanakan pada tahun 2015, diketahui bahwa angka kesakitan diare pada semua umur adalah 270 per 1000 penduduk, angka kesakitan diare pada balita adalah 843 per 1000 penduduk. Selain itu diare juga merupakan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dari hasil pengumpulan data melalui rekapitulasi laporan bulanan diare di wilayah Kabupaten Tangerang, menunjukkan hasil sebagai berikut.

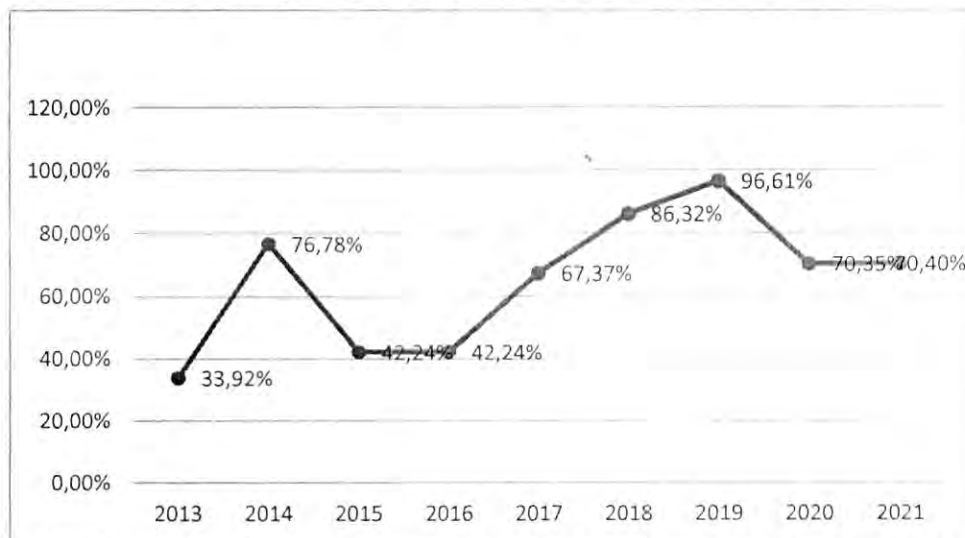
Gambar 2.23
Penemuan Kasus Diare Semua Umur Di Kabupaten Tangerang
Tahun 2013-2021



Sumber: Bid.P2- P2P Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penderita diare semua umur yang dilayani di Puskesmas dan kader dari tahun 2020 ke 2021 cenderung mengalami stagnan. Meskipun jumlah kasus yang mendapatkan pelayanan cenderung tetap, namun cakupan belum sesuai target nasional yaitu 100%. Cakupan penderita diare paling rendah berada pada tahun 2016 yaitu sebanyak 28.390 kasus pada persentasi 42,24 %, sedangkan paling tinggi ada pada tahun 2019 yaitu 99.703 kasus dengan persentasi 70,35 %. Berikut presentase cakupan penderita diare semua umur di Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.24
Persentase Cakupan Kasus Diare Semua Umur
Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021

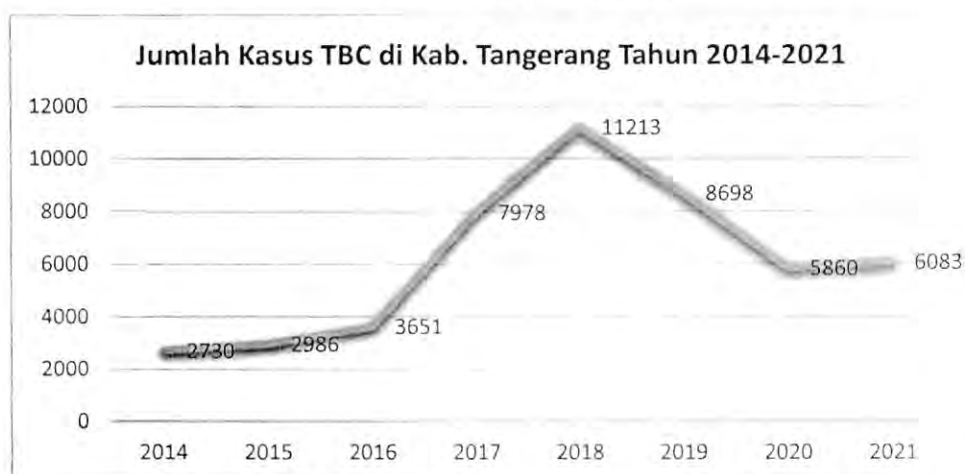


Sumber : Bid.P2-P2P Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

k. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

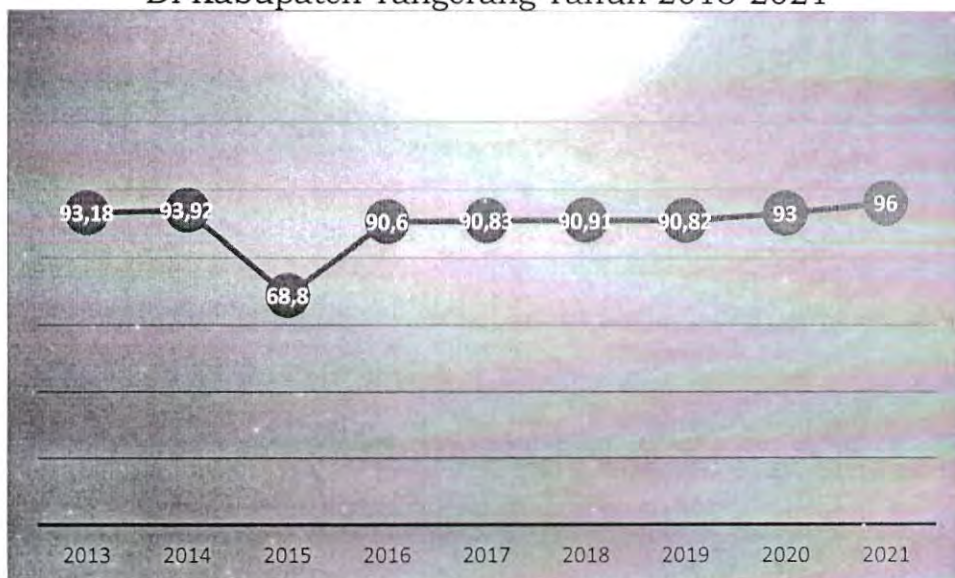
Angka penemuan kasus Tuberkulosis adalah jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan diantara perkiraan jumlah semua kasus TB (insiden). Pada akhir tahun 2021 diperoleh jumlah kasus yang berhasil di catat sebanyak 6.083 kasus, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus TB dari tahun sebelumnya.

Gambar 2.25
Jumlah Kasus Tuberkulosis Tercatat dan Diobati di Kabupaten Tangerang
Tahun 2014 - 2021



Sumber Data: Bid P2P Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

Gambar 2.26
Angka Kesembuhan dan Keberhasilan Pengobatan TB
Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021

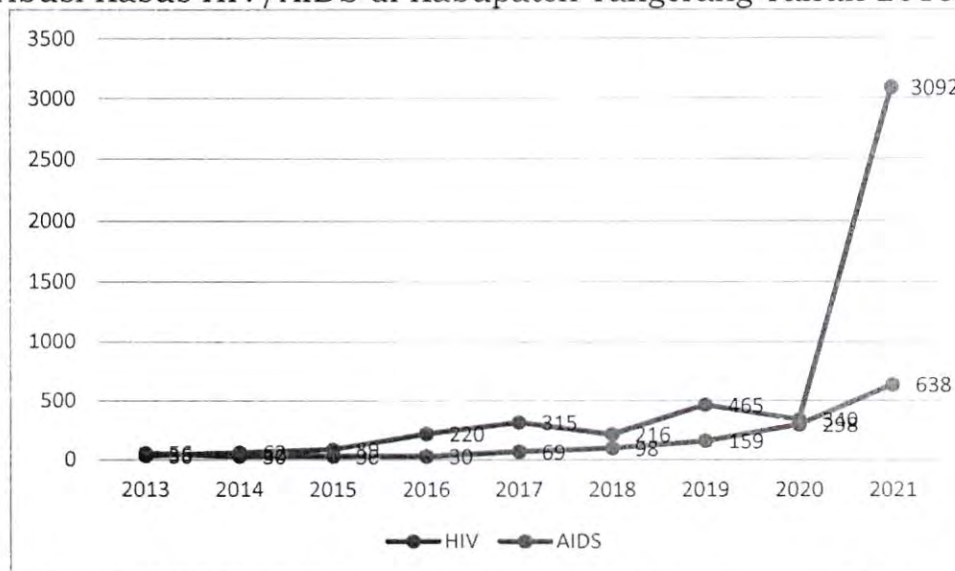


Sumber Data: Bid P2P Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

1. Cakupan Penemuan dan Penanganan Kasus HIV/AIDS

Kabupaten Tangerang mempunyai Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) HIV 44 Puskesmas diantaranya 44 puskesmas dan 15 Rumah Sakit yang menjadi Layanan Konseling dan Tes (KT). Serta 16 puskesmas dan 5 Rumah sakit yang menjadi Layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP).

Gambar 2.27
Distribusi Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021



Sumber: Bid.P2- P2P Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

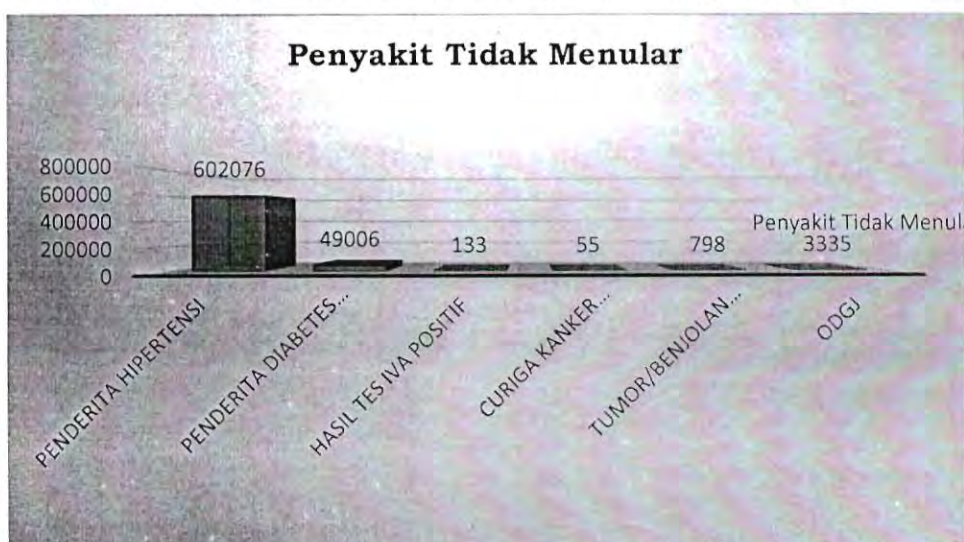
Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus HIV yang sangat drastis dari 465 kasus ke 3092 kasus dan terjadi kenaikan kasus AIDS dari 298 kasus ke 638 kasus. Hal ini terjadi karena sudah banyak yang

tahu status HIV tetapi tidak akses Anti Retroviral (ARV) sehingga banyak yang menjadi kasus AIDS.

m. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit kronis yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang. PTM diantaranya adalah Hipertensi, Diabetes Melitus, Kanker Leher Rahim, Kanker Payudara, Tumor/Benjolan Payudara, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). PTM merupakan hampir 70% penyebab kematian di dunia.

Gambar 2.28
Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Tangerang Tahun 2021



Sumber Data: Bid P2P Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

n. Penyakit Menular lainnya Potensial Wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Indikator yang harus dicapai dalam penanggulangan kejadian luar biasa adalah kejadian luar biasa (KLB) harus bisa ditanggulangi < 24 jam, menurunnya KLB dengan CFR menurun < 1 % saat KLB terjadi.

Tabel 2.58
Distribusi Penyakit Menular lainnya Potensial Wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) Tahun 2021

NO	JENIS KLB	2019	KASUS	2020	KASUS	2021	KASUS
		JUMLAH KECAMATAN		JUMLAH KECAMATAN		JUMLAH KECAMATAN	
1	Keracunan Makanan	3	4	2	2		
2	Hepatitis A	1	6	0	0		
3	Covid-19	0	0	29	5514	29	22.074

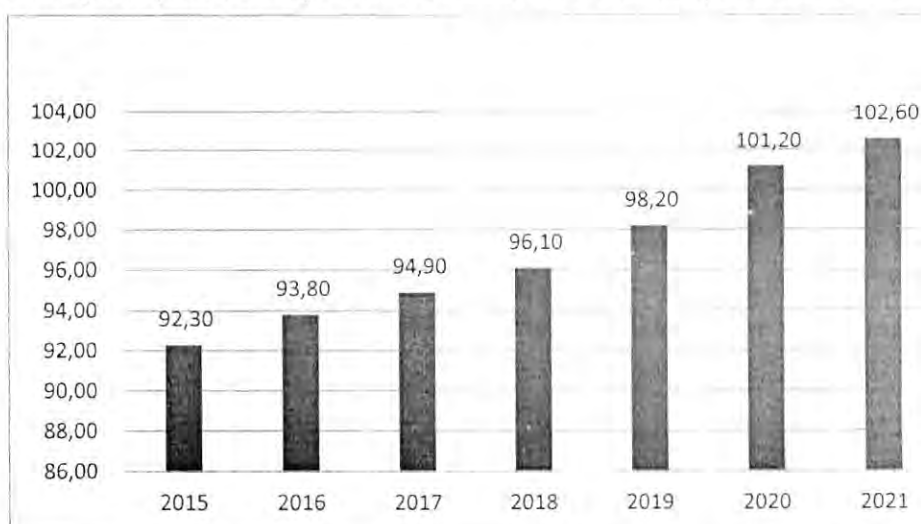
Sumber Data: Bid.P2P –SIPK Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

Telah terjadi Penyakit Menular lainnya Potensial Wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) Tahun 2021 yaitu Covid-19, dengan jumlah 22.074 di seluruh Kecamatan Kabupaten Tangerang. Terjadi peningkatan Penyakit Menular yang luar biasa dibandingkan dengan Tahun 2020, hal ini dikarenakan banyaknya warga di wilayah Kabupaten Tangerang yang terpapar Covid-19.

o. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga.

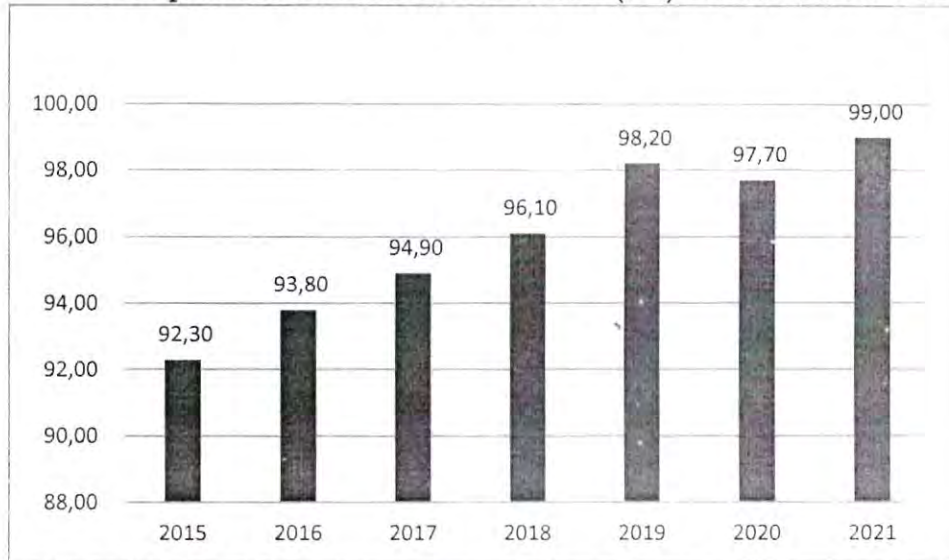
Gambar 2.29
Cakupan (Dalam %) Pemeriksaan Ibu Hamil (K1) Tahun 2015-2021



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

Dari grafik diatas diperoleh cakupan K1 pada tahun 2021 adalah 102,60 % meningkat dibandingkan cakupan K1 tahun 2020.

Gambar 2.30
Cakupan Pemeriksaan Ibu Hamil (K4) Tahun 2015-2021



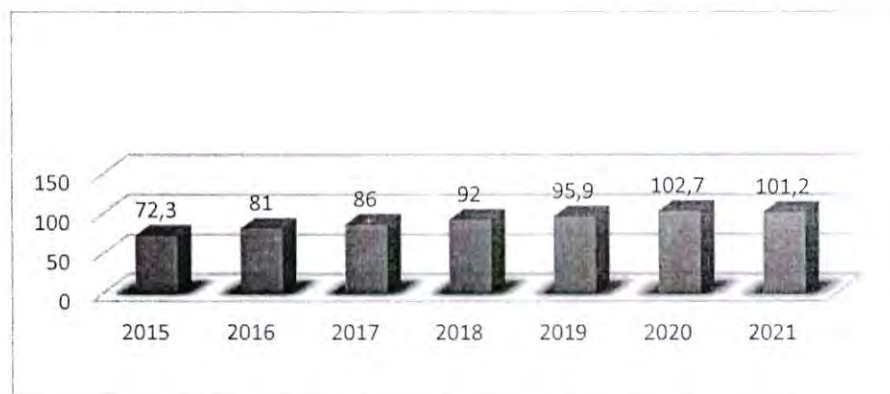
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

Dari grafik diatas diperoleh persentase kunjungan ibu hamil K4 pada Tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 99%. Kenaikan cakupan K4 memperlihatkan bahwa pelayanan kesehatan lebih optimal.

p. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan meningkat setiap tahun, pada tahun 2021 mencapai 101,2%, penurunan ini dikarenakan menurunnya jumlah persalinan.

Gambar 2.31
Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

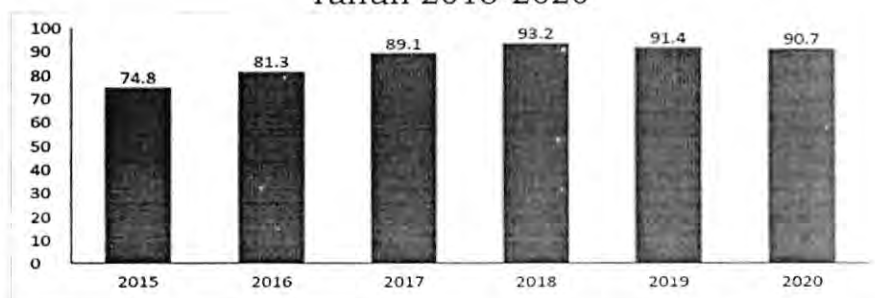


Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

Pada grafik di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Tangerang 90,7%. Menurun dibandingkan cakupan penanganan komplikasi kebidanan tahun 2019 sebesar 91,4%. Dikarenakan kondisi Pandemi Covid 19 yang menyebabkan

keterbatasan. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di wilayah Kabupaten Tangerang pada tahun 2015-2019 digambarkan pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.32
Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Tangerang
Tahun 2015-2020



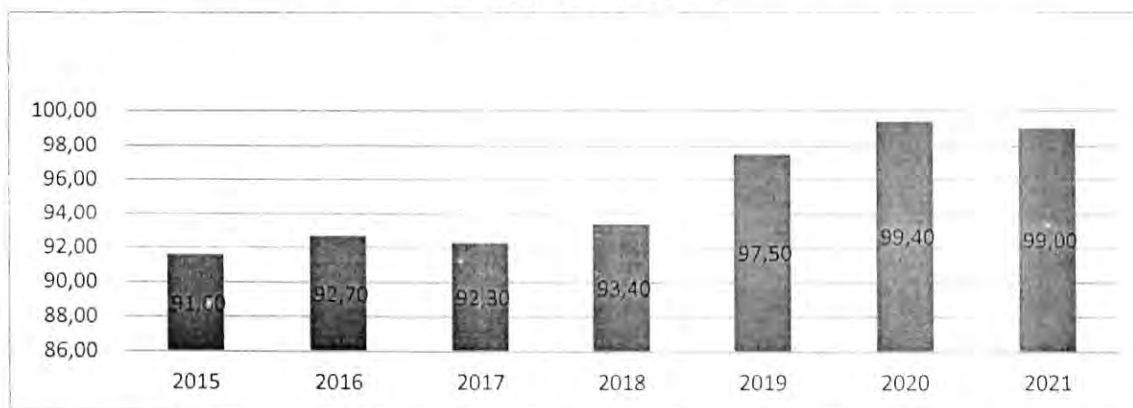
Sumber Data : Bid.Kesmas- Kesga Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2020

Meningkatnya cakupan pertolongan ibu bersalin dengan bantuan tenaga kesehatan yang kompeten merupakan salah satu upaya untuk menurunkan AKI dan AKB.

q. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari keempat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Cakupan pelayanan ibu nifas dari Tahun 2015 sampai 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2.33
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Tangerang
Tahun 2015-2021



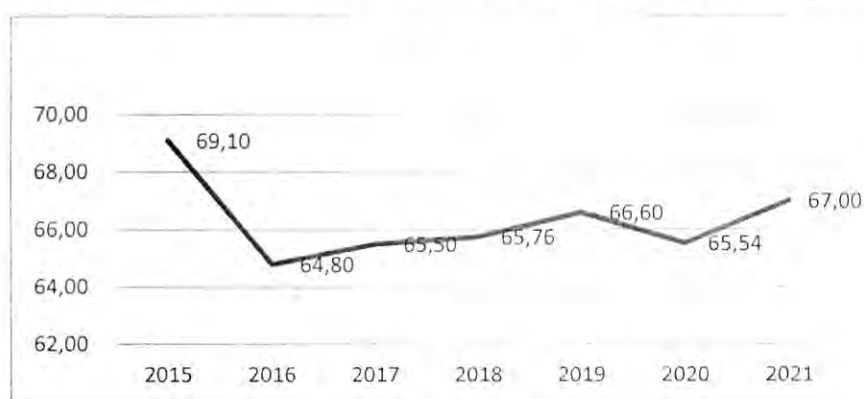
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

Dari grafik tersebut diatas terlihat bahwa cakupan pelayanan ibu nifas di tahun 2021 sebesar 99,% meningkat dibanding cakupan tahun 2020 sebesar 97,5%.

r. Pelayanan Kontrasepsi

Cakupan Peserta KB Aktif pada tahun 2019 sebesar 66,6% dan menurun menjadi 65,54% pada tahun 2020. Permasalahan dalam pencapaian peserta KB aktif antara lain karena masih tingginya kasus Drop Out (DO) KB dan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang masih kurang pada peserta KB aktif. Untuk tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 67 %.

Gambar 2.34
Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

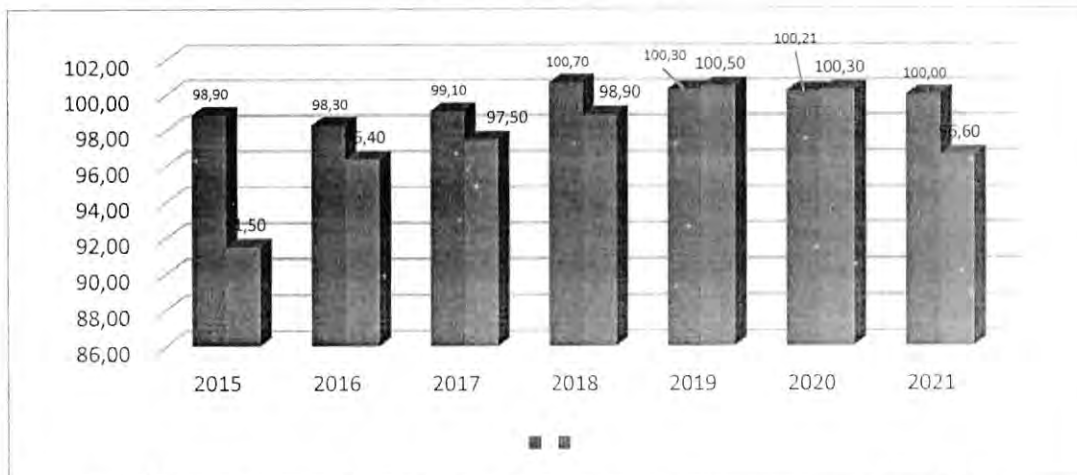


Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

s. Pelayanan Kesehatan Neonatal

Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai dengan 28 hari setelah lahir.

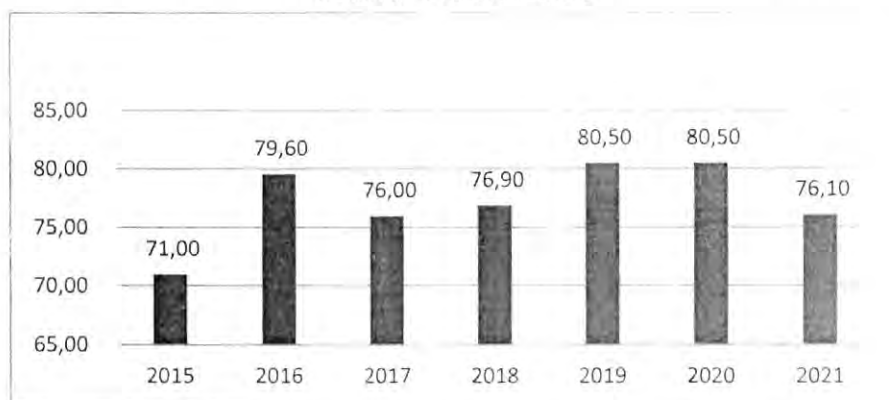
Gambar 2.35
Cakupan Kunjungan Neonatus KN1 dan KN Lengkap di Kabupaten Tangerang
Tahun 2015-2021



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

Cakupan KN lengkap tahun 2020 100,2% dan KN Lengkap 100,3% telah mencapai target SPM pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 100%. Peningkatan kunjungan KN 1 dan KN lengkap ini oleh karena peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan kunjungan dan keaktifan tenaga kesehatan dalam melakukan kunjungan terhadap Neonatus. Untuk tahun 2021 mengalami turun sebesar 761%.

Gambar 2.36
Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus di Kabupaten Tangerang
Tahun 2015-2021



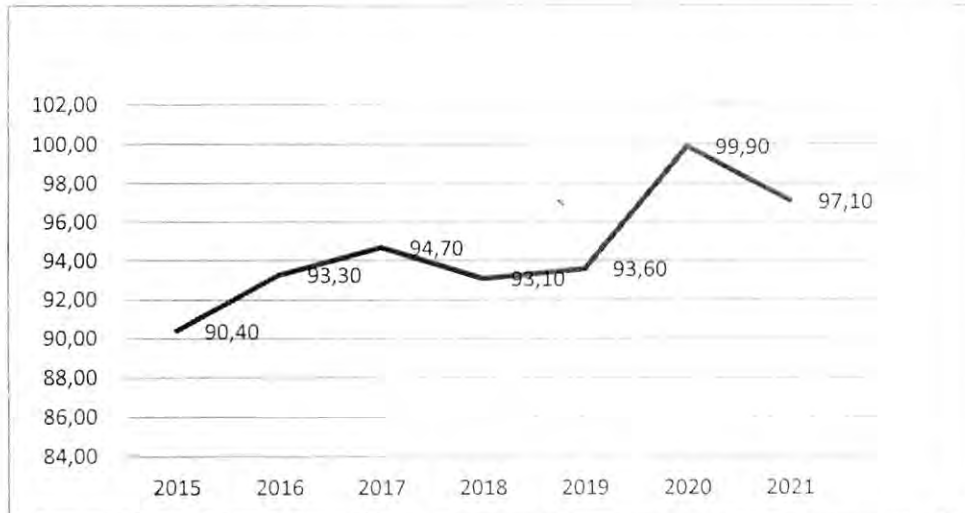
Sumber Data : Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus Tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya yaitu 76,10%, hal ini menunjukkan bahwa telah menurunnya angka komplikasi pada neonatus karena ibu lebih sadar akan pemeriksaan kehamilan dan pasca persalinan, dan perawatan pada bayi baru lahir.

t. Pelayanan Kesehatan Bayi

Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2020 sebesar 99,9% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 93,6%. Untuk 2021 mengalami peningkatan sebesar 97,1%.

Gambar 2.37
Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

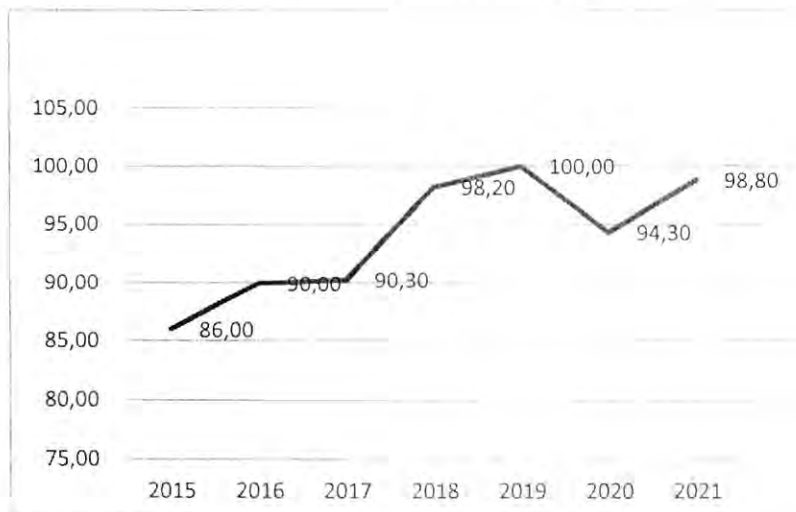


Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

u. Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan pelayanan anak Balita mengalami penurunan tahun 2020 menjadi 94,3 % dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 100% dan telah mencapai target SPM pelayanan kesehatan Balita sebesar 94,3%. Untuk tahun 2021 cakupan pelayanan anak balita mengalami kenaikan 98,8%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran ibu-ibu untuk merawat bayinya semakin baik.

Gambar 2.38
Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kabupaten Tangerang Tahun 2015 - 2021



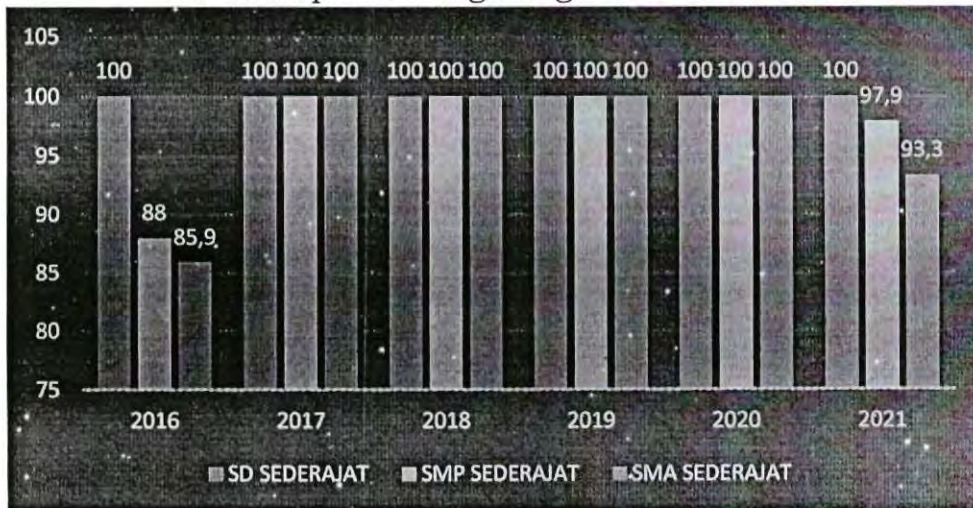
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

v. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Cakupan sekolah yang mendapatkan pelayanan penjangkaran kesehatan pada tahun 2021 mencapai 100% adalah SD Sederajat. Sedangkan untuk SMP Sederajat 97,9 %, dan SMA sederajat : 93,3 %, hal ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya karena adanya pembelajaran jarak jauh disebabkan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pihak puskesmas tidak bisa bertemu dengan para murid sekolah.

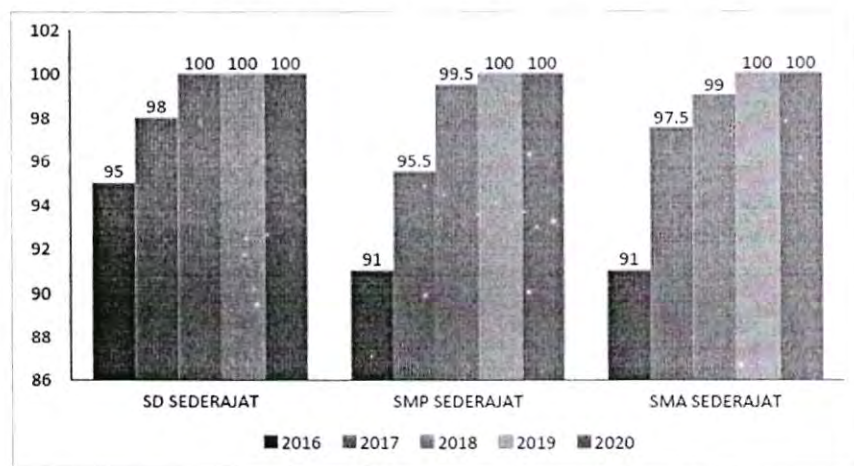
Dibawah ini adalah cakupan sekolah yang mendapatkan pelayanan penjangkaran Kesehatan di Kabupaten Tangerang tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.

Gambar 2.39
Cakupan Sekolah Yang Mendapatkan Pelayanan Penjangkaran Kesehatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Th.2021

Gambar 2.40
Hasil Penjangkaran Siswa/I kelas 1, 7 dan 10 SD, SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020



Sumber Data : Kesga –Kesmas Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2020

w. Pemantauan Status Gizi

Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk tahun 2021 mengalami penurunan di banding tahun 2020. Keadaan ini menunjukkan adanya komitmen menyeluruh dari lintas sektor dalam menanggulangi masalah gizi di Kabupaten Tangerang melalui advokasi dan kegiatan gizi bersumber daya masyarakat melalui Pos Gizi, KP ASI dan KEPING EMAS. Gambaran status gizi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

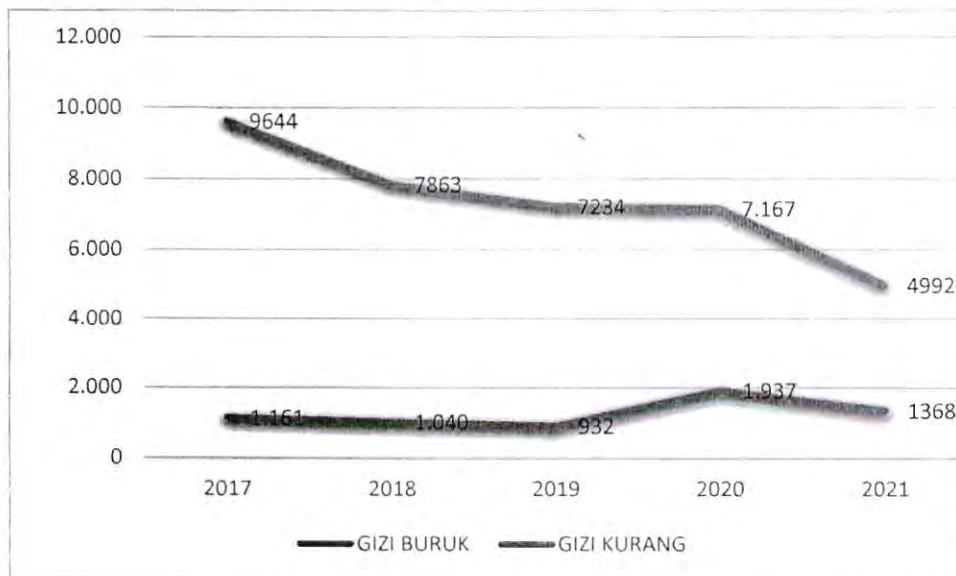
Tabel 2.59
Gambaran Status Gizi Pada Balita Di Kabupaten Tangerang
Tahun 2017-2021

Tahun	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Gizi Baik		Gizi Lebih	
	N	%	N	%	N	%	N	%
2017	1.161	0,38	9644	3,14	294.027	95,68	2479	0,81
2018	1.040	0,33	7863	2,51	296.092	94,66	2.134	0,68
2019	932	0,29	7234	2,28	305.893	96,22	2.131	0,67
2020	1.937	1,1	7.167	3,9	160.942	88,4	12.013	6,6
2021	1368	0,64	4992	2,34	187,040	87,59	20.136	9,43

Sumber: Bid.Kesmas- Gizi Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

Pada Tahun 2021 telah terjadi penurunan pada Gizi Buruk dan Gizi Kurang pada Balita, sedangkan telah terjadi peningkatan pada Gizi Baik dan Gizi Lebih pada Balita. Maka ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan warga Kabupaten Tangerang makin meningkat.

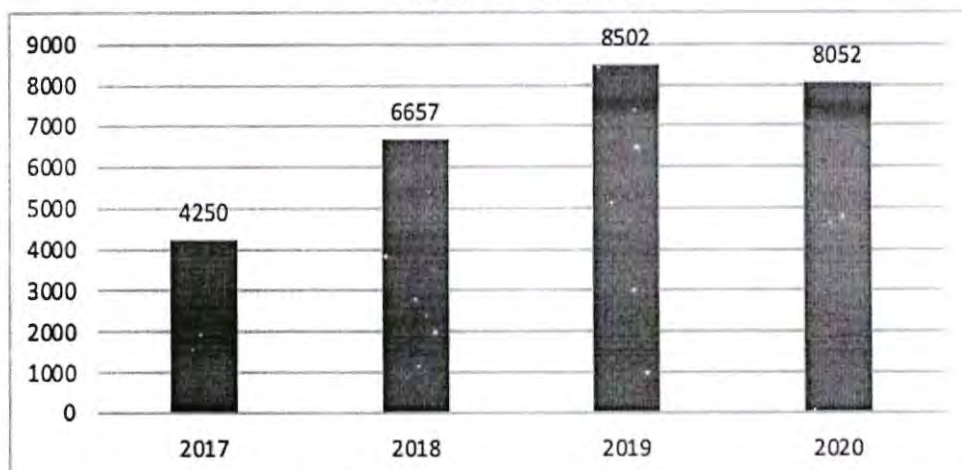
Gambar 2.41
Trend Gizi Buruk dan Gizi Kurang Berdasarkan Metode (BB/U) di Wilayah
Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021



Sumber :

Bid.Kesmas- Gizi Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2021

Gambar 2.42
Jumlah balita yang Mendapatkan PMT Balita APBD Kabupaten Tangerang
Tahun 2017-2020



Sumber:

Bid.Kesmas- Gizi Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2020

x. Pelayanan Imunisasi

Cakupan imunisasi per antigen pada Tahun 2021 tetap memenuhi target yang ditetapkan sebesar 103.2% walaupun mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 96.5%. Hal ini disebabkan oleh ditetapkannya Pandemi Coronavirus sehingga membatasi pergerakan masyarakat salah satunya dalam hal mengakses pelayanan Kesehatan.

Tabel 2.60
Cakupan Imunisasi dasar pada bayi 0-11 bulan Di Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

No	Jenis Imunisasi	Cakupan (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	BCG	104,7	101,8	107,5	98,5	96,6	101,8
2	Hepatitis B O	97,0	99,7	106,7	98,5	102,3	106,2
3	DPT - HB III	102,6	99,8	100,9	98,5	95,6	98,1
4	Polio IV	103,3	101,1	100,9	98,5	95,6	101,1
5	Campak	101,9	89,9	100	98,5	96,5	103,2

Sumber Data: Seksi SIPK Dinas Kesehatan Kab. Tangerang, 2021

Tabel 2.61
*Universal Child Immunization (UCI) Desa Di Kabupaten Tangerang
Tahun 2014-2021*

NO	TAHUN	JUMLAH DESA	JUMLAH DESA UCI	% DESA UCI
1	2014	274	215	78,5
2	2015	274	262	95,6
3	2016	274	262	95,6
4	2017	274	269	98,2
5	2018	274	269	98,2
6	2019	274	269	98,2
7	2020	274	249	90,9
8	2021	274	261	95,26

Sumber Data: Seksi SIPK Dinas Kesehatan Kab. Tangerang, 2021

UCI (*Universal Child Immunization*) adalah Indikator lain, selain dari imunisasi dasar lengkap, untuk mengukur keberhasilan pemberian imunisasi. UCI desa/kelurahan adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Upaya imunisasi perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi (*herd immunity*) sehingga penyakit-penyakit yang dapat di imunisasi (PD3I) dapat dibasmi, dieliminasi atau dikendalikan, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan upaya imunisasi dapat semakin efektif bermutu dan efisien.

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa tahun 2021 capaian Desa UCI sebesar 261 Desa (95,26%) terjadi peningkatan 4,36% dari capaian tahun 2020.

y. Cakupan Universal Health Coverage

Dalam rangka mendukung Universal Health Coverage Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, seluruh penduduk Kabupaten Tangerang harus memiliki Jaminan Kesehatan Nasional JKN-KIS yang dilakukan secara bertahap. Sesuai Peraturan Bupati Nomor : 38 tahun 2016 tentang Integrasi program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang Kedalam Jaminan Kesehatan Nasional, sejak tahun 2016 secara bertahap peserta program Kartu Sehat Pada Jamkesda Kabupaten Tangerang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan. Dengan jumlah peserta sebagai berikut :

Tabel 2.62
Jumlah Peserta JKN Terintegrasi di Kabupaten Tangerang
Tahun 2016-2021

NO	TAHUN	SK BUPATI	JUMLAH PESERTA JKN TERINTEGRASI
1.	2016	Nomor : 440/Kep.414-HUK/2016, tentang Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2016	37.076
2.	2017	Nomor : 440/KEP.325-HUK/2017, tentang Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2017	49.699
3.	2018	Nomor : 440/Kep. 159-Huk/2018, Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2018	80.000
4.	2019	Nomor : 440/Kep. 771-Huk/2019 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2019	90.000
5.	2020	Nomor : 440/Kep. 771-Huk/2019 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2019	90.000
6.	2021	Nomor : 440/Kep. 771-Huk/2019 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Program Kartu Sehat Kabupaten Tangerang yang diintegrasikan ke dalam JKN BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2019	90.000

Sumber Data : UPTD.PJK Dinas Kesehatan Kab. Tangerang 2021

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan sampai dengan bulan Desember 2021 dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang 3.105.042 jiwa sebanyak 83,21%, atau 2.583.755 jiwa telah menjadi peserta JKN KIS/BPJS Kesehatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.63
Jumlah Jenis Peserta JKN Terintegrasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Jumlah Jenis Peserta JKN Terintegrasi Tahun 2021			
NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN	
		JUMLAH	%
1	2	3	4
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)			
1	PBI APBN	787.336	30,47
2	PBI APBD	236.533	9,15
SUB JUMLAH		1.023.869	39,63
NON PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	990.928	38,35
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	543.690	21,04
3	Bukan Pekerja (BP)	25.268	0,98
SUB JUMLAH NON PBI		1.559.886	60,37

Jumlah Jenis Peserta JKN Terintegrasi Tahun 2021			
NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN	
		JUMLAH	%
JUMLAH PESERTA JKN KAB. TANGERANG		2.583.755	
JUMLAH PENDUDUK		3.105.042	
		%	
		83,21	

Sumber : BPJS Kesehatan tahun 2021

z. Bantuan biaya kesehatan orang miskin/tidak mampu

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tangerang mengalokasikan anggaran jamkesda yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan yang tidak dijamin oleh JKN/BPJS kesehatan. Jumlah pasien jamkesda yang dilayani baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas sebanyak 5.202 orang dengan rincian sesuai tabel dibawah ini :

Tabel 2.64
Rekapitulasi Pasien Jamkesda Per Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

NO	RUMAH SAKIT	JUMLAH PASIEN
1	RSU TANGERANG	1.355
2	RSUD BALARAJA	2.258
3	RS SITANALA	156
4	RSUD PAKUHAJI	1.183
5	RSCM	16
6	RS MARZOEKI MAHDI	7
8	RS SOEHARTO HEERDJAN	81
7	RS AJI DARMO	2
9	PUSKESMAS SEPATAN	8
10	PUSKESMAS TIGARAKSA	16
11	PUSKESMAS MAUK	22
12	PUSKESMAS CISOKA	14
13	PUSK KEDAUNG BARAT	82
14	RS SILOAM	1
15	RS RSJP HARKIT	1
TOTAL		5.202

Sumber : UPTD.PJK Dinas Kesehatan Kab. Tangerang 2021

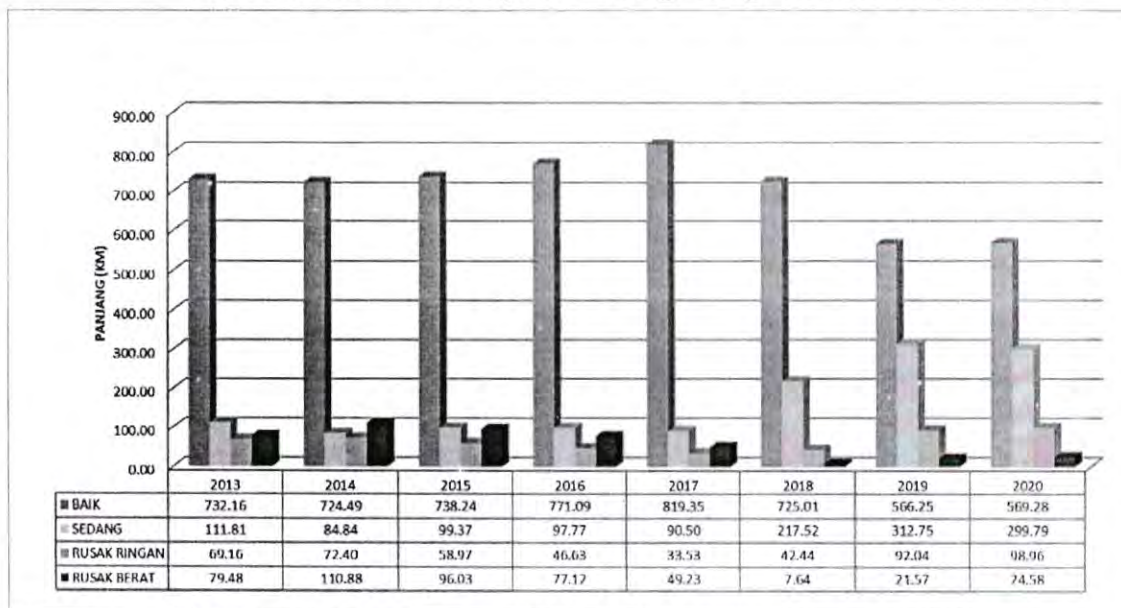
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jaringan Jalan

Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Tangerang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 27.93 Km sebanyak 1 ruas. Jalan Propinsi sepanjang 105.44 Km sebanyak 9 ruas dan 992,61 Km merupakan jalan kabupaten yang terbagi menjadi 301 ruas dengan jalan strategis sebanyak 50 ruas sepanjang 279.55 Km. dan jalan Lintas Umum sebanyak 251 ruas sepanjang 713.06 Km. Sebagian besar jalan-jalan yang ada sudah di beton. bahkan sampai ke jalan lingkungan dengan kondisi konblok.

Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kepadatan jalan (Road Density) pada tahun 2019. kepadatan jalan di Kabupaten Tangerang sebesar 1.18 Km/Km². sementara itu. dilihat dari sisi ketersediaan panjang jalan per jumlah penduduk yang ditunjukkan melalui indikator panjang jalan per 1000 penduduk (Km/1000 orang). sebesar 0.000294491Km/1000 Orang. Sedangkan, kualitas jalan Kabupaten, dengan kondisi jalan mantap pada tahun 2020 sebesar 87,55 % atau sekitar 869,07 Km, dengan kondisi rusak sekitar 12.4% atau sekitar 123,54 Km.

Gambar 2.43
Kondisi Jalan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020



Sumber : Dinas Bina Marga dan SDA kab. Tangerang Tahun 2020

Aksesibilitas Daerah pada tahun 2021 untuk panjang jalan existing adalah sebesar 992.62 km dengan kondisi jalan mantap (baik-sedang) sepanjang 923.44 Km, dalam kondisi rusak sepanjang 69.16 Km. Kondisi jalan

dengan kategori baik pada tahun 2021 adalah 77,65%, dengan kondisi sedang 15,38% dan kondisi rusak dan rusak berat 6,97%.

Tabel 2.65
Kondisi Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten
Tangerang Tahun 2017-2021

Kondisi Jalan	2017	2018	2019	2020	2021
Baik	819,35	725,01	566,25	569,28	770.76
Sedang	90,49	217,52	312,75	299,79	152.68
Rusak	33,53	42,22	92,04	98,96	19.68
Rusak Berat	49,23	7,64	21,57	24,58	49.48

Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, BPS 2020

b. Jaringan Irigasi

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap. Didalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini efisiensi teknis diukur dari tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Sedangkan efektivitas ditunjukkan oleh indeks luas areal (IA). Semakin kecil nilai PIA, PIR dan PAR, maka pengelolaan irigasi semakin efisien.

Tabel 2.66
Daerah Irigasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2020

No.	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	
			Baku	Fungsional
1	DI Gunung Kaler 1	Gunung Kaler	449	449
2	DI Gunung Kaler 2	Gunung Kaler	962	962
3	DI Gunung Kaler 3	Gunung Kaler	767	767
4	DI Kemiri 1	Kemiri	582	582
5	DI Kemiri 2	Kemiri	506	506
6	DI Kemiri 3	Kemiri	637	637
7	DI Kresek 1	Kresek	451	451
8	DI Kresek 2	Kresek	413	413
9	DI Kresek 3	Kresek	564	564
10	DI Kronjo 1	Kronjo	636	636

No.	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	
			Baku	Fungsional
11	DI Kronjo 2	Kronjo	535	535
12	DI Kronjo 3	Kronjo	928	928
13	DI Mauk 1	Mauk	830	830
14	DI Mauk 2	Mauk	796	796
15	DI Mekarbaru 1	Mekarbaru	591	591
16	DI Mekarbaru 2	Mekarbaru	917	917
17	DI Rajeg 1	Rajeg	323	323
18	DI Rajeg 2	Rajeg	674	674
19	DI Sukadiri 1	Sukadiri	549	549
20	DI Sukadiri 2	Sukadiri	637	637
21	DI Sukamulya 1	Sukamulya	534	534
22	DI Sukamulya 2	Sukamulya	435	435
Luas (Ha)			13,716	13,716

Sumber : Dinas Bina Marga dan SDA, Kab Tangerang, 2021

Jumlah saluran irigasi yang memiliki kondisi baik meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, jaringan irigasi dengan kondisi baik hanya sebesar 11,58%. Kemudian pada tahun 2020, jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik menjadi 64,52%. Akan tetapi, masih terdapat 35,48% jaringan irigasi dengan kondisi buruk.

Tabel 2.67
Panjang dan Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

Daerah Irigasi (DI)	Luas/Panjang	Jumlah Saluran	Daerah Irigasi (DI)	Luas/Panjang	Jumlah Saluran
DI. CIDURIAN	8.707 Ha		DI. CISADANE	22.441 Ha	
Saluran Induk	26.546 m2	1	Wilayah SDA IV Cisdane Barat	4.526 Ha/58.597 m2	
Saluran Sekunder	74.433 m2	18	Wilayah SDA III Garukgak	4.615 Ha/28.936 m2	
Saluran Sekunder	28.931 m2		Wilayah SDA V Cisdane Barat Laut	11.052 Ha/65.638 m2	
Saluran Jaringan Utama	129.910 m2		Wilayah SDA VI Cisdane Utara	2.203 Ha/20.668 m2	
UPT SDA Wilayah II/Cidurian Hulu	3.060 Ha		Saluran Jaringan Utama	22.396 Ha/173.839 m2	
Saluran Induk	13.350 m2	1	UPT SDA Wil IV/Cisdane Barat	4.526 Ha	
Saluran Sekunder	25.789 m2	17	Saluran Induk	21.245 m2	1
Saluran Jaringan Utama	39.136 m2		Saluran Sekunder	37.352 m2	9
UPT SDA Wilayah IV/Cidurian Hulu	1.566 Ha		Saluran Jaringan Utama	58.597 m2	
Saluran Induk	9.186 m2	1	Wilayah SDA III Garukgak	4.615 Ha	
Saluran Sekunder	16.215 m2	5	Saluran Induk	0	0
Saluran Jaringan Utama	25.401 m2		Saluran Sekunder	28.936 m2	8
UPT SDA Wilayah VIII/Cidurian Hulu	402 Ha		Saluran Jaringan Utama	28.936 m2	
Saluran Induk	4.010 m2		Wilayah SDA V Cisdane Barat Laut	11.052 Ha	
Saluran Sekunder	3.229 m2		Saluran Induk	13.272 m2	1

Daerah Irigasi (DI)	Luas/Panjang	Jumlah Saluran	Daerah Irigasi (DI)	Luas/Panjang	Jumlah Saluran
Saluran Jaringan Utama	7.239 m2		Saluran Sekunder	52.366 m2	15
UPT SDA Wil II/Cidurian Hilir	3.667 Ha		Saluran Jaringan Utama	65.638 m2	
Saluran Induk	0		Wilayah SDA VI Cisdane Utara	2.203 Ha	
Saluran Sekunder	23.278 m2		Saluran Induk	11.848	1
Saluran Jaringan Utama	23.278 m2		Saluran Sekunder	9.184 m2	1
DI. CISADANE	22.441 Ha		Saluran Jaringan Utama	21.032 m2	
Wilayah SDA IV Cisdane Barat	4.526 Ha/58.597 m2				
Wilayah SDA III Garukgak	4.615 Ha/28.936 m2				
Wilayah SDA V Cisdane Barat Laut	11.052 Ha/65.638 m2				
Wilayah SDA VI Cisdane Utara	2.203 Ha/20.668 m2				
Saluran Jaringan Utama	22.396 Ha/173.839 m2				
UPT SDA Wil IV/Cisdane Barat	4.526 Ha				
Saluran Induk	21.245 m2	1			
Saluran Sekunder	37.352 m2	9			
Saluran Jaringan Utama	58.597 m2				
Wilayah SDA III Garukgak	4.615 Ha				
Saluran Induk	0	0			
Saluran Sekunder	28.936 m2	8			
Saluran Jaringan Utama	28.936 m2				
Wilayah SDA V Cisdane Barat Laut	11.052 Ha				
Saluran Induk	13.272 m2	1			
Saluran Sekunder	52.366 m2	15			
Saluran Jaringan Utama	65.638 m2				
Wilayah SDA VI Cisdane Utara	2.203 Ha				
Saluran Induk	11.848	1			
Saluran Sekunder	9.184 m2	1			
Saluran Jaringan Utama	21.032 m2				

Sumber : Dinas Bina Marga dan SDA, Kab Tangerang, 2021

Gambar 2.44
Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tangerang
Tahun 2013-2020



Sumber : Dinas Bina Marga dan SDA, Tahun 2013-2016 dan RKPD Kabupaten Tangerang (2021), diolah.

Selain infrastruktur irigasi yang banyak mengalami kerusakan, Kabupaten Tangerang masih banyak potensi air baku yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, dan Sungai Cimanceuri tercatat sebanyak 24 danau/rawa/ waduk yang ada di Kabupaten Tangerang yang dimanfaatkan untuk irigasi dan konservasi. Potensi Embung Cigarukgak di Desa Kemuning, Kecamatan Kresek dengan luas 177 Ha atau 1.770.000 m² memiliki debit total sekitar 180 lps, dan ini merupakan potensi air baku bagi PDAM.

c. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai akses air layak apabila sumber air minum yang digunakan rumah tangga berasal dari :

- air leding
- sumur bor/pompa dengan jarak ke tempat
- penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m
- sumur terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/ tinja terdekat ≥ 10 m
- mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/ tinja terdekat ≥ 10 m
- air hujan
- Serta dikombinasikan dengan penggunaan air mandi/cuci yang bersumber dari air terlindung (leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan) bila sumber air minum utama menggunakan air kemasan/isi ulang dan air tidak terlindungi (air terlindung dengan jarak < 10 m dan air tidak terlindung)

Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas

menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

Tabel 2.68
Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum
di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020

Tahun	Air Kemasan Bermerk	Air Isi Ulang	Ledeng Meteran	Ledeng Eceran	Sumur Bor/Pompa	Sumur terlindung
2015	16.68	36.13	3.03	4.78	27.97	9.44
2016	16.4	35.07	1.83	2.72	32.65	8.32
2017	16.59	46.25	4.18	0.00	28.66	3.33
2018	17.98	41.46	3.58	0.00	32	3.95
2019	0	0	12.18	0.00	77.21	7.64
2020	17.16	39,41	3.85		36.80	1.78

Tabel 2.69
Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum
di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020 (lanjutan)

Tahun	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Sungai	Air Hujan	Lainnya
2015	1.73	0.11	0.00	0.12	0	0
2016	2.4	0.32	0	0.23	0.06	0
2017	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2018	0.94	0.08	0.00	0.00	0.01	0.00
2019	1.46	0.11	0.15	0.98	0.27	0
2020	0.66	0.19	0.14	0.00	0.00	0.00

Sumber : BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2015-2020

Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Akses air minum yang layak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020, di tahun 2021 persentase akses rumah tangga terhadap air minum yang layak sekitar 97,97%, kondisi akses rumah tangga terhadap air bersih yang sekitar 83,13%.

Tabel 2.70
Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun
2015-2021

Tahun	Persentase
2015	73,98
2016	69,82
2017	73,2
2018	80,95
2019	72,89
2020	98,48
2021	97,97

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, BPS Provinsi Banten 2015- 2021

d. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Sarana peribadahan semua agama ada di Kabupaten Tangerang dikarenakan heterogenya penduduk Kabupaten Tangerang. Rasio ketersediaan rumah ibadah terhadap satuan pemeluk agama paling besar adalah ketersediaan gereja katolik. Rasionya pada tahun 2020 sebesar 1: 13.252. Jumlah penduduk menurut agama dan ketersediaan tempat ibadah di Kabupaten Tangerang Tahun 2019 tersebut pada tabel berikut ini :

Tabel 2.71
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Di Kabupaten Tangerang Tahun 2020

Jenis Tempat Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah	Jumlah Pemeluk	Rasio
Masjid & Musholah	5.119	2.869.058	1:560
Gereja Protestan	30	94.506	1:3.150
Gerja Katolik	3	39.756	1:13.252
Pura	6	1.974	1:329
Vihara	21	51.482	1:2.452

Sumber : BPS Kab Tangerang, 2021,dan DKB 2020 data diolah.

e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, Seperti Fasilitas Air bersih, Pembuangan Tinja, Pembuangan air limbah (air bekas), dan Pembuangan sampah.

Rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai akses sanitasi (sanitasi layak) apabila rumah tangga menggunakan fasilitas buang air besar (BAB) sendiri dan bersama, kloset leher angsa, dan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran/tinja (TPAT). Kondisi sanitasi merupakan salah satu komponen yang ikut mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan yang secara tidak langsung juga turut berkontribusi terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Sanitasi yang layak merupakan syarat mutlak dalam kehidupan sehari-hari untuk tercapainya kesejahteraan, terutama sanitasi yang layak di lingkungan rumah. Sanitasi termasuk sektor yang sulit sekali merangkak mencapai target. Indonesia sendiri termasuk yang masih bekerja keras untuk memastikan target sanitasi bisa tercapai.

Tabel 2.72
Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2015-2021
(Dalam Persen)

No.	Fasilitas Tempat Buang Air Besar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sendiri	27,28	81,97	85,35	84,31	79,13	80,30	89,63
2	Lainnya	13,09	7,26	14,64	15,69	20,87	14,8	10,37
3	Tidak Ada	4,62	10,76	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00

Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2017 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang 2018-2021

Capaian sanitasi di Kabupaten Tangerang tahun 2021 mengalami perkembangan yang sangat baik dengan penggunaan fasilitas tempat buang air besar yang mencapai 89,63 persen, dengan adanya program STOP BAB Sembarangan dan penanganan desa ODF di Kabupaten Tangerang mengurangi warga untuk menjaga lingkungan dan hidup sehat.

Tabel 2.73
Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang digunakan Rumah tangga, Tahun 2015-2021 (Dalam Persen)

No.	Jenis Kloset	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Leher Angsa	91,58	96,52	96,82	97,96	96,97	97,54	94,50
2	Lainnya	7,42	3,48	3,18	2,04	3,03	2,46	5,50
3	Tidak Pakai	1	0	0	0	0	0	0

Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2017 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang 2018-2021

Infrastruktur permukiman yang semakin baik ditunjukkan dengan penggunaan tanki septik/IPAL/SPAL untuk saluran pembuangan limbah rumah tangga mengalami peningkatan dengan capaian 94,45 persen ditahun 2021, mengindikasikan program pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menjaga lingkungan tetap sehat dan bersih tercapai dengan baik.

Tabel 2.74
Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja
Tahun 2015-2021 (Dalam Persen)

No.	Tempat Pembuangan Akhir Tinja	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tanki Septik/IPAL/SPA L	67,95	77,64	95,73	90,37	80,2	88,63	94,45
2	Lainnya	32,06	22,35	4,27	9,63	19,8	10,95	5,55

Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2017 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang 2018-2021

f. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah.

g. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Untuk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 sebesar 13,48 % dibandingkan jumlah penduduk yang ada. secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.75
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah TPS	223
2.	Jumlah Daya Tampung TPS	512.460
3.	Jumlah Penduduk	3.800.787
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah	13,48 %

Sumber : DLHK Kab. Tangerang. 2021

h. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria :

1. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;

2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur;
3. Didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kondisi saat ini luasan RTH eksisting adalah 9.532 hektar dari luas kawasan perkotaan di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang 57.363 hektar, dengan prosentase luas RTH eksisting 16,61%. Rasio RTH Kawasan perkotaan di Kabupaten Tangerang lebih besar dibandingkan dengan kota Jakarta, namun secara amanat Undang-Undang Penataan Ruang no.26 Tahun 2007 belum mencapai target diatas 30%. Kondisi jenis RTH eksisting yang ada di wilayah perkotaan Kabupaten Tangerang, didominasi oleh RTH taman lingkungan yang mencapai 42%, RTH privat yaitu 40%, sedangkan RTH yang terkecil adalah hutan kota yang hanya 0,08%.

- i. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social budaya maupun kegiatan khusus.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Rasio Rumah Layak Huni

Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kelayakan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2019 yaitu 98,17%

rumah sudah layak huni sementara rumah tidak layak huni sebesar 1.83% dan dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 2.76
Persentase Rumah Tinggal menurut Jenis Atap Terlulus di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

No.	Jenis Atap Rumah								
	Tahun	Beton	Genteng	Seng	Asbes	Bambu	Kayu/Sirap	Jerami/Ijuk	Lainnya
1	2016	0	85,03		14,85	0	0	0	0,14
2	2017	0,20	85,34	0,35	13,82	0	0,13	0,16	0,20
3	2018	2,73	77,44	0,10	19,44	0	0,07	0	0
4	2019	1,67	81,03	-	16,50	0,69	0,11	0	0
5	2020	0,45	83,41	1,46	14,33	0	0	0	0,35

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2016-2020

Persentase rumah tinggal berdasarkan jenis atap yang dipakai tahun 2020 sudah memakai genteng sekitar 83,41% dan masih menggunakan seng sekitar 1,46%.

Tabel 2.77
Persentase Rumah Tinggal menurut Dinding yang digunakan di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

No.	Jenis Dinding							
	Tahun	Tembok	Plesteran Anyaman Bambu/Kawat	Kayu/Papan	Anyaman Bambu	Batang Kayu	Bambu	Lainnya
1	2016	91,99	0,35	0,52	6,46	0,12	0,27	0,29
2	2017	90,85	0	2,07	6,49		0,36	0,24
3	2018	94,43	0	0,93	4,28	0	0,07	0,16
4	2019	91,66	0,76	3,32	3,33	0,19	0	0,75
5	2020	95,14	0,89	0,75	2,28	0	0,20	0,74

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2016-2020

Persentase rumah tinggal di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2020 sudah berdindingkan tembok sebanyak 95,14%, dan sekitar 0,20% masih berdindingkan bambu.

Tabel 2.78
Persentase Rumah Tinggal menurut Jenis Lantai di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

No.	Jenis Lantai									
	Tahun	Marmar/Granit	Keramik	Parket	Ubin	Kayu	Semen	Bambu	Tanah	Lainnya
1	2016	82,34	-	0,01	6,97	0,09	4,29	0,20	5,83	0,28
2	2017	0,92	82,24	0,09	7,25	0,16	4,83	0,30	4,21	0
3	2018	1,32	82,24	0,39	5,23	0,07	5,98	0	4,77	0
4	2019	1,15	85,87	0,34	3,35	0,59	0,48	0,48	4,12	0,10
5	2020	2,69	84,17	0,34	6,43	0,13	2,73	0,09	3,20	0,22

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2016-2020

Persentase rumah tinggal dengan kondisi jenis lantai yang digunakan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 84,17% menggunakan keramik, sekitar 3,20% masih berlantaikan tanah. Kondisi rumah di Kabupaten Tangerang relative masih layak huni, meskipun ada beberapa rumah dalam kondisi tidak layak huni, dengan program pemerintah Kabupaten Tangerang yang melibatkan lintas sector melalui Program Gebrak Pakumis Plus dan Bedah Rumah mulai memperbaiki kondisi rumah tinggal dan lingkungannya.

Gambar 2.45
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kondisi Kelayakan Bangunan
di Kabupaten Tangerang Tahun 2019



Sumber : BPS Provinsi Banten

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat

a. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbup untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga hal ini akan mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun kondisi pelanggaran Perda dapat dilihat di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada kurun waktu tahun 2015-2019 tingkat penyelesaian pelanggaran rata-rata berada pada kisaran 93,07 %.

Tingkat penyelesaian pelanggaran adalah jumlah pelanggaran yang dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam. Perkembangan selama lima tahun terakhir tercantum pada table 2.65 berikut :

rumah sudah layak huni sementara rumah tidak layak huni sebesar 1.83% dan dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 2.76
Persentase Rumah Tinggal menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

No.	Jenis Atap Rumah								
	Tahun	Beton	Genteng	Seng	Asbes	Bambu	Kayu/ Sirap	Jerami/ Ijuk	Lainnya
1	2016	0	85,03		14,85	0	0	0	0,14
2	2017	0,20	85,34	0,35	13,82	0	0,13	0,16	0,20
3	2018	2,73	77,44	0,10	19,44	0	0,07	0	0
4	2019	1,67	81,03	-	16,50	0,69	0,11	0	0
5	2020	0,45	83,41	1,46	14,33	0	0	0	0,35

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2016-2020

Persentase rumah tinggal berdasarkan jenis atap yang dipakai tahun 2020 sudah memakai genteng sekitar 83,41% dan masih menggunakan seng sekitar 1,46%.

Tabel 2.77
Persentase Rumah Tinggal menurut Dinding yang digunakan di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

No.	Jenis Dinding							
	Tahun	Tembok	Plesteran Anyaman Bambu/ Kawat	Kayu/ Papan	Anyaman Bambu	Batang Kayu	Bambu	Lainnya
1	2016	91,99	0,35	0,52	6,46	0,12	0,27	0,29
2	2017	90,85	0	2,07	6,49		0,36	0,24
3	2018	94,43	0	0,93	4,28	0	0,07	0,16
4	2019	91,66	0,76	3,32	3,33	0,19	0	0,75
5	2020	95,14	0,89	0,75	2,28	0	0,20	0,74

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2016-2020

Persentase rumah tinggal di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2020 sudah berdindingkan tembok sebanyak 95,14%, dan sekitar 0,20% masih berdindingkan bambu.

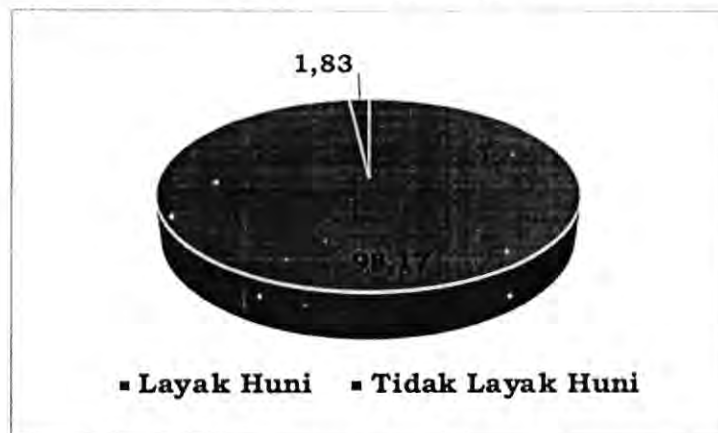
Tabel 2.78
Persentase Rumah Tinggal menurut Jenis Lantai di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

No.	Jenis Lantai									
	Tahun	Marmar/ Granit	Keramik	Parket	Ubin	Kayu	Semen	Bambu	Tanah	Lainnya
1	2016	82,34	-	0,01	6,97	0,09	4,29	0,20	5,83	0,28
2	2017	0,92	82,24	0,09	7,25	0,16	4,83	0,30	4,21	0
3	2018	1,32	82,24	0,39	5,23	0,07	5,98	0	4,77	0
4	2019	1,15	85,87	0,34	3,35	0,59	0,48	0,48	4,12	0,10
5	2020	2,69	84,17	0,34	6,43	0,13	2,73	0,09	3,20	0,22

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2016-2020

Persentase rumah tinggal dengan kondisi jenis lantai yang digunakan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 84,17% menggunakan keramik, sekitar 3,20% masih berlantaikan tanah. Kondisi rumah di Kabupaten Tangerang relative masih layak huni, meskipun ada beberapa rumah dalam kondisi tidak layak huni, dengan program pemerintah Kabupaten Tangerang yang melibatkan lintas sector melalui Program Gebrak Pakumis Plus dan Bedah Rumah mulai memperbaiki kondisi rumah tinggal dan lingkungannya.

Gambar 2.45
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Kondisi Kelayakan Bangunan
di Kabupaten Tangerang Tahun 2019



Sumber : BPS Provinsi Banten

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat

a. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbup untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga hal ini akan mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun kondisi pelanggaran Perda dapat dilihat di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada kurun waktu tahun 2015-2019 tingkat penyelesaian pelanggaran rata-rata berada pada kisaran 93,07 %.

Tingkat penyelesaian pelanggaran adalah jumlah pelanggaran yang dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam. Perkembangan selama lima tahun terakhir tercantum pada table 2.65 berikut :

Tabel 2.79
Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang dilaporkan dan/atau dipantau	124	136	146	123	103	35	55
2	Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang diselesaikan	121	135	132	114	88	32	53
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran	97.58	99.26	90.41	92.68	85.43	91%	96%

Sumber : Satpol PP Kab. Tangerang. Tahun 2015-2019

Tabel 2.80
Jenis Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tangerang
Tahun 2020

No.	Jenis Gangguan	Satuan	Jumlah	Penanganan	Lokasi Kecamatan
1	PSK	Orang	31	Penertiban	Pasar Kemis, Panongan, Cikupa
2	Tempat Hiburan	Tempat Hiburan	24	Penertiban	Pagedangan, Kelapa Dua
3	Unjuk Rasa	Kali	6	Pengamanan	Puspem Tigaraksa
4	Bangunan Liar	Bangunan	106	Penertiban	Balaraja
5	Tempat Usaha	Tempat Usaha	1	Penertiban	Pasar Kemis
6	Galian Tanah	Galian	1	Penertiban	Kresek

Sumber : Satpol PP Kab. Tangerang, Tahun 2020

Tabel 2.81
Jenis Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

No.	Jenis Gangguan	Satuan	Jumlah	Penanganan	Lokasi Kecamatan
1	PSK	Surat Perintah	7	7 kali	Rajeg, Pasar Kemis, Panongan
3	Unjuk Rasa	Surat perintah	12	12 kali	Puspem Tigaraksa
4	Bangunan Liar/PKL	Surat perintah	6	6 kali	Tigaraksa, Teluknaga
5	Penanganan protokol kesehatan	Surat perintah	25	25 kali	29 kecamatan
6	Penanganan operasi tindak pidana ringan	Surat perintah	3	3 kali	Tigaraksa, Cikupa, KelapaDua, Pasar Kemis

Sumber : Satpol PP Kab. Tangerang, Tahun 2021

6. Sosial

Kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah pelayanan dasar dalam urusan social salah satunya adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 sebanyak 217.423 jiwa, penanganan PMKS di Kabupaten Tangerang dilakukan dengan sinergitas antara program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk Kabupaten Tangerang dilaksanakan program-program bantuan dan pemberdayaan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) . Untuk lebih jelasnya tentang data PMKS lihat table-tabel dibawah ini :

Tabel 2.82

Karakteristik Anak/Keterlantaran di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No.	Uraian	2020	2021
1	Anak Balita terlantar	8.261	8261
2	Anak Terlantar	66.033	61853
3	Anak Berhadapan dengan hukum	0	40
4	Anak Jalanan	163	163

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2021

Dari data diatas jumlah anak berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan, anak terlantar mengalami penurunan. Disini disimpulkan bahwa perlunya edukasi tentang hukum terhadap anak anak. Untuk anak terlantar telah terjadi penurunan dibanding tahun 2020, hal ini disebabkan karena Dinas Sosial telah mengatasi masalah tersebut.

Tabel 2.83

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di Kabupaten Tangerang Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah KK
1	Kecamatan Balaraja	6,900
2	Kecamatan Cikupa	4,304
3	Kecamatan Cisauk	4,869
4	Kecamatan Cisoka	9,530
5	Kecamatan Curug	4,696
6	Kecamatan Gunung Kaler	9,114
7	Kecamatan Jambe	5,067
8	Kecamatan Jayanti	5,815
9	Kecamatan Kelapa Dua	2,860
10	Kecamatan Kemiri	7,842
11	Kecamatan Kosambi	10,432
12	Kecamatan Kresek	9,895
13	Kecamatan Kronjo	10,271

No.	Kecamatan	Jumlah KK
14	Kecamatan Legok	8,065
15	Kecamatan Mauk	12,046
16	Kecamatan Mekar Baru	7,778
17	Kecamatan Pagedangan	5,397
18	Kecamatan Pakuhaji	17,267
19	Kecamatan Panongan	5,935
20	Kecamatan Pasar Kemis	5,428
21	Kecamatan Rajeg	14,504
22	Kecamatan Sepatan	7,296
23	Kecamatan Sepatan Timur	10,642
24	Kecamatan Sindang Jaya	9,379
25	Kecamatan Solear	7,986
26	Kecamatan Sukadiri	6,765
27	Kecamatan Sukamulya	8,508
28	Kecamatan Teluknaga	14,189
29	Kecamatan Tigaraksa	11,551

Sumber : Kementerian Sosial RI, 2020

Ket. Tahun 2021 tidak dilaksanakan pendataan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT).

Tabel 2.84
Jumlah Keluarga Fakir Miskin di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No.	Kecamatan	Keluarga Fakir Miskin	2021
1	Cisoka	3,728	3728
2	Solear	3,467	3467
3	Tigaraksa	3,352	3352
4	Jambe	1,830	1830
5	Cikupa	914	914
6	Panongan	2,150	2150
7	Curug	684	684
8	Kelapa Dua	453	453
9	Legok	2,487	2487
10	Pagedangan	1,744	1744
11	Cisauk	1,693	1693
12	Pasar Kemis	1,576	1576
13	Sindang Jaya	3,615	3615
14	Balaraja	2 215	2215
15	Jayanti	1,989	1989
16	Sukamulya	3,614	3614
17	Kresek	3,073	3073
18	Gunung Kaler	3,946	3946
19	Kronjo	3,827	3827
20	Mekar Baru	3,968	3968
21	Mauk	3,647	3647
22	Kemiri	3,400	3400
23	Sukadiri	2,135	2135

No.	Kecamatan	Keluarga Fakir Miskin	2021
24	Rajeg	6,115	6115
25	Sepatan	2,240	2240
26	Sepatan Timur	3,810	3810
27	Pakuhaji	7,284	7284
28	Teluknaga	6,008	6008
29	Kosambi	3,171	3171
Kabupaten Tangerang		88,135	88135

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Untuk keluarga fakir miskin di tahun 2021 jumlahnya tetap dibanding tahun 2020. Hal ini menunjukkan kemungkinan Dinas Sosial belum bekerja maksimal atau karena pengaruh pandemi covid 19.

Tabel 2.85
Karakter Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No.	Uraian	2020	2021
1	Pengemis	261	98
2	Gelandangan	167	21
3	Narapidana	571	843

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Untuk pengemis dan gelandangan mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Dinas sosial kabupaten tangerang bekerja untuk mengurangi pengemis dan gelandangan.sebaliknya dengan adanya peningkatan kriminalitas menandakan perlunya ditambah jumlah personil keamanan seperti polisi, satpol PP, dan edukasi hukum di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.86
Penyandang disabilitas di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah
1	Laki-laki	3.610
2	Perempuan	2.978
Jumlah		6.588

Sumber : disdukcapil, Kab. Tangerang Tahun 2021

Penyandang disabilitas di Kabupaten Tangerang tahun 2021 berjumlah 6.588 jiwa, dengan sebanyak 3.610 jiwa merupakan laki-laki, dan sebanyak 2.978 jiwa adalah perempuan.

Tabel 2.87
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Data Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	2,308
2	Data Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	691
3	Data Anak Dengan Kedisabilitas Tahun 2020	611
4	Pemulung	2,480
5	Penyandang Disabilitas	6,588
6	Anak Terlantar	61853
7	Anak Balita Terlantar	8,261
8	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	4,367
9	Fakir Miskin	88,135
10	Anak Berhasapan Dengan Hukum	40
11	Anak Jalanan	163
12	Anak Korban Tindak Kekerasan	65
13	Gelandangan	21
14	Pengemis	98
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	846
16	Korban Penyalahgunaan Narkoba	-
17	Wanita Tuna Susila	80
18	HIV	316
19	Kelompok Minoritas	101
20	Korban Tindak Kekerasan	65
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	110
22	Lanjut Usia Terlantar	16,301
23	Trafficking	5
24	Korban Bencana Alam	20,238
25	Korban Bencana Sosial	-
Total		217,423

Sumber : Dinas Sosial, Kab. Tangerang, 2021.

Tabel 2.88
Rekapitulasi Hasil Pendataan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

NO	JENIS PSKS	2020	2021
1	Pekerja Sosial Profesional (PSP)	198	198
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	318	318
3	Karang Taruna	274	274
4	Dunia Usaha	383	383
5	WKSBM	0	0

NO	JENIS PSKS	2020	2021
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	29	29
7	TAGANA	176	176
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	55	55
9	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1
10	Keluarga Pioner	0	0
11	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	0	0
12	Penyuluh Sosial Masyarakat	6	6
13	Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan (NK3)	0	0
	Total	1440	1440

Sumber : Dinas Sosial Kab Tangerang, 2021

2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga kerja

Berdasarkan data Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun 2020 jumlah penduduk usia kerja yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tangerang tahun 2020 adalah 1,836,726 jiwa, dengan penduduk yang bekerja sebanyak 1,596,938 jiwa.

Tabel 2.89

Jumlah Angkatan Kerja dan Bekerja Sesuai Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Tangerang Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Bekerja	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja thdp Angkatan Kerja
≤ Sekolah Dasar (SD)	527,139.00	577,307.00	91,31
Sekolah Menengah Pertama	319,195.00	366,752.00	87,03
Sekolah Menengah Atas	589,168.00	718,684.00	81,98
Perguruan Tinggi	161,436.00	173,983.00	92,79
Jumlah/Total	1,596,938.00	1,836,726.00	86.94

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2021

1. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon II – IV. Jumlah perempuan di lembaga pemerintahan Kabupaten Tangerang sebanyak 5.651 dari 10.326 orang pegawai atau Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2020 adalah 54,7%.

b. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tabel 2.90
Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

Kecamatan	2019	2020	2021
Balaraja	1	0	0
Cikupa	3	1	7
Cisoka	0	2	0
Curug	0	1	1
Jambe	1	0	0
Kelapa Dua	4	0	1
Kemiri	1	4	1
Legok	2	0	2
Pasar Kemis	4	3	2
Rajeg	4	0	2
Sepatan	1	0	1
Sukamulya	3	0	1
Kresek	1	1	1
Panongan	0	2	0
Pakuhaji	0	1	0
Jayanti	0	1	0
Jumlah	25	16	19

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA Kab Tangerang, tahun 2021

Dari data diatas untuk kecamatan Cikupa dan Rajeg menunjukkan nilai yang signifikan, hal ini diperlukan adanya edukasi pendidikan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

c. Perempuan Yang Menduduki Lembaga Perwakilan Rakyat

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif daerah (DPRD) berada pada angka 14 persen atau 7 anggota legislatif perempuan dari 50 anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Walaupun masih belum mencapai target keterwakilan 30 persen perempuan. Jumlah Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRD Kabupaten Tangerang sebanyak 7 kursi.

Tabel 2.91
Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

Uraian	2019	2020	2021
Perempuan yang menduduki kursi DPRD	7	7	7
Persentase	14	14	14

Sumber : DPPA, Kab Tangerang Tahun 2021

d. Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun

Usia pekerja yang diperbolehkan secara peraturan yang berlaku adalah kisaran antara usia 15 – 64 tahun, sedangkan usia 5 – 14 tahun dianggap bertentangan dan menyalahi ketentuan aturan yang berlaku, sehingga pekerja yang berusia 5 – 14 tahun rawan kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2019, di Kabupaten Tangerang jumlah pekerja anak sebanyak 14 orang, dan di tahun 2020 pekerja anak di Kabupaten Tangerang tidak ada lagi. Program pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menurunkan angka bahkan menghilangkan tingkat pekerja anak, melalui advokasi dan perlindungan khusus anak dengan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.92
Pekerja Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun	14	0	0

Sumber : DPPA, Kab Tangerang Tahun 2021

e. Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Mendapat Layanan Bantuan Hukum

Pada umumnya korban kekerasan pada anak dan perempuan mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual maupun sosial yang secara keseluruhan dapat berpengaruh pada penurunan kualitas hidup, sehingga bagi korban diperlukan penanganan secara khusus dan komprehensif berupa

KECAMATAN	JENIS KASUS (Per 31 Agustus 2020)										Jumlah
	Kekerasan Seksual	Pelecehan Seksual	TPPO	KDRT Fisik	KDRT Psikis	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	ABH	AKB	Pekerja Anak	
Pagedangan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Pakuhaji	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Panongan	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Pasar Kemis	4	1	1	2	1	1	0	7	0	0	17
Rajeg	7	1	0	0	0	0	0	2	0	0	10
Sepatan	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
Sepatan Timur	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4
Sindang Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solear	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Sukadiri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sukamulya	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Teluknaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tigaraksa	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Jumlah	65	7	1	12	6	6	1	23	0	0	
121											

Sumber : DPPA, Kab Tangerang Tahun 2021

Tabel 2.95
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

KECAMATAN	JENIS KASUS (Per 31 Agustus 2021)										Jumlah
	Kekerasan Seksual	Pelecehan Seksual	TPPO	KDRT Fisik	KDRT Psikis	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	ABH	AKB	Pekerja Anak	
Balaraja	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Cikupa	3	4	0	2	5	1	3	0	0	0	18
Cisauk	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
Cisoka	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Curug	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
Gunung Kaler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jayanti	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7
Jambe	1	0	0	0	0	2	0	7	0	0	10
Kelapa Dua	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	4
Kemiri	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Kosambi	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Kresek	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	5
Kronjo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Legok	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	5
Mauk	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Mekar Baru	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pagedangan	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
Pakuhaji	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	5
Panongan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Pasar Kemis	4	3	0	1	1	1	1	0	0	0	11
Rajeg	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	6
Sepatan	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	5
Sepatan Timur	1	2	0	2	0	0	0	2	0	0	7

KECAMATAN	JENIS KASUS (Per 31 Agustus 2021)										Jumlah
	Kekerasan Seksual	Pelecehan Seksual	TPPO	KDRT Fisik	KDRT Psikis	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	ABH	AKB	Pekerja Anak	
Sindang Jaya	4	1	0	0	1	1	0	0	0	0	7
Solear	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6
Sukadiri	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Sukamulya	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5
Teluknaga	2	1	0	0	1	0	1	0	0	0	5
Tigaraksa	7	1	0	0	3	1	0	0	0	0	12
Jumlah	62	24	0	12	19	10	5	22	0	0	150
	143										

Dari data Tahun 2020 ke 2021 mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Tangerang untuk Kekerasan seksual, TPPO, dan ABH mengalami penurunan. Sedangkan untuk Pelecehan Seksual, KDRT Fisik, dan KDRT Psikis mengalami peningkatan. Hal ini diperlukan edukasi hukum kepada masyarakat agar tingkat Pelecehan Seksual, KDRT Fisik, dan KDRT Psikis mengalami penurunan.

Tabel 2.96

Jumlah Pengaduan/Laporan Tentang Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah Pengaduan	275	120	154

Sumber : DPPA, Kab Tangerang Tahun 2021

Dengan adanya peningkatan jumlah Pengaduan/Laporan Tentang Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Tangerang antara tahun 2020 dan 2021, menandakan bahwa masyarakat di Kabupaten Tangerang sudah mulai melek hukum.

2. Lingkungan Hidup

Untuk menghitung persentase penanganan sampah dapat disusun tabel sebagai berikut ini :

Tabel 2.97

Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Timbulan sampah yang ditangani (%)	32,34%	23,63%	24,13%	24,63%	39,00%

Sumber : DLHK Kabupaten Tangerang, 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang terus bertambah tentu saja mempengaruhi timbulan sampah yang ada. Dengan metode pendekatan diasumsikan bahwa volume timbulan sampah di Kab. Tangerang sebesar 1.956 ton/hari (asumsi : sampah yang dihasilkan = 0.7 kg/org/hari).

Satu-satunya tempat pembuangan akhir yang dimiliki adalah TPA Jatiwaringin dengan luas lahan 18 Ha dan yang sudah terpakai sekitar 7 Ha. Kondisi ini tidak serta merta mampu menyelesaikan masalah atau menampung volume sampah yang ada karena disebabkan oleh beberapa factor. Diantaranya adalah infrastruktur yang kurang memadai seperti akses masuk ke TPA, teknologi pengelolaan sampah yang masih open dumping (yang menyebabkan rendahnya penilaian TPA pada P1 adipura yaitu 36.27). Berikutnya disebabkan oleh kurangnya armada sampah. Adapun data armada pengangkut sampah vs volume sampah dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.98
Sampah yang terangkut di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Armada	Jumlah (unit)	Sampah yang terangkut (m ³ /hari)
Dinas	207	2.484
Kecamatan	46	552
Roda 3 (Germo)	72	144
Total	325	3180

Catatan : Volume bak : 6 m³, Ritase : 2

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah yang terangkut adalah 3.180 ton/hari atau sekitar 51% dari total sampah yang ada. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya kawasan kumuh dan titik-titik sampah liar. Hal lain yang juga menyumbang permasalahan sampah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku budaya 3R. Kabupaten Tangerang telah membangun dan memfasilitasi masyarakat dengan pembangunan TPST dalam kurun waktu tahun 2014 s/d 2019 telah dibangun 42 TPST di beberapa kecamatan namun yang aktif hanya sekitar 29 TPST, diantaranya TPST 3R Gemah Ripah yang berlokasi di Kecamatan Tigaraksa. Adapun Bank Sampah juga sudah mulai dikembangkan dan terdapat 2 (dua) Bank sampah yang sudah berjalan dengan baik, yaitu Bank Sampah Kemuning (Binong) dan bank Sampah Puri Permai (Tigaraksa). TPST dan Bank Sampah inilah yang masih perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah.

3. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi pelayanan KTP elektronik, KIA, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Perkawinan. Bentuk pelayanan terhadap penduduk dalam penerbitan KTP adalah proses perekaman data penduduk yang berjumlah 2,226,573 jiwa.

Tabel 2.99
Perekaman KTP di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Balaraja	42,563	41,707	84,270
2	Jayanti	23,850	23,433	47,283
3	Tigaraksa	54,026	53,067	107,093
4	Jambe	17,948	17,579	35,527
5	Cisoka	32,131	30,969	63,100
6	Kresek	24,573	24,431	49,004
7	Kronjo	21,645	22,303	43,948
8	Mauk	31,396	30,423	61,819
9	Kemiri	16,910	16,746	33,656
10	Sukadiri	22,789	22,064	44,853
11	Rajeg	60,426	58,418	118,844
12	Pasar Kemis	91,288	89,944	181,232
13	Teluknaga	57,199	55,718	112,917
14	Kosambi	39,579	38,929	78,508
15	Pakuhaji	43,930	41,943	85,873
16	Sepatan	38,006	36,620	74,626
17	Curug	61,364	60,911	122,275
18	Cikupa	73,483	71,273	144,756
19	Panongan	42,832	42,072	84,904
20	Legok	41,158	39,987	81,145
21	Pagedangan	36,785	36,142	72,927
22	Cisauk	30,201	29,457	59,658
23	Sukamulya	25,349	25,004	50,353
24	Kelapa Dua	60,381	61,992	122,373
25	Sindang Jaya	31,793	30,793	62,586
26	Sepatan Timur	36,409	34,562	70,971
27	Solear	32,978	31,874	64,852
28	Gunung Kaler	18,856	18,938	37,794

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
29	Mekar Baru	14,630	14,796	29,426
	JUMLAH	1,124,478	1,102,095	2,226,573

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Tangerang tahun 2021 sebanyak 2,295,725, data tersebut merupakan jumlah penduduk usia diatas 17 tahun yang diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagai bentuk tertib administrasi penduduk.

Tabel 2.100
Jumlah Penduduk Wajib KTP di Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Balaraja	43,861	42,949	86,810
2	Jayanti	24,624	24,135	48,759
3	Tigaraksa	55,789	54,800	110,589
4	Jambe	18,513	18,144	36,657
5	Cisoka	33,114	31,983	65,097
6	Kresek	25,240	25,108	50,348
7	Kronjo	22,253	22,874	45,127
8	Mauk	32,245	31,266	63,511
9	Kemiri	17,448	17,221	34,669
10	Sukadiri	23,313	22,648	45,961
11	Rajeg	62,472	60,380	122,852
12	Pasar Kemis	94,480	93,186	187,666
13	Teluknaga	59,019	57,495	116,514
14	Kosambi	40,757	40,094	80,851
15	Pakuhaji	45,104	43,049	88,153
16	Sepatan	39,182	37,771	76,953
17	Curug	63,076	62,677	125,753
18	Cikupa	75,589	73,421	149,010
19	Panongan	44,331	43,465	87,796
20	Legok	42,632	41,393	84,025
21	Pagedangan	38,030	37,368	75,398
22	Cisauk	31,183	30,472	61,655
23	Sukamulya	25,989	25,600	51,589
24	Kelapa Dua	62,181	63,926	126,107
25	Sindang Jaya	32,734	31,692	64,426
26	Sepatan Timur	37,509	35,615	73,124
27	Solear	34,174	32,955	67,129
28	Gunung Kaler	19,394	19,446	38,840
29	Mekar Baru	15,128	15,228	30,356
	JUMLAH	1,159,364	1,136,361	2,295,725

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Pelayanan kependudukan lainnya berupa pencatatan akta kelahiran yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap penduduk, pada tahun 2021 sebanyak 766.896 jiwa atau sekitar 84.82 persen yang sudah tercatat dan memiliki akta kelahiran, sisanya sebanyak 137,258 jiwa atau sekitar 15.18 persen belum memiliki akta kelahiran.

Tabel 2.101
Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Tangerang
Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	SUDAH MEMILIKI AKTA	% MEMILIKI AKTA	BELUM MEMILIKI AKTA	% BELUM MEMILIKI
1	Balaraja	31,767	90.43	3,362	9.57
2	Jayanti	16,778	85.45	2,856	14.55
3	Tigaraksa	42,387	89.66	4,887	10.34
4	Jambe	13,808	87.23	2,021	12.77
5	Cisoka	23,927	87.47	3,428	12.53
6	Kresek	16,071	82.89	3,317	17.11
7	Kronjo	11,734	68.63	5,363	31.37
8	Mauk	21,394	84.55	3,910	15.45
9	Kemiri	11,986	82.39	2,561	17.61
10	Sukadiri	15,321	86.23	2,446	13.77
11	Rajeg	40,609	82.74	8,469	17.26
12	Pasar Kemis	61,009	87.31	8,871	12.69
13	Teluknaga	36,545	79.68	9,319	20.32
14	Kosambi	26,221	87.28	3,820	12.72
15	Pakuhaji	27,279	80.91	6,437	19.09
16	Sepatan	25,678	81.78	5,721	18.22
17	Curug	38,997	84.30	7,261	15.70
18	Cikupa	52,890	88.09	7,153	11.91
19	Panongan	32,904	87.88	4,536	12.12
20	Legok	32,252	86.73	4,933	13.27
21	Pagedangan	24,417	84.34	4,533	15.66
22	Cisauk	21,511	85.05	3,781	14.95
23	Sukamulya	16,750	84.25	3,131	15.75
24	Kelapa Dua	34,167	85.42	5,832	14.58
25	Sindang Jaya	23,725	86.26	3,780	13.74
26	Sepatan Timur	23,550	81.16	5,467	18.84
27	Solear	23,091	86.63	3,563	13.37
28	Gunung Kaler	11,543	79.28	3,017	20.72
29	Mekar Baru	8,585	71.14	3,483	28.86
	JUMLAH	766,896	84.82	137,258	15.18

Sumber : DKB Semester II TAHUN 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

4. Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga. Menurut data yang tercatat pada tahun 2019 bahwa banyaknya kepala keluarga adalah 966.049 Keluarga, dengan jumlah anak sebanyak 1.057.096 anak.

Sementara untuk menunjang Program Keluarga Berencana, penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 juga telah dan sedang ber-KB dengan menggunakan beragam pilihan jenis alat KB yang dapat dilihat pada data berikut ini :

Tabel 2.102
Jumlah Keluarga dan Anak di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021

KECAMATAN	Jumlah Keluarga					Jumlah Anak				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Balaraja	38.348	39.502	40.659	42.118	28991	48.420	39.179	38.934	30612	30612
Cikupa	86.148	88.742	91.340	94.619	37050	97.285	39.673	79.392	38187	38187
Cisauk	18.822	19.389	19.956	20.673	18312	34.034	64.868	28.210	19356	19356
Cisoka	22.594	23.274	23.955	24.815	17413	38.598	18.064	30.160	19334	19334
Curug	58.259	60.014	61.771	63.988	28885	73.965	99.805	59.478	28244	28244
Gunung Kaler	13.727	14.140	14.554	15.077	13910	19.827	58.556	14.538	12734	12734
Jambe	11.187	11.523	11.861	12.287	12214	18.039	75.772	13.875	14190	14190
Jayanti	17.210	17.728	18.247	18.902	14766	30.444	80.700	22.376	13769	13769
Kelapa Dua	57.053	58.770	60.491	62.662	28994	78.656	49.782	60.492	24349	24349
Kemiri	10.649	10.969	11.290	11.696	10456	17.962	46.710	13.134	9878	9878
Kosambi	41.400	42.647	43.896	45.471	16585	58.880	35.010	46.047	13126	13126
Kresek	17.516	18.043	18.571	19.238	15707	24.029	132.322	17.607	17008	17008
Kronjo	15.749	16.223	16.698	17.297	9028	22.760	38.320	17.103	6798	6798
Legok	29.143	30.021	30.899	32.009	25696	48.724	49.135	39.186	28732	28732
Mauk	21.118	21.754	22.390	23.194	19453	29.945	30.687	21.799	18621	18621
Mekar Baru	10.377	10.690	11.003	11.398	4441	15.070	24.715	11.249	3722	3722
Pagedangan	27.79	28.626	29.464	30.522	25727	45.790	23.929	36.621	26525	26525
Pakuhaji	29.838	30.736	31.636	32.772	27263	43.663	19.781	32.389	25380	25380
Panongan	29.577	30.467	31.359	32.485	22568	55.985	22.781	48.561	24683	24683
Pasar Kemis	81.841	84.307	86.773	89.888	50033	126.970	14.976	111.100	47954	47954
Rajeg	39.164	40.343	41.524	43.014	46180	70.671	29.766	57.656	48688	48688
Sepatan	27.366	28.190	29.015	30.057	19119	46.158	17.892	36.761	20104	20104
Sepatan Timur	23.498	24.205	24.914	25.808	17080	36.870	19.402	27.545	15901	15901
Sindang Jaya	21.820	22.477	23.135	23.966	21558	37.605	72.715	29.496	23708	23708
Solear	20.873	21.501	22.131	22.925	25084	38.895	47.453	31.427	26145	26145
Sukadiri	14.983	15.434	15.886	16.456	9617	19.562	37.250	14.007	8479	8479
Sukamulya	17.331	17.852	18.375	19.035	12064	24.667	43.736	18.855	11973	11973
Teluknaga	40.723	41.950	43.178	44.728	38520	62.412	63.188	48.047	34639	34639
Tigaraksa	35.462	36.530	37.599	38.949	36067	62.962	60.146	52.295	36922	36922
JUMLAH	851.804	906.047	932.570	966.049	652781	1.328.848	1.356.313	1.057.096	649761	647761

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Tabel 2.103

Peserta Keluarga Berencana Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021

KEC.	MIX KONTRASEPSI																			
	IUD					MOW					MOP					IMPLANT				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Balaraja	4	1779	1.791	1.823	1873	95	593	596	627	643	0	168	168	168	168	70	2428	2451	2465	2557
Cikupa	165	6446	6.526	6617	6648	6	516	516	516	516	0	304	305	305	305	116	1102	1133	3467	1294
Cisauk	54	408	386	422	454	4	124	124	124	134	0	51	51	51	51	103	580	595	641	686
Cisoka	13	971	994	1015	1042	0	45	45	45	318	0	327	327	327	42	50	1841	1802	1843	567
Curug	49	4079	4.093	4162	4180	0	364	364	364	364	0	242	242	242	242	47	3282	3335	3467	3617
Gunung Kaler	7	888	567	573	599	1	256	256	256	256	0	92	92	92	92	57	2027	2066	2083	2135
Jambe	36	724	754	779	857	0	110	110	110	119	0	38	38	38	38	50	1025	1059	1099	1157
Jayanti	35	728	738	744	807	0	175	175	175	174	0	90	40	90	90	107	732	746	820	972
Kelapa Dua	100	2742	2707	2777	2917	0	182	182	182	205	0	140	140	140	178	110	2944	3005	3074	3238
Kemiri	9	1008	1015	1026	1029	0	221	221	221	221	0	77	77	77	77	34	798	858	921	953
Kosambi	9	1582	1589	1591	1596	0	614	614	614	614	0	413	413	413	413	91	2619	2648	2783	2988
Kresek	28	938	943	944	1291	0	180	180	180	282	0	180	71	71	87	139	1346	1388	1414	1763
Kronjo	49	490	509	517	526	0	88	88	88	88	0	22	22	22	22	66	1204	1299	1299	354
Legok	41	2443	2263	2283	2595	0	896	655	654	370	0	653	474	474	163	55	3677	3696	3754	3837
Mauk	28	1459	1490	1538	1561	0	322	322	322	325	0	174	174	174	175	33	2369	2442	2497	2537
Mekar Baru	29	566	890	893	535	1	254	254	254	74	0	92	92	92	22	45	1326	1330	1356	278
Pagedangan	98	1905	1945	1993	2286	3	360	360	360	361	2	211	211	211	213	226	1232	1288	1422	1717
Pakuhaji	6	1418	1443	1450	2608	2	165	165	165	500	0	611	611	611	730	57	2176	2227	2304	1110
Panongan	17	936	962	974	1003	0	260	260	260	265	0	67	67	67	67	8	1567	1636	1691	1726
Pasar Kemis	92	2308	2385	2446	2556	0	363	363	365	369	0	163	163	163	161	135	3236	3357	3521	3599
Rajeg	47	1408	1437	1491	1578	0	570	570	570	571	0	132	132	132	132	151	3073	3184	3350	3678
Sepatan	46	1376	1517	1532	1552	0	300	300	300	245	0	153	153	153	110	90	2783	2858	2982	3003
Sepatan Timur	16	1077	1088	1102	332	0	275	275	275	212	0	85	85	85	70	42	1665	1692	1723	2223
Sindang Jaya	47	883	928	969	991	0	135	135	135	135	0	140	140	140	140	28	836	878	943	987
Solear	21	785	794	800	792	2	321	321	321	338	0	59	59	59	58	78	1885	1914	2047	2107
Sukadiri	11	534	536	540	556	0	228	228	228	228	0	70	70	70	70	20	1156	1237	1296	1367
Sukamulya	13	524	545	552	589	2	208	210	210	215	0	62	62	62	62	44	1287	1319	1348	1421
Teluknaga	953	3796	3300	3387	3584	206	1235	1159	1179	1255	0	384	384	384	384	53	4251	4282	4466	4848
Tigaraksa	76	793	793	855	1418	0	203	203	203	120	0	199	199	199	44	109	1026	1084	1165	5454
JUMLAH	2099	44994	32530	45795	48556	322	956	9251	9303	9517	2	5399	5062	5112	4406	2214	55473	56809	61241	62173

Sumber : DPPKB, Kab Tangerang Tahun 2020

Tabel 2.104

Peserta Keluarga Berencana Aktif Per Mix Kontrasepsi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021

KEC.	MIX KONTRASEPSI															
	IMPLANT				SUNTIKAN				PIL				KONDOM			
	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
Balaraja	2451	239	2557	7865	8027	8027	8676	5362	5104	5419	5960	236	238	239	348	
Cikupa	1133	1186	1294	15481	15632	15709	16385	6770	6849	6866	7344	315	327	337	444	
Cisauk	595	629	686	5156	5293	5452	7030	3058	3098	3113	2521	156	157	158	304	
Cisoka	1802	1843	567	6354	6537	6764	5937	3088	3251	3398	4992	333	380	503	371	
Curug	3335	3428	3617	11698	11865	12030	14705	8029	8144	8242	7946	335	352	358	398	
Gunung Kaler	2066	2079	2135	3646	3743	4047	5103	3252	3333	3500	3588	166	221	247	367	
Jambe	1059	1092	1157	4024	4139	4511	5455	1848	1945	1986	1940	366	372	397	578	
Jayanti	746	760	972	5884	996	6069	7171	4001	4055	4080	4753	422	442	447	744	
Kelapa Dua	3005	3055	3238	11471	11646	12218	13476	4822	4940	5212	6044	917	1023	1377	1867	

KECAMATAN	JUMLAH											
	KLINIK				PPLKB				PKB			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Mekar Baru	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagedangan	3	2	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1
Pakuhaji	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Panongan	4	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1
Pasar Kemis	12	10	10	13	0	0	0	0	1	1	0	0
Rajeg	4	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1
Sepatan	2	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepatan Timur	2	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Sindang Jaya	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Solear	2	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0
Sukadiri	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Sukamulya	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Teluknaga	4	1	1	5	0	0	0	0	1	1	1	1
Tigaraksa	4	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	132	47	47	93	0	0	0	0	13	13	7	8

Sumber : DPPKB, Kab Tangerang Tahun 2021

Tabel 2.106

Jumlah Klinik, Petugas Penyuluh Lapangan KB, PKB, PPKBD dan Sub PPKBD Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021 (lanjutan)

KECAMATAN	JUMLAH											
	PPKBD				SUB PPKBD				TOTAL			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Balaraja	9	9	9	9	44	44	48	48	100	57	62	63
Cikupa	14	14	14	14	69	69	84	83	92	90	104	108
Cisauk	6	6	6	6	36	36	37	37	45	43	44	45
Cisoka	10	10	10	10	56	56	64	65	68	67	75	77
Curug	7	7	7	7	138	138	90	91	152	151	102	101
Gunung Kaler	9	9	9	9	37	37	37	37	47	46	46	47
Jambe	10	10	10	10	51	51	54	59	62	61	64	70
Jayanti	8	8	8	8	39	39	41	44	49	48	50	55
Kelapa Dua	6	6	6	6	96	96	98	98	108	104	107	112
Kemiri	7	7	7	7	32	32	32	32	41	40	39	40
Kosambi	10	10	10	10	148	148	146	138	162	160	157	151
Kresek	9	9	9	9	43	43	44	45	55	54	55	56
Kronjo	10	10	10	10	41	41	43	32	53	52	54	44
Legok	11	11	11	11	72	72	70	78	88	86	83	93
Mauk	12	12	12	12	56	56	57	57	69	68	69	71
Mekar Baru	8	8	8	8	33	33	37	32	42	41	45	41
Pagedangan	11	11	11	11	72	72	76	76	87	86	90	90
Pakuhaji	14	14	14	14	108	108	90	81	125	123	104	97
Panongan	8	8	8	8	68	68	87	79	80	78	97	91
Pasar Kemis	9	9	9	9	127	127	146	146	149	147	165	171
Rajeg	13	13	13	13	87	87	111	114	104	102	126	131
Sepatan	8	8	8	8	43	43	63	59	53	52	72	70
Sepatan Timur	8	8	8	8	38	38	42	42	49	48	51	52
Sindang Jaya	7	7	7	7	51	51	61	60	60	60	70	70

KECAMATAN	JUMLAH											
	PPKBD				SUB PPKBD				TOTAL			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Solear	7	7	7	7	53	53	54	55	63	62	62	64
Sukadiri	8	8	8	8	41	41	44	44	50	49	52	53
Sukamulya	8	8	8	8	37	37	39	40	46	45	48	50
Teluknaga	13	13	13	13	138	138	160	160	156	153	175	179
Tigaraksa	14	14	14	14	89	89	108	148	107	105	124	166
JUMLAH	274	274	274	274	1,943	1,943	2,063	2,094	2,362	2,277	2,391	2458

Sumber : DPPKB, Kab Tangerang Tahun 2021

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Tangerang tahun 2020 meningkat drastic menjadi 35% dibandingkan tahun 2019 yang mengalami penurunan 32% dari tahun 2018-2019. Dari Psangan Usia Subur tersebut sebanyak 97.015 pasangan yang ber-KB dari 691.501 PUS yang ada. Untuk lebih jelasnya lihat table berikut :

Tabel 2.107
Jumlah Pasangan Subur Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Tahun 2017-2021

KECAMATAN	JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR					Jumlah Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah 20 Tahun
	2017	2018	2019	2020	2021	2019
Balaraja	25,857	26,14	18,995	26,216	28368	204
Cikupa	42,229	43,43	29,939	43,796	45935	284
Cisauk	13,093	13,45	12,798	13,654	14270	362
Cisoka	16,437	17,784	14,197	18,352	19350	788
Curug	39,983	40,352	14,957	40,768	44673	176
Gunung Kaler	13,346	14,596	9,138	13,346	13941	270
Jambe	10,951	11,192	8,567	11,631	12369	266
Jayanti	17,54	17,847	9,53	17,987	19983	171
Kelapa Dua	30,59	32,185	11,65	33,082	36417	132
Kemiri	10,017	10,409	6,751	10,818	11333	114
Kosambi	26,45	27,189	19,433	27,592	32670	321
Kresek	14,418	14,976	10,514	16,161	14729	163
Kronjo	13,329	13,443	9,484	13,52	17714	281
Legok	16,173	17,325	13,627	17,613	19309	263
Mauk	20,532	20,948	14,04	21,454	19776	233
Mekar Baru	15,502	13,701	5,982	15,46	11682	159
Pagedangan	24,425	24,743	15,724	25,032	22315	246
Pakuhaji	31,41	32,115	19,051	32,577	28195	505
Panongan	26,122	26,747	19,512	26,726	28396	500
Pasar Kemis	49,164	50,989	38,753	51,882	45512	334

Sumber : DPPKB, Kab Tangerang Tahun 2021

Rajeg	31,347	34,091	30,072	34,956	39107	830
Sepatan	27,886	28,555	16,522	27,896	29419	184
Sepatan Timur	19,254	19,455	14,23	19,618	21329	331
Sindang Jaya	17,931	19,414	15,568	20,331	21679	327
Solear	14,927	15,222	12,204	15,293	16314	298
Sukadiri	11,068	11,905	9,543	12,624	13372	135
Sukamulya	14,516	14,832	10,127	15,126	17005	213
Teluknaga	42,441	43,732	23,603	44,287	47100	228
Tigaraksa	23,45	23,534	22,473	23,703	26290	327
JUMLAH	660,388	680,301	456,984	691,501	718552	8,645

Tabel 2.108
Jumlah Pasangan Subur Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Tahun 2017-2021 (lanjutan)

KECAMATAN	Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB					Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Balaraja	1,791	1,66	1,646	1,563	20225	1,791	1,66	1,646	1,563	1130
Cikupa	6,54	7,497	6,444	6,291	33136	6,54	7,497	6,444	6,291	5134
Cisauk	2,584	2,538	2,503	2,415	11180	2,584	2,538	2,503	2,415	1604
Cisoka	3,632	3,552	3,485	3,338	13269	3,632	3,552	3,485	3,338	2881
Curug	4,37	4,334	4,259	4,058	31452	4,37	4,334	4,259	4,058	4331
Gunung Kaler	2,605	2,653	2,918	2,583	12140	2,605	2,653	2,918	2,583	657
Jambe	2,191	2,067	2,017	1,847	10144	2,191	2,067	2,017	1,847	1325
Jayanti	2,139	2,088	2,018	1,895	14711	2,139	2,088	2,018	1,895	1444
Kelapa Dua	4,687	4,674	4,731	4,353	27925	4,687	4,674	4,731	4,353	3364
Kemiri	2,023	2,001	1,962	1,88	9353	2,023	2,001	1,962	1,88	830
Kosambi	4,819	4,78	4,739	4,38	22147	4,819	4,78	4,739	4,38	6491
Kresiek	1,877	1,847	1,758	1,728	11961	1,877	1,847	1,758	1,728	1709
Kronjo	2,514	2,445	2,359	2,245	14536	2,514	2,445	2,359	2,245	1978
Legok	3,486	3,435	4,162	4,007	13804	3,486	3,435	4,162	4,007	3331
Mauk	2,622	2,568	2,52	2,388	16446	2,622	2,568	2,52	2,388	1776
Mekar Baru	2,67	2,59	2,259	2,2	9280	2,67	2,59	2,259	2,2	1501
Pagedangan	2,629	2,6	2,547	2,333	19723	2,629	2,6	2,547	2,333	1868
Pakuhaji	3,028	3	2,918	2,529	21205	3,028	3	2,918	2,529	2925
Panongan	4,212	4,173	4,106	3,989	19657	4,212	4,173	4,106	3,989	3949
Pasar Kemis	6,61	6,561	6,476	6,101	41637	6,61	6,561	6,476	6,101	2253
Rajeg	4,03	7,332	6,216	5,818	28060	4,03	7,332	6,216	5,818	5901
Sepatan	7,112	7,077	6,835	6,656	19875	7,112	7,077	6,835	6,656	5923
Sepatan Timur	3,465	3,452	3,367	3,276	14555	3,465	3,452	3,367	3,276	3279
Sindang Jaya	3,013	2,99	2,963	2,652	17173	3,013	2,99	2,963	2,652	3052
Solear	3,44	3,11	3,087	2,998	13114	3,44	3,11	3,087	2,998	2368
Sukadiri	2,096	2,08	2,08	1,785	10563	2,096	2,08	2,08	1,785	2590
Sukamulya	2,493	2,483	2,431	2,304	13377	2,493	2,483	2,431	2,304	1441
Teluknaga	5,531	5,472	5,964	5,378	33135	5,531	5,472	5,964	5,378	10877

KECAMATAN	Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB					Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Tigaraksa	4,223	4,181	4,077	4,025	17863	4,223	4,181	4,077	4,025	5463
JUMLAH	102,432	105,24	102,847	97,015	541646	102,432	105,24	102,847	97,015	91375

Sumber : DPPKB, Kab Tangerang Tahun 2021

Tabel 2.109

Jumlah Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021

2017	2018	2019	2020	2020	2021
Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	√	√
Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan	√	√
LH dan Kebersihan	LH dan Kebersihan	LH dan Kebersihan	LH dan Kebersihan	√	√
Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	√	√
KEMENAG	KEMENAG	KEMENAG	KEMENAG	√	√
DP3A	DP3A	DP3A	DP3A	√	√
Dukcapil	Dukcapil	Dukcapil	Dukcapil	√	√
Pertanian Peternakan	Pertanian Peternakan	Pertanian Peternakan	Pertanian Peternakan	√	√
Perikanan	Perikanan	Perikanan	Perikanan	√	√
Binamarga	Binamarga	Binamarga	Binamarga	√	√
Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial	√	√
Perkim	Perkim	Perkim	Perkim	√	√
Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa	√	√

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Tabel 2.110

Jumlah Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian Penduduk di Kabupaten Tangerang 2017-2021

2017	2018	2019	2020	2021
DINKES	DINKES	DINKES	DINKES	DINKES
DISNAKER	DISNAKER	DISNAKER	DISNAKER	DISNAKER
DINSOS	DINSOS	DINSOS	DINSOS	DINSOS
DISDIK	DISDIK	DISDIK	DISDIK	DISDIK
DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
DP3A	DP3A	DP3A	DP3A	DP3A
DUKCAPIL	DUKCAPIL	DUKCAPIL	DUKCAPIL	DUKCAPIL
BPS	BPS	BPS	BPS	BPS
DINAS KOPERASI	DINAS KOPERASI	DINAS KOPERASI	DINAS KOPERASI	DINAS KOPERASI
BAPPEDA	BAPPEDA	BAPPEDA	BAPPEDA	BAPPEDA

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2021 berjumlah 4.843 kelompok, dengan

adanya kelompok BKR ini diharapkan pemahaman tentang keluarga berencana bisa ditingkatkan dengan baik.

Tabel 2.11
Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kabupaten
Tangerang Tahun 2017-2021

Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)									
KECAMATAN	Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)				Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Remaja				
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021
Balaraja	128	128	128	128	119	119	119	119	125
Cikupa	58	58	58	58	41	41	41	41	166
Cisauk	92	92	92	92	67	67	67	67	92
Cisoka	300	300	300	300	288	288	288	288	358
Curug	207	207	207	207	167	167	167	167	71
Gunung Kaler	126	126	126	126	116	116	116	116	163
Jambe	218	218	218	218	200	200	200	200	265
Jayanti	120	120	120	120	106	106	106	106	98
Kelapa Dua	125	125	125	125	110	110	110	110	219
Kemiri	696	696	696	696	519	519	519	519	200
Kosambi	230	230	230	230	185	185	185	185	350
Kresiek	176	176	176	176	170	170	170	170	163
Kronjo	300	300	300	300	240	240	240	240	570
Legok	267	267	267	267	260	260	260	260	275
Mauk	300	300	300	300	243	243	243	243	200
Mekar Baru	416	416	416	416	372	372	372	372	157
Pagedangan	233	233	233	233	148	148	148	148	56
Pakuhaji	45	45	45	45	38	38	38	38	70
Panongan	207	207	207	207	171	171	171	171	201
Pasar Kemis	90	90	90	90	61	61	61	61	71
Rajeg	124	124	124	124	95	95	95	95	225
Sepatan	101	101	101	101	67	67	67	67	300
Sepatan Timur	120	120	120	120	100	100	100	100	100
Sindang Jaya	105	105	105	105	81	81	81	81	100
Solear	144	144	144	144	127	127	127	127	148
Sukadiri	162	162	162	162	70	70	70	70	140
Sukamulya	237	237	237	237	209	209	209	209	154
Teluknaga	332	332	332	332	243	243	243	243	565
Tigaraksa	214	214	214	214	180	180	180	180	220
JUMLAH	5.873	5.873	5.873	5.873	4.843	4.843	4.843	4.843	5822

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang

Tabel 2.112

Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021

Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)									
KECAMATAN	Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)				Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB				
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021
Balaraja	281	275	275	250	265	271	271	246	248
Cikupa	155	50	50	166	101	25	25	109	97
Cisauk	240	240	340	240	172	177	177	177	177
Cisoka	414	416	416	436	363	372	372	317	350
Curug	358	358	358	299	304	304	304	181	184
Gunung Kaler	354	271	271	249	238	216	216	220	263
Jambe	258	258	258	270	213	250	250	264	247
Jayanti	138	138	138	138	118	128	128	129	110
Kelapa Dua	226	226	226	595	167	175	175	265	230
Kemiri	230	370	370	232	101	101	101	167	150
Kosambi	230	370	370	232	192	193	193	167	167
Kresek	253	230	230	255	218	203	203	248	263
Kronjo	450	430	430	580	280	230	230	400	400
Legok	408	408	408	440	323	327	327	425	435
Mauk	450	450	450	281	213	213	213	221	270
Mekar Baru	271	242	242	275	216	218	218	199	110
Pagedangan	341	342	342	342	253	261	261	272	185
Pakuhaji	93	109	109	109	56	56	56	56	95
Panongan	472	150	150	180	353	132	132	158	189
Pasar Kemis	136	275	275	145	135	245	245	144	128
Rajeg	252	245	245	255	182	229	229	186	122
Sepatan	184	184	184	118	161	161	161	115	90
Sepatan Timur	208	228	228	271	154	160	160	130	80
Sindang Jaya	216	396	396	252	152	152	152	180	180
Solear	403	407	407	416	309	345	345	352	242
Sukadiri	87	175	175	185	54	160	160	185	185
Sukamulya	364	361	361	105	268	271	271	83	201
Teluknaga	324	289	289	284	208	208	208	240	240
Tigaraksa	305	258	258	216	216	216	216	196	245
JUMLAH	8.101	8.151	8.251	7.805	5.985	5.999	5.999	6.025	5883
<i>Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang</i>									

Tabel 2.113
Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) di Kabupaten
Tangerang Tahun 2017-2021

Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)									
KECAMATAN	Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)				Jumlah Anggota Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB				
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021
Balaraja	226	207	207	150	179	185	185	90	100
Cikupa	165	111	111	201	107	83	83	175	128
Cisauk	381	381	381	198	274	287	287	128	287
Cisoka	330	330	330	140	260	276	276	108	140
Curug	347	347	347	284	306	306	306	280	32
Gunung Kaler	362	422	422	255	264	299	299	126	122
Jambe	204	204	204	236	189	191	191	232	204
Jayanti	98	143	143	143	75	70	73	82	94
Kelapa Dua	284	294	294	262	215	97	215	246	350
Kemiri	690	690	690	140	432	432	432	140	157
Kosambi	229	320	320	339	134	134	134	179	150
Kresek	196	154	154	162	156	121	121	154	122
Kronjo	600	580	580	590	475	430	430	540	590
Legok	336	336	336	495	286	305	305	490	476
Mauk	600	600	600	275	223	223	223	175	175
Mekar Baru	422	215	215	242	299	156	156	207	116
Pagedangan	198	198	198	425	105	115	115	255	145
Pakuhaji	88	101	101	10	53	53	53	7	30
Panongan	172	113	113	204	103	90	90	100	150
Pasar Kemis	84	114	114	87	76	67	67	85	92
Rajeg	126	175	175	86	94	103	103	81	99
Sepatan	258	258	258	255	224	224	224	202	250
Sepatan Timur	120	76	76	371	72	36	36	238	15
Sindang Jaya	283	371	371	857	155	155	155	126	107
Solear	245	249	249	100	107	118	18	61	81
Sukadiri	0	130	130	143	0	120	120	143	143
Sukamulya	233	233	233	381	206	216	216	114	176
Teluknaga	445	326	326	326	285	285	285	285	285
Tigaraksa	300	204	204	140	215	191	191	138	138
JUMLAH	8022	7882	7882	7497	5569	5368	5389	5187	4954
<i>Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang</i>									

5. Perhubungan

Populasi kendaraan yang berada di Kabupaten Tangerang menurut data Polri dari tahun 2019-2021 meliputi mobil penumpang, bus, truck, dan sepeda motor. Data tahun 2021 untuk mobil penumpang sebanyak 198.647 unit, dan sepeda motor sebanyak 1.203.050 unit, dengan banyaknya kepemilikan sepeda

motor di Kabupaten Tangerang dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang banyak di Provinsi Banten, dan didominasi sebagai alat transportasi yang hemat untuk aktivitas kerja dan kegiatan lainnya.

Tabel 2.114
Jumlah Kendaraan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No.	Kendaraan	2019	2020	2021
1	Mobil Penumpang	192,302	189,087	198,647
2	Bus	400	310	1,648
3	Truk	55,246	53,669	52,844
4	Sepeda Motor	1,339,870	1,253,300	1,203,050
	Jumlah	1,587,818	1,496,366	1,456,189

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

Ijin Trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan mobil bus atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus. yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap.lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Ijin trayek di Kabupaten Tangerang tahun 2020 sejumlah 1.408 buah dengan jumlah penduduk 3.245.619 jiwa. Sehingga dapat dihitung bahwa rasio ijin trayek tahun 2020 sebesar 1 : 2305. Sementara ijin trayek di Kabupaten Tangerang tahun 2021 sejumlah 1.408 buah dengan jumlah penduduk 3.263.794 jiwa, sehingga dapat dihitung bahwa rasio ijin trayek tahun 2021 sebesar 1: 2.318.

Tabel 2.115
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah ijin Trayek	1.917	1.419	1.408	1.408
2.	Jumlah Penduduk	3.692.693	3.800.787	3.245.619	3.263.794
3.	Rasio Ijin Trayek	1 : 1.926	1 : 2.678	1 : 2.305	1 : 2.318

Sumber : Dinas Perhubungan tahun 2021

Unit pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau uji KIR di Kabupaten Tangerang hanya 1 unit yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan yaitu yang berlokasi di Kecamatan Balaraja. Selama tahun 2015 sampai dengan 2021 telah dilaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT PKB sebanyak 376.361 unit, kendaraan dengan rincian mobil barang sebanyak 349.839 unit, mobil bis sekitar 17.008 unit, mobil penumpang sebanyak 8.126 unit, dan tempelan sebanyak 1.378 unit.

Selama tahun 2015 telah di uji KIR sebanyak 51.735 unit, tahun 2016 sebanyak 51.192 unit, tahun 2017 sebanyak 51.461 unit, tahun 2018 sebanyak 59.650 unit, tahun 2019 sebanyak 59.650 unit, tahun 2020 sebanyak 51.133 unit, dan tahun 2021 sebanyak 56.137 unit. KIR adalah rangkaian tes untuk mengukur apakah sebuah kendaraan masih layak jalan atau tidak. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda 'keur' yang berarti menyetujui. Uji KIR mobil wajib bagi kendaraan niaga, baik itu yang digunakan untuk mengangkut penumpang maupun barang. Oleh sebab itu, tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan uji kir sudah semakin baik dibanding tahun sebelumnya, hal ini sesuai dengan peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan uji kir dari tahun 2020 ke tahun 2021.

Tabel 2.116

Perkembangan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

Jenis Kendaraan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mobil Barang	45.832	45.639	47.482	51.505	56.271	48.956	54.154
Mobil Bus	4.850	4.812	3.520	3.199	315	209	103
Mobil Penumpang	1.043	741	241	147	2.738	1.707	1.509
Tempelan	-	-	218	202	326	261	371
Jumlah	51.735	51.192	51.461	55.053	59.650	51.133	56.137

Sumber : UPT PKB Dinas Perhubungan. tahun 2021. Diolah.

Unit pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau uji KIR di Kabupaten Tangerang hanya 1 unit yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan yaitu yang berlokasi di Kecamatan Balaraja. Selama tahun 2015 sampai dengan 2021

telah dilaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT PKB sebanyak 376.361 unit, kendaraan dengan rincian mobil barang sebanyak 349.839 unit, mobil bis sekitar 17.008 unit, mobil penumpang sebanyak 8.126 unit, dan tempelan sebanyak 1.378 unit. Selama tahun 2015 telah di uji KIR sebanyak 51.735 unit, tahun 2016 sebanyak 51.192 unit, tahun 2017 sebanyak 51.461 unit, tahun 2018 sebanyak 59.650 unit, tahun 2019 sebanyak 59.650 unit, tahun 2020 sebanyak 51.133 unit, dan tahun 2021 sebanyak 56.137 unit.

KIR adalah rangkaian tes untuk mengukur apakah sebuah kendaraan masih layak jalan atau tidak. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda 'keur' yang berarti menyetujui. Uji KIR mobil wajib bagi kendaraan niaga, baik itu yang digunakan untuk mengangkut penumpang maupun barang. Oleh sebab itu, tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan uji kir sudah semakin baik dibanding tahun sebelumnya, hal ini sesuai dengan peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan uji kir dari tahun 2020 ke tahun 2021.

Tabel 2.117
Perkembangan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PKB Dinas
Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

Jenis Kendaraan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mobil Barang	45.832	45.639	47.482	51.505	56.271	48.956	54.154
Mobil Bus	4.850	4.812	3.520	3.199	315	209	103
Mobil Penumpang	1.043	741	241	147	2.738	1.707	1.509
Tempelan	-	-	218	202	326	261	371
Jumlah	51.735	51.192	51.461	55.053	59.650	51.133	56.137

Sumber : UPT PKB Dinas Perhubungan. tahun 2021. diolah

a. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Kabupaten Tangerang memiliki 1 buah pelabuhan laut dan 1 buah terminal bis untuk menunjang transportasi penduduk antar daerah dan 2 pelabuhan udara.

6. Komunikasi dan Informasi

A. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Selular (HP)

Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang memiliki Telepon Seluler di Kabupaten Tangerang tahun 2019 adalah sekitar 36,5 persen, sedangkan yang tidak memiliki telepon seluler sekitar 63,5 persen.

Gambar 2.46
Persentase penduduk 5 tahun keatas yang memiliki HP Tahun 2015-2021 di Kabupaten Tangerang

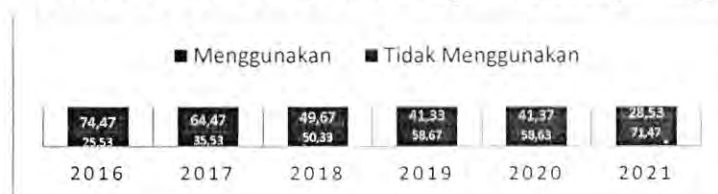


Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten Tahun 2015-2021

B. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer dan Akses terhadap Internet

Sementara itu, aktivitas penduduk yang mengakses internet pada tahun 2018 sekitar 50,33 persen dan pada tahun 2021 naik menjadi 71,47 persen, dengan menggunakan komputer sebanyak 8,95 persen.

Gambar 2.47
Persentase penduduk 5 tahun keatas yang menggunakan Akses internet Tahun 2015-2021 di Kabupaten Tangerang



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten Tahun 2012-2021

Kabupaten Tangerang dengan luas wilayah yang sangat luas dari pantai utara sampai yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang memberikan kendala berupa sinyal internet dan seluler

yang tidak bisa diterima dengan masih adanya blank spot, sebanyak 257 desa/kelurahan menerima sinyal 4G dan meningkat ditahun 2021 sebanyak 267 desa/kelurahan menerima sinyal 4G, tahun 2020 sebanyak 17 desa/kelurahan masih menerima sinyal G/H/H+/EVDO tapi tahun 2021 menurun menjadi 7 desa/kelurahan yang menerima sinyal tersebut, ini berarti desa/kelurahan pengguna internet dan seluler mulai beralih ke teknologi 4G.

Tabel 2.118

Banyaknya Desa/Kelurahan dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler, 2020 dan 2021

No	Sinyal	2020	2021
1	4G	257	267
2	G/H/H+/EVDO	17	7
3	2,5G/E/GPRS	0	0
4	Tidak Ada	0	0

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

7. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Terdapat 723 koperasi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 437 koperasi merupakan koperasi aktif dan mampu menyerap 2.151 karyawan. Berdasarkan modalnya, koperasi di Kabupaten Tangerang lebih banyak menggunakan modal dari luar dibandingkan modal sendiri.

Tabel 2.119

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Tangerang 2018-2021

KECAMATAN	KOPERASI	KOPERASI AKTIF				KOPERASI TIDAK AKTIF		TENAGA KERJA			
		2020	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2018	2019	2020
Balaraja	41	30	32	33	34	8	8	90	96	99	96
Cikupa	93	32	35	36	45	57	57	96	105	108	91
Cisauk	24	5	6	6	9	18	18	15	18	18	0
Cisoka	7	5	5	5	5	2	2	15	15	15	0
Curug	43	12	15	15	19	28	28	36	45	45	23

KECAMATAN	KOPERASI	KOPERASI AKTIF				KOPERASI TIDAK AKTIF		TENAGA KERJA			
	2020	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Gunung Kaler	6	2	2	2	3	4	4	6	6	6	0
Jambe	4	3	3	3	4	1	1	9	9	9	0
Jayanti	14	10	11	11	12	3	3	30	33	33	2
Kelapa Dua	75	22	33	36	43	39	39	66	99	108	70
Kemiri	5	4	4	4	5	1	1	12	12	12	11
Kosambi	7	5	5	5	7	2	2	15	15	15	2
Kresek	8	3	4	4	4	4	4	9	12	12	0
Kronjo	5	2	2	2	7	3	3	6	6	6	7
Legok	24	7	8	9	15	15	15	21	24	27	0
Mauk	12	9	11	11	11	1	1	27	33	33	8
Mekar Baru	2	1	2	2	2	0	0	3	6	6	0
Pagedangan	34	11	15	19	21	15	15	215	227	242	1521
Pakuhaji	9	3	3	3	4	6	6	9	9	9	0
Panongan	18	9	13	13	16	5	5	27	39	39	71
Pasar Kemis	59	26	29	30	36	29	29	78	87	90	81
Rajeg	23	13	17	17	20	6	6	39	51	51	16
Sepatan	23	7	9	10	13	13	13	21	27	30	24
Sepatan Timur	5	3	3	3	4	2	2	9	9	9	112
Sindang Jaya	5	3	4	5	7	0	0	9	12	15	0
Solear	13	7	9	10	11	3	3	21	27	30	0
Sukadiri	7	6	6	6	7	1	1	18	18	18	6
Sukamulya	6	5	5	5	9	1	1	15	15	15	0
Teluknaga	27	11	14	15	22	12	12	33	42	45	0
Tigaraksa	42	30	35	35	42	7	7	207	222	222	10
JUMLAH	641	286	340	355	437	286	286	1.157	1.319	1.367	2.151

Sumber : Dinas Koperasi Kab Tangerang Tahun 2021

8. Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah pengeluaran atau perbelanjaan perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor Penanaman Modal Asing/PMA dan Investor dalam negeri yang berinvestasi di Kabupaten Tangerang tahun 2019 sebanyak 2.776 investor. dengan 1.140 investor dalam negeri. 1.636 investor asing.

Tabel 2.120

Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

No	Penanaman Modal	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PMDN	53	115	181	326	1.140	2.173	2.345
2	PMA	62	110	132	833	1.636	1.778	1.251
	Jumlah	115	225	313	1.716	2.776	3.951	3.596

Sumber : DPMPSTSP Kab. Tangerang. 2021

Dengan bertambahnya jumlah investor pada PMDN dari tahun 2020 ke 2021 menandakan semakin dipercayanya investasi di kabupaten Tangerang. Akan tetapi untuk Penanaman Modal pada PMA mengalami penurunan , hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 maka banyak perusahaan PMA yang berkurang jumlahnya dalam berinvestasi di Kabupaten Tangerang.

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi PMA di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 senilai 313.602 (ribu US\$). Untuk PMDN mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 4.121.081,30. Sedangkan perluasan proyek PMA sebesar 1.251,00 dan PMDN sebesar 2.354,00.

Tabel 2.121

Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PMA							
Nilai Investasi (ribu US\$)	472.486.60	560.327.5	412.661.5	774.731.6	516.450	149,732	313.602,88
Perluasan (Ribu US\$)							
Jumlah Proyek	62	110	132	833	1636	470	1.251,00
Perluasan Proyek							
PMDN							
Nilai Investasi (juta Rp)	3.401.518.4	3.986.356.3	6.413.641.5	6.988.565	7.656.675	2,082,947	4.121.081,30
Perluasan (Juta Rp.)							
Jumlah Proyek	53	115	181	326	1.140	781	2.354,00
Perluasan Proyek							

Sumber :DPMPSTSP Kab Tangerang 2021

9. Kepemudaan dan olah raga

Pada tahun 2021, persentase organisasi pemuda yang aktif terdapat sejumlah 85% dari total yang ada, Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 70%. Sementara persentase wirausaha muda juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 67% di tahun 2020 menjadi 70% di tahun 2021. Untuk cakupan pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda, mengalami peningkatan menjadi 75%. Jumlah atlet yang berprestasi mengalami penurunan di tahun 2021 dari tahun sebelumnya, yaitu 21 orang menjadi 4 orang, Penurunan signifikan terjadi di tahun 2021 seperti yang tertera pada table berikut ini :

Tabel 2.122
Data Kepemudaan Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	20	40	55	70	85
Persentase wirausaha muda (%)	42	57	62	67	70
Cakupan pembinaan olahraga (%)	33	35	41	41	75
Cakupan pembinaan atlet muda (%)	20	42	60	79	75
Jumlah atlet berprestasi (Orang)	22	145	22	21	4

Sumber : *Disporabudpar, 2021*

10. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat. yang disusun menurut sistim tertentu. yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Banyaknya jumlah perpustakaan akan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun sebanyak 72.256 orang dengan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 111.363 eks.

- ✓ Tahun 2015 : 5.629 judul / 16.888 eks
- ✓ Tahun 2016 : 3.336 judul / 18.000 eks
- ✓ Tahun 2017 : 58.120 judul / 55.000 eks
- ✓ Tahun 2018 : 60.120 judul/60.000 eks
- ✓ Tahun 2019 : 68.000 judul/68.000 eks
- ✓ Tahun 2020 : 111.363 koleksi
- ✓ Tahun 2021 : 112.147 koleksi

Sementara kunjungan ke perpustakaan sebanyak 15.852 orang mengalami penurunan dikarenakan pembatasan di pandemi Covid-19. Kapasitas perpustakaan yang ada di Kabupaten Tangerang baru 1.492 unit dengan 1 perpustakaan daerah, 29 perpustakaan kecamatan.

Tabel 2.123

Kondisi Perpustakaan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	84.344	161.221	249.793	304.358	335.707	72.256	15.852
Koleksi Buku	16.888	18.000	55.000	60.000	68.000	111,363	112.147
Jumlah Perpustakaan	6	6	6	6	6	1.491	1.492

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Tangerang Tahun 2015-2021

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan perikanan

Tingkat konsumsi ikan atau dikenal dengan Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per-kapita per- tahun.

Potensi Kabupaten Tangerang dalam sector perikanan khususnya ikan dari laut cukup tinggi, dengan panjang garis pantai yang cukup panjang, berpotensi tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Tangerang tinggi. Data konsumsi ikan di Kabupaten Tangerang tahun 2021 mencapai 1085,7 Kg/Kapita/Tahun dengan rata-rata tingkat konsumsi sekitar 37,44 Kg/Kapita/Tahun.

Tabel 2.124
Jumlah Konsumsi Ikan per Kecamatan di Kabupaten Tangerang
Tahun 2018-2021

KECAMATAN	KONSUMSI IKAN (Kg/Kapita/Tahun)			
	2018	2019	2020	2021
Balaraja	33.57	34.98	36.25	37,86
Cikupa	33.40	34.69	36.25	37,65
Cisauk	32.89	34.12	36.78	36,98
Cisoka	33.54	34.85	35.89	36,89
Curug	32.85	33.89	36.22	37,65
Gunung Kaler	32.89	34.94	35.85	36,85
Jambe	32.75	34.28	35.35	36,92
Jayanti	32.85	34.25	35.95	36,98
Kelapa Dua	33.45	34.98	36.24	37,97
Kemiri	32.97	34.80	35.85	37,68
Kosambi	33.95	35.11	36.28	37,88
Kresiek	32.12	34.90	35.98	36,78
Kronjo	33.55	35.22	36.35	37,89
Legok	32.24	34.32	36.48	37,44
Mauk	33.45	34.65	35.85	37,87
Mekar Baru	32.87	34.29	35.86	37,29
Pagedangan	32.89	34.22	35.98	36,89
Pakuhaji	33.78	34.95	36.45	37,79
Panongan	33.10	34.82	35.85	36,72
Pasar Kemis	32.78	34.25	35.95	37,48
Rajeg	32.35	34.45	36.28	37,88
Sepatan	33.58	34.99	36.25	37,67
Sepatan Timur	33.10	34.75	36.29	37,63
Sindang Jaya	32.75	34.12	35.87	36,89
Solear	32.80	34.90	35.87	36,79
Sukadiri	33.85	34.49	35.94	36,78
Sukamulya	32.96	34.02	35.90	37,79
Teluknaga	33.90	34.94	36.38	38,12
Tigaraksa	33.25	34.95	35.98	37,69
Jumlah	960.43	1,004.12	1,046.42	1085,7
Rata2 Kabupaten	33.12	34.62	36.08	37,44

Sumber : Dinas Perikanan Kab Tangerang, 2021

Produksi tangkapan ikan di Kabupaten Tangerang Tahun 2021 dari laut sebanyak 20.942,33 ton, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, sedangkan nilai produksi sekitar 766.336.561. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada produksi dan nilai produksi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

Tabel 2.125

Produksi Dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Penangkapan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021

Jenis	2018	2019	2020	2021
Perikanan Tangkap di Laut				
Produksi (ton)	20,625.00	20,590.52	20,814.30	20.942,33
Nilai Produksi (000 Rp)	507,905,691.00	718,390,871.56	659,222,090.78	766.336.561
Perikanan Perairan di daratan				
Produksi	69.71	207.98	87.91	88,34
Nilai Produksi (000 Rp)	2,042,695.00	4,634,276.03	2,109,818.99	2.156.367

Sumber : Dinas Perikanan Kab Tangerang, 2021

11. Pertanian

Potensi pertanian di Kabupaten Tangerang masih cukup tinggi dengan keterbatasan lahan dan persaingan dengan industry, tetapi tidak menyurutkan usaha pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memaksimalkan produksi sector pertanian untuk kebutuhan pangan masyarakat. Untuk lebih jelasnya lihat table berikut ini :

Tabel 2.126

Kontibusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB di Kabupaten Tangerang 2018-2021

KECAMATAN	JUMLAH PRODUKSI PADI/BAHAN PANGAN UTAMA LOKAL HASIL KELOMPOK PETANI (TON)			JUMLAH PRODUKSI PADI/BAHAN PANGAN UTAMA DI DAERAH (TON)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021
Balaraja	8,281	10,400	10,788	8,281	10,400	10,788	10.545
Cikupa	2,261	2,674	3,309	2,261	2,674	3,309	3.031
Cisauk	2,648	2,556	2,855	2,648	2,556	2,855	2.622
Cisoka	11,530	11,541	12,764	11,530	11,541	12,764	12,127
Curug	2,468	2,763	2,779	2,468	2,763	2,779	3.249
Gunung Kaler	22,981	20,656	24,202	22,981	20,656	24,202	23.907
Jambe	6,586	6,342	9,081	6,586	6,342	9,081	6.877
Jayanti	10,277	10,896	12,408	10,277	10,896	12,408	11.735

KECAMATAN	JUMLAH PRODUKSI PADI/BAHAN PANGAN UTAMA LOKAL HASIL KELOMPOK PETANI (TON)			JUMLAH PRODUKSI PADI/BAHAN PANGAN UTAMA DI DAERAH (TON)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021
Kelapa Dua	80	237	240	80	237	240	363
Kemiri	9,820	10,446	17,823	9,820	10,446	17,823	17.605
Kosambi	2,009	1,343	1,985	2,009	1,343	1,985	1.478
Kresek	16,679	14,344	17,735	16,679	14,344	17,735	16.088
Kronjo	17,522	18,510	23,249	17,522	18,510	23,249	20.419
Legok	7,439	7,518	7,682	7,439	7,518	7,682	8.289
Mauk	25,692	22,835	24,592	25,692	22,835	24,592	21.908
Mekar Baru	18,394	16,843	20,577	18,394	16,843	20,577	20.084
Pagedangan	3,668	3,699	3,503	3,668	3,699	3,503	3.682
Pakuhaji	21,025	23,625	27,525	21,025	23,625	27,525	30.754
Panongan	7,919	7,438	7,714	7,919	7,438	7,714	6.508
Pasar Kemis	4,539	4,393	5,068	4,539	4,393	5,068	4.682
Rajeg	24,947	19,795	27,474	24,947	19,795	27,474	36.043
Sepatan	6,347	6,239	5,936	6,347	6,239	5,936	8,238
Sepatan Timur	10,818	7,537	8,087	10,818	7,537	8,087	10.638
Sindang Jaya	10,783	11,054	16,713	10,783	11,054	16,713	15.585
Solear	10,760	10,547	11,235	10,760	10,547	11,235	11.009
Sukadiri	19,510	16,933	16,403	19,510	16,933	16,403	20.396
Sukamulya	14,117	13,510	14,367	14,117	13,510	14,367	11.980
Teluknaga	6,080	7,679	10,147	6,080	7,679	10,147	9.340
Tigaraksa	10,975	10,261	11,466	10,975	10,261	11,466	10.829
JUMLAH	316,152	302,614	357,704	316,152	302,614	357,704	360.003

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kab Tangerang, 2021

Tingkat produktivitas tanaman pangan padi atau bahan pangan utama lokal lainnya yang diproduksi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 mencapai 360.003 ton, dengan luas areal tanaman sekitar 36.202 Ha.

Tabel 2.127
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021

KECAMATAN	PRODUKSI TANAMAN PADI/BAHAN PANGAN UTAMA LOKAL LAINNYA (TON)			LUAS AREAL TANAMAN PADI/BAHAN PANGAN UTAMA LOKAL LAINNYA (Ha)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021
Balaraja	47.32	47.79	48.27	1,117	1,117	1,117	2.151
Cikupa	46.62	47.09	47.56	315	315	315	665
Cisauk	46.86	47.33	47.80	310	310	310	543
Cisoka	47.08	47.55	48.03	1,228	1,228	1,228	2.520
Curug	47.00	47.47	47.94	306	306	306	671
Gunung Kaler	47.54	48.02	48.50	2,505	2,505	2,505	4.892
Jambe	46.48	46.94	47.41	733	733	733	1.446

KECAMATAN	PRODUKSI TANAMAN PADI/BAHAN PANGAN UTAMA LOKAL LAINNYA (TON)			LUAS AREAL TANAMAN PADI/BAHAN PANGAN UTAMA LOKAL LAINNYA (Ha)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021
Jayanti	47.38	47.85	48.33	1,287	1,287	1,287	2.448
Kelapa Dua	47.02	47.49	47.97	25	25	25	75
Kemiri	48.42	48.90	49.39	1,772	1,772	1,772	3.532
Kosambi	47.50	47.98	48.45	232	232	232	302
Kresek	47.09	47.56	48.04	1,847	1,847	1,847	3.484
Kronjo	47.64	48.12	48.60	2,407	2,407	2,407	4.187
Legok	47.02	47.49	47.97	810	810	810	1.711
Mauk	47.88	48.36	48.84	2,569	2,569	2,569	4.415
Mekar Baru	47.20	47.67	48.15	2,181	2,181	2,181	4.136
Pagedangan	47.08	47.55	48.03	402	402	402	759
Pakuhaji	48.10	48.58	49.07	2,479	2,479	2,479	5.936
Panongan	46.58	47.05	47.52	848	848	848	1.433
Pasar Kemis	47.48	47.95	48.43	503	503	503	952
Rajeg	48.44	48.92	49.41	2,492	2,492	2,492	7.222
Sepatan	48.49	48.97	49.46	635	635	635	1.649
Sepatan Timur	48.36	48.84	49.33	798	798	798	2.135
Sindang Jaya	47.42	47.89	48.37	1,702	1,702	1,702	3.190
Solear	46.64	47.11	47.58	1,154	1,154	1,154	2.290
Sukadiri	48.58	49.07	49.56	1,635	1,635	1,635	4.075
Sukamulya	47.50	47.98	48.45	1,437	1,437	1,437	2.440
Teluknaga	47.46	47.93	48.41	1,260	1,260	1,260	2.099
Tigaraksa	46.86	47.33	47.80	1,213	1,213	1,213	2.243
JUMLAH	47.42	47.89	48.37	36,202	36,202	36,202	73.622

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kab Tangerang, 2021

Tingkat Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021 mencapai 73.622 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan kita semakin meningkat.

12. Perdagangan

Sektor perdagangan di Kabupaten Tangerang memberikan kontribusi terbesar ke-3 terhadap PDRB Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 11,040,282.72, kontribusi sector perdagangan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp. 11,675,614.85, penurunan sector perdagangan merupakan dampak global pandemic covid-19. Data ekspor bersih (selisih antara total nilai ekspor suatu negara dan nilai total impor) kabupaten Tangerang termasuk mengalami penurunan, sehingga Pemerintah Kabupaten Tangerang mendorong

para pelaku ekspor untuk meningkatkan ekspor keluar negeri di masa pandemic Covid-19.

Data ekspor Kabupaten Tangerang diambil dari data pelaku usaha yang menggunakan Surat Keterangan Asal. Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang/komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah/negara pengeksport yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan negara tujuan. Mendasari hal ini adalah kesepakatan bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor/ tujuan yang mewajibkan SKA ini disertakan pada barang ekspor Indonesia. SKA ini sebagai bukti bahwa barang tersebut dihasilkan dan diolah di Indonesia dengan nilai kandungan local minimum 40%. Sehingga data yang disampaikan dibawah ini tidak menjelaskan jumlah ekspor keseluruhan Kabupaten Tangerang karena tidak semua pelaku usaha berhak menggunakan fasilitas ini.

Berdasarkan data ekspor bersih berdasarkan Surat Keterangan Asal Kabupaten Tangerang di tahun 2021 terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar 32% dibandingkan tahun 2020. Hal ini dikarenakan ekonomi dunia sudah mulai bangkit dan melakukan penyesuaian dalam menghadapi pandemi covid ini sehingga bisnis masih terus berjalan. Alas kaki masih mendominasi komoditi tertinggi untuk Kabupaten Tangerang dengan negara tujuan benua Eropa kemudian disusul dengan produk garmen dan textile. Namun negara di Benua Eropa tidak masuk kedalam 10 besar negara dengan tujuan ekspor tertinggi karena Benua Eropa sudah menggunakan system DAB dimana adanya perjanjian antara Indonesia dengan Eropa yang memperbolehkan pelaku usaha yang akan mengirim produknya ke Eropa tidak perlu mencetak COO. Dalam menghadapi pandemi yang dialami seluruh dunia ini produk makanan merupakan produk unggulan yang tidak terdampak pandemic bahkan permintaanya meningkat. Pada tahun 2019-2020, produk Garmen merupakan komoditi tertinggi tetapi terjadi penurunan dikarenakan ada beberapa pabrik garmen yang tutup akibat pandemi maupun pindah lokasi pabrik maka digantikan oleh produk alas kaki.

Untuk jumlah perusahaan yang melakukan ekspor menggunakan fasilitas SKA ini pun mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, tetapi jumlah negara tujuan terjadi penurunan sebesar 12 negara. Hal ini dikarenakan:

1. Negara yang masih memberlakukan lock down

2. Negara yang ekonominya belum stabil
3. Perjanjian kerjasama Indonesia dengan negara tujuan telah berakhir atau belum diperbarui.

Tabel 2.128
Ekspor Bersih di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020

No	Jenis Usaha	Ekspor			Total
		2018	2019	2020	
1	(64) ALAS KAKI	64,558,677,087	49,666,470,634	36,606,634,539	5,221,672,700.42
2	(52) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)	892,010,264	5,788,514	7,613,624,974	679,548,141.36
3	(61) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)	8,886,933,863	7,170,846,616	3,410,322,098	596,813,019.06
4	(62) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)	2,706,688,470	2,713,970,206	894,275,840	244,462,293.77
5	(03) MOLUSKA	4,176,966,300	5,533,883,108	9,933,618,018	226,632,041.17
6	(39) BARANG PLASTIK	2,100,354,359	1,583,599,265	4,247,208,005	217,434,587.27
7	(87) KENDARAAN SELAIN YANG BERGERAK DIATAS REL DAN BAGIANNYA	1,217,021,156	1,358,602,736	970,468,267	157,885,698.00
8	(44) KAYU OLAHAN	1,797,744,854	1,560,161,027	1,235,183,375	153,126,628.03
9	(69) PRODUK KERAMIK	1,347,674,443	1,172,879,500	1,295,786,513	141,370,419.37
10	(19) MAKANAN OLAHAN	924,479,527	981,231,185	1,109,715,227	94,546,497.34
11	(70) GELAS	1,006,193,882	779,380,495	640,683,253	77,010,860.15
12	(74) TEMBAGA DAN PRODUKNYA	581,311,018	1,466,115,353	1,364,168,763	62,998,950.12
13	(94) LAMPU	87,651,897	1,748,433,295	3,857,216,465	60,576,472.17
14	(96) TERMOS	248,326,998	246,710,201	226,585,059	60,439,620.40
15	(55) TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)	252,619,901	101,441,186	60,864,994	34,776,091.92
16	(72) LOGAM TIDAK MULIA DAN PRODUKNYA	106,717,379	1,379,631,499	1,473,238,391	34,550,320.22
17	(95) MAINAN DAN PERALATAN OLAH RAGA	401,036,343	581,495,478	222,966,185	33,170,807.68
18	(42) BARANG DARI USUS	81,959,486	1,798,937,618	1,087,139,365	30,145,527.83
19	(33) KOSMETIK	156,986,393	214,850,802	1,374,400,930	22,838,732.21
20	(85) MESIN DAN PERALATAN ELEKTRIS	555,688,346	366,334,253	786,516,689	22,664,211.80
	TOTAL	92,087,041,966	80,430,762,971	78,410,616,950	8,172,663,620.29

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Tangerang Tahun 2020

Tabel 2.129
Ekspor Bersih di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

KOMODITI EKSPOR BERSIH KABUPATEN TANGERANG 2021			
20 besar komoditi			
NO	NAMA KOMODITI	NILAI FOB	Nilai FOB (Rp)
1	Alas kaki; Dengan Sol Luar Kulit, Uppers Terdiri Dari Tali Kulit Di Instep Dan Sekitar Jempol Kaki	984,874,151	13,788,238,114,000
2	Sepatu Olahraga; Sepatu Tenis, Sepatu Basket, Sepatu Gym, Sepatu Latihan Dan Sejenisnya, Dengan Sol Luar Karet Atau Plastik Dan Bagian Atas Bahan Tekstil	569,896,622	7,978,552,708,000
3	Persiapan Sayuran; Sayuran, Buah, Kacang-kacangan Dan Bagian Tanaman lain yang dapat dimakan, Disiapkan Atau Diawetkan Oleh Cuka Atau Asam Asetat (tidak termasuk Mentimun Dan Gherkins)	407,513,844	5,705,193,816,000
4	Tembaga; Bar, Batang Dan Profil, Paduan Tembaga (selain Paduan Dasar Tembaga-seng)	325,874,798	4,562,247,172,000
5	Besi Atau Baja, Besi Babi, Spiegeleisen; Butiran Daripadanya	304,754,744	4,266,566,416,000
6	Besi atau Baja Non-paduan; Dalam Kumparan, Tanpa Pola Lega, Flat-rolled, Lebar 600mm Atau Lebih, Hot-rolled, Dari Ketebalan 4.75mm Atau Lebih Tetapi Tidak Melebihi 10mm	303,281,823	4,245,945,522,000
7	Tungku; Bagian pembakar tungku, untuk bahan bakar cair, bahan bakar padat atau gas yang dilumatkan, stoker mekanik, parutan, debitor abu dan sejenisnya	270,148,119	3,782,073,666,000
8	Karet; Vulkanisir, Sabuk Transmisi Tak Berujung Dari Penampang Trapesium (v-belt), Selain V-ribbed, Dari Lingkaran Luar Melebihi 60cm Tetapi Tidak Melebihi 180 Cm	262,270,031	3,671,780,434,000
9	Krustasea; Beku, Udang Dan Udang, Tidak Termasuk Varietas Air Dingin, Dalam Cangkang Atau Tidak, Merokok, Dimasak Atau Tidak Sebelum Atau Selama Merokok; Dalam cangkang, dimasak dengan mengukus atau dengan merebus dalam air	256,602,745	3,592,438,430,000
10	Propylene, Polimer Olefin Lainnya; Polypropylene Dalam Bentuk Primer	252,862,054	3,540,068,756,000
11	Alas kaki; N.e.c. Dalam Judul No. 6402, Menutupi Pergelangan Kaki, Dengan Sol Luar Dan Bagian Atas Karet Atau Plastik	246,992,500	3,457,895,000,000
12	Hidrokarbon Asiklik; Tak jenuh, N.e.c. Dalam Judul No. 2901	226,148,383	3,166,077,362,000
13	Tembaga; Halus, Unwrought, N.e.c. Dalam Item No. 7403.1	224,512,635	3,143,176,890,000
14	Barang Berkemah; (bahan tekstil), N.e.c. Dalam Judul No. 6306	196,758,690	2,754,621,660,000
15	Sirkuit Terpadu Elektronik; Amplifier	176,913,054	2,476,782,756,000

KOMODITI EKSPOR BERSIH KABUPATEN TANGERANG 2021			
20 besar komoditi			
NO	NAMA KOMODITI	NILAI FOB	Nilai FOB (Rp)
16	Minyak-kue dan residu padat lainnya; Apakah Tanah Atau Dalam Bentuk Pelet, Hasil Dari Ekstraksi Kacang Sawit Atau Minyak Kernel	168,553,157	2,359,744,198,000
17	Minyak Nabati; Minyak Sawit Dan Fraksinya, Selain Minyak Mentah, Apakah Disempurnakan atau Tidak, Tetapi Tidak Dimodifikasi Secara Kimia	167,181,755	2,340,544,570,000
18	Halida dan Halida Oksida Non-logam; Tidak termasuk klorida	164,229,501	2,299,213,014,000
19	Asam Lemak Monokarboksilat Industri; Minyak asam dari penyulingan; (selain Asam Stearat, Asam Oleat Atau Asam Lemak Minyak Tinggi)	141,435,696	1,980,099,744,000
20	Peralatan Listrik; Transistor, (selain Fotosensitif), Dengan Tingkat Disipasi 1w Atau Lebih	140,126,392	1,961,769,488,000
TOTAL NILAI EKSPOR		5,790,930,694	81,073,029,716,000

Sumber : Disperindag Kab Tangerang, 2021

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. produktivitas total daerah. dan nilai tukar petani.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Secara empiris, kemampuan konsumsi rumah tangga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih terbatas karena sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau daya beli masyarakat, Dalam kurun waktu 2015–2019, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk, Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2017 s,d 2019 terus meningkat, Pada tahun 2019 porsinya adalah sebesar 51,90 persen, Angka ini menunjukkan bahwa penopang perekonomian di Kabupaten Tangerang masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah sebesar 5,05 persen pada tahun 2019, Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai pertumbuhan sebesar 5,29 persen, Ini disebabkan menurunnya laju pertumbuhan di Kabupaten Tangerang tahun 2019, Sementara itu, konsumsi perkapita cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2019, Ini menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian di tingkat konsumsi masyarakat lebih cepat daripada perkembangan penduduk, Ekonomi tumbuh di atas pertumbuhan penduduk.

Dampak Covid-19 terasa pada daya beli masyarakat pada tahun 2020, Daya beli masyarakat Kabupaten Tangerang menurun. Hal ini disebabkan karena salah satunya adalah menurunnya pendapatan masyarakat akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Tahun 2021 kehidupan mulai beradaptasi dengan kondisi pandemic Covid-19, pembatasan kegiatan tetap dilakukan tanpa mengurangi protocol kesehatan, aktivitas perekonomian mulai berjalan normal, dan produktifitas masyarakat mulai berjalan sehingga dampaknya kondisi ekonomi dan social masyarakat mulai menunjukkan bangkitnya dari kelesuan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mulai pulih dari kontraksi yang sebelumnya 3,75 persen, tahun 2021 mulai bangkit dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,63 persen, lebih tinggi dari pada Banten dan Nasional. Masyarakat mulai kembali kerja dengan mulai berkurangnya pengangguran akibat Covid-19, tahun 2021 mulai menunjukkan tren penurunan angka pengangguran, tetapi kondisi kemiskinan cenderung meningkat disebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need), ditambah inflasi terhadap beberapa kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.130
Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah tangga Kabupaten
Tangerang, Tahun 2016 - 2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
Total Konsumsi Rumah Tangga						
a, ADHB (Miliar Rp)	56,994,77	61,506.15	67,159.46	72,998.71	71,692.85	74,665.68
b, ADHK 2010 (Miliar Rp)	47,086,34	49,408.52	52,000.18	54,496.20	53,122.77	54,753.28
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	52,1	51.69	51.73	52.11	52.82	51.42
Rata - Rata Konsumsi perkapita						
a, ADHB (Miliar Rp)	16,389,60	17,172,35	18,268,19	19,264,01	22,159,01	N/A
b, ADHK 2010 (Miliar Rp)	13,540,30	13,786,41	14,091,58	14,373,14	16,420,21	N/A

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertumbuhan						
a, Total Konsumsi RT	5,27	4,96	5,29	5,05	-2,4	N/A
b, Perkapita	2,04	1,82	2,21	2,93	14,2	N/A
Jumlah Penduduk	3,477,495	3,584,770	3,692,693	3,800,787	3,245,619**	3.293.533

**Angka sensus 2020

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2020

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

Aksesibilitas Daerah pada tahun 2019 untuk panjang jalan existing adalah sebesar 992.61 km dengan klasifikasi beton 947.81 km atau 95.49%. aspal 24.63 atau 2.48%. dan DII 20.18 KM atau 2.03%. Jika dibandingkan dengan kondisi jalan tahun 2018. maka jalan di kabupaten Tangerang dengan klasifikasi beton meningkat 0.46%.

Tabel 2.131
Jenis Perkerasan Jaringan Jalan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020

TAHUN 2018				
Panjang	Panjang Ruas (KM)	Beton	Aspal	DII
		(KM)	(KM)	(KM)
Panjang existing	992.61	943.30	26.30	23.01
Panjang (%)	100%	95.03%	2.65%	2.32%
TAHUN 2019				
Panjang	Panjang Ruas (KM)	Beton	Aspal	DII
		(KM)	(KM)	(KM)
Panjang existing	992.61	947.81	24.63	20.18
Panjang (%)	100%	95.49%	2.48%	2.03%
Tahun 2020				

Panjang existing	992.61	879.62	77.11	35.98
Panjang (%)	100%	88.62	7.77	3.62
<i>Tahun 2021</i>				
<i>Panjang existing</i>				
<i>Panjang (%)</i>				

Sumber : Dinas Bina Marga dan SDA kab. Tangerang, 2020

2.1.4.3 Fasilitas Bank dan non Bank

Posisi pinjaman rupiah dan valuta asing yang diberikan Bank Umum dan BPR di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 diperuntukan untuk Modal Kerja sebesar Rp, 48,139,347 juta, investasi Rp, 26,786,929 juta dan konsumsi Rp, 55,327,116.

Tabel 2.132

Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang Diberikan dari Bank Umum dan BPR di Kabupaten Tangerang dan Jenis Penggunaan (juta rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Modal Kerja	44,201,333	45,187,413	52,185,191	51,586,062	46,893,956	45,642,186
Investasi	24,891,300	24,524,628	28,883,677	28,032,656	24,330,016	23,240,458
Konsumsi	43,715,500	47,810,622	53,305,355	55,741,884	55,661,689	57,700,027
TOTAL	112,808,133	117,522,663	134,374,224	135,360,603	126.885.662	126.582.671

Sumber : Indikator Ekonomi Provinsi Banten, 2021

2.2 Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja. Tata Cara Reviu

Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

2.2.1 Evaluasi Terhadap RPJMD

Indikator Makro dalam RPJMD Kabupaten Tangerang menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan

nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Tabel 2.133

Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No.	Uraian Indikator Makro	Satuan	Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	LPE	Persen	5,84	5,93	5,45	-3,75	4,63
2	Inflasi	Persen	3,5	3,46	3,31	1,17	1,79
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,57	9,7	8,91	13,06	9,06
4	Kemiskinan	Persen	5,39	5,18	5,14	6,23	7,12
5	IPM	Nilai	70,97	71,59	71,93	71,92	72,92

1. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan pasca pandemic Covid – 19, kenaikan ini mempengaruhi hampir seluruh sektor, tak terkecuali sektor ekonomi. Secara umum, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,63% dari sebelumnya mengalami penurunan hingga mencapai -3,75%. Sebagian besar lapangan usaha mengalami penurunan laju pertumbuhan yang drastis, kecuali lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, informasi dan komunikasi, dan jasa keuangan dan asuransi. Lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan dan usaha di bidang jasa keuangan dan asuransi mengalami kenaikan tipis dibandingkan tahun 2020.
2. Tangerang mengalami inflasi sebesar 1,79 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi di Tangerang adalah mobil sebesar 0,21 persen, daging ayam ras dan beras masing-masing sebesar 0,05 persen, bawang merah sebesar 0,04 persen, cabai rawit, tomat dan telur ayam ras masing-masing sebesar 0,03 persen. Sementara komoditas yang memberikan andil deflasi, yaitu cabai merah sebesar 0,17 persen; angkutan udara sebesar 0,08 persen; parfum dan buah naga masing-masing sebesar 0,02 persen; emas perhiasan, kangkung dan bayam masing-masing sebesar 0,01 persen.
3. Kemiskinan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 7,12 persen. Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang tahun 2021 sekitar 1,21

sedangkan tahun 2020 sekitar 0,95. Tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan (P2) mencapai 0,29 tahun 2020 mencapai 0,22. Sementara itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2021 sekitar 7.12 % atau sebanyak 272,350 orang, mengalami peningkatan secara persentase dari tahun 2020, dan mengalami peningkatan dari segi jumlah. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020 senilai Rp520.742,-/kapita/bulan, sedangkan tahun 2021 sekitar Rp. 545,065 kapita/bulan.

4. Menurut data BPS Provinsi Banten tahun 2021, angka pengangguran di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 9,06, yang sebelumnya di tahun 2020 mencapai 13,06 tertinggi di Banten, penurunan angka pengangguran menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang mulai pulih dari dampak pandemi covid-19 dengan banyaknya industri pengolahan menerima kembali para tenaga kerja.
5. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran adalah sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (dalam tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 69,93 tahun, Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah antara 12,84 tahun, serta Rata-rata Lama Sekolah antara 8,61 tahun. Adapun, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan berada pada kisaran 12.273 juta rupiah. Selain dari sisi pencapaian, variasi juga terlihat dari kecepatan atau pertumbuhan IPM nya. Tercatat, Kabupaten Tangerang tumbuh 0,51

persen, sehingga menjadi daerah yang pembangunan manusianya mengalami kemajuan paling pesat. Kemajuannya itu didorong oleh cepatnya perbaikan pada dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak.

Tabel 2.134

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No.	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	Persen	100	100	100
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,96	69,93	100
3	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun)	Tahun	8,41	8,61	102,37
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	3,07		5,47
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	12,14%	9,06%	133,9%
6	Nilai AKIP	Persen	71,37		72,61
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	81	85,95	106,1
8	Survey Eksternal Persepsi Korupsi		3,79		4,19
9	Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	Persen	91		95
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	54,7		55,7
11	Persentase inovasi yang diimplementasikan	Persen	56		81

Capaian indikator makro RPJMD Kabupaten Tangerang pada Tahun 2021 menunjukkan 94,2 persen melampaui target (>100 persen) dan sisanya belum mencapai target. Adapun penjelasan masing-masing indikator makro tersebut diuraikan sebagai berikut :

Capaian kinerja yang tidak mencapai target ditunjukkan pada:

- 1) Indikator Nilai AKIP Hasil Evaluasi KemenPANRB-RI belum diperoleh karena masih dalam proses penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, namun demikian jika Nilai AKIP tahun sebelumnya dapat dijadikan rujukan sementara maka terjadi penurunan nilai namun masih dalam rentang nilai sangat memuaskan dengan capaian target sebesar 98,77%*);

- 2) Persentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik pada tahun ini mengalami kenaikan capaian kinerja dari tahun sebelumnya;
- 3) Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan capaian kinerja meskipun tidak signifikan, dengan capaian target sebesar 70,21%;
- 4) Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan dengan capaian target sebesar 8,7%;
- 5) Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) belum mencapai kinerja yang telah ditetapkan dikarenakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang pada Tahun 2020 berkonstraksi -3,70% yang dipengaruhi oleh 11 (sebelas) sektor PDRB yang mengalami penurunan sehingga tidak terjadi pertumbuhan ekonomi hingga -66,07%, namun demikian melihat rentang waktu Tahun 2016 hingga Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang rata-rata tumbuh sebesar 3,29%;
- 6) Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum mencapai kinerja yang telah ditetapkan namun masih dalam rentang nilai baik dengan capaian target hanya 64,10%.

Secara umum Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 sebanyak 11 Sasaran Strategis.

Tahun 2021 merupakan tahun Ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang, dari sebanyak 11 Sasaran Strategis dengan 11 indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertera pada tabel diatas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel berikut :

Tabel 2.135

Pencapaian Kinerja Kabupaten Tangerang Tahun 2020

No.	Tingkat Capaian Kinerja	Capaian
1.	Melebihi/Melampaui Target	45,45 %
2.	Sesuai Target	0,00 %
3.	Tidak Mencapai Target	54,55 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dari sebanyak 11 Sasaran Strategis, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.136

Pencapaian Sasaran Strategis Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penanganan Kasus Ketentraman dan Ketertiban	1	100	-	-	-	-
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	-	-	-	-	1	100
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	-	-	-	-	1	100
4	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-	-	-	-	1	100
5	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	-	-	-	1	100
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Hasil Evaluasi KemenPANRB-RI	-	-	-	-	1	100
7	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1	100	-	-	-	-
8	Meningkatnya Integritas Aparatur	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	1	100	-	-	-	-
9	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Persentase Infrastruktur Wilayah Dalam Kondisi Baik	-	-	-	-	1	100
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1	100	-	-	-	-
11	Meningkatnya Kinerja Inovasi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi Daerah	1	100	-	-	-	-
Total Indikator		11	4	45,45	0		6	

2.2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan

Kabupaten Tangerang dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019. secara umum untuk realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan disebabkan oleh beberapa penyebab diantara kegiatan bersifat lintas sektor sehingga dalam mewujudkannya diperlukan kerja keras. ketersediaan anggaran yang belum terpenuhi secara cukup sehingga kegiatan berjalan tidak optimal. beberapa kegiatan yang bersifat lelang terlambat untuk ditenderkan sehingga waktu pelaksanaan dalam tahun lalu tidak selesai. perencanaan di awal tahun yang menganut prinsip mengikuti kegiatan seperti pada tahun-tahun sebelumnya sehingga berdampak pada kurangnya pencapaian SPM dan IKK.

Sedangkan untuk realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan merupakan keberhasilan dimana secara umum dengan keterbatasan yang telah disebutkan di atas. masih mampu untuk menghasilkan output melebihi dari target.

Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2020 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.137
Capaian Program Kabupaten Tangerang Tahun 2021

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84,5	85	85,5	100%	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	65,15	65,8	66,1	66,1	Dinas Pendidikan
	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD	28	31	34	86,5	Dinas Pendidikan
	ANGKA PARTISIASI MURNI (APM) Kesetaraan	16%	15%	0,13	67,05	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah peserta didik yang dapat Baca Tulis Al Quran Jenjang SD DAN SMP	0	0%	10.000	10.000	Dinas Pendidikan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100%	100%	90%	98%	Dinas Kesehatan
	Prosentase Ibu hamil KEK	8%	7%	6,7%		Dinas Kesehatan
	Persentase Balita dengan status gizi baik berdasarkan BB/TB	79%	85,3 %	87%	100%	Dinas Kesehatan
	Success rate tuberkulosis	90%	90%	90%	< 10%	Dinas Kesehatan
	Respon Time Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam	100%	100%	100%	90%	Dinas Kesehatan
	Jumlah Puskesmas yang bersertifikat akreditasi Utama	0	8 puskesmas	13 puskesmas	90%	Dinas Kesehatan
	Jumlah RSUD yang bersertifikat akreditasi Paripurna	2 RSUD	2 RSUD	2 RSUD	100%	Dinas Kesehatan
	Persentase Masyarakat Memiliki Jaminan Kesehatan (JKN)	80%	81%	84,47%	31 puskesmas	Dinas Kesehatan

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Fasilitas Kesehatan dengan SDMK sesuai standar di FKTP	67%	69%	90,00	3 RSUD	Dinas Kesehatan
	Prosentase Fasilitas Kesehatan dengan SDMK sesuai standar di FKRTL (RS)	77%	79%	76,22	84%	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar	76%	78%	96%	75%	Dinas Kesehatan
	Prosentase industri rumah tangga pangan (IRTP) sesuai standar	76%	78%	94%	85%	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	60%	61%	77	84%	Dinas Kesehatan
	Prosentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan	75%	77%	75%	84%	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	60%	61%	79	70%	Dinas Kesehatan
	Prosentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan	75%	77%	79	85%	Dinas Kesehatan
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					70%	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase infrastruktur Sungai , saluran pembuang dan Daerah Irigasi terbangun	29%	33%	80%	85%	DBMSDA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Sarana Air bersih	37%	40%	42%		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase Pengelolaan Persampahan di TPA	100	100		81%	DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase meningkatnya sarana sanitasi bagi masyarakat miskin	81,28	81,3	81,32	47%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Prosentase kapasitas lumpur tinja	25,45	30,45	35%	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Capaian Program : Cakupan Layanan Kawasan Permukiman	6,16	6,16	6,16	81,36	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Cakupan TPU yang memenuhi Standar	60	65	75,00	45,45	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Persentase sarana dan prasarana tpu yang terpelihara	100	100	100%	30,80	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang dipelihara dan dibangun	28%	54 %		85,00	DTRB
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang disusun	0	0%		100	DTRB
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	86%	87%		100%	DBMSDA
	Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan Jalan Jembatan	100%	100%		35%	DBMSDA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemenuhan RDTR	25 %	50%		92%	DTRB
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					100%	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pemenuhan Pembinaan Penyelenggaraan Rumah susun dan Apartemen	20	22	50,00%	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Pemenuhan Perencanaan pengembangan kawasan Permukiman	100%	100	100%		Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Penanganan Kawasan Kumuh	4%	6%	18,39%	29,96%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase PSU dalam Asset	18%	21%	24%	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					24,55%	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	92,41%	17,83%	52,01%	29,86%	Satpol PP
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana	170,2	146,93	130		BPBD
	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	65	75	96%	100%	BPBD
	Jumlah desa dan kelurahan yang tanggap bencana	53	54	53	125	BPBD
	Persentase korban bencana yang tertangani	100	100	100	100	BPBD

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan kebakaran dalam kurun waktu <i>respon time</i> 15 menit	50%	50%	62,5%	274	BPBD
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang dibina	66%	54%	61,18%	100%	Dinsos
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan	0%	0%	0%		Dinsos
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	22%	14%	16,14%	67,99%	Dinsos
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase terpenuhinya pelayanan jaminan sosial bagi PMKS Yang valid	100%	100%	70%	100%	Dinsos
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana daerah /kota	100%	100%	100%	100,00%	Dinsos
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase pengelolaan TMP Raden Aria Wangsakara	65%	70%	76%	100%	Dinsos
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					80%	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih	7%	8,17%	8,35%		Dinas Tenaga Kerja
	Persentase Lulusan Pelatihan BLK Yang Di Tempatkan	38%	0%	8,35%		Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	17277	17877	8,35%	25%	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	18%	24,54%	8,35%	45%	Dinas Tenaga Kerja
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					47.550	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	100%	100%	80.45%	26%	DPPPA

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan	100%	100%	50%		DPPPA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Kelembagaan PUG yang Aktif	17%	17%	10%	100%	DPPPA
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah	100%	100%	100%	100%	DPPPA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah seluruh kluster hak anak	100%	100%	85.99%	18,48%	DPPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase Perlindungan Terhadap Anak	100%	100%	75%	100%	DPPPA
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					100%	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88%	88%	86%	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Cadangan Pangan	10%	10%	10%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan Yang Tertangani	9,09	12,73	12,73	88%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88%	88%	86%	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					60	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun	100%	100%	100%	88%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan	50	47,57	55,8	100%	DLHK
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	0,78	80%	0,82		DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	0,22	24%	0,26	63,25	DLHK
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase tindakanjutt pengaduan pengelolaan LB3	100	100	100	0,85	DLHK

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	440	340	285	0,3	DLHK
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasinya pembinaan dan pengelolaan lingkungan di Sekolah	25	30	36	100	DLHK
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasinya pembinaan kampung iklim	2	3	4	350	DLHK
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	100	100	45	DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah terkelola	38	41	44	20	DLHK
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					100	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Perekaman KTP-el	100%	100%	100,10%	50	Disdukcapil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	100%	100%	95,76%		Disdukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	Disdukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%		98%	Disdukcapil
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					100%	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Tatakelola Pemerintahan Desa yang Baik	16,67%	22,35%	32,52%	100%	DPMPD
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	10%	20%	20%		DPMPD
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					100%	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					97,35%	DPPKB

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Tersedianya model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan	0,04	0,04			DPPKB
	Presentase desa/kelurahan yang memiliki data dan infoemasi	0,05	5.3%			DPPKB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					0,04	DPPKB
	Presentase PPKBD mandiri	4%	4%		0,04	DPPKB
	Persentase KB Baru	5%	5.3%			DPPKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Kelompok ketahanan yang aktif	78%	299		4%	DPPKB
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					4%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase jaringan trayek dan moda transportasi	96,55	0	96,55	136	Dinas Perhubungan
	Prosentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	11,11	33	55,56		Dinas Perhubungan
	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	50	50	60	96,55	Dinas Perhubungan
	Persentase Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten	100	100	88	100	Dinas Perhubungan
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					80	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase layanan keterbukaan Daftar informasi publik	80	81%	90%	88	Diskominfo
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase penyediaan layanan internet	20,00%	20,00%	100%		Diskominfo
	Prosentase penyediaan layanan aplikasi	51,52%	60,00%	64,95%	100%	Diskominfo
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					100,00	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				100,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan.					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.				60	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase usaha yang terfasilitasi legalitas usaha				29,25	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	12	12		13,29	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		5000	5000		7.41	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					12,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan berusaha	0	5	10	25000	DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investor	20	20	20		DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	85	86	87	50	DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Skor kepatuhan investor yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	50	55	30	100	DPMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	5	10	20	90	DPMPTSP
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					70	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda binaan	750	950	3296	70	Disporabudpar
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet cabang olahraga binaan	35	35	35		Disporabudpar
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah anggota pramuka yang dikembangkan	114000	57000	118610	5500	Disporabudpar
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase layanan ketersediaan data statistik sektoral	0	25%	96,43%	570.000	Diskominfo
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				100		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase layanan kemanan informasi	0	0	100	55%	Diskominfo

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
PENGAMANAN INFORMASI						
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Event kebudayaan yang dilaksanakan	22	0%	8	45%	Disporabudpar
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan	37%	67%	80%	50	DISPERPUSIP
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku, pemilahan arsip inaktif dan penyerahan arsip dari SKPD/BUMD/Lembaga ke Disperpusip	35%	54%	70%	100%	DISPERPUSIP
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					100%	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	0,005	0,005	0,7		DISKAN
	2. Produktivitas Perikanan Budidaya	4,4	4,6	9,26		DISKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1. Persentase Pengetahuan Produksi Budidaya Ikan	80%	80%	80%	0,50%	DISKAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	34,6	35,99	36,26	5,4	DISKAN
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					80%	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase peningkatan daya tarik pariwisata	0	0		40,45	Disporabudpar
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	0	0	2		Disporabudpar
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					100	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	1%	1%	1%	7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	1%	1%	1%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Hewan Sakit yang Dapat Disembuhkan	5%	5%	5%	1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Produk Hewan yang Memenuhi SNI	5%	5%	5%	1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	2%	2%	1,5%	55%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Peningkatan SDM Pertanian	1%	1%	1%	50%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1,5%	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Pelaku Usaha Perdagangan dan IKM yang diawasi dalam memenuhi mekanisme dan prosedur ekspor	21%	42%	15,67%	1%	Disperindag
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan	21,37	13,73	0		Disperindag
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Bersubsidi yang di Monitor/ di Pantau	2137%	13,73	41,67%	189,77%	Disperindag
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Pelaku Usaha yang memenuhi mekanisme dan prosedur ekspor	21%	14%	0	93,10	Disperindag
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase Pelaku Usaha yang melaksanakan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTP	20%	12%	24,28%	156,53	Disperindag
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					86,01%	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Presentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pendampingan/Pembinaan dan Pelatihan	14,01	17,34	8,76%	66,76%	Disperindag
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelaku Usaha IKM yang memiliki izin/legalitas yang diawasi	14%	17%	14,54%		Disperindag
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi	14%	17,34	5,78%	75,22	Disperindag
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					132,11%	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah calon transmigran yang terseleksi	5KK	0 KK	8,35%	75,61	Dinas Tenaga Kerja
4.01 SEKRETARIAT DAERAH				8,35%	5	

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Penyelesaian Permasalahan dibidang Kesra	0	0	100%		SEKRETARIAT DAERAH
	Prosentase pemenuhan Administrasi Pemerintahan	0	0	100		SEKRETARIAT DAERAH
	Prosentase Produk Hukum dan Penanganan Kasus/Perkara yang diselesaikan	0	0	100	100%	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Rumusan Kebijakan ekonomi yang di implementasikan	0	0	100	100%	SEKRETARIAT DAERAH
	Prosentase Rumusan Kebijakan Pembangunan yang di implementasikan	0	0	100	100%	SEKRETARIAT DAERAH
	Tercapainya Tingkat Kematangan UKPBJ			3	100%	SEKRETARIAT DAERAH
4.02 SEKRETARIAT DPRD					100%	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		78,63	79%	46,82	4	Sekretariat DPRD
	Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitas Persidangan Tepat Waktu	82,43	83,02	64,37%		Sekretariat DPRD
	Jumlah produk hukum yang difasilitasi pembahasannya	74,83	75,04	29,27%	82,37%	Sekretariat DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					86,89%	
PERENCANAAN					77,85%	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%		Bappeda
	Presentase Dokumen Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	100%		Bappeda
	Prosentase Ketersediaan Data Pembangunan	60%	65%	70%	100%	Bappeda
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	% hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	Bappeda
	% hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	50%	50%	50%	80%	Bappeda
	% hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	Bappeda

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	% hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan bidang Perencanaan Prasarana Wilayah	100%	100%	100%	100%	Bappeda
KEUANGAN					100%	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tingkat kepatuhan Rasio Penganggaran	100%	100%	100%	100%	BPKAD
	Persentase kinerja penyelenggaraan Akuntansi	92%	93%	100%		BPKAD
	Tingkat Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bendahara SKPD	80%	85%	100%	100%	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	80%	85%	100%	96%	BPKAD
	Persentase Barang Milik Daerah yang digunaisahkan	45%	50%	55%	95%	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					95%	
	Prosantase Kepatuhan wajib pajak	62%	65%	71%	65%	BAPENDA
	Persentase Pemenuhan Capaian Target Pendapatan secara Tepat Waktu	100%	100	100%		BAPENDA
	Persentase Capaian Target Pajak Daerah	100%	100	100%	0,77	BAPENDA
	Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100	BAPENDA
KEPEGAWAIAN					100	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan pengadaan ASN, Pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100 %	100 %	100%	100,00%	BKPSDM
	Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN	100 %	100 %	100%		BKPSDM
	Prosentase peningkatan disiplin ASN	99,2 %	99,3 %	99,91	100 %	BKPSDM
	Persentase capaian pengembangan karir sesuai kompetensi ASN	20 %	40 %	86,74	100 %	BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					99,6 %	

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis, manajerial, fungsional dan latsar/ prajabatan	100 %	100 %	100	100 %	BKPSDM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase Implementasi Kebijakan Hasil Litbang	100%	100%	100%	100 %	Bappeda
	Jumlah Inovasi Daerah yang diimplementasikan	5	10	35		Bappeda
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya Jumlah temuan hasil pemeriksaan	25%	100%	100%	135	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,0602	3,0602	3,0811		Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN					100%	
7.01 KECAMATAN					3,1522	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa	32,42	55,68	74,07		Kec. Tigaraksa
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa	88,6	88,8	92,2		Kec. Tigaraksa
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa	87,02	88,64	91,35	88,62	Kec. Cikupa
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cikupa	90	92	96	93,6	Kec. Cikupa
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Panongan	32%	56%	74,07%	95,52	Kec. Panongan
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Panongan	32%	56%	74,07%	98	Kec. Panongan
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug	32,42	55,68	75	100%	Kec. CURUG
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug	71,18	81,18	92	100%	Kec. CURUG
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32%	56%	74,07%	100,00	Kec. Legok
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	65%	74%	80%	98,00	Kec. Legok
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	80%	85%	90%	100%	Kec. Pasar Kemis

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	74*%	78%	82%	90%	Kec. Pasar Kemis
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32%	56%	93,23%	100%	Kec. Balaraja
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32%	56%	93,23%	90%	Kec. Balaraja
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32,42%	55,68%	74,07%	100%	Kec. Kresek
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32,42%	55,68%	74%	100%	Kec. Kresek
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	67%	70%	75%	100	Kec. Kronjo
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	67%	70%	75%	100	Kec. Kronjo
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32%	56%	85	95%	Kec. Mauk
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32%	56%	87	95%	Kec. Mauk
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32%	56%	85,90%	100%	Kec. Rajeg
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32%	56%	86,50%	100%	Kec. Rajeg
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32%	56%	75	100%	Kec. SEPATAN
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	65%	74%	80	100%	Kec. SEPATAN
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	100%	96	100%	Kec. Teluknaga
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	100%	97	90%	Kec. Teluknaga
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cisoka	32%	56%	98,75%	100%	Kec. Cisoka
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cisoka	32%	56%	99,55%	100%	Kec. Cisoka
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32%	56%	74,07%	100%	Kec. Pakuhaji

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32%	56%	74,50%	100%	Kec. Pakuhaji
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32%	56%	74,07%	100%	Kec. Kosambi
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32%	56%	81	100%	Kec. Kosambi
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	78%	80%	82,50%	100%	Kec. Cisauk
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	75%	78%	80,00%	100%	Kec. Cisauk
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32%	80%	85%	87,50%	Kec. Gunung Kaler
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32%	78%	85,90%	85%	Kec. Gunung Kaler
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Jambe	32%	56%	74,07%	100%	Kec. Jambe
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Jambe	32%	56%	73,00%	100%	Kec. Jambe
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32%	56%	85,50%	100%	Kec. Jayanti
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32%	56%	73%	100%	Kec. Jayanti
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32%	56%	100%	100%	Kec. Kemiri
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32%	56%	80%	100%	Kec. Kemiri
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	100%	88,09%	100%	Kec. Mekar Baru
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	100%	73,08%	100%	Kec. Mekar Baru
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32%	56%	95,98%	95,75%	Kec. Pagedangan
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	65%	74%	95,98%	87,89%	Kec. Pagedangan
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	100%	85	100%	Kec. Sepatan Timur

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	100%	87	90%	Kec. Sepatan Timur
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32%	56%	74,07%	100%	Kec. Sindang Jaya
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	65%	74%	78%	100%	Kec. Sindang Jaya
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Solear	67%	70%	75%	100%	Kec. Solear
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Solear	67%	70%	75%	90%	Kec. Solear
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32%	56%	74,07	95%	Kec. Sukamulya
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32%	56%	74,07	95%	Kec. Sukamulya
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32,42%	55,68%	74,07%	100%	Kec. Sukadiri
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	0	0%	0	100%	Kec. Sukadiri
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kelapa Dua	32,42%	55,68%	98,31%	100,0	Kec. Kelapa Dua
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kelapa Dua	32,42%	55,68%	96,12%	100,00	Kec. Kelapa Dua
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	50%	60%	65	100,00	Kec. Tigaraksa
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	43%	52%	60	100,00	Kec. Cikupa
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1000%	15	20	70%	Kec. Panongan
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	50%	75	75%	Kec. CURUG
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	50%	60%	30	Kec. Legok
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan	60%	70%	60%	88,00%	Kec. Pasar Kemis
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25	50	88,88%	85%	Kec. Balaraja

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25	50	62,50%	100%	Kec. Kresek
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25	50		88	Kec. Kronjo
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25	30	72	88	Kec. Mauk
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25	50	67,50%	88	Kec. Rajeg
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	50%	65	88	Kec. SEPATAN
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100%	100%	95	88	Kec. Teluknaga
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25	30	97,77%	85%	Kec. Cisoka
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	32%	56%	74,07%	100%	Kec. Pakuhaji
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25	30	74,50%	88	Kec. Kosambi
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	75%	79%	74,07%	100%	Kec. Cisauk
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	0,25	79%	84,62%	88	Kec. Gunung Kaler
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	0,25	50%	60,00%	90%	Kec. Jambe
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	50%	62,50%	100%	Kec. Jayanti
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	50%	80%	88%	Kec. Kemiri
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	30%	35%	40%	88%	Kec. Mekar Baru
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	50%	82,29%	88%	Kec. Pagedangan
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100%	100%	75	55%	Kec. Sepatan Timur
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	50%	58%	85%	Kec. Sindang Jaya

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	50%	62,50%	100%	Kec. Solear
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	50%	62,50	85%	Kec. Sukamulya
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	0	0%	0	88%	Kec. Sukadiri
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25	50	75%	88%	Kec. Kelapa Dua
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,43	71,43		88%	Kec. Tigaraksa
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	58	60	64	88%	Kec. Cikupa
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71%	71%	42,86%	57,14	Kec. Panongan
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,43	71,43	45	70	Kec. CURUG
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	0,14	25%	60%	71,43%	Kec. Legok
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	75	80	60%	71,43	Kec. Pasar Kemis
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71%	71%	79,89%	71,43%	Kec. Balaraja
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,43	71,43	31%	100%	Kec. Kresek
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71%	71%	94,20%	71,43%	Kec. Kronjo
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71%	71%	94,20%	71,43	Kec. Mauk
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71%	71%	42,86%	71,43%	Kec. Rajeg
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	14%	25%	40%	71,43%	Kec. SEPATAN
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	100%	97	71,43%	Kec. Teluknaga
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71%	71%	43%	71,43%	Kec. Pakuhaji
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71%	71%	67%	100%	Kec. Kosambi

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	69%	75%	81,25%	71,43%	Kec. Cisauk
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71%	75%	100%	71,43%	Kec. Gunung Kaler
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71%	71%	42,86%	93%	Kec. Jambe
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71%	71%	41,80%	100%	Kec. Jayanti
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71%	71%	80%	71%	Kec. Kemiri
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	56%	60%	65%	71,43%	Kec. Mekar Baru
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	14%	25%	40,00%	71,43%	Kec. Pagedangan
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	100%	47	75%	Kec. Sepatan Timur
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	14%	25%	100%	71,43%	Kec. Sindang Jaya
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71%	71%	65,67%	100%	Kec. Solear
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71%	71%	42,86	71,43%	Kec. Sukamulya
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	0%	0%		71,43%	Kec. Sukadiri
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,43%	71,43%	88,88%	71,43%	Kec. Kelapa Dua
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	50	58,33		71,43%	Kec. Tigaraksa
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	50	67	78	71,43%	Kec. Cikupa
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	56%	66,67%	83,33	Kec. Panongan
	Prosentase peningkatan tata pemerintahan desa	44%	56%	68	92	Kec. CURUG
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	56%	77,77%	88,88%	Kec. Legok

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	60%	70	80	88,88	Kec. Pasar Kemis
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	56%	94,89%	88,88%	Kec. Balaraja
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44,44%	55,55	67%	100%	Kec. Kresek
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	0%		88,88%	Kec. Kronjo
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44,44%	55,55%	75	89	Kec. Mauk
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	56%	70,00%	89%	Kec. Rajeg
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	56%	68	88,88%	Kec. SEPATAN
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	100%	100%	100	88,88%	Kec. Teluknaga
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	56%	100%	88,88%	Kec. Cisoka
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	56%	67%	100%	Kec. Pakuhaji
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	56%	66,67%	88,88%	Kec. Kosambi
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	80%	83%	85,00%	88,88%	Kec. Cisauk
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	83%	88,9%	88,88%	Kec. Gunung Kaler
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	56%	66,67%	90%	Kec. Jambe

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	56%	66,67%	100%	Kec. Jayanti
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	56%	80%	89%	Kec. Kemiri
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	60%	70%	70%	88,88%	Kec. Mekar Baru
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	56%	90,93%	88,88%	Kec. PAGEDANGAN
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	100%	100%	75	80%	Kec. Sepatan Timur
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	56%	65,67%	88,88%	Kec. Sindang Jaya
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	50%	88%	100%	Kec. Solear
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	56%	66,67%	88,88%	Kec. Sukamulya
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	0	0%	0%	89%	Kec. Sukadiri
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44,44%	55,55%	95,56%	88,88%	Kec. Kelapa Dua
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					88,88%	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					88,88%	
PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Capaian Efektifitas Penguatan nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa	80%	80%	80%		Kesbangpol
PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Capaian Efektifitas Penguatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	78%	78%	78%		Kesbangpol

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Capaian Efektifitas Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	60%	65%	65%	80%	Kesbangpol
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Capaian Efektifitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	60%	65%	65%	80%	Kesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Capaian Efektifitas Penyelenggaraan Kewaspadaan Nasional di Daerah	80%	80%	80%	70%	Kesbangpol
X					70%	
X.XX					80%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						SEMUA OPD
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100		Dinas Pendidikan
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	100	100		Dinas Pendidikan
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100	DBMSDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100	DTRB
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%		100%	DTRB
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	0	0%	93%	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	100	100	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	88,82%	66,82%	71,66%	100	Satpol PP
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	74,06%	84,65%	100	Satpol PP
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	100	100	100	BPBD
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	BPBD
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	100	100	100	Dinsos
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	Dinsos
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	8,35%	100	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	8,35%	100	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	8,35%	100%	DPPPA
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	DPPPA
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	100	100	100%	DLHK

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	100	100	100%	DLHK
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100	DPMPD
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100%	100	DPMPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Disdukcapil
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100	DPPKB
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	DPPKB
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	100	100	100 Persen	Diskominfo
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100 Persen	Diskominfo
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	0	100	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	DPMPTSP
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	100	100	100	DPMPTSP
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100	Disporabudpar
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100	Disporabudpar
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	100	100%	100%	DISPERPUSIP
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100%	100%	DISPERPUSIP
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100	DISKAN
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100	DISKAN
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	99%	99%	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	75	99%	Disperindag

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	75	100%	Disperindag
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	90	100%	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100	100%	SEKRETARIAT DAERAH
	Prosentase Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah	100%	100%	100	100%	SEKRETARIAT DAERAH
	Indeks Reformasi Birokrasi	50,37	52	58,39	100%	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	81,23	81,76	64,56%	100%	SEKRETARIAT DPRD
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	82,67	82,78	64,29%	65	SEKRETARIAT DPRD
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	86,01%	Bappeda
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	85,90%	Bappeda
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	BPKAD
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	BPKAD
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	BAPENDA

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S/D 2021	Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	BAPENDA
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	BKPSDM
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	BKPSDM
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Inspektorat
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Inspektorat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Kec. Tigaraksa
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Kec. Tigaraksa
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Kec. Cikupa
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Kec. Cikupa
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Panongan	100%	100%	100%	100%	Kec. Panongan
	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan	100%	100%	100%	100%	Kec. Panongan

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Curug	100%	100%	100%	100%	Kec. CURUG
	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan	100%	100%	100%	100%	Kec. CURUG
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Kec. Legok
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Kec. Legok
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Kec. Pasar Kemis
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Kec. Pasar Kemis
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	94,20%	100%	Kec. Balaraja
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	94,20%	100%	Kec. Balaraja
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	91,17%	100%	Kec. Kresek
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	97,79%	100%	Kec. Kresek
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Kec. Kronjo

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Kec. Kronjo
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	98	100%	Kec. Mauk
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	97	100%	Kec. Mauk
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Kec. Rajeg
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Kec. Rajeg
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Kec. SEPATAN
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Kec. SEPATAN
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100	100%	Kec. Teluknaga
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100	100%	Kec. Teluknaga
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Cisoka	100%	100%	90,50%	100%	Kec. Cisoka
	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Cisoka	100%	100%	97%	100%	Kec. Cisoka

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Kec. Pakuhaji
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Kec. Pakuhaji
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Kec. Kosambi
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Kec. Kosambi
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	90%	90%	90%	100%	Kec. Cisauk
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	90%	90%	90%	100%	Kec. Cisauk
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	90%	Kec. Gunung Kaler
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	90%	Kec. Gunung Kaler
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Jambe	100%	100%	100%	100%	Kec. Jambe
	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Jambe	100%	100%	100%	100%	Kec. Jambe
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Kec. Jayanti

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Kec. Jayanti
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Kec. Kemiri
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Kec. Kemiri
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Kec. Mekar Baru
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Kec. Mekar Baru
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	88,77%	100%	Kec. PAGEDANGAN
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	88,77%	100%	Kec. PAGEDANGAN
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	98	100%	Kec. Sepatan Timur
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	97	100%	Kec. Sepatan Timur
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Kec. Sindang Jaya
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Kec. Sindang Jaya

PROGRAM	INDIKATOR	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian S.D 2021	Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Solear	100%	100%	100%	100%	Kec. Solear
	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan	100%	100%	100%	100%	Kec. Solear
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Kec. Sukamulya
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Kec. Sukamulya
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	Kec. Sukadiri
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Kec. Sukadiri
	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan	100	100	97,6	100%	Kec. Kelapa Dua
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kelapa Dua	100	100	98,5	100%	Kec. Kelapa Dua
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	Kesbangpol
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	Kesbangpol

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Dari hasil evaluasi terhadap program prioritas permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain menggali dan mengembangkan potensi Daerah, kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM serta pengembangan sektor unggulan
2. Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus ditata dan dikelola dengan baik dalam rangka mendukung perwujudan Reformasi Birokrasi
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pasca pandemi Covid-19 yang masih perlu ditingkatkan
4. Perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung dinamika aktivitas masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya dan politik dalam upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Dari hasil evaluasi terhadap urusan pemerintahan, permasalahan yang dihadapi antara lain :

a. Bidang Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 antara lain :

1. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) belum dapat dilaksanakan akibat pandemic covid 19;
2. Banyaknya ruang kelas yg rusak;
3. Rendahnya fasilitas sekolah;
4. Tidak memiliki tenaga teknis bangunan;
5. Belum optimalnya penerapan kurikulum akibat pandemi;

b. Bidang kesehatan

Permasalahan pada Bidang Kesehatan Tahun 2021 antara lain :

1. Meningkatnya jumlah kematian ibu di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2021 sebanyak 109 orang per 100.000 KH dengan penyebab langsung Pandemi Covid 19 yaitu sebanyak 42% kematian ibu

karena Covid-19, selain itu juga penyebab tidak langsung kematian ibu karena RS penuh di bulan Juni sampai dengan pertengahan Agustus 2021;

2. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah tidak bisa dilakukan secara maksimal terkendala peraturan PPKM, jumlah pendamping yang terbatas, banyak petugas Puskesmas yang terpapar Covid-19 pada bulan Juni - Agustus 2021 dan fokus pada percepatan vaksinasi di bulan September 2021.

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 antara lain :

1. Ketersediaan lahan dan kepastian status lahan;
2. Undang-Undang Cipta Kerja belum ada turunan produk hukum di daerah. Sehingga pelayanan dokumen perijinan tertunda;
3. Refocusing menyebabkan beberapa pagu pembangunan gedung tertunda.

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 antara lain :

1. Banyaknya usulan perbaikan sarana prasarana perumahan yang belum menjadi asset pemda sehingga tidak bias direalisasikan;
2. Pada sebagian TPU tidak ada batas antara TPU wakaf dan TPU miliki pemda.

e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2021 antara lain :

1. Permasalahan Penegakan Perda dan Perkada;
 - Tingkat Kesadaran Masyarakat akan Perda dan Perkada masih kurang,
 - Data persebaran/pertumbuhan tempat hiburan belum akurat,
 - Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dan aktifitas pelaku usaha hiburan, peredaran Miras.
2. Permasalahan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- Penyalahgunaan Pelaku kegiatan usaha/penyalahgunaan Fasos Fasum untuk kegiatan usaha,
 - Belum optimalnya koordinasi penanganan masalah gangguan trantibum,
 - Belum optimalnya koordinasi penanganan gangguan PSK.
3. Permasalahan perlindungan Masyarakat;
- Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam Satlinmas.

f. Bidang Sosial

Permasalahan pada Bidang Sosial Tahun 2021 antara lain :

1. Belum optimalnya verifikasi dan validasi pendataan PMKS dan PSKS;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan bagi PMKS.

g. Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 antara lain :

1. Belum optimalnya penyerapan lulusan pelatihan UPTD Latihan kerja di perusahaan;
2. Kurangnya tenaga instruktur yang kompeten sesuai dengan kejuruan yang ada;
3. Masih banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja;
4. Tidak ada kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan;
5. Attitude pencari kerja yang rendah;
6. Belum optimalnya lembaga kerja sama Bipartit dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan;
7. Belum efektifnya penanganan PHI pada tahap Bipartit.

h. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 antara lain :

1. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
2. Adanya pembatasan kegiatan tatap muka sehingga pembinaan tidak maksimal.

i. Bidang Pangan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 antara lain :

1. Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tangerang cukup secara kuantitas namun belum beragam secara kualitas;
2. Anomali Iklim;
3. Harga bahan baku pakan unggas tidak stabil (sering terjadi lonjakan);
4. Skala usaha pemeliharaan ternak rakyat masih rendah dan perorangan.

j. Bidang Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 adalah tidak ada kesepakatan harga pengadaan tanah antara pemilik tanah dengan harga yang ditetapkan oleh tim apresial.

k. Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 antara lain :

1. Pengelolaan TPA Jatiwaringin belum optimal;
2. Tindak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tangerang masih banyak.

1. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 antara lain :

1. Adanya Surat Edaran dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor: 906/1622/KEUDA tanggal 25 Februari 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Non Fisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Kurangnya Sarana dan prasarana pelayanan adminduk, seperti alat perekaman KTP el, alat cetak KIA, Komputer Pengolah Data, tidak punya gedung arsip dokumen adminduk;
3. Masih sedikitnya OPD yang memanfaatkan data kependudukan;

m. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021 antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMDesa disebabkan kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDes dan pengurus BUMDes sehingga pengurus belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, peranan Kepala Desa dan BPD selaku penasehat dan pengawas masih belum optimal yang menyebabkan fungsi pengawasan (controlling) dalam manajemen BUMDes belum berjalan efektif;
2. Pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa dikarenakan produk BUMDes yang tidak sesuai dengan potensi maupun harapan dari masyarakat desa;

n. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 antara lain :

1. Belum optimalnya penyerasian Kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan (kurangnya dukungan pada kampung keluarga berkualitas);
2. tidak adanya PKB/PLKB di Tingkat Kecamatan dan Desa.

o. Bidang Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 antara lain :

1. Jumlah Petugas Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas tidak sebanding dengan target penanganan titik kemacetan sesuai Renstra Dinas Perhubungan 2019-2023. Jumlah petugas Dinas Perhubungan pada tahun 2021 yang melaksanakan tugas di lapangan berupa penjagaan dan pengaturan lalu lintas (gatur lalin) berjumlah 159 orang. Sementara jumlah simpang yang perlu dilakukan gatur lalin sebanyak 18 simpang. Secara eksisting yang dilakukan gatur lalin hanya 9 titik, sementara sisanya 9 titik belum dilakukan gatur lalin karena keterbatasan personil. Tugas petugas bukan hanya melakukan gatur lalin, melainkan juga harus melakukan penjagaan dan pengawasan operasional angkutan tambang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2018. Hal ini menyebabkan tugas gatur lalin menjadi kurang fokus. Dari 9 titik yang dilakukan gatur lalin, di perbatasan-perbatasan sebanyak 15

titik dilakukan penjagaan dan pengawasan Perbup 47. Jika dijumlah, sebanyak 24 titik yang dilakukan penjagaan tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada.

2. Lebar ruas jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan yang melewati jalan. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah penyangga ibukota Jakarta, sehingga pertumbuhan penduduknya tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh terhadap pertumbuhan kendaraan yang melewati jalan. Sementara pertumbuhan lebar jalan cukup lambat, mengingat dalam suatu pelebaran jalan tidak serta bias dilakukan. Harus dibebaskan dulu lahannya yang membutuhkan biaya yang besar. Hal inilah yang menyebabkan kemacetan menjadi semakin banyak di Kabupaten Tangerang.
3. Kurangnya payung hukum Peraturan Bupati sebagai turunan dari Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Dalam penyelenggaraan perhubungan di daerah payung hukumnya mengacu pada Peraturan Daerah sebagai upaya pengaturan masalah perhubungan disesuaikan dengan muatan lokal Kabupaten Tangerang. Peraturan Daerah nya sudah ada, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Namun aturan turunannya, yaitu Peraturan Bupati belum ada. Hal ini yang menyebabkan penindakan pelanggaran dan pengaturan di lapangan menjadi kurang optimal.

p. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang dihadapi pada tahun 2021 adalah belum optimalnya pengamanan Teknologi Informasi terhadap ancaman hacker.

q. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 adalah belum optimalnya pembinaan terhadap Koperasi Sehat.

r. Bidang Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 adalah perubahan regulasi dan kebijakan perizinan berusaha.

- s. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 adalah belum optimalnya pembinaan terhadap Wira Usaha Baru (WUB).
- t. Bidang Kebudayaan
Permasalahan bidang kebudayaan yang dihadapi Tahun 2021 antara lain:
1. Minimnya pelaku seni tradisional untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya;
 2. Minimnya sarana dan prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni;
 3. Rendahnya animo masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional.
- u. Bidang Perpustakaan
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 antara lain :
1. Sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar;
 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia Perpustakaan masih terbatas.
- v. Bidang Kearsipan
Permasalahan pada Bidang Kearsipan pada tahun 2021 adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan masih terbatas.
- w. Bidang Perikanan
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 antara lain :
1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan, pembudidaya, maupun pengolah dan pemasar hasil perikanan. Para nelayan di kabupaten Tangerang masih menggunakan sistem produksi nelayan dan pembudidaya yang tradisional;
 2. Rendahnya nilai tambah produk perikanan yang disebabkan oleh kapasitas kelembagaan perikanan masih rendah dan pola pembinaan untuk peningkatan nilai tambah produk perikanan belum maksimal.
- x. Bidang Pariwisata
Permasalahan bidang pariwisata yang dihadapi pada tahun 2021 adalah belum optimalnya promosi pariwisata dan Budaya di Kabupaten Tangerang.

y. Bidang Pertanian

Permasalahan bidang pertanian pada Tahun 2021 adalah Kurangnya ketersediaan air di lahan-lahan pertanian, dan serangan hama dan penyakit tanaman.

z. Bidang Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 antara lain :

1. Kurang optimalnya promosi dan informasi potensi produk IKM dan masih minimnya penggunaan Gerai tangerang Gemilang yang ditujukan sebagai sarana promosi produk UMKM lokal Kabupaten Tangerang
2. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar karena beberapa kendala, seperti masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran konsumen terkait hak dan kewajibannya sebagai konsumen menurut undang-undang dan juga regulasi yang belum mengatur mekanisme detail tentang penyidikan dan aturan pelaksana pengurusan sengketa konsumen
3. Banyaknya kerugian dan menurunnya aktivitas perdagangan karena pandemi Covid-19

aa. Bidang Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 adalah Pembinaan kepada pelaku IKM hanya terbatas dilakukan secara virtual.

bb. Bidang Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 adalah terbatasnya jumlah kuota transmigran yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin bertransmigrasi.

cc. Bidang Administrasi Pemerintahan

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 antara lain :

1. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah terkait penanganan Pandemi Covid-19 terhadap pembatasan kegiatan kunjungan kerja dan rapat/bimtek/diklat;

2. Regulasi target waktu pelayanan belum maksimal diterapkan. dikarenakan dalam penyelesaian pelaksanaan pelayanan perizinan belum semuanya bisa dijalankan sesuai SOP dan perlu didukung oleh OPD teknis terkait.

dd. Bidang Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 adalah terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan.

ee. Bidang Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi bidang penunjang fungsi Perencanaan pada Tahun 2021 antara lain :

1. Pengolahan dan Pemanfaatan data pendukung perencanaan yang belum optimal;
2. Sistem kendali pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan optimal;
3. Kapasitas dan kompetensi SDM perencanaan yang belum memadai;
4. Penataan kelembagaan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ee. Bidang Keuangan

Permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2021 antara lain :

1. Kualitas layanan pajak daerah kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.
2. Masih terdapat masyarakat yang belum patuh dalam membayar dan mentaati ketentuan pajak daerah;
3. Pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan sosial masyarakat sehingga petugas pajak dilapangan menemui kendala dalam berinteraksi dan berkoordinasi dengan wajib pajak yang berdampak pada penurunan optimalisasi pajak daerah.

ff. Bidang Penunjang Kepegawaian

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 adalah Pandemic covid masih belum berakhir maka berpengaruh pada proses pelaksanaan kegiatan tahun 2021. Beberapa kegiatan yang mengalami perubahan indeks biaya kegiatan karena pola pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dimasa pandemi ini.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara substansial, diantaranya memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah serta arah kebijakan ekonomi daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Global dan Nasional

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh Negara di dunia memberikan pengaruh besar, tidak sebatas pada bidang kesehatan namun memberikan dampak ikutan termasuk bidang Ekonomi dan sosial. Berbagai langkah antisipatif seperti kebijakan “lockdown” diambil oleh berbagai negara atau pun pembatasan aktivitas sosial untuk mencegah penyebaran lebih lanjut COVID-19, berdampak pada terhambatnya kegiatan perekonomian dan memberi tekanan pada pertumbuhan ekonomi dunia termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Angin segar terkait penanganan covid-19 mulai dirasakan setelah beberapa negara mensosialisasikan keberhasilannya dalam memproduksi vaksin. Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund (IMF) memprediksi bahwa pembatasan Social Distancing akan berlanjut hingga 2021 tetapi akan menurun seiring waktu karena cakupan vaksin yang meluas meskipun disisi lain masih terjadi transmisi lokal yang relatif rendah di berbagai wilayah pada akhir tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa Pandemi Covid-19 masih akan mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat di tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2023 aktivitas perekonomian tergantung dari hasil distribusi dan efektivitas vaksin yang ada.

Pada bulan April 2021, Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2021, tetapi Indonesia justru direvisi ke bawah dari proyeksi sebelumnya di bulan Januari.

Setelah berkontraksi 3,3% di 2020, World Economic outlook IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 6% di 2021, naik dari 5,5% dari proyeksi bulan Januari. Sedangkan untuk 2023, diperkirakan

ekonomi dunia naik 4,4% dibanding proyeksi sebelumnya 4,2%. Sementara itu untuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan di 4,3%, lebih rendah dibanding proyeksi Januari sebesar 4,8%. Untuk 2023, PDB Indonesia diperkirakan tumbuh 5,8%.

Di tengah ketidakpastian akibat pandemi, jalan keluar dari krisis ekonomi dan kesehatan ini semakin terlihat. Ratusan juta orang sedang divaksinasi akan memberikan energi bagi pemulihan ekonomi di banyak negara tahun ini. Pemulihan juga didorong oleh adaptasi kehidupan sehari-hari dan stimulus fiskal AS. Akan tetapi pandemi masih ada dan kasus baru masih bertambah di banyak negara. Pemulihan ekonomi juga berjalan ke arah yang berbeda-beda. Negara-negara yang belum banyak mendapatkan vaksin, memiliki kemampuan terbatas, dan sangat tergantung pariwisata akan memiliki pemulihan yang tidak begitu baik.

Untuk kelompok negara berkembang di Asia, proyeksi 2021 naik 0,6% menjadi 8,6%. Ini berkat dilonggarkannya kebijakan lockdown di beberapa negara seperti India. Tetapi, kasus Covid-19 yang masih banyak seperti di Indonesia dan Malaysia menahan prospek pertumbuhan lebih tinggi.

IMF mengatakan prospek pemulihan global masih penuh ketidakpastian meskipun pandemi sudah berlalu setahun. Mutasi baru dan jumlah korban jiwa yang terus naik menghantui program vaksinasi yang terus berjalan. Pemulihan ekonomi bergerak dalam laju yang berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing negara.

IMF lebih optimistis akan pertumbuhan ekonomi global berkat kebijakan fiskal yang diambil beberapa perekonomian besar, program vaksinasi, dan adaptasi aktivitas ekonomi di tengah pembatasan sosial. Namun, masih banyak ketidakpastian terkait pandemi, efektivitas kebijakan, dan evolusi kondisi keuangan.

Gambar 3.1
Proyeksi Pertumbuhan Global



Tabel 3.1
 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2023

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2023						
	IMF		WB		OECD	
	OKT 21	JAN 22	JUN 21	JAN 22	SEP 21	DES 21
<i>World</i>	3,6	3,8	3,1	3,2	-	3,2
<i>Major Economies</i>	2,2	2,6	2,2	2,3	-	-
Amerika Serikat	2,2	2,6	2,3	2,6	-	2,4
Euro Area	2,0	2,5	2,4	2,1	-	2,5
Jepang	1,4	1,8	1,0	1,2	-	1,1
<i>Emerging Markets</i>	4,6	4,7	4,4	4,4	-	-
China	5,3	5,2	5,3	5,3	-	5,1
Indonesia	6,4	6,0	5,1	5,1	-	5,1
Vietnam	-	-	6,5	6,5	-	-
Thailand	4,0	4,7	4,3	4,3	-	-
Malaysia	5,7	5,7	4,4	4,5	-	-
Filipina	7,0	6,9	6,0	5,7	-	-
Brazil	2,0	1,6	2,3	2,7	-	2,1
India	6,6	7,1	6,5	6,8	-	5,5

Proyeksi ekonomi tahun 2023 cenderung direvisi naik untuk negara negara maju, sedangkan untuk negara-negara berkembang beberapa direvisi turun. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 utamanya dipengaruhi oleh penanganan COVID-19 serta keputusan pemerintah dalam mengurangi atau menghentikan stimulus. Adapun tantangan global pada tahun 2023 adalah gangguan rantai pasok, krisis energi, perkembangan varian baru Covid-19, dan China Switching Policy.

Tahun 2023 ada optimisme untuk tumbuh lebih baik dari 2022, tetapi tantangan global dan domestik masih akan dihadapi oleh Indonesia. Sehingga optimis tetapi harus realistis.

Tabel 3.2
 Proyeksi Indikator Makro Nasional Tahun 2022 dan 2023

NO	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3% - 5,9%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3% - 6,0%
3	Kemiskinan	7,5% - 8,5%
4	IPM	73,29 - 73,35

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Banten

3.1.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten

Struktur ekonomi merujuk pada dasar sebuah perekonomian yang dikaitkan dengan sektor (lapangan usaha) pembentuknya, atau dapat pula diartikan struktur ekonomi sebagai komposisi peranan masing-masing lapangan usaha dalam perekonomian.

Struktur perekonomian suatu daerah dirumuskan sebagai distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Pengalihan. Kelompok lapangan usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.

Terdapat tiga lapangan usaha utama yang menopang perekonomian Provinsi Banten selama periode 2017-2021, yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Konstruksi. Pada tahun 2021 masih terjadi Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, khususnya Banten. Walaupun demikian, tiga lapangan usaha utama tersebut tetap masih menjadi penopang utama perekonomian Banten, di mana share dari Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Konstruksi masing-masing adalah 31,48 persen, 12,90 persen, dan 12,33 persen.

Share lapangan usaha tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 (masa sebelum pandemic Covid-19), lapangan usaha Transportasi dan pergudangan mengalami penurunan share yang pada tahun 2019 sebesar 10,77 persen menjadi 6,25 persen di tahun 2021. Hal ini disebabkan apenyebarandanya penurunan penumpang pada sarana transportasi sebagai implikasi kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang membatasi mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta

lapangan usaha Real Estate mengalami peningkatan share masing-masing menjadi 6,06 persen dan 8,50 persen.

Tabel 3.3

Distribusi Persentase PDRB Provinsi Banten atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	5,90	5,80	5,60	6,23	6,04
B Pertambangan dan Penggalian / <i>Mining and Quarrying</i>	0,74	0,70	0,66	0,68	0,70
C Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	31,93	31,26	30,73	31,21	31,48
D Pengadaan Listrik dan Gas / <i>Electricity and Gas</i>	2,13	2,08	1,82	1,68	1,82
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
F Konstruksi / <i>Construction</i>	10,32	10,66	11,09	11,43	12,33
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	12,29	12,49	12,73	13,30	12,90
H Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and Storage</i>	10,87	10,97	10,76	6,47	6,25
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	2,39	2,38	2,40	2,42	2,39
J Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	3,63	3,53	3,52	4,03	3,99
K Jasa Keuangan dan Asuransi / <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,03	3,08	2,98	3,24	3,35
L Real Estat / <i>Real Estate Activities</i>	7,47	7,59	7,89	8,67	8,50
M, N Jasa Perusahaan / <i>Business Activities</i>	1,08	1,09	1,13	1,17	1,10
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,03	2,00	2,07	2,27	2,17
P Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	3,31	3,44	3,59	3,91	3,66
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,18	1,21	1,27	1,47	1,55
R,S,T,U Jasa lainnya / <i>Other Services Activities</i>	1,62	1,63	1,69	1,74	1,68
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : * Angka sementara. ** Angka sangat sementara

Perubahan struktur ekonomi Provinsi Banten akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2017 s.d 2021, memang tidak lepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir, sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional. Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada pendekatan pengeluaran, mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Banten digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah

tangga, Lembaga Non Profit (LNPRT), dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori). Berikut diuraikan perilaku dari masing-masing komponen pengeluaran tersebut. 3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB BANTEN MENURUT PENGELUARAN Perkembangan perekonomian Provinsi Banten terus mengalami perubahan seiring perkembangan aktifitas perekonomian wilayah dan regional yang mempengaruhinya. Hal ini terlihat dari kinerja perekonomian Provinsi Banten selama

Perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2021 tumbuh mencapai 4,44 persen. Ini merupakan resultan dari pertumbuhan pada hampir seluruh sector. Artinya pada tahun kedua pandemic Covid-19 perekonomian Banten mulai pulih.

Terdapat tiga lapangan usaha yang tumbuh sangat tinggi di tahun 2021 yaitu lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial masing-masing sebesar 12,76 persen, 10,81 persen dan 9,95 persen. Ini terjadi karena meningkatnya pada ketiga sektor tersebut.

Sementara itu, terdapat tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi ditahun kedua pandemic Covid-19 antara lain lapangan usaha Jasa Perusahaan, lapangan usaha Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta lapangan usaha Jasa Pendidikan, maing-masing terkontraksi sebesar 1,34 persen, 0,83 persen dan 1,02 persen,. Kegiatan pembelajaran mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi selama tahun 2021 sebagian besar masih dilakukan secara daring.

Selain itu adanya penurunan realisasi Rencana Anggaran Belanja Daerah di Banten karena dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial.

Tabel 3.4

Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Banten atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha / Industry		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	4,28	3,58	2,21	3,55	0,56
B	Pertambangan dan Penggalian / <i>Mining and Quarrying</i>	-0,68	0,72	0,36	-8,36	0,61
C	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	3,70	3,61	3,57	-4,68	4,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas / <i>Electricity and Gas</i>	0,50	7,20	-3,63	-11,25	12,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	7,30	4,88	5,21	7,45	5,01
F	Konstruksi / <i>Construction</i>	8,28	7,76	8,70	-2,87	10,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6,15	7,25	6,28	-2,91	1,84
H	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and Storage</i>	8,57	6,52	0,65	-28,62	5,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	8,28	7,45	7,36	-5,09	4,30
J	Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	8,42	7,87	8,98	9,14	5,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,89	6,94	2,02	2,72	5,61
L	Real Estat / <i>Real Estate Activities</i>	7,92	7,88	8,75	2,15	3,00
M, N	Jasa Perusahaan / <i>Business Activities</i>	7,91	6,62	8,57	-4,42	-1,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4,79	5,29	7,87	-0,65	-0,83
P	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	7,42	7,43	7,69	1,33	-1,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / <i>Human Health and Social Work Activities</i>	8,15	6,85	8,55	7,50	9,95
R,S,T,U	Jasa lainnya / <i>Other Services Activities</i>	8,27	7,63	8,67	-5,43	1,42
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		5,75	5,77	5,26	-3,39*	4,44

Catatan : * Angka sementara

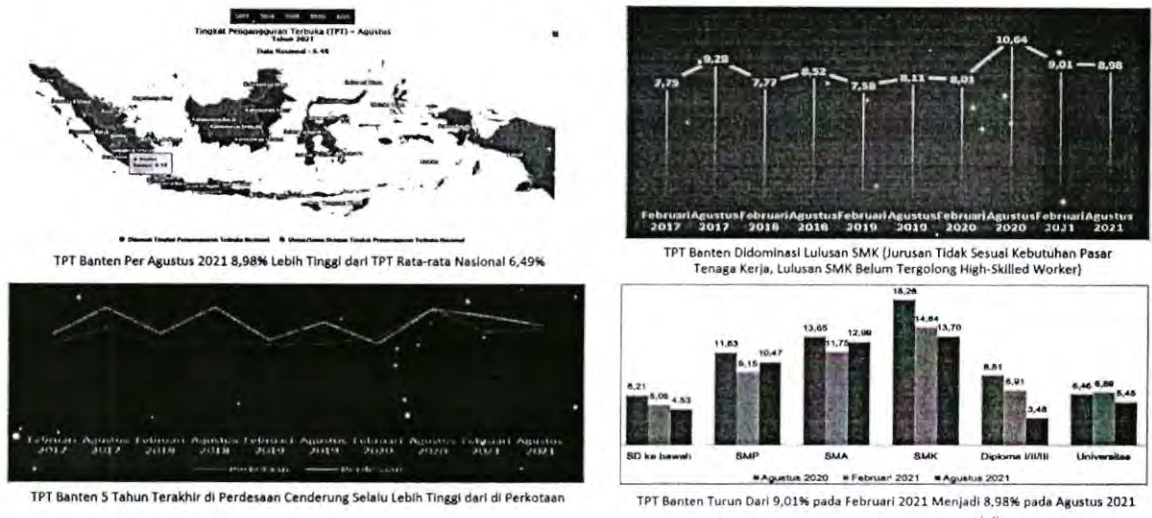
** Angka sangat sementara

3.1.2.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu isu yang selalu menjadikan Banten sorotan karena seringkali berada di urutan teratas terkait dengan TPT. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh BPS, pada Agustus 2021, TPT di Banten mencapai angka 8,98% jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 6,49%. Kondisi ini tentu saja bukanlah hal yang mengembirakan mengingat Banten seharusnya memiliki TPT yang rendah jika berkaca terhadap tingginya nilai realisasi investasi dari tahun ke tahun.

Gambar 3.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2021

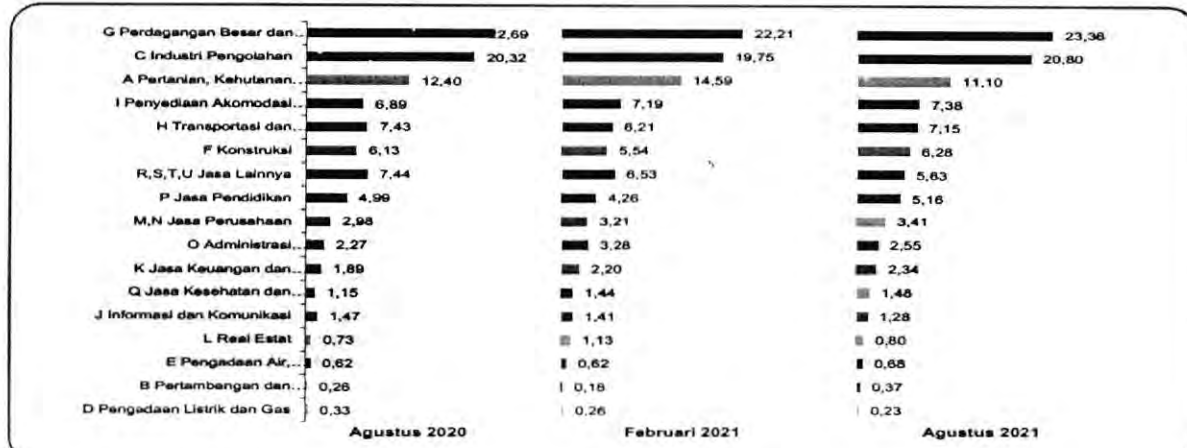


Sumber: Bappenas dan BPS

Angka pengangguran di Provinsi Banten per Agustus 2021 masih cukup tinggi yaitu 562.310 orang. Meskipun telah terjadi pengurangan jumlah pengangguran di Provinsi Banten selama satu tahun ke belakang sebanyak 98.750 orang, tetapi angka tersebut masih terbilang cukup tinggi dan perlu perhatian lebih dari pemerintah. Penduduk usia kerja pun selalu bertambah dari tahun ke tahun dan hal ini harus diimbangi dengan pertambahan perluasan kesempatan kerja. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan muncul pengangguran baru baik karena bertambahnya penduduk usia kerja maupun perpindahan status masyarakat yang tadinya bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja.

Perekonomian Provinsi Banten jika dilihat dari sisi LU, didominasi oleh LU industri pengolahan, tetapi jika kita melihat persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, peringkat pertamanya adalah LU perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa LU perdagangan merupakan salah satu LU andalan dalam hal penyerapan tenaga kerja karena mampu memiliki posisi lebih tinggi dari kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Banten. Di sisi lain, LU industri pengolahan meskipun memiliki peringkat pertama perhal kontribusi PDRB, tapi tidak mampu memberikan hal yang sama terkait dengan perannya dalam hal ketenaga kerjaan. Hal ini diduga karena industri pengolahan di Banten karakteristiknya padat modal dan bukan padat karya sehingga perannya dalam menyerap tenaga kerja tidak sebesar nilai tambah yang dimilikinya.

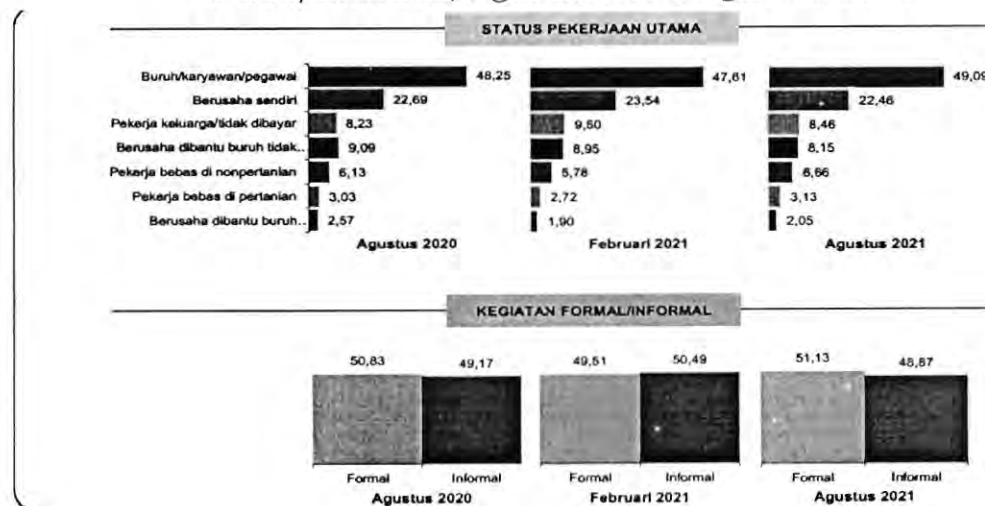
Gambar 3.4
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
 Agustus 2020–Agustus 2021



Sumber: BPS

Ada hal menarik dari data persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama di mana setiap tahunnya ada lebih dari 20% penduduk Provinsi Banten yang statusnya berusaha sendiri. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah pusat untuk menambah jumlah wirausahawan di Indonesia. Akan tetapi, memang harus ditelaah lagi data tersebut apakah berusaha sendiri tersebut sesuai dengan karakteristik wirausahawan. Selain itu, hal menarik berikutnya adalah komposisi antara pekerja formal dan informal di Provinsi Banten di mana proporsinya hampir seimbang. Hal ini memeberikan informasi kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi sektor informal karena proporsinya yang sangat signifikan.

Gambar 3.5
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020-Agustus 2021



Sumber: BPS

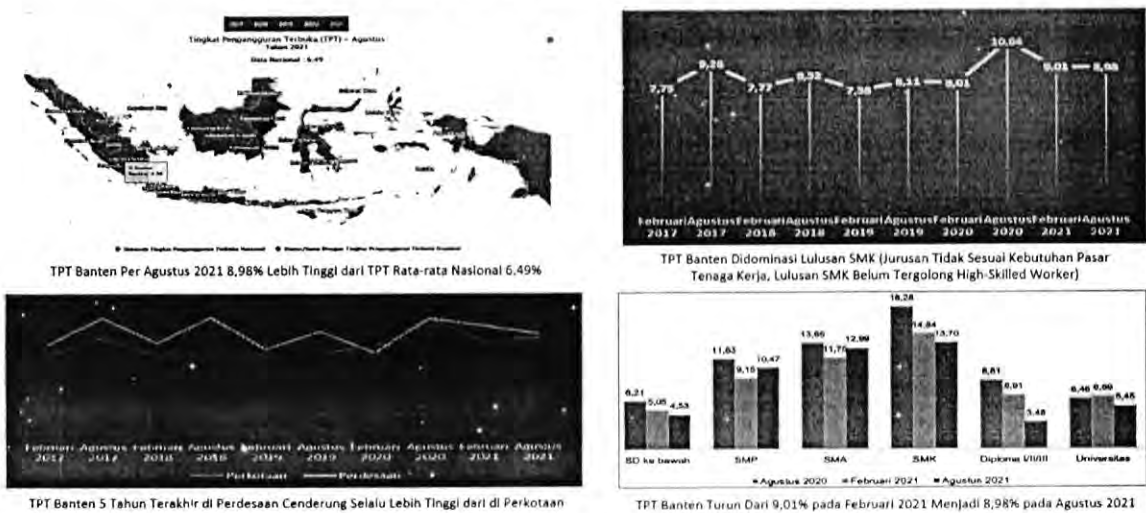
Tamatan SD mendominasi penduduk yang bekerja di Provinsi Banten sebanyak 32,40% per Agustus 2021. Hal ini tentu saja bukan hal yang menggembirakan mengingat karakteristik perekonomian di Provinsi yang didominasi industri pengolahan yang padat modal dan membutuhkan tenaga kerja yang high skill. Kondisi ini diduga menjadi salah satu penyebab kenapa TPT di Provinsi Banten sangat tinggi karena tidak match nya karakteristik perekonomian dengan karakteristik ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Hal ini bisa dikelola dengan cara mendorong sektor pendidikan sehingga pendidikan tinggi akan mendominasi karakteristik penduduk dan juga karakteristik ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Di saat yang sama Provinsi Banten menarik investasi yang lebih berorientasi padat karya sehingga secara bertahap sektor perekonomian dan sektor ketenagakerjaan akan bertemu dan TPT pun dapat berkurang secara signifikan.

3.1.2.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu isu yang selalu menjadikan Banten sorotan karena seringkali berada di urutan teratas terkait dengan TPT. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh BPS, pada Agustus 2021, TPT di Banten mencapai angka 8,98% jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 6,49%. Kondisi ini tentu saja bukanlah hal yang menggembirakan mengingat Banten seharusnya memiliki TPT yang rendah jika berkaca terhadap tingginya nilai realisasi investasi dari tahun ke tahun.

Gambar 3.6

Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2021

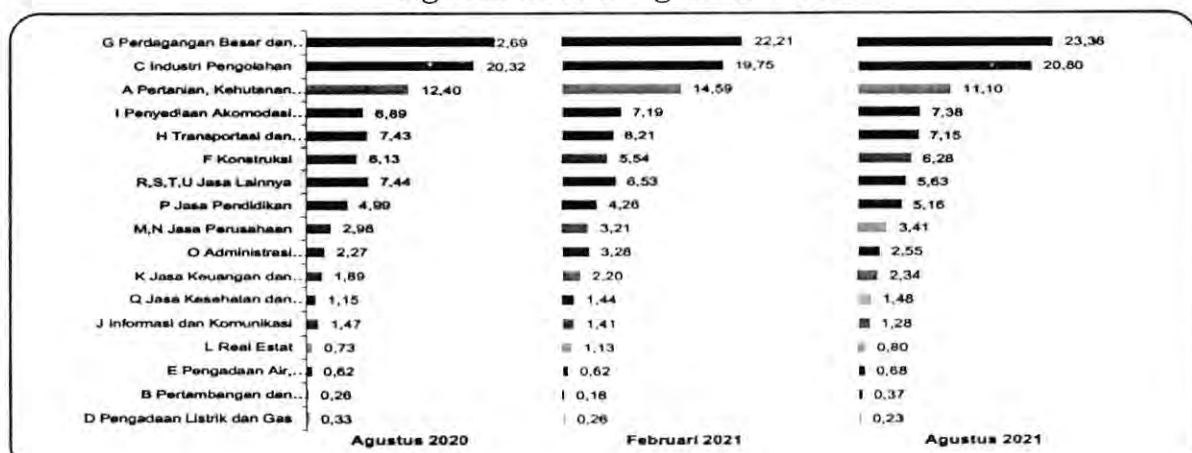


Sumber: Bappenas dan BPS

Angka pengangguran di Provinsi Banten per Agustus 2021 masih cukup tinggi yaitu 562.310 orang. Meskipun telah terjadi pengurangan jumlah pengangguran di Provinsi Banten selama satu tahun ke belakang sebanyak 98.750 orang, tetapi angka tersebut masih terbilang cukup tinggi dan perlu perhatian lebih dari pemerintah. Penduduk usia kerja pun selalu bertambah dari tahun ke tahun dan hal ini harus diimbangi dengan penambahan perluasan kesempatan kerja. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan muncul pengangguran baru baik karena bertambahnya penduduk usia kerja maupun perpindahan status masyarakat yang tadinya bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja.

Perekonomian Provinsi Banten jika dilihat dari sisi LU, didominasi oleh LU industri pengolahan, tetapi jika kita melihat persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, peringkat pertamanya adalah LU perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa LU perdagangan merupakan salah satu LU andalan dalam hal penyerapan tenaga kerja karena mampu memiliki posisi lebih tinggi dari kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Banten. Di sisi lain, LU industri pengolahan meskipun memiliki peringkat pertama perihal kontribusi PDRB, tapi tidak mampu memberikan hal yang sama terkait dengan perannya dalam hal ketenaga kerjaan. Hal ini diduga karena industri pengolahan di Banten karakteristiknya padat modal dan bukan padat karya sehingga perannya dalam menyerap tenaga kerja tidak sebesar nilai tambah yang dimilikinya.

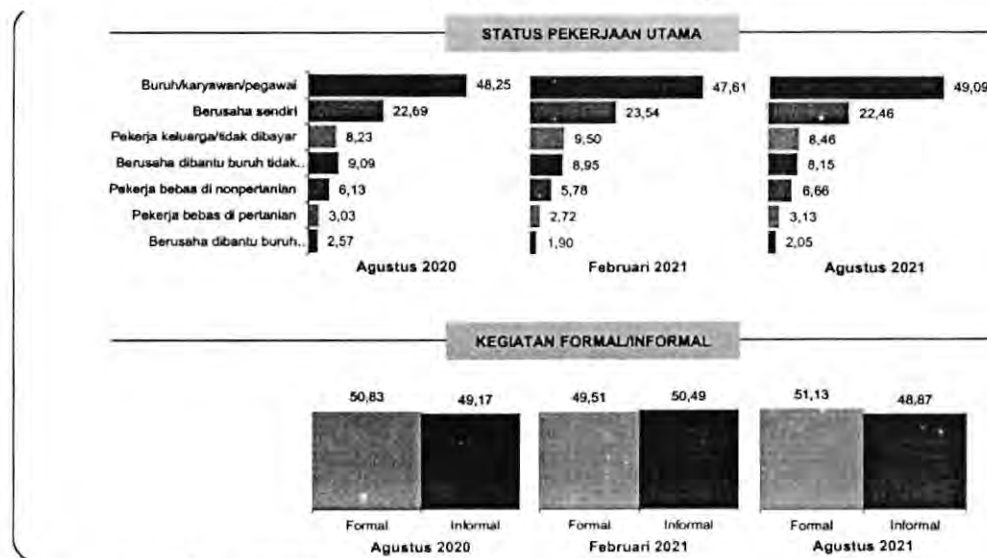
Gambar 3.7
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Agustus 2020–Agustus 2021



Sumber: BPS

Ada hal menarik dari data persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama di mana setiap tahunnya ada lebih dari 20% penduduk Provinsi Banten yang statusnya berusaha sendiri. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah pusat untuk menambah jumlah wirausahawan di Indonesia. Akan tetapi, memang harus ditelaah lagi data tersebut apakah berusaha sendiri tersebut sesuai dengan karakteristik wirausahawan. Selain itu, hal menarik berikutnya adalah komposisi antara pekerja formal dan informal di Provinsi Banten di mana proporsinya hampir seimbang. Hal ini memeberikan informasi kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi sektor informal karena proporsinya yang sangat signifikan.

Gambar 3.8
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020-Agustus 2021

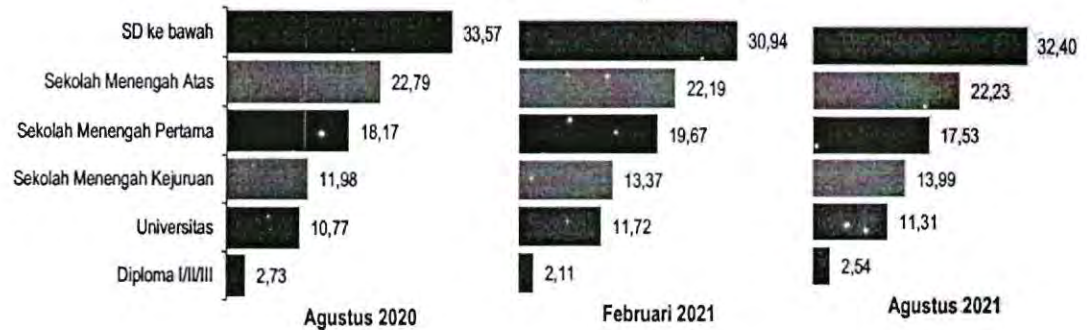


Sumber: BPS

Tamatan SD mendominasi penduduk yang bekerja di Provinsi Banten sebanyak 32,40% per Agustus 2021. Hal ini tentu saja bukan hal yang menggembirakan mengingat karakteristik perekonomian di Provinsi yang didominasi industri pengolahan yang padat modal dan membutuhkan tenaga kerja yang high skill. Kondisi ini diduga menjadi salah satu penyebab kenapa TPT di Provinsi Banten sangat tinggi karena tidak match nya karakteristik perekonomian dengan karakteristik ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Hal ini bisa dikelola dengan cara mendorong sektor pendidikan sehingga pendidikan tinggi akan mendominasi karakteristik penduduk dan juga karakteristik ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Di saat yang sama Provinsi Banten menarik investasi yang lebih berorientasi padat karya sehingga secara bertahap sektor

perekonomian dan sektor ketenagakerjaan akan bertemu dan TPT pun dapat berkurang secara signifikan.

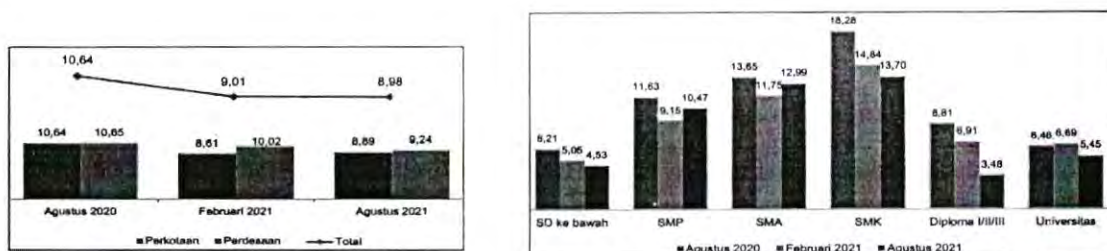
Gambar 3.9
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2020 – Agustus 2021



Sumber: BPS

TPT Provinsi Banten mengalami penurunan dari Agustus 2020 hingga Agustus 2021 dan berdasarkan data di bawah, maka penurunan tersebut terutama berasal dari sisi perkotaan. Selain itu dilihat dari sisi pendidikan, TPT di Provinsi Banten didominasi oleh lulusan SMK. Hal ini diduga karena karakteristik perekonomian Banten yang padat modal dan membutuhkan high skill labor dan tidak mampu dipenuhi oleh lulusan SMK yang mungkin secara skill masih di bawah kualifikasi sektor industri pengolahan. Selain gap antara tingkat skill yang diminta dengan tingkat skill yang tersedia, diduga tantangan berikutnya adalah tingkat keserasian antara jurusan/kejuruan lulusan SMK dengan permintaan pasar ketenagakerjaan di Provinsi Banten.

Gambar 3.10
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal dan TPT Menurut Pendidikan

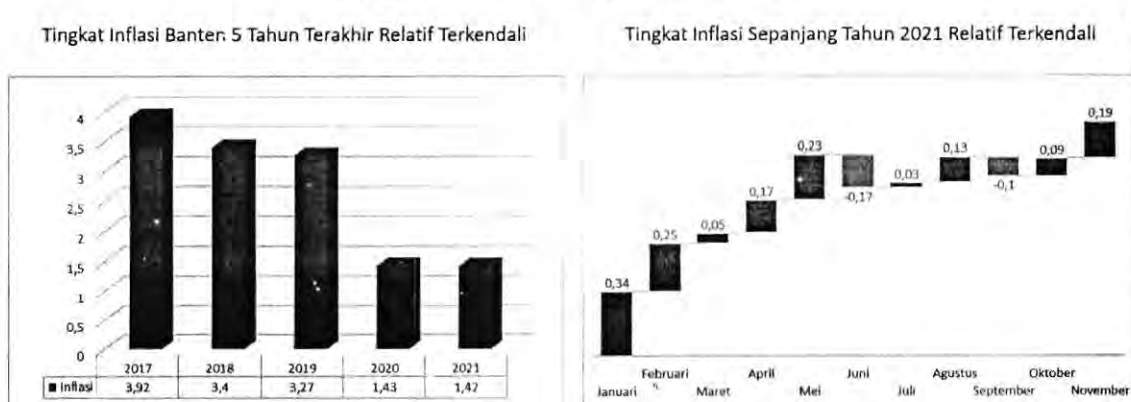


Sumber: BPS

3.1.2.4 Perkembangan Inflasi

Berbicara inflasi, dilihat trend dari tahun 2017 hingga tahun 2021 maka inflasi baik di Banten maupun di tingkat nasional turun secara signifikan. Inflasi di Banten fluktuatif terkadang ada di atas rata-rata nasional, terkadang ada di bawah rata-rata nasional, tetapi masih dalam kondisi yang terjaga. Sepanjang tahun 2021 pun inflasi di Banten dari Januari hingga Februari relatif terjaga. Hal ini tidak lepas dari usaha muti stakeholder dalam menjaga tingkat inflasi di Provinsi Banten.

Gambar 3.11
Tingkat Inflasi Provinsi Banten



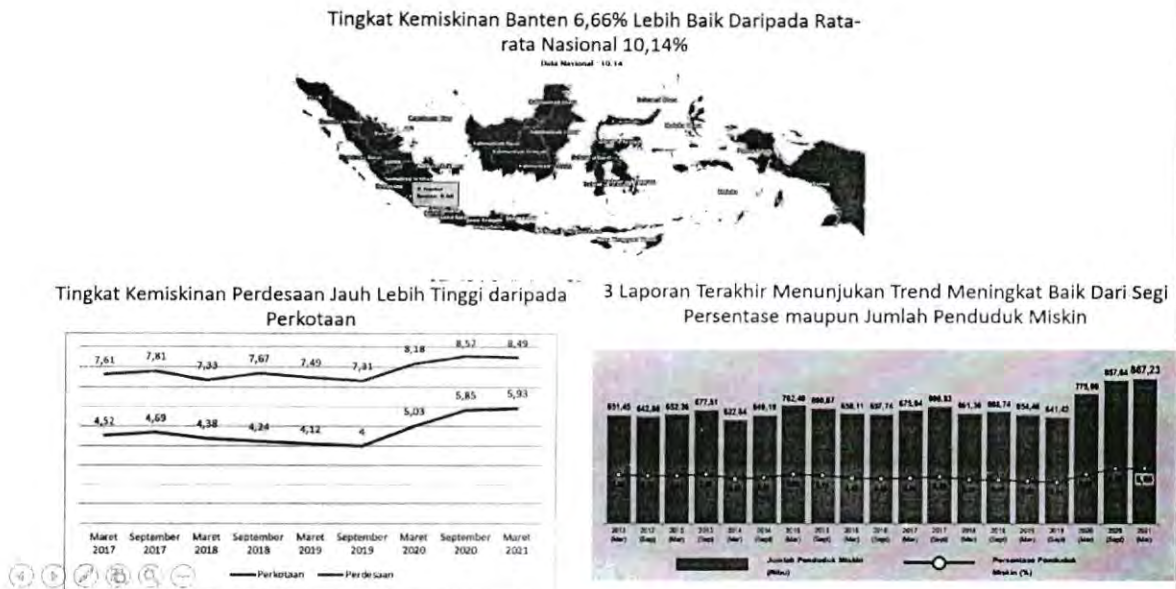
Sumber: BPS Diolah

3.1.2.5 Perkembangan Kemiskinan

Kemiskinan di Provinsi Banten terutama terkonsentrasi di daerah Perdesaan dengan 8,49%, sedangkan di perkotaan hanya 5,93%. Hal ini diduga karena memang tingkat hidup penduduk perdesaan belum mampu setara dengan taraf hidup penduduk yang tinggal di daerah perkotaan sehingga akhirnya lebih banyak penduduk yang tinggal di daerah perdesaan yang masuk kategori miskin karena berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena peran pemerintah harus menjangkau baik penduduk yang tinggal di perdesaan maupun yang tinggal di perkotaan.

Gambar 3.12

Tingkat Kemiskinan



Sumber: Bappenas dan BPS

3.1.2.5 Gini Ratio

Gini Ratio adalah salah satu alat ukur untuk melihat bagaimana tingkat ketimpangan yang ada di masyarakat. Dilihat dari data yang ada, maka sumber ketimpangan di Provinsi Banten terutama berasal dari ketimpangan yang terjadi di perkotaan. Jadi, jika pemerintah ingin mengurangi ketimpangan secara lebih cepat, maka pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap daerah perkotaan dengan tetap memerhatikan ketimpangan yang ada di daerah perdesaan.

Gambar 3.13



Sumber: Bappenas dan BPS

3.1.2.6. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi, dan Tingkat Kemiskinan

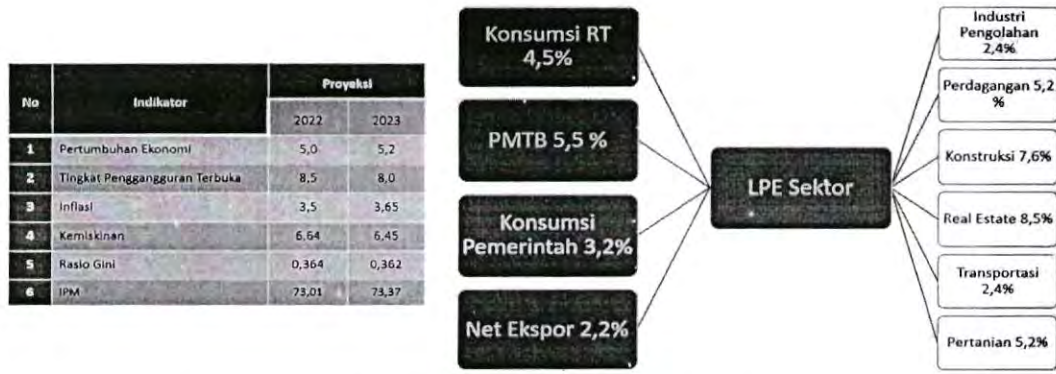
Berbicara tentang proyeksi ekonomi di Provinsi Banten, maka kita harus melihat bagaimana proyeksi ekonomi di tingkat dunia, tingkat ASEAN, dan juga

tingkat nasional. Berdasarkan proyeksi yang dikeluarkan oleh IMF, proyeksi ekonomi dunia secara umum diperkirakan tumbuh seiring dengan melandainya angka kasus Covid19 di berbagai belahan dunia yang juga diiringi dengan peningkatan cakupan vaksin. Kedua hal tersebut memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia. Jika pada tahun 2020, mayoritas negara mengalami kontraksi. Maka sejak tahun 2021 diperkirakan semua negara di dunia akan mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif.

Berdasarkan kondisi-kondisi terkini tersebut maka diproyeksikan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, ekonomi Banten mampu tumbuh sebesar 5,0% dan 5,2%. Ada beberapa asumsi yang mendasari proyeksi tersebut diantaranya pertama, trend pelandaian kasus Covid-19 terus berlanjut bahkan mengalami penurunan yang lebih cepat dari kondisi saat ini. Ke dua, cakupan vaksin baik vaksin pertama dan vaksin ke dua mengalami peningkatan yang signifikan terutama vaksin ke dua yang saat ini angkanya belum cukup menggembirakan. Ke tiga, diaplikasikannya protokol kesehatan di berbagai sektor sehingga roda ekonomi di Banten mampu tetap tumbuh tanpa harus 100% bergantung terhadap perkembangan kasus Covid-19 dan juga cakupan vaksin. Ke empat, semakin normalnya aktivitas ekonomi dunia karena mayoritas perekonomian di Banten berorientasi ekspor terutama sektor industri pengolahan yang sangat bergantung baik dari sisi ekspor maupun impor.

TPT pada tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan mengalami penurunan menjadi 8,5% dan 8,0% dengan beberapa asumsi diantaranya pertama meningkatnya investasi yang memiliki karakteristik padat karya. Ke dua, meningkatnya sisi supply tenaga kerja dengan tingkat skill yang lebih tinggi yang lebih sesuai dengan sisi demand dari pemberi kerja. Ke tiga, berkurangnya jurusan/kejuruan yang tidak match dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan bertambahnya jurusan/kejuruan yang lebih match terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja diiringi dengan meningkatnya kerja sama antara institusi pendidikan dengan insititusi pemberi kerja.

Gambar 3.14
Proyeksi Ekonomi



Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Banten

Tabel 3.5
Realisasi dan Target Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2023

NO	INDIKATOR MAKRO	Sasaran Awal RKP 2023	TARGET PROVINSI BANTEN		
		NASIONAL	Realisasi 2021	RKPD 2022	RANC. RKPD 2023
1	IPM	73.31-73.36	72,72	72,60-73,68	73,27
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.3 - 5.9	4,4	5,0-5,6	5,02-5,15
3	Tingkat Kemiskinan (%) *)	8.50 - 7.50	6,50	4,99-5,40	5,58
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) *)	6.00 - 5.30	8,98	9,70-9,20	8,67
5	Gini Rasio	0.378-0.375	0,363	0,370	0,354

Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Banten

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Tangerang

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2021 kembali pulih yang sebelumnya mengalami kontraksi dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berada -3,75 persen di tahun 2020, tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang kembali pulih dengan pertumbuhan sekitar 4,63 persenn lebih tinggi jika dibandingkan dengan Banten dan angka laju pertumbuhan ekonomi Nasional.

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2021 mengalami kenaikan setelah pandemic Covid-19 yang tadinya mengalami kontraksi di tahun 2020 sekitar 3,75%, tumbuh positif ditahun 2021 menjadi 4,63%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,96%, dan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,70%. Dari 17 sektor lapangan usaha yang ada sebanyak 5 sektor lapangan mengalami penurunan yaitu sector lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sector Pertambangan dan Penggalan, sector Jasa Perusahaan, sector Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, dan sector Jasa Pendidikan. Sebanyak 12 sektor lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan yang positif di tahun 2021 yaitu sector lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, sector Pengadaan Air.

Apabila dilihat berdasarkan kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, pada tahun 2021, kontribusi terbesar pada tahun 2021 dicapai oleh lapangan usaha industry pengolahan sebesar 34,087.80 miliar rupiah, sector lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,984.82 miliar rupiah, sector lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,449.47 miliar rupiah, sector lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,051.09 miliar rupiah, dan sector lapangan Real Estat sebesar 8,838.91 miliar rupiah.

Menurut PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2021 kontribusi sector lapangan usaha yang paling besar dari sector lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 34,087.80 miliar rupiah, sector lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,984.82 miliar rupiah, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,449.47 miliar rupiah, dan sector lapangan usaha Real Estat sebesar 8,838.91 miliar rupiah. Untuk lebih jelasnya lihat table laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang ADHK Tahun 2018-2020.

Tabel 3.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2018-2021

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,98	2,25	2,82	(0,84)
B	Pertambangan dan Penggalian	5,72	2,30	(5,90)	(9,45)
C	Industri Pengolahan	2,66	3,20	(8,74)	4,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,82	(4,23)	(12,35)	11,70
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,19	6,71	8,60	5,62
F	Konstruksi	8,18	9,44	(3,29)	11,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,69	6,22	(3,70)	1,83
H	Transportasi dan Pergudangan	9,60	9,55	(5,32)	9,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,62	7,86	(5,63)	4,25
J	Informasi dan Komunikasi	8,35	9,69	9,12	5,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,16	0,72	1,58	6,07
L	Real Estat	9,44	9,49	1,96	3,07
M,N	Jasa Perusahaan	6,02	9,20	(6,00)	(2,25)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,48	8,75	(0,38)	(0,81)
P	Jasa Pendidikan	8,25	8,30	0,69	(1,04)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,68	11,13	4,41	9,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,69	9,36	(6,11)	1,39
	Produk Domestik Regional Bruto	5,80	5,56	(3,75)	4,63

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2021

Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, sector Konstruksi, sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sector Transportasi dan Pergudangan, sector Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sector Informasi dan Komunikasi, sector Jasa Keuangan dan Asuransi, sector Real Estat, sector Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sector lapangan usaha Jasa Lainnya.

Di tahun 2021, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) sebesar 145,210.12 miliar rupiah atau meningkat sebesar 6,98 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 135,737.06 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun yang sama, PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 97,809.90 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 4,63 persen dari tahun

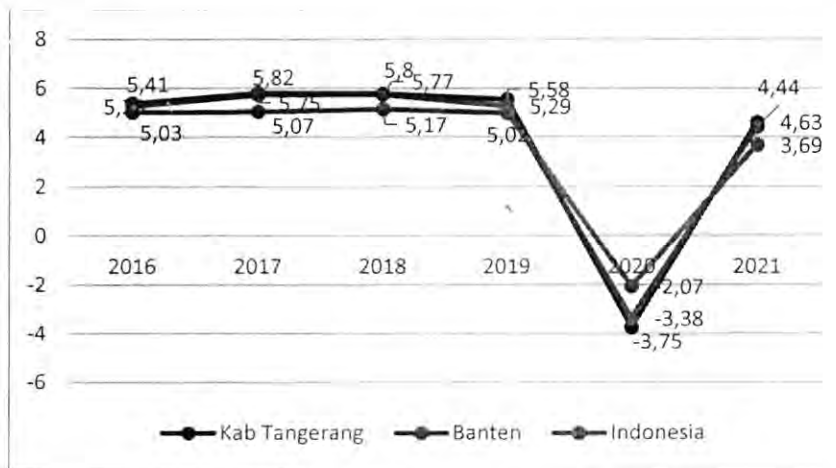
sebelumnya yang nilainya 93,482.49 miliar rupiah. Kondisi tersebut mulai menunjukkan peningkatan setelah tahun 2020 yang menyebabkan PDRB Kabupaten Tangerang baik ADHB maupun ADK terganggu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurut PDRB harga konstan relatif sedikit berfluktuasi sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 sebesar 5,41%, tahun 2017 meningkat menjadi 5,82% yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,80% dan kembali menurun di tahun 2019 mencapai 5,58%. Memasuki tahun 2020 gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun drastis ke angka -3,75%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dalam empat tahun terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,00% dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasional dari tahun 2016-2019. Sayangnya, pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurun hingga angka yang lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten maupun Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi nasional, Banten dan Kabupaten Tangerang mulai pulih dengan ditunjukkan dengan mulai tumbuh positif, pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat di angka 4,63%, begitu juga dengan Provinsi Banten yang mulai tumbuh sekitar 4,44%.

Di tahun 2021, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) sebesar 145.210,12 miliar atau naik sekitar 9.473,06 miliar dari tahun 2020 yang sebesar 135.737,06 miliar. Sedangkan pada tahun yang sama, PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 97.809,90 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 4,63 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 93.481,49 miliar rupiah ditahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurut PDRB harga konstan relatif sedikit berfluktuasi sejak tahun 2016 dan tahun 2020. Pada tahun 2016 sebesar 5,41%, tahun 2017 meningkat menjadi 5,82% yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,80% dan kembali menurun di tahun 2019 mencapai 5,58%. Memasuki tahun 2020 gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun drastis ke angka -3,75%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dalam empat tahun terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,00% dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasional dari tahun 2016-2019. Sayangnya, pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang

menurun hingga angka yang lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten maupun Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang baik secara Nasional mulai bangkit kembali dari kontraksi, sehingga tahun 2021 mulai pulih kembali ke kondisi new normal dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,64 persen.

Gambar 3.15

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2016-2021



Disamping menggunakan pendekatan lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Tangerang, perekonomian suatu wilayah menggunakan juga pendekatan PDRB dengan pengeluaran, yang menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan (output) dalam wilayah domestik yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh masyarakat, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen ekspor barang dan jasa.

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Sektor lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LPNRT) berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislative, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau

Negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Aktivitas investasi merupakan salah satu factor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Aktivitas ekspor impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan.

Nilai PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku selama periode 2017-2021 menunjukkan peningkatan signifikan dari Peningkatan nilai PDRB yang terus meningkat akhirnya tertahan di tahun 2020, karena nilainya turun dibanding tahun sebelumnya. Selain dinilai atas harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010.

Tabel 3.7

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang, 2017-2021 (miliar Rp.)

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	49,408.52	52,000.18	54,496.20	53,122.77	54,753.28
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	438.90	468.26	521.97	480.02	473.93
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,129.68	3,237.70	3,426.47	3,097.36	3,143.37
Pembentukan Modal Tetap Bruto	19,527.91	20,783.59	22,278.58	22,056.56	23,147.61
Perubahan Inventori	8.48	8.64	6.40	1.10	0.08
Ekspor Barang dan Jasa	73,901.40	77,259.58	80,968.19	78,205.47	84,601.17
Dikurangi: Impor Barang dan Jasa	59,450.87	61,746.54	64,568.64	63,480.80	68,309.54
Produk Domestik Regional Bruto	86,964.03	92,011.41	97,129.17	93,482.49	97,809.90

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2021

PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2017-2021,

gambaran tentang perekonomian Kabupaten Tangerang berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel diatas. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari 86.964,03 miliar rupiah ditahun 2017, meningkat lagi menjadi 92.011,41 miliar rupiah di tahun 2018, meningkat kembali menjadi 97.129,17 miliar rupiah ditahun 2019, mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 93.482,49 miliar rupiah dan kembali meningkat ditahun 2021 menjadi 97,809.90 miliar rupiah.

3.1.3.2 Kontribusi Ekonomi

Apabila dilihat berdasarkan kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usahanya, pada tahun 2021, lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan sumbangan tertinggi sebesar 34.85 persen, kemudian disusul lapangan usaha Konstruksi sebesar 14.30 persen, lapangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11.71 persen. Selanjutnya lapangan usaha Real Estate menyumbang 9.04 persen dan lapangan usaha informasi dan komunikasi memberikan sumbangan sebesar 6.19 persen. Sedangkan pada tahun 2020, lapangan usaha Industri Pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi yaitu sebesar 35.04 persen, meskipun persentasenya menurun dibandingkan tahun 2019, kemudian disusul lapangan usaha Konstruksi sebesar 13.36 persen, lapangan persen. Selanjutnya lapangan usaha real estate menyumbang 9.17 persen dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangan sebesar 6.18 persen.

Tabel 3.8

PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A Pertanian Kehutanan dan Perikanan	5,339.40	5,498.45	5,622.08	5,780.75	5,731.96
B Pertambangan dan Penggalia	35.87	37.92	38.79	36.50	33.05
C Industri Pengolahan	33,877.15	34,778.08	35,890.71	32,752.30	34,087.80
D Pengadaan Listrik dan Gas/	1,408.41	1,490.37	1,427.30	1,251.07	1,397.42
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	70.53	74.19	79.17	85.98	90.81
F Konstruksi	10,909.63	11,802.04	12,916.15	12,491.21	13,984.82
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	10,113.12	10,991.87	11,675.61	11,244.17	11,449.47

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Mobil dan Sepeda Motor					
H Transportasi dan Pergudangan	2,461.27	2,697.43	2,955.03	2,797.73	3,074.81
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,302.58	1,414.83	1,525.99	1,440.15	1,501.32
J Informasi dan Komunikasi	4,436.55	4,807.00	5,272.80	5,753.68	6,051.09
K Jasa Keuangan dan Asuransi	4,347.71	4,659.19	4,692.76	4,766.98	5,056.55
L Real Estat	7,019.03	7,681.62	8,410.61	8,575.46	8,838.91
M N Jasa Perusahaan	823.60	873.19	953.52	896.31	876.19
O Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,251.11	1,332.18	1,448.75	1,443.24	1,431.56
P Jasa Pendidikan	1,982.45	2,146.00	2,324.12	2,340.16	2,315.89
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	365.41	400.78	445.38	465.03	507.52
R S T U Jasa Lainnya	1,220.22	1,326.26	1,450.39	1,361.78	1,380.73
Produk Domestik Regional Bruto	86,964.03	92,011.41	97,129.17	93,482.49	97,809.90

*Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2021

Tabel 3.9

PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A Pertanian Kehutanan dan Perikanan	5,339.40	5,498.45	5,622.08	5,780.75	5,731.96
B Pertambangan dan Penggalia	35.87	37.92	38.79	36.50	33.05
C Industri Pengolahan	33,877.15	34,778.08	35,890.71	32,752.30	34,087.80
D Pengadaan Listrik dan Gas/	1,408.41	1,490.37	1,427.30	1,251.07	1,397.42
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	70.53	74.19	79.17	85.98	90.81
F Konstruksi	10,909.63	11,802.04	12,916.15	12,491.21	13,984.82
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,113.12	10,991.87	11,675.61	11,244.17	11,449.47
H Transportasi dan Pergudangan	2,461.27	2,697.43	2,955.03	2,797.73	3,074.81
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,302.58	1,414.83	1,525.99	1,440.15	1,501.32
J Informasi dan Komunikasi	4,436.55	4,807.00	5,272.80	5,753.68	6,051.09
K Jasa Keuangan dan Asuransi	4,347.71	4,659.19	4,692.76	4,766.98	5,056.55

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
L	Real Estat	7,019.03	7,681.62	8,410.61	8,575.46	8,838.91
M N	Jasa Perusahaan	823.60	873.19	953.52	896.31	876.19
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,251.11	1,332.18	1,448.75	1,443.24	1,431.56
P	Jasa Pendidikan	1,982.45	2,146.00	2,324.12	2,340.16	2,315.89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	365.41	400.78	445.38	465.03	507.52
R S T U	Jasa Lainnya	1,220.22	1,326.26	1,450.39	1,361.78	1,380.73
Produk Domestik Regional Bruto		86,964.03	92,011.41	97,129.17	93,482.49	97,809.90

*Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2021

Tabel 3.10

Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2021

Lapangan Usaha	Tahun (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,92	6,85	6,68	6,46	6,95	6,53
Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Industri Pengolahan	37,47	36,85	35,86	35,21	33,30	33,08
Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	4,02	3,81	3,34	3,02	3,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
Konstruksi	13,08	13,63	14,21	14,82	14,85	16,16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,76	11,00	11,36	11,57	11,74	11,30
Transportasi dan Pergudangan	2,85	2,90	2,98	3,08	3,05	3,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,49	1,50	1,51	1,52	1,49	1,46
Informasi dan Komunikasi	3,20	3,28	3,19	3,21	3,61	3,54
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,28	5,33	5,45	5,19	5,46	5,68
Real Estate	6,92	7,30	7,47	7,81	8,39	8,17
Jasa Perusahaan	1,01	1,05	1,05	1,10	1,08	1,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,68	1,70	1,70	1,76	1,89	1,80
Jasa Pendidikan	2,46	2,53	2,65	2,78	2,93	2,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,40	0,42	0,44	0,47	0,51	0,53
Jasa Lainnya	1,46	1,52	1,54	1,60	1,60	1,53

Catatan / Note: * Angka sementara / Preliminary figures

** Angka sangat sementara / Very preliminary figures

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2021

Sementara itu, berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha, Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2021 sekitar 6,53%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang sekitar 6,95%, sementara pada tahun 2017-2018 kontribusi sektor pertanian sebesar 6,85% dan 6,68%. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terkecil yang mana berkontribusi sebesar 0,04% pertahun terhadap PDRB Kabupaten Tangerang, sedangkan

sektor Industri pengolahan mempunyai kontribusi sebesar yaitu 35,08% pada tahun 2021, yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar yaitu sebesar 36,30%. Sedangkan sektor Perdagangan pada tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Kontribusi sektor Perdagangan pada tahun 2021 sebesar 11,30 persen, turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 11,74% lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 11,59%.

Tabel 3.11
Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga konstan Tahun 2016
- 2021 (dalam persen)

KATEGORI	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,17	6,14	5,98	5,79	6,18	5,86
B	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
C	Industri Pengolahan	39,84	38,96	37,80	36,96	35,04	34,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,86	1,62	1,62	1,47	1,34	1,43
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
F	Konstruksi	12,10	12,54	12,83	13,30	13,36	14,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,54	11,63	11,95	12,02	12,03	11,71
H	Transportasi dan Pergudangan	2,76	2,83	2,93	3,04	2,99	3,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,46	1,50	1,54	1,57	1,54	1,53
J	Informasi dan Komunikasi	4,99	5,10	5,22	5,43	6,15	6,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,02	5,00	5,06	4,83	5,10	5,17
L	Real Estate	7,77	8,07	8,35	8,66	9,17	9,04
M,N	Jasa Perusahaan	0,93	0,95	0,95	0,98	0,96	0,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,43	1,44	1,45	1,49	1,54	1,46
P	Jasa Pendidikan	2,24	2,28	2,33	2,39	2,50	2,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,41	0,42	0,44	0,46	0,50	0,52
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,35	1,40	1,44	1,49	1,46	1,41

Catatan / Note: * Angka sementara / Preliminary figures

** Angka sangat sementara / Very preliminary figures

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2021

3.1.3.3 Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di Kota Serang, Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan, diketahui pada bulan Desember 2021 ini sebanyak 215 komoditas mengalami perubahan harga. Rincian lengkapnya adalah 158 komoditas mengalami kenaikan harga dan sisanya sebanyak 57 komoditas mengalami penurunan harga, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dibulan Desember 2021 antara lain: cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, minyak goreng, cabai hijau, kacang panjang, daun bawang, ketimun, tarif dokter. gigi, dan cumi-cumi. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga selama bulan Desember 2021, antara lain: biaya administrasi transfer uang, kulit melinjo, tomat, pelicin/pewangi pakaian, pir, pil KB, kol putih/kubis, rampela hati ayam, obat batuk, dan kepinging/rajungan. Angka inflasi disajikan dalam tabel.

Pada Desember 2021 dari 11 kelompok pengeluaran, 7 kelompok memberikan andil/ sumbangan inflasi, 4 kelompok pengeluaran lainnya memberikan andil/sumbangan inflasi kurang dari 0,01 persen. Kelompok yang menyumbangkan andil inflasi yaitu kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,55 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,05 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,03 persen; kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,02 persen; kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,02 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,01 persen; dan kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok Pakaian dan Alas Kaki; kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; dan kelompok Pendidikan masing-masing menyumbang inflasi sebesar kurang dari 0,01 persen. Beberapa komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Desember ini adalah komoditas: minyak goreng, telur ayam ras, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, tarif dokter spesialis, angkutan udara, buah naga, sabun detergen bubuk/cair, dan tarif check up. Sementara komoditas yang dominan menyumbang deflasi pada bulan Desember ini adalah komoditas: pengharum cucian/pelembut pakaian, tomat, susu bubuk untuk balita, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, pepaya, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan

gembolo/ikan aso-aso, susu bubuk, popok bayi sekali pakai/diapers, dan susu cair kemasan.

Kabupaten Tangerang mengalami inflasi sebesar 0,69 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi di Kabupaten Tangerang adalah minyak goreng sebesar 0,12 persen, telur ayam ras sebesar 0,10 persen, cabai merah sebesar 0,07 persen, daging ayam ras dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,06 persen. Sementara komoditas yang memberikan andil deflasi, yaitu pengharum cucian/pelembut sebesar 0,02 persen, ikan tongkol, bawang merah, pepaya dan susu bubuk untuk balita masing-masing sebesar 0,01 persen.

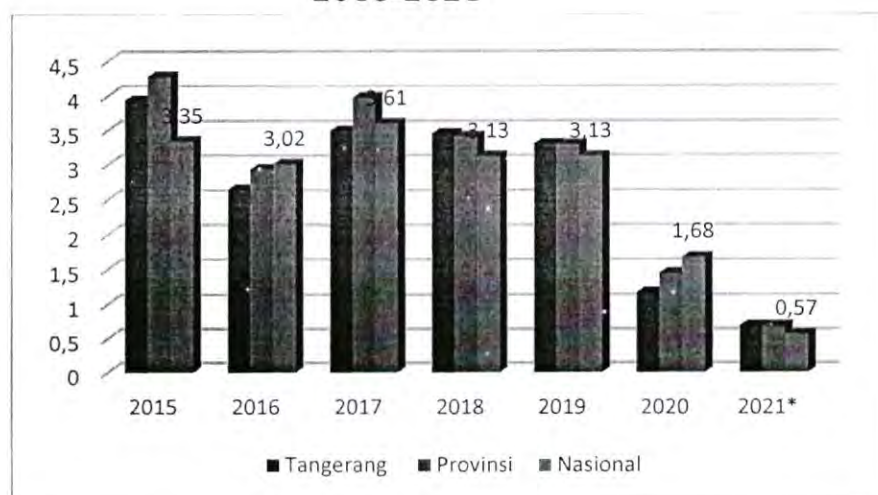
Tabel 3.12
Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2021

inflasi YoY (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Kota Tangerang	3,94	2,65	3,50	3,46	3,31	1,17	0,69
Kota Serang	4,28	3,26	5,17	3,78	3,06	1,89	0,73
Kota Cilegon	4,67	4,22	5,24	2,73	3,54	2,59	0,66
Provinsi Banten	4,29	2,94	3,98	3,42	3,30	1,45	0,69
Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	3,13	1,68	0,57

* Desember 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 3.16
Perkembangan Inflasi di Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2015-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Perkembangan tingkat inflasi Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon dari tahun 2015-2021 relatif berfluktuasi. Inflasi Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan

inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2021, laju inflasi di Kota Tangerang memiliki tren yang cenderung menurun. Nilai inflasi tertinggi Kota Tangerang adalah pada tahun 2015, yaitu sebesar 3,94%, sementara nilai inflasi pada tahun 2021 adalah yang terendah, yaitu sebesar 0,69%.

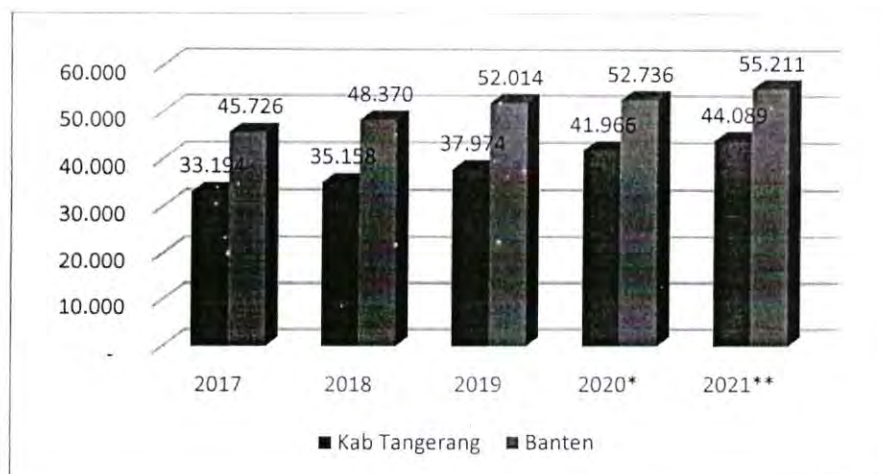
Sedangkan apabila dibandingkan dengan dengan nilai inflasi Provinsi Banten, nilai inflasi di Kota Tangerang pada tahun 2019 adalah sebesar 3,31% sama jika dibandingkan Provinsi Banten yang juga sebesar 3,30%, memasuki tahun 2020 inflasi kota Tangerang menurun mencapai nilai 1,17% yang nilainya sedikit lebih rendah dari inflasi Provinsi Banten sebesar 1,45%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional pada tahun 2019-2021, inflasi Kota Tangerang pada tahun 2019 mencatat nilai yang lebih tinggi yaitu 3,30% dibandingkan inflasi Nasional sebesar 2,72% dan tahun 2020 inflasi Kota Tangerang sebesar 0,17% tercatat lebih rendah daripada inflasi nasional tahun 2020 sebesar 1,68%, dan pada Desember 2021 inflasi pada angka 0,57%.

3.1.3.4 PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, PDRB per kapita menurut harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. PDRB per kapita mencapai titik tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 44.089 (000 rupiah). PDRB per kapita Kabupaten Tangerang menurut Harga Konstan tahun 2021 sebesar Rp. 29.698 (000 rupiah).

Gambar 3.17
Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten
Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2021 (000 rupiah)



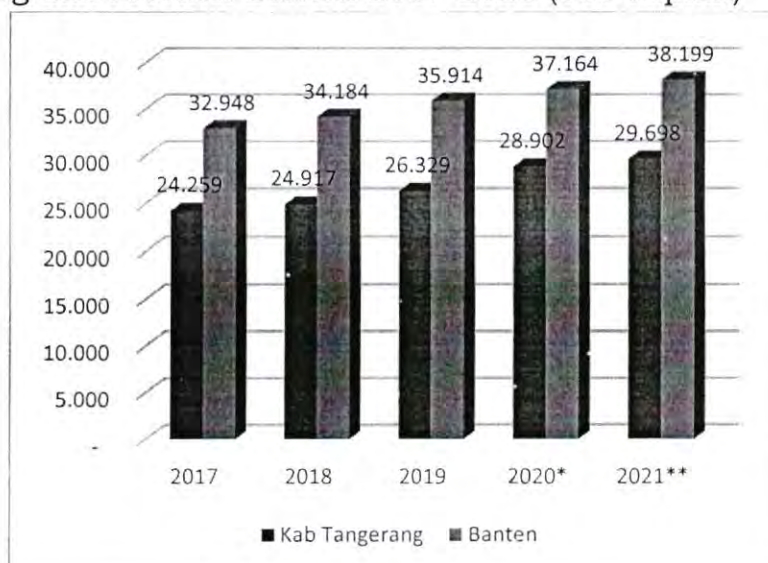
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

Gambar 3.18

Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2021 (000 rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

3.1.3.5 Gini Ratio

Ada berbagai tolok ukur yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan, antara lain Kurva Conrad Lorenz, Corrado Gini Coefficient, Kuznets Index, Oshima Index dan Theil Decomposition Index. Namun yang paling banyak dan juga digunakan di Indonesia adalah Gini Coefficient atau lebih dikenal dengan nama Gini Ratio (GR).

Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah merata. Perbedaan pendapatan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Suatu metode mengukur ketimpangan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan

masyarakat. Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai berikut:

$0 < G \leq 0,35$ menunjukkan ketimpangan rendah

$0,35 < G < 0,50$ menunjukkan ketimpangan sedang

$G \geq 0,50$ menunjukkan ketimpangan tinggi

Level indeks gini tertinggi dalam periode 2010-2019 yaitu sebesar 0,37 pada tahun 2011 dan 2014. Pada tahun 2016 dan 2017 indeks gini sebesar 0,30 dan 0,32 secara berurutan yang menunjukkan ketimpangan yang rendah. Hal ini menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan Kabupaten Tangerang semakin baik. Meskipun masalah ketimpangan dapat diatasi, namun perlu tetap mewaspadaai terjadinya ketimpangan yang lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya. Hal ini terjadi pada tahun 2017 – 2019 yang justru menunjukkan tren peningkatan ketimpangan dengan semakin meningkatnya indeks Gini (lihat gambar 2.29 untuk detail pertumbuhan rasio Gini Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang). Indeks gini dapat Kembali ditekan pada tahun 2020 yang menunjukkan angka 0,285.

Tabel 3.13

Pendapatan Penduduk 40% terendah dan Gini Rasio di Kabupaten Tangerang, Tahun 2010-2020

Tahun	Gini Ratio	Distribusi Pendapatan Penduduk 40% terendah (dalam %)
2010	0,33	20,87
2011	0,37	19,05
2012	0,32	22,42
2013	0,34	20,93
2014	0,37	19,60
2015	0,34	19,49
2016	0,30	21,14
2017	0,32	21,43
2018	0,34	N/A
2019	0,34	N/A
2020	0,285	N/A

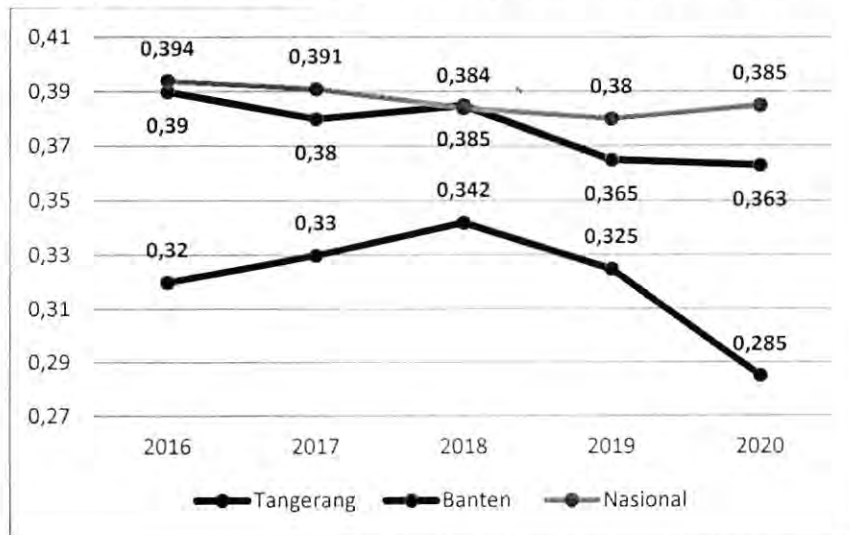
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang tahun 2020 dan BPS Provinsi Banten tahun 2021

Grafik di bawah ini menyajikan data ketimpangan pendapatan di Tangerang dibandingkan Provinsi Banten, dan angka nasional. Dari grafik tersebut terlihat bahwa dalam beberapa tahun belakangan ketimpangan

Kabupaten Tangerang bergerak sangat cepat dan cenderung meningkat dibandingkan dengan angka ketimpangan Provinsi Banten maupun angka nasional yang justru memiliki tren menurun hingga tahun 2019. Namun di tahun 2020, angka indeks gini Kabupaten Tangerang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan hingga angka 0,285.

Gambar 3.19

Rasio Gini Kabupaten Tangerang, Banten, dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari website BPS

Ketimpangan yang tinggi bersumber dari beberapa aspek, salah satunya tidak berkembangnya sektor pertanian. Dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian memang tidak banyak, tetapi nilai tambah sektor ini kecil. Nilai tambah yang kecil bersumber dari tidak berkembangnya sektor yang bersangkutan. Sebagai daerah yang berkembang ke arah industri, permintaan lahan untuk industri cukup tinggi, akibatnya lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan industri, sedangkan lahan pertanian bergeser ke tanah yang lebih marginal. Sementara kebijakan yang diambil daerah lebih banyak mendukung sektor industri yang menciptakan pertumbuhan dengan cepat.

Penyebab lain dari ketimpangan adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah dari sektor rumah makan, hotel, dan restoran. Sektor ini adalah sektor yang memiliki pendapatan per kapita paling rendah. Sektor ini adalah sektor yang sangat padat tenaga kerja. Sektor ini melayani hotel, rumah makan, dan restoran dari segala segmen. Sebagai daerah industri yang berkembang, maka dapat diduga kelompok masyarakat dengan pendapatan perkapita rendah adalah yang terbanyak dari sektor ini. Kebutuhan pekerja pabrik atas akomodasi

dan konsumsi mendominasi sektor ini sehingga menyebabkan produktivitas sektor ini jauh lebih rendah dari rata-rata kabupaten.

Pada sisi lain, sektor industri pengolahan yang menjadi penopang utama pertumbuhan bersifat padat modal. Industri padat modal hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja tetapi menghasilkan nilai tambah yang sangat tinggi. Dengan demikian maka terjadilah ketimpangan antar sektor yang sangat mencolok. Dari kondisi ini sangat mudah diduga bahwa mereka yang masih terkategori penduduk miskin adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian dan akomodasi konsumsi itu.

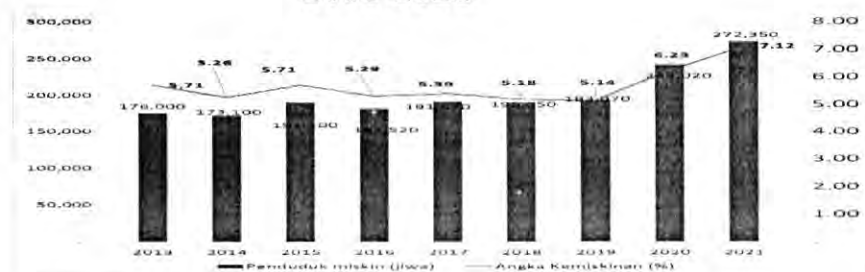
Ketimpangan yang tinggi akan bermuara pada penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya alias miskin. Dilihat dari jumlahnya, penduduk miskin Kabupaten Tangerang memang hanya 5% penduduk, jauh lebih rendah dari angka nasional yang masih mencapai angka lebih dari 9%.

3.1.3.6 Kemiskinan

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.20
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021

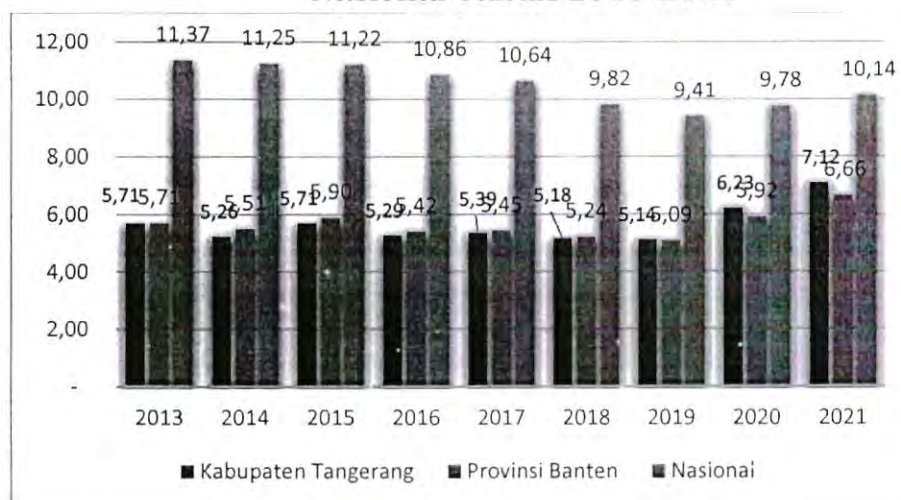


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang tahun 2020 sekitar 0,95 dan tahun 2021 meningkat hingga 1,21. Sedangkan pada tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan (P2) mencapai 0,22 dan tahun 2021 mencapai 0,29. Sementara itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2020 sekitar 6,23% atau sebanyak 242.160 orang, tahun 2021 naik menjadi 7,12% atau sekitar 272,350 orang atau sekitar 7,12 persen. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2021 senilai Rp 545.065,-/kapita/bulan.

Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang berfluktuasi nilainya, pada tahun 2018 mengalami penurunan mencapai nilai sebesar 5,18% kemudian persentase penduduk miskin tahun 2019 kembali menurun hingga mencapai 5,14%, tetapi kembali meningkat di tahun 2020-2021 hingga mencapai 6,23 - 7,12%. Sementara itu, Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional pada Tahun 2013-2021 dapat dilihat pada grafik.

Gambar 3.21
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2013-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan dengan menjalankan beberapa program yang berasal dari pemerintah pusat, antara lain seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan non tunai. Selain itu, juga pembentukan tim reaksi cepat (TRC) untuk menanggulangi angka kemiskinan dengan memberikan pendampingan usaha bagi warga miskin. Sedangkan jika dilihat pada tiga tahun ke belakang, pada

tahun 2017, 2018, dan 2019 persentase penduduk miskin di tingkat Provinsi Banten dan Nasional trennya juga cenderung mengalami penurunan.

Kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Pandemi Covid-19 turut memberikan dampak meningkatnya persentase penduduk miskin baik di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maupun di tingkat Nasional. Di Kabupaten Tangerang, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 7,12%, sedangkan di level Provinsi Banten, persentase penduduk miskin juga meningkat menjadi 6,66%. Di level nasional, persentase penduduk miskin meningkat hingga menjadi 10,14%.

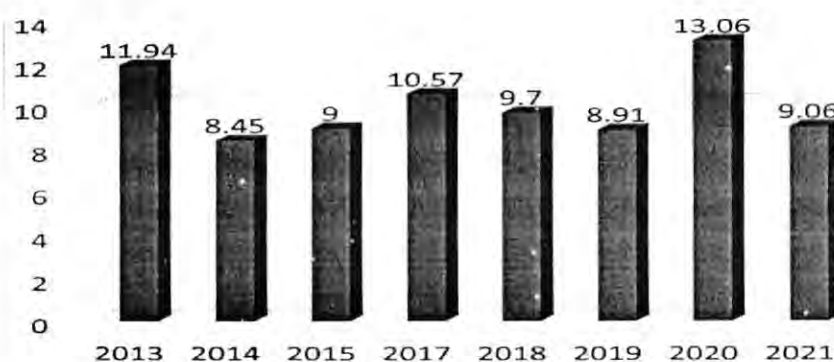
Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan antara lain

1. Belum terpenuhinya standar kebutuhan hidup layak masyarakat walaupun termasuk penduduk sudah bekerja, terutama penduduk yang mencari kerja disektor informal
2. Inflasi harga kebutuhan bahan pokok sedangkan penghasilan belum ada penyesuaian

3.1.3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran, angka TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka bersumber dari Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2021, merupakan gambaran kondisi ketenagakerjaan periode Agustus 2021.

Gambar 3.22
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021



Sumber : BPS Provinsi Banten 2013-2020, diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 9,06%. Jumlah penduduk usia kerja (> 15 tahun) di Kabupaten Tangerang sekitar 2,880,692 jiwa, yang terdiri dari angkatan kerja sebesar 1,842,009 jiwa, dan Jumlah bukan Angkatan Kerja sebanyak 1,038,683 jiwa, meliputi Ibu Rumah Tangga, usia Sekolah, dan lainnya.

Jumlah pengangguran tahun 2021 mencapai 166.798 jiwa atau 9,06 persen, dengan penduduk yang bekerja mencapai 1.675.211 jiwa atau sekitar 90.94 persen. Penurunan angka pengangguran ini merupakan imbas dari pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 yang melanda di seluruh dunia.

3.1.3.8 Proyeksi Indikator Makro Tahun 2022 dan 2023

Kondisi perekonomian tahun 2022 dan tahun 2023 diproyeksikan akan makin membaik jika dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditunjukkan dengan tumbuhnya perekonomian Kabupaten Tangerang menjadi 4,67 persen yang sempat berkontraksi sebesar 3,75 persen tahun 2020. Demikian pula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang menurun hingga 4 persen jika dibandingkan tahun 2020. Namun dengan mulai tumbuhnya perekonomian di Kabupaten Tangerang belum mampu menurunkan persentase penduduk miskin. Hal ini disebabkan pendapatan yang diperoleh masyarakat belum dapat memenuhi standar hidup layak yaitu Rp. 545.065,-/kapita/bulan. Proyeksi kinerja perekonomian Kabupaten Tangerang didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Penanganan pandemi Covid-19 dengan dilaksanakannya vaksinasi secara luas kepada masyarakat sehingga tercipta Herd Immunity
2. Stimulus berupa Bantuan Sosial oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan daya beli berlanjut di tahun 2022
3. Sektor industry pengolahan, perdagangan, dan konstruksi mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan membaiknya iklim investasi di Kabupaten Tangerang
4. Stabilitas harga bahan pokok

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 menargetkan capaian indikator makro daerah sebagai berikut :

Tabel 3.14

Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023

No.	Uraian Indikator Makro	Satuan	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,07	5,21	5,47
2	Inflasi	Persen	3,4	3,30	3,20
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,06	8,8	8,3
4	Kemiskinan	Persen	7,12	7	6,5
5	IPM	Nilai	72,92	72,82	73,26

Sumber : Proyeksi Bappeda, 2021

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimpikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah antara lain :

a. Intensifikasi

Intensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tercapainya optimalisasi pajak penerimaan daerah dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak melalui upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tersebut untuk melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Sosialisasi kepada wajib pajak daerah terkait ketentuan perpajakan daerah.
2. Monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
3. Pengawasan kepatuhan dan kebenaran kewajiban pembayaran pajak para wajib pajak.
4. Optimalisasi pajak melalui pemeriksaan pajak.
5. Dukungan pemanfaatan dan pengembangan aplikasi teknologi sistem informasi manajemen terkini guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan cakupan subjek pajak dan objek pajak. Upaya ini dilakukan dengan cara :

1. Pendataan dan survey subjek pajak dan objek pajak guna mengetahui informasi berkaitan dengan objek pajak dan subjek pajak yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tujuan akhir dari kegiatan ini diharapkan wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri atau berdasarkan data yang dimiliki fiskus melakukan pengukuhan secara jabatan dan mengenakan pajak atas subjek pajak

atau objek pajak yang semula belum dikenakan pajak.

2. Koordinasi optimalisasi pajak daerah melalui kerjasama dengan instansi terkait untuk optimalisasi penerimaan pajak

3.2.1.2 Dana Transfer

Pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana transfer-perimbangan ini mencakup; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (SDA).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

- 1) Peningkatan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mengadakan komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota;
- 3) Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang.
- 4) Penghitungan besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah dihitung sementara masih mengikuti Dana Transfer yang diberikan kepada Kabupaten Tangerang Tahun 2022

3.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang mencakup dana hibah baik dari Kementerian/Lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus. Pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah karena Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat dikelompokkan dalam Dana Transfer yaitu Dana Alokasi Khusus.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.15
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023

Kode	Uraian	2022	2023	%
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.583.428.104.592	2.861.402.894.309	10,76
4.1.01	Pajak Daerah	1.961.053.392.906	2.205.000.000.000	12,44
4.1.02	Retribusi Daerah	79.785.396.662	80.356.917.823	0,72
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	53.789.023.713	58.482.204.636	8,73
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	488.800.291.311	517.563.771.850	5,88
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	3.154.266.365.989	3.154.266.365.989	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.449.768.183.000	2.449.768.183.000	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	704.498.182.989	704.498.182.989	0,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0,00
	Jumlah Pendapatan	5.737.694.470.581	6.015.669.260.298	4,13

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi

peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, dalam bentuk Program/Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Nomenklatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

1. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

a. belanja pegawai;

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi tersebut diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja barang dan jasa;

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketigadalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai

kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

d. Belanja Bansos

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

- a. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini minimal 10 persen dari Pendapatan Pajak dan Retribusi
- b. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Keuangan dalam hal ini adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa

Tabel 3.16
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023

Kode	Uraian	2022	2023	%
5	BELANJA			
5,1	BELANJA OPERASI	4.163.674.254.397	4.318.854.526.946	3,73
5.1.01	Belanja Pegawai	2.163.930.782.176	2.250.578.775.008	4,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.713.306.992.921	1.781.839.272.638	4,00
5.1.05	Belanja Hibah	280.388.479.300	280.388.479.300	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.048.000.000	6.048.000.000	0,00
5,2	BELANJA MODAL	1.165.681.312.343	1.271.874.686.270	9,11
5.2.01	Belanja Modal Tanah	134.294.460.679	64.650.785.156	-51,86
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.496.102.737	202.195.323.284	20,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392.255.955.567	470.707.146.680	20,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	445.267.859.292	534.321.431.150	20,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.366.934.068	30.440.320.882	20,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000	50.000.000.000	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	50.000.000.000	0,00
5,4	BELANJA TRANSFER	631.138.903.841	674.940.047.082	6,94
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	184.734.548.541	228.535.691.782	23,71
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	446.404.355.300	446.404.355.300	0,00
	Jumlah Belanja	6.010.494.470.581	6.315.669.260.298	4,40
	Total Surplus/(Defisit)	(272.800.000.000)	(300.000.000.000)	

3.2.2. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Tangerang bersumber dari SiLPA yang terdiri dari pelampauan pendapatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas pembayaran cicilan pokok pinjaman (utang) yang jatuh tempo dan penyertaan modal daerah, serta pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel.3.17
Proyeksi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	2022	2023	%
6	PEMBIAYAAN			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	300.000.000.000	300.000.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	300.000.000.000	300.000.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	300.000.000.000	300.000.000.000	
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.200.000.000	0	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	27.200.000.000	0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	27.200.000.000	0	
	Pembiayaan Netto	272.800.000.000	300.000.000.000	

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Oleh karenanya, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 dirumuskan untuk mencapai target kinerja RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Substansi sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2023 memperhatikan :

1. Arah kebijakan Pemerintah dalam RKP Tahun 2023.
2. Prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Banten dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2023.
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2023.
4. Arah kebijakan pembangunan kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;
5. Hasil evaluasi RKPD tahun 2021 dan. Pelaksanaan RKPD tahun berjalan;
6. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten Tangerang sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten.
7. Identifikasi isu strategis serta penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2023.
8. Kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Guna mewujudkan pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2023, maka RKPD Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dengan mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan terkini dan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024 serta visi dan misi pembangunan Provinsi Banten Tahun 2018- 2023.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas

pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: "*Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan*", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
 - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.
 - d. Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP reformasi sistem perlindungan sosial;
 - MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
 - MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 1. Prevalensi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
 2. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
 3. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
 4. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 5. Persentase Sumber Daya Manusia IPTEK (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
 6. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
 7. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

8. MP reformasi kesehatan nasional; dan
 9. MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
1. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
 2. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
 3. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
 4. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
 5. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
6. MP destinasi pariwisata prioritas; dan
 7. MP pengelolaan terpadu UMKM.
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
 - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP kawasan industri prioritas dan smelter.
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
1. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
 2. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
 3. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
 4. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%. Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
 - MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
 - MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik;
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
 - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
 - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optic kumulatif sebesar 50%.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
1. MP reformasi sistem kesehatan nasional;
 2. MP transformasi digital;
 3. MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
 4. MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.
8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

4.1.2. Telahaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 bukan merupakan pelaksanaan RPJMD. Hal ini disebabkan oleh telah berakhirnya RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, karena Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, sesuai amanat Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemerintah Provinsi Banten belum mempunyai dokumen RPJMD yang baru.

Bagi daerah yang belum mempunyai RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah memberikan panduan. Penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan, serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, dengan mengacu pada RPJMN. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional. Untuk memperjelas Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Dalam periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, tahun 2023 merupakan tahun pertama dari RPJMD ke-5, Tahun 2023-2025, yang merupakan tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai Visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, adalah “*Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa*”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD periode tahun 2017-2022 serta memperhatikan RPJMN tahun 2020-2024, Pemerintah Provinsi Banten dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan menjadi 6,50% (2021) menjadi 5,37% (2026)	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan nilai)	52,83	58,13	71,06



No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa dan daerah perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,644	0,665	0,695
				Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan persen)	7,71	7,74	7,79
			Tingkat Pengangguran Terbuka 8,98% (2021) menjadi 8,20% (2026)	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	64,48	65,19	66,24
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Pemerataan Akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (satuan : tahun)	8,93	9,11	9,4
					Harapan Lama Sekolah (satuan : tahun)	13,02	13,75	14,3
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan:tahun)	70,02	70,4	70,83
					Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	24,5	23,5	22
				Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	91,67	93,07	93,91
				Terbentuknya Karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	Indeks pembangunan kebudayaan (satuan : nilai)	52,63	55,03	58,63
					Indeks Pembangunan	48,67	49,42	51,67

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
					Pemuda dan Olah Raga (satuan : nilai)			
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,44% (2021) menjadi 5,27 - 5,41 (2026)	Meningkatnya Iklim Investasi Modal Tetap dan Usaha Bruto (PMTB) ADHB (satuan	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan ; persen)	3,87	12.168	6,82
				Meningkatnya Kontribusi industri Sektor Industri dan perdagangan	LPE sektor industri (satuan : persen)	4,93	3,97	5,69
					LPE sektor perdagangan (satuan : persen)	1,84	4,99	4,24
				Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan : persen)	4,3	2,44	4,66
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,56	4,39	1,04
			Indeks Williamson 0,625 (2021) menjadi 0,618 (2026)	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi
			Indeks Gini 0,363 (2021) menjadi 0,336 (2026)	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahun yang Disesuaikan (Satuan : Ribu Rupiah)	12.033	12.033	12.573
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 14,48% (2021) menjadi 20% (2026)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan : nilai)	62,94	62,99	63,14

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
				Meningkatnya Mitigasi, Bencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Resiko Bencana (satuan : nilai)	149,08	147,37	140,02
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi 61 (2021) menjadi 81 (2026)	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan : nilai)	65,88	69,77	80
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan : nilai)	55,89	82,2	87,6
					Indeks Persepsi Anti Korupsi (satuan : nilai)	2	2 - 3	2 - 3
					Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan : nilai)	3,45	3,47	3,53
				Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Tangguh

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mempedomani RKP, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah. Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Tahun 2023 dan tema RKP Tahun 2023, adalah “Memperkuat Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Fondasi Tahap Modernisasi”.

Permasalahan-permasalahan pembangunan merupakan analisis

kesenjangan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil evaluasi RKPD, analisis arah kebijakan RPJPD, serta analisis arah kebijakan RPJMN. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut adalah:

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan berkeadilan
3. Terbatasnya daya dukung lingkungan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
4. Implementasi reformasi birokrasi yang belum optimal

Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. Isu-isu strategis daerah Tahun 2023 adalah:

1. Daya saing Sumber Daya Manusia
2. Daya saing perekonomian
3. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Hierarki prioritas pembangunan daerah tahun 2023 berdasarkan hasil analisis adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
4. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,02%-5,15%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,67%
3. Tingkat kemiskinan sebesar 5,58%
4. Rasio Gini sebesar 0,354
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,27

4.1.3. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2023.

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2023, merupakan rumusan kondisi yang akan dicapai atas capaian kinerja pembangunan pada pelaksanaan tahun Keempat dari RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah

Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023, yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, yaitu :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang yang hendak dicapai pada tahun 2023 berdasarkan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Satuan	Target Tahun 2023
	Misi 1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.			
1	Tujuan 1.1. Meningkatkan perilaku spritualitas masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	1,08
	Sasaran 1.1. 1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	Persen	100%
	Misi 2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.			

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Satuan	Target Tahun 2023
1		Tujuan 2.1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Angka IPM	Angka	73,26
	1.1	Sasaran 2.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	70,21
			Prevalensi stunting	Persen	14%
			Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC)	Persen	88%
	1.2	Sasaran 2.1.2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,11
	1.3	Sasaran 2.1.3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun)	Angka	8,49
		Misi 3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan			
1		Tujuan 3.1. Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat kemiskinan	Persen	4,78%
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,47%
			Tingkat Pengangguran (TPT)	Persen	9,98%
	1.1	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan sektor pariwisata	Laju Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	Persen	5,56%
			Penambahan Kunjungan wisatawan	Persen	6,00%
	1.2	Sasaran 3.1.2. Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	5,12
	1.3	Sasaran 3.1.3. Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi/skill	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja	Persen	70%
	1.4	Sasaran 3.1.4. Meningkatnya produk hasil UMKM dan IKM	Persentase koperasi aktif	Persen	60,00
			Jumlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang	Jumlah	20.000
		Misi 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel			

Kode		Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Satuan	Target Tahun 2023
1		Tujuan 4.1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82,45
	1.1	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	Nilai	72,61
	1.2	Sasaran 4.1.2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89
	1.3	Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Integritas Aparatur	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Skala	4,19
	1.4	Sasaran 4.1.4. Meningkatnya cakupan dan pelaksanaan e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,25
		Misi 5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah			
1		Tujuan 5.1. Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	99,11
	1.1	Sasaran 5.1.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Presentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	Persen	95
			Presentase Sumber Air Minum Rumah Tangga	Persen	60
			Indeks Sanitasi	Indeks	82,5
2		Tujuan 5.2. Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55,7
	2.1	Sasaran 5.2.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKA (Indeks Kualitas Air)	Indeks	57,5
	2.2	Sasaran 5.2.2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang ditangani	Persen	26,13
	2.3	Sasaran 5.2.3. Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang	Indeks Risiko Bencana	Indeks	125
		Misi 6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.			
1		Tujuan 6.1. Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Terinovatif

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/outcome)	Satuan	Target Tahun 2023
11	Sasaran 6.1.1. Meningkatnya Kinerja Inovasi Daerah	Persentase inovasi yang diimplementasikan	Persentase	81

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: *“PEMANTAPAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI YANG BERBASIS PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”*, maka focus pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, serta penguatan usaha mikro, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi Daerah sebesar 5,47%
2. Inflasi sebesar 3,20%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,3%
4. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5%
5. IPM sebesar 73,26

Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah maka dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang turut mengacu arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011- 2031 yang untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan Industri, permukiman, dan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- 1) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah dengan skala pelayanan nasional;
- 2) Pengembangan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di wilayah Kabupaten;
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan;
- 4) Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara; dan
- 5) Rencana pengembangan RTH.

Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah meliputi:

- a. mempersiapkan Ruang Kawasan Peruntukan Industri Daerah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan dan membangun infrastruktur pendukung Kawasan Industri; dan
- c. meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran.

Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura :

- a. melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan di atas lahan hasil reklamasi sepanjang pantai utara Daerah dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan Daerah sekitarnya; dan
- b. membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi pantai utara dengan Wilayah daratan Daerah.

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara meliputi:

- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan nasional dengan fungsi khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- c. mengembangkan Kawasan Peruntukan Lindung dan/atau Kawasan Peruntukan Budi Daya tidak terbangun disekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara dengan Kawasan Peruntukan Budi Daya terbangun; dan

- d. membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Rencana pengembangan RTH pada kawasan perkotaan ditetapkan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) dari Kawasan Perkotaan yang direncanakan terdiri atas:

- a. RTH publik 20% (dua puluh perseratus); dan
- b. RTH privat 10% (sepuluh perseratus).

Strategi pengembangan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di seluruh Daerah:

- a. mengintegrasikan pembangunan infrastruktur permukiman dengan kegiatan Industri dan pertanian;
- b. mewujudkan pusat-pusat kegiatan Wilayah baru sesuai dengan kewenangan Daerah;
- c. mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang ada di Daerah sesuai dengan hierarkinya
- d. meningkatkan intensitas pembangunan permukiman di tiap Kecamatan melalui pola pembangunan vertikal, pola perluasan dan/atau pengembangan Kawasan Permukiman dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
- e. menata Kawasan Permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Daerah; dan
- f. meningkatkan aksesibilitas antarpusat perkotaan, antarpusat desa, antarpusat perkotaan dan pusat desa.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Tangerang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Banten dan Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 maupun RKPD Provinsi Banten Tahun 2023.

4.2.1. Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan

perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 4. Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 5. Pengembangan industri pendukung EBT.
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1. Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 2. Pengelolaan hutan berkelanjutan;
 3. Penyediaan air untuk pertanian;
 4. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 5. Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 6. Pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1. Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 2. Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 3. Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 4. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 5. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 4. Peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 2. Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 3. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 5. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 6. Pengembangan industri halal.

- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1. Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
 - 2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3. Pengelolaan Impor;
 - 4. Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
 - 5. Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
 - 6. Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi *Branding*, dan Produk Kreatif; dan
 - 7. Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1. Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
 - 2. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan *Industry 4.0*;
 - 3. Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
 - 4. Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan
 - 5. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
- b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,

- d) Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) Pengentasan kemiskinan; dan
- g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
 - 2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
 - 3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
 - 4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) Kesejahteraan Sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;

- b) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - c) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
 - d) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
 - e) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
 - 2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
 - 3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
 - 5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
 - 2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
 - 3) Kualitas Pemuda.
- f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
 - 3) Reforma Agraria; dan
 - 4) Perhutanan Sosial.
- g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
 - 2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
 - 3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
 - 4) Prestasi Olahraga.
- 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
- a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;

- b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan

- 5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
 - c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
 - 3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
 - 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
 - 5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.
 - d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan Budaya Literasi;
 - 2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
- Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
 - 2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
 - 3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
 - 4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - 5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
 - 6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Konektivitas Jalan;
 - 2) Konektivitas Kereta Api;
 - 3) Konektivitas Laut;
 - 4) Konektivitas Udara; dan
 - 5) Konektivitas Darat.
- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Transportasi Perkotaan; dan
 - 2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.
- d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - 2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - 3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
- e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Penuntasan Infrastruktur TIK;
 - 2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
 - 3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penanggulangan Bencana; dan
 - 2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
 - c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
 - 2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
 - 3) Pengembangan Industri Hijau.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
 - c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
 - e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
 - 2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
 - 3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
 - 2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
 - 2) Transformasi pelayanan publik;
 - 3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
 - 2) Penguatan Keamanan Laut; dan
 - 3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Gambar 4.1

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional RKP Tahun 2023



Kebijakan strategis dan sasaran yang akan diwujudkan dari ketujuh Prioritas Nasional (PN) tahun 2023 sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Pembangunan SDM pada tahun 2023 akan ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, pembangunan Science-Techno Park, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, serta transformasi digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP tahun 2023 difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak Covid-19 menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pascapandemi Covid-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah B3 dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (sudden onset) maupun perlahan (slow onset); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standardisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.

4.2.2. Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023

Permasalahan-permasalahan pembangunan merupakan analisis kesenjangan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil evaluasi RKPD, analisis arah kebijakan RPJPD, serta analisis arah kebijakan RPJMN. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut adalah:

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan berkeadilan
3. Terbatasnya daya dukung lingkungan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
4. Implementasi reformasi birokrasi yang belum optimal

Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu- isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. Isu-isu strategis daerah Tahun 2023 adalah:

1. Daya saing Sumber Daya Manusia
2. Daya saing perekonomian
3. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Berdasarkan isu-isu strategis daerah tersebut, dirumuskan fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023. Hierarki prioritas pembangunan daerah tahun 2023 berdasarkan hasil analisis adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
4. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kabupaten Tangerang adalah :

1. Pengembangan Kawasan Strategis
 - Pengembangan SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan;
 - Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan

tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan manajer perusahaan (gedung)

2. Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

- Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
- Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi.
- Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas Kabupaten Tangerang

Berdasarkan prioritas pembangunan dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023, lokus pada Kabupaten Tangerang adalah :

- 1) Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Baku Regional : Pengadaan Lahan WTP - Offtake SPAM Regional Karian Timur (Solear, Maja dan Rangkasbitung);
- 2) Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA, SMK dan SKh;
- 3) Pengembangan Destinasi Pariwisata Situ Gede;
- 4) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Tangerang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :

Tabel 4.3
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
Misi I	<i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i>	Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
	- Pelestarian dan aktualisasi norma agama	
	- Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya	
	- Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i>	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
	- Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	
	- Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan	
	- Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan	
	- Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta	
	- Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat	
	- Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	
	<i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i>	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
	- Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan	
	- Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha	
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i>	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
	- Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan	
	- Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan	
	- Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan	
	- Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat	
	- Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin	
	<i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i>	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
	- Pembinaan kesehatan lingkungan	
	- Pencegahan dan penanggulangan penyakit	
	- Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat	
	<i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i>	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan	
	- Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial	
	- Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial	
	- Pelayanan dan rehabilitasi sosial	
	- Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	<i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i>	Pemantapan Kualitas produktivitas tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing
	- Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan	
	- Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan	
	- Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha	
	- Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	
	- Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan	
	<i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i>	Pemantapan Kualitas produktivitas tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing
	- Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha	
	- Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya	
	- Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain	
	<i>Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa</i>	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
	- Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak	
	- Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan	
	- Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa	
	- Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa	
	- Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan	
	- Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif	
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan pengendalian kependudukan</i>	Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
	- Peningkatan fasilitasi kapasitas	
	- Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana	
	- Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi	
	<i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i>	Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
	- Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan	
	<i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i>	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	- Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda	
	<i>Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah raga</i>	Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
	- Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	
	- Peningkatan prasarana dan sarana olah raga	
	- Pembinaan manajemen keolahragaan	
Misi 2	Peningkatan Iklim Investasi yang kondusif	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	- Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi	
	- Pemberian insentif pajak bagi investor	
	- Jaminan kepastian hukum berusaha	
	- Promosi investasi	
	<i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i>	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	- Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM	
	- Pembinaan manajemen usaha	
	- Fasilitasi modal usaha	
	- Fasilitasi aksesibilitas pasar	
	- Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi	
	- Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	
	<i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i>	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	- Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	
	<i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan</i>	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	- Pembinaan manajemen usaha	
	- Fasilitasi modal usaha	
	- Fasilitasi aksesibilitas pasar	
	- Fasilitasi kerjasama perdagangan	
	- Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan	
	<i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i>	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	- Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	<i>Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor</i>	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	- Fasilitasi aksesibilitas pasar	
	- Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah	
	- Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar	
	- <i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i>	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	- Fasilitasi kerjasama perdagangan	
	- Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional)	
	- Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar	
	<i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i>	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	- Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM Pariwisata	
	- Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata	
	- Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata	
	- Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata	
	- Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata	
	<i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i>	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	- Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan	
	- Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan	
	<i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i>	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	- Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan	
	- Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan	
	- Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan	
	- Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan	
	- Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan	
	- Perumusan kebijakan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	
	- Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan	
	<i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i>	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	- Pembangunan dan peningkatan pelabuhan	
	- Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang pelabuhan	
	- Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan	
	Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	- Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas	
	- Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera	
	<i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i>	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	- Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP	
	- Revitalisasi jaringan kereta api	
	- Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan	
	- <i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i>	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	- Pengelolaan bandar udara yang ada	
	- Pengembangan bandar udara perintis di wilayah selatan	
	Peningkatan pengelolaan sumberdaya air	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	- Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ)	
	- Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi	
	Pengelolaan pengendalian banjir	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	- Pengelolaan prasarana pengendalian banjir	
	- Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase	
	Peningkatan pelayanan air bersih	
	- Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih	
	<i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i>	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	- Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal)	
	- Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional	
	Peningkatan pelayanan energi dan listrik	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	- Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik	
	- Peningkatan pemanfaatan energi alternatif	
	Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan	
	<i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan dan informatika</i>	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	- Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	- Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan	
	<i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i>	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	- Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu	
	- Fasilitasi usaha pengembangan perumahan	
	<i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i>	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	- Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman	
	- Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh	
Misi 3	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	- Sinkronisasi, harmonisasi dan pepadu serasian rencana tata ruang wilayah	
	- Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang	
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang	
	- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang	
	<i>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i>	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	- Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I	
	- Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II	
	- Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III	
	<i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i>	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	- Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya	
	- Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup	
	- Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	
	<i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i>	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	Penataan kawasankawasan rawan bencana alam	
	Fasilitasi penanggulangan bencana alam	
Misi 4	Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	- Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan	
	- Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur	
	- Kompetensi sesuai bidang keahlian	
	- Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur	
	- Peningkatan kualitas kearsipan daerah	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	- <i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan</i>	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	- Pemutakhiran data dan informasi	
	- Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah	
	- Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	
	- <i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i>	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	- Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain	
	- Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan tinggi	
	- <i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i>	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	- Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik	
	- Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik	
	- Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah	
	- Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab./kota dan instansi vertikal	
	<i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan asset daerah</i>	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	- Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas	
	- Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik	
	- Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah	
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i>	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	- Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat	
	- Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	
	- <i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i>	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	- Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan	
	- Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	<i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i>	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	- Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum	
	- Penegakan dan penataan produk hukum daerah	
	- Penegakan supremasi hukum	
	<i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i>	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	- Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokras	
	- Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik	
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i>	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	- Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib	
	- Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	

Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Rancangan RKPD Kabupaten disusun untuk menyepakati permasalahan-permasalahan pembangunan Daerah dan prioritas pembangunan daerah sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 dapat mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tangerang serta 15 Program unggulan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Isu Strategis Kabupaten Tangerang Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Pasca Pandemi;
2. Perekonomian Masyarakat
3. Insfrastruktur Wilayah dan Lingkungan;
4. Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2023, terdiri dari:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Pasca Pandemi, fokus pada:
 - a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
 - Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan,

- ibu dan anak.
 - Penanganan Kesehatan Pasca Pandemi Covid-19.
 - Penanganan dan penurunan *stunting*.
 - Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tigaraksa
 - Percepatan eliminasi TB dan HIV
 - Pemenuhan Jaminan Kesehatan MBR dengan data terintegrasi.
- b. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
 - Penyediaan beasiswa bagi siswa MBR berprestasi
 - Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik
 - Peningkatan budaya membaca dan literasi terpadu.
- c. Peningkatan perlindungan sosial, perempuan dan anak serta kepemudaan
- Peningkatan perlindungan perempuan, anak, difable, dan kaum marginal.
 - Peningkatan pengarusutamaan gender
 - Pemberdayaan pemuda
 - Peningkatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- d. Peningkatan Nilai-nilai Religius
- Pemberian insentif guru ngaji
 - Pengembangan diri siswa Baca Tulis Quran
 - Pembangunan sarana sanitasi pada Pondok Pesantren
 - Peningkatan pembangunan sector ekonomi di Pondok Pesantren
 - Peningkatan ketentraman dan ketertiban
2. Peningkatan Poduktivitas Ekonomi Masyarakat
- a. Pemberdayaan Ekonomi
- Peningkatan digitalisasi (e-commerce)
 - Pengembangan lembaga keuangan mikro (Koperasi, Bumdes, BUMD)
 - Penguatan akses permodalan dan pemasaran sektor Usaha Mikro dan industri kecil menengah (IKM)
 - Penguatan akses permodalan dan pemasaran sektor Ekonomi

Kreatif

- Peningkatan jumlah wirausaha baru (WUB)
- Peningkatan dan penumbuhkembangan koperasi
- Peningkatan kapasitas BLK
- Peningkatan kemudahan pelayanan perijinan usaha bagi sektor UMKM/IKM, dan Wira Usaha Baru
- Peningkatan omset IKM/Usaha Mikro
- Peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)
- Optimalisasi Gerai Tangerang Gemilang (GTG)
- Pengembangan obyek destinasi wisata Kabupaten Tangerang
- Optimalisasi Kampung Tematik

b. Penguatan Ketahanan Pangan

- Peningkatan akses distribusi dan produksi di sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan
- Operasionalisasi Pusat Kawasan Agropolitan
- Peningkatan kapasitas Balai Benih (Perikanan, Pertanian, Peternakan)
- Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam program ketahanan pangan
- Inovasi dan rekayasa teknologi pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan
- Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari
- Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- Optimalisasi Komisi Irigasi
- Optimalisasi Aksi Pangan dan Gizi

3. Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, focus pada :

a. Infrastruktur

- Peningkatan infrastruktur Wisata Bahari
- Pemeliharaan dan pembangunan jalan
- Pengendalian kemacetan
- Penuntasan Jembatan Fly Over Cisauk

b. Pengendalian Sumber Daya Air

- Penanggulangan banjir
- Peningkatan kapasitas air baku dan sumber daya air yang menunjang sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan
- c. Penanganan Kawasan Kumuh
 - Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
 - Peningkatan kualitas lingkungan Kawasan kumuh
- d. Peningkatan sanitasi
 - Percepatan Desa/Kelurahan Bebas ODF
 - Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) wilayah barat
- e. Pengelolaan Persampahan
 - Revitalisasi TPA Jatiwaringi
 - Optimalisasi TPS3R dan Bank Sampah
 - Biokonversi Maggot
- f. Konservasi Lingkungan Hidup
 - Konservasi Keanekaragaman Hayati
- 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, focus pada :
 - a. Peningkatan SDM Aparatur
 - Peningkatan Manajemen ASN
 - Penataan Kelembagaan Organisasi dan *Merit System*
 - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan
 - b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Operasionalisasi elektronifikasi transaksi Pemerintahan Daerah
 - Peningkatan pelayanan kependudukan dengan SIAK terintegrasi
 - Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - Implementasi Roadmap *Smart City* dan Tangerang Satu Data
 - Implementasi Design Smart City
 - Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Dalam mendukung arah kebijakan daerah maka perencanaan perwilayahan agar dapat mengakomodir hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Perencanaan Kelurahan :
 - a. Sarana dan prasarana Posyandu di Kelurahan berupa honor kader, gedung, sarana dan prasarana posyandu;
 - b. Operasional Pokja FKTS berupa perlengkapan administrasi, koordinasi dan pembinaan lapangan;
 - c. Kelurahan Bebas ODF dengan penyediaan sarana prasarana sanitasi, penyediaan jamban berseptik tank;
 - d. Validasi data sanitasi;
 - e. Penataan Ruang Bermain Ramah Anak dan Pojok Baca;
 - f. Pencegahan dan penurunan Stunting berupa Honor kader Pembangunan Manusia (KPM) Stunting, PMT balita Stunting, rembuk stunting;
 - g. Verifikasi dan Validasi DTKS berupa Honor petugas pendataan dan operator, penggandaan format pendataan, FKP/ Muskel Penetapan Usulan Perbaikan DTKS;
 - h. Kelurahan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana
 - i. Pengembangan Produk Unggulan Kelurahan, pojok UM di Kelurahan dan Pembinaan UM
 - j. Pengembangan Kampung Tematik
 - k. Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau)
 - l. Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

2. Kebijakan Perencanaan Kecamatan
 - a. Operasional Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) berupa perlengkapan administrasi, rapat-rapat dan pembinaan lapangan
 - b. Penataan Ruang Bermain Ramah Anak dan Pojok Baca
 - c. Pencegahan dan penurunan Stunting: PMT balita Stunting, rembuk stunting,
 - d. Verifikasi dan Validasi DTKS berupa Pelatihan petugas pendataan, Rapat Penyepakatan DTKS
 - e. Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana
 - f. Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, pojok UM di Kecamatan dan Pembinaan UM
 - g. Pengembangan Inovasi Kecamatan
 - h. Pengembangan Kampung Tematik

- i. Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah dan Bio Konversi.
- j. Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau)
- k. Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
- l. Pemeliharaan Stadion mini dan Gedung Bersama Keagamaan

4.2.4 Arah Kebijakan Pemulihan Dampak Ekonomi

Arah kebijakan pemulihan perekonomian dititikberatkan kepada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia kepada sektor wirausaha baru dan usaha mikro kecil hal ini berkenaan tema yang diusung pada RKPD tahun 2023. Adapun peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan dengan memberdayakan usaha mikro karena usaha mikro merupakan sektor ekonomi yang dapat bertahan ditengah pandemi covid19 dengan berupaya memasarkan produk lokal yang dapat berdaya saing.

Salah satu Program Unggulan Bupati Tangerang yaitu Proaktif (Produk Kreatif dan Inovatif) diimplementasikan dengan cara optimalisasi pemasaran produk tersebut kepada suatu tempat Gerai Tangerang Gemilang (GTG) di Desa Bojong Kecamatan Cikupa, salah satu kegiatan di Gerai Tangerang Gemilang yang difokuskan antara lain pada peningkatan digitalisasi pemasaran (*e-commerce*) baik Usaha Mikro dan juga Industri Kecil dengan pembuatan QLang (Kios Gemilang) yang terintegrasi dengan aplikasi terpadu Kabupaten Tangerang, selain itu aplikasi Bintang Gemilang yang dikembangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan bekerjasama dengan akademisi diharapkan dapat menyerap produk lokal dan dapat berdaya saing di pemasaran *online*. Dari beberapa kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah gemilang dari program unggulan Bupati Tangerang Proaktif tersebut dalam pemasaran Usaha Mikro dan Industri Kecil ke berbagai segmen masyarakat terlebih *e-Commerce*.

Prioritas selanjutnya adalah pengembangan lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Lembaga Keuangan Mikro Artha Kerta Raharja (LKM AKR) dan pengembangan Koperasi yang berafiliasi di Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB), Lembaga ini merupakan contoh dalam hal penguatan akses permodalan dan pemasaran sektor usaha mikro dan industri kecil menengah di Kabupaten Tangerang, tujuan dari penguatan ini adalah membantu lembaga Usaha Mikro dan Industri Kecil untuk dapat *Move On* sehabis diterpa kerugian Pandemi

Covid19. Secara output Sektor lembaga permodalan tersebut dikhususkan untuk pengembangan usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tangerang, adapun secara outcome (dampak) diharapkan dapat meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang dan secara teknis dalam kegiatan prioritas ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Kabupaten Tangerang.

Prioritas Pemulihan Dampak Ekonomi (PDE) lainnya adalah dengan meningkatkan pelayanan dan kapasitas pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) di Jayanti oleh Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) dalam menangani permasalahan pengangguran, sebagai informasi data pada tahun 2021 (Agustus) bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang sebesar 9,06 persen diatas dari Propinsi Banten sebesar 8,98 persen yang berarti bahwa peningkatan peluang pekerjaan di Kabupaten Tangerang harus segera diupayakan. Langkah-langkah yang dilaksanakan antara lain dengan memperbanyak pengembangan kelas pemberdayaan masyarakat, kelas pelatihan serta penambahan kelas baru sesuai dengan pemenuhan permintaan perusahaan di Kabupaten Tangerang, sebagai gambaran informasi bahwa pada tahun 2022 ini Disnaker membuka kelas keterampilan operator *forklift* sebagai bentuk penambahan kapasitas keterampilan di Dinas Tenaga Kerja, kedepannya Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menambah kembali BLK-BLK lain dengan berbagai jurusan tambahan antara lain perhotelan, Keterampilan Air Conditioner (AC) dan sebagainya. Upaya ini diperuntukan sebagai komitmen dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam program prioritas pemenuhan peluang pekerjaan di Daerah Urbanisasi seperti Kabupaten Tangerang ini. Upaya program prioritas lainnya dari perekonomian adalah kemudahan pelayanan perizinan usaha bagi sektor UMKM dan wirausaha baru oleh DPMPPTSP. Sebagaimana Permendagri nomor 59 tahun 2021 bahwa kemudahan dalam pelayanan/ standar pelayanan minimal (SPM) menitik beratkan kepada pelayanan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan, dalam hal iklim investasi pun pelayanan dasar perizinan mesti diwujudkan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mesti didapatkan oleh masyarakat Kabupaten dari sisi kemudahan perizinan dan penanaman Modal. Dalam hal ini prioritas utama dalam peningkatan perekonomian pasca pandemic Covid19 antara lain dengan memudahkan perizinan.

Prioritas pembangunan sektor ekonomi perlu diwujudkan melalui

pengembangan pendekatan ekonomi kawasan seperti pengembangan Objek Destinasi Tujuan Wisata (ODTW) Kabupaten Tangerang salah satunya Ketapang Urban Aquaculture (KUA) di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk. KUA merupakan contoh *role model* penataan kawasan ekonomi yang berintegrasi dengan penataan lingkungan, konsep *Resirculating Aquaculture System* (RAS) sebagai teknik budidaya ikan secara pemanfaatan air agar tidak boros, RAS ini selanjutnya diintegrasikan dengan penataan lingkungan konservasi Mangrove dengan konsep WanaMina (Wana;Hutan dan Mina;Ikan) sehingga diharapkan pada jangka panjang Masyarakat Kab Tangerang dapat membudidayakan ikan secara ramah lingkungan dengan mendapatkan sarana wisata dengan memanfaatkan hutan mangrove yang rimbun. Diharapkan dari suatu kawasan yang terintegrasi tersebut didapatkan peningkatan perekonomian, pariwisata serta edukasi masyarakat dapat terwujud. Kawasan KUA tersebut dibangun dengan upaya kolaborasi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan beberapa stakeholders yang sama-sama ingin mewujudkan penanganan dan pengelolaan kawasan pesisir secara terintegrasi, hal ini terwujud dalam program unggulan Bupati Tangerang yaitu GERBANG MAPAN (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai), Tujuan dari Gerbang Mapan yaitu mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat dengan pendekatan ekonomi kawasan. Selain KUA (Ketapang Urban Aquaculture) Kabupaten Tangerang memiliki Kampung Tematik, Kampung tematik yaitu *suatu kampung layak huni yang memiliki potensi berdasarkan inovasi dan kreasi dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan dalam peningkatan perekonomian masyarakat*. Kampung Tematik di Kabupaten Tangerang sangat bervariasi tema dan ciri khasnya, ada yang memiliki tema lingkungan, pendidikan, kesehatan bahkan bertemanan Wisata. Diharapkan dari sektor kawasan kampung tematik tersebut dapat memberikan dampak ekonomi kepada kawasan-kawasan kampung yang memiliki potensi di daerahnya sehingga pemulihan dampak ekonomi (PDE) pasca Covid19 di Kabupaten Tangerang dapat pulih dan meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Tangerang.

Prioritas peningkatan ekonomi lainnya adalah yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang. Program TANGERANG MANTAP (Tangerang Mandiri Tahan Pangan) merupakan program unggulan Bupati Tangerang dan Wakil Bupati Tangerang tahun 2019-2023 yang dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) diharapkan dapat diperkuat dengan peningkatan akses distribusi jalan produksi di sektor

pertanian, perkebunan, peternakan bahkan perikanan, dan terutama adalah operasionalisasi Pusat Kawasan Agropolitan (PKA)/ PUSAGRO di desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kawasan ini diharapkan dapat membuka peluang pasar baru di Kabupaten Tangerang dengan peningkatan nilai (Value added) dari produksi hasil pertanian berupa hortikultura dan buah-buahan, PUSAGRO ini juga diharapkan dapat menjadi sentra pelatihan bagi masyarakat sebagai sentra edukasi sektor pertanian dengan menumbuhkembangkan edukasi penanaman dan pelatihan bagi masyarakat secara inklusif. Program Unggulan Bupati Tangerang Tangerang MANTAP pada PUSAGRO diupayakan bukan hanya pelayanan edukasi/ pelatihan bagi masyarakat saja akan tetapi juga meningkatkan produksi pertanian sebagai upaya dalam ketahanan pangan Kabupaten Tangerang. Komitmen lain dari pelaksana Tangerang Mantap (DPKP) dalam upayanya pada kegiatan antara lain peningkatan ketahanan pangan dengan meningkatkan kapasitas balai benih (pertanian, peternakan dan perkebunan) yang selanjutnya diharapkan dapat lebih memberdayakan masyarakat. Tangerang Mantap juga meliputi pengembangan inovasi dan rekayasa teknologi (pertanian, , peternakan, perkebunan dan perikanan) serta pengembangan plasma nutfah dan pelayanan dasar bagi pemenuhan kebutuhan tanaman-tanaman buah dan pelindung bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang membutuhkan. Diharapkan dengan Sinergi dan kolaborasi dari akademisi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui teknologi tepat guna dapat meningkatkan ketahanan Pangan Daerah. Selain itu pada Tangerang Mantap juga dikembangkan Pekarangan Pangan Lestari (PPL) dengan menitikberatkan kepada produksi sektor pertanian dengan kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan memanfaatkan lahan tidak produktif di Kabupaten Tangerang, hal ini diwujudkan dalam dokumen rencana aksi pangan dan gizi yang berguna dalam mendukung penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Tangerang.

Gambaran perekonomian Kabupaten Tangerang dalam pemulihan dampak ekonomi (PDE) tersebut diharapkan dapat meningkatkan Laju Perekonomian pelaku usaha mikro serta industri kecil di Kabupaten Tangerang Pasca pandemi covid19, dan tentunya wirausaha baru (WUB) dapat tumbuh. Tentunya langkah-langkah diatas merupakan respon Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengupayakan bangkitnya keterpurukan perekonomian di Kabupaten Tangerang serta upaya tersebut dimasukan dalam perwujudan program unggulan Bupati Tangerang 2019-2023 yang

tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2022.

4.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD

Selain memuat sasaran pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Tangerang, prioritas pembangunan daerah juga disusun dengan memperhatikan pandangan dan pertimbangan DPRD. Pandangan dan pertimbangan DPRD menggambarkan permasalahan pembangunan daerah untuk diselaraskan dalam dokumen rencana pembangunan daerah sehingga dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah, yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan Nasional. Pandangan dan pertimbangan tersebut berupa saran dan pendapat, yang berisi pokok-pokok pikiran DPRD, berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran tersebut menjadi bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Rekapitulasi Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 yang telah diinput melalui aplikasi SIPD adalah sebagaimana berikut :

Tabel 4.4

Rekapitulasi Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2023

FRAKSI	JUMLAH USULAN	URUSAN	JENIS USULAN
PDIP	413	Kecamatan	Sarana Olah Raga, Pemeliharaan Saluran, pemeliharaan Jalan Lingkungan, Pemeliharaan turap, penataan RTH/Taman Bacaan, sarana prasarana Paten, sarana prasarana persampahan
		Kepemudaan dan Olah Raga	Sarana Prasarana Olah Raga
		Kesehatan	Pengadaan sarana prasarana kesehatan
		PUPR	Pembangunan Jalan, Pembangunan balai/gedung warga, Pembangunan turap, Pembangunan jalan lingkungan, Penataan TPU, Pembangunan Saluran, normalisasi, pembangunan irigasi/drainase
		Perhubungan	Pengadaan PJU

FRAKSI	JUMLAH USULAN	URUSAN	JENIS USULAN
		Pertanian	Pengadaan sarana prasarana pertanian
Demokrat	57	PUPR	Pembangunan jalan lingkungan, pembangunan SAB, Turap, sarana sanitasi, pembangunan turap
		Kecamatan	Pemeliharaan jalan lingkungan, pemeliharaan saluran
Golkar	35	Kecamatan	Pemeliharaan jalan lingkungan, pemeliharaan saluran, pembangunan RTLH
		PUPR	Pembangunan Jalan, Pembangunan balai/gedung warga, Pembangunan turap, Pembangunan jalan lingkungan, Penataan TPU, Pembangunan Saluran, normalisasi, pembangunan irigasi/drainase
		Perhubungan	Pengadaan PJU
PAN	137	Kecamatan	Sarana Olah Raga, Pemeliharaan Saluran, pemeliharaan Jalan Lingkungan, Pemeliharaan turap
		PUPR	Pembangunan Jalan, Pembangunan balai/gedung warga, Pembangunan turap, Pembangunan jalan lingkungan, Penataan TPU, Pembangunan Saluran, normalisasi, pembangunan irigasi/drainase
PKB	50	PUPR	Pembangunan Jalan, Pembangunan balai/gedung warga, Pembangunan turap, Pembangunan jalan lingkungan, Penataan TPU, Pembangunan Saluran, normalisasi, pembangunan irigasi/drainase
PKS	191	PUPR	Pembangunan Jalan, Pembangunan balai/gedung warga, Pembangunan turap, Pembangunan jalan lingkungan, Penataan TPU, Pembangunan Saluran, normalisasi, pembangunan irigasi/drainase, jembatan
		Kecamatan	Pemeliharaan jalan lingkungan, pemeliharaan saluran, pembangunan RTLH

FRAKSI	JUMLAH USULAN	URUSAN	JENIS USULAN
		Kepemudaan dan Olah Raga	Sarana Prasarana Olah Raga
JUMLAH	883		

Sumber : SIPD, 2022

4.4 Keselarasan RKPD Tahun 2023

4.4.1 Keselarasan Tema Pembangunan antara dokumen RKP, RKPD Provinsi Banten dengan RKPD Kabupaten Tangerang

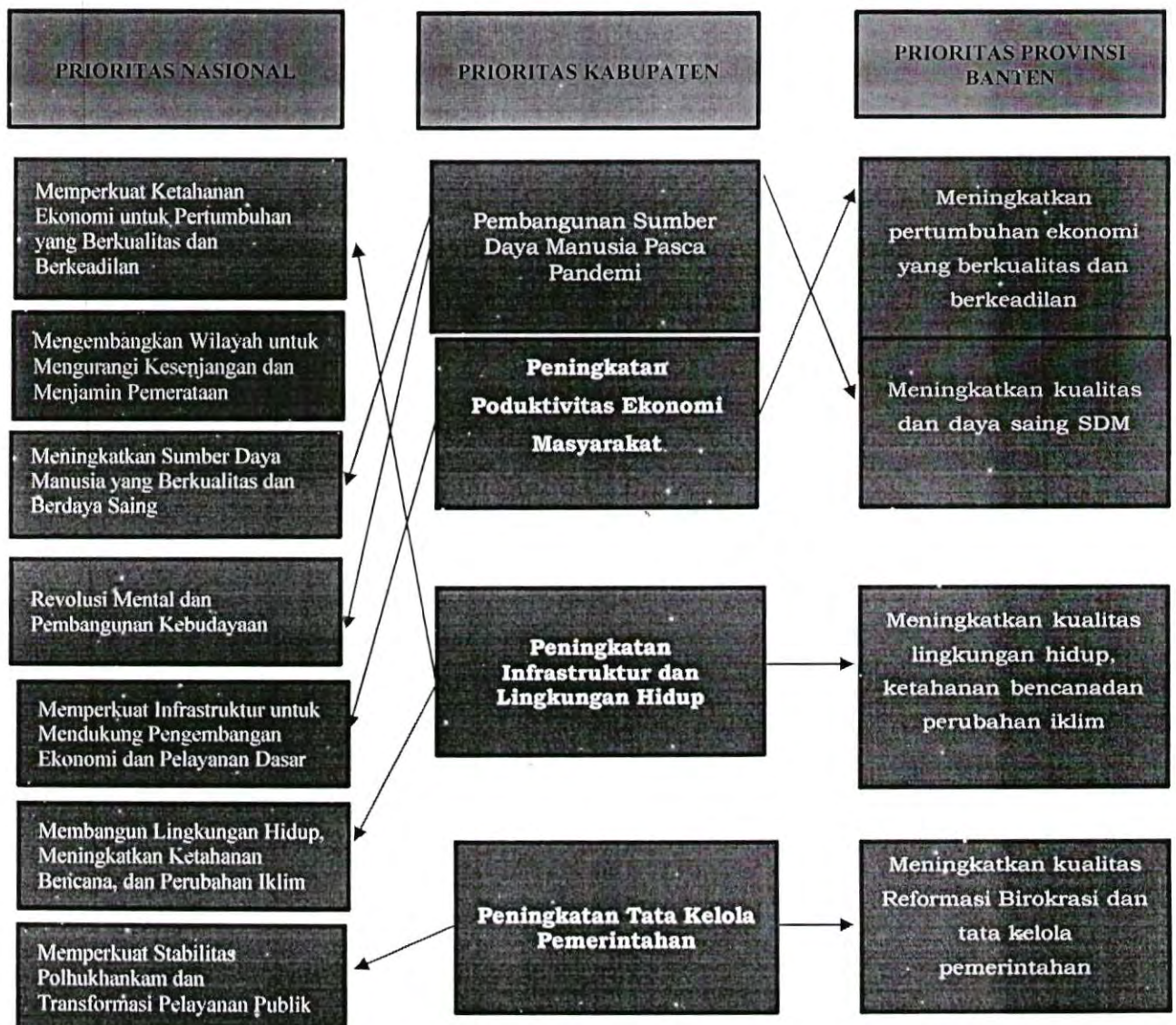
Tema pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, dan tema pembangunan Provinsi Banten adalah “Memperkuat Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Fondasi Tahap Modernisasi” sedangkan tema pembangunan di Kabupaten Tangerang adalah “Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Ekonomi yang Berbasis Pembangunan yang Berkelanjutan” dalam tema pembangunan baik Nasional, Provinsi Banten maupun Kabupaten Tangerang terkandung makna bahwa pembangunan diarahkan untuk percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dengan peningkatan SDM masyarakat, dan SDM aparatur dan semua itu diharapkan dapat memulihkan kondisi kehidupan sosial masyarakat. Adapun gambaran penyelarasan tema pembangunan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.2
Penyelarasan Tema Pembangunan











4.4.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Banten dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang

Gambar 4.3
Keselarasan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Banten



Hasil penyesuaian target pembangunan, antara sasaran Pembangunan RKP Tahun 2023 dengan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD 2023, disajikan dalam diagram berikut:

			
 Pertumbuhan Ekonomi	5,3%-5,9%	5,02%-5,15%	5,47%
 Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3%-6,0%	8,67%	8,3%
 Kemiskinan	7,0%-8,0%;	5,58%	6,5%
 Indeks Pembangunan Manusia	73,29-73,35	73,27	73,26
 Gini Ratio	0,375-0,0378	0,354	0,24

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2023

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2023 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang hingga Tahun 2023 dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Tabel 5.1

Rekapitulasi Program Prioritas Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	86,5	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	67,05	Dinas Pendidikan
	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD	40	Dinas Pendidikan
	ANGKA PARTISIASI MURNI (APM) Kesetaraan	0,11	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah peserta didik yang dapat Baca Tulis Al Quran Jenjang SD DAN SMP	10000	Dinas Pendidikan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
	Prosentase Ibu hamil KEK	< 10%	Dinas Kesehatan
	Persentase Balita dengan status gizi baik berdasarkan BB/TB	90%	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Success rate tuberkulosis	90%	Dinas Kesehatan
	Respon Time Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam	100%	Dinas Kesehatan
	Jumlah Puskesmas yang bersertifikat akreditasi Utama	2 puskesmas	Dinas Kesehatan
	Jumlah RSUD yang bersertifikat akreditasi Paripurna	3 RSUD	Dinas Kesehatan
	Persentase Masyarakat Memiliki Jaminan Kesehatan (JKN)	84%	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Fasilitas Kesehatan dengan SDMK sesuai standar di FKTP	75%	Dinas Kesehatan
	Prosentase Fasilitas Kesehatan dengan SDMK sesuai standar di FKRTL (RS)	85%	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar	84%	Dinas Kesehatan
	Prosentase industri rumah tangga pangan (IRTP) sesuai standar	84%	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	70%	Dinas Kesehatan
	Prosentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan	85%	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	70%	Dinas Kesehatan
	Prosentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan	85%	Dinas Kesehatan
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase infrastruktur Sungai , saluran pembuang dan Daerah Irigasi terbangun	81,46%	DBMSDA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Sarana Air bersih	47%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase Pengelolaan Persampahan di TPA	100	DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase meningkatnya sarana sanitasi bagi masyarakat miskin	81,36	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Prosentase kapasitas lumpur tinja	45,45	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Capaian Program : Cakupan Layanan Kawasan Permukiman	6,16	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Cakupan TPU yang memenuhi Standar	80	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Persentase sarana dan prasarana tpu yang terpelihara	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang dipelihara dan dibangun	100%	DTRB
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang disusun	35%	DTRB
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	92,08%	DBMSDA
	Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan Jalan Jembatan	100%	DBMSDA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemenuhan RDTR	100%	DTRB
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pemenuhan Pembinaan Penyelenggaraan Rumah susun dan Apartemen	29,96%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Pemenuhan Perencanaan pengembangan kawasan Permukiman	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Penanganan Kawasan Kumuh	24,55%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase PSU dalam Asset	29,86%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	Satpol PP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana	125	BPBD
	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	BPBD
	Jumlah desa dan kelurahan yang tanggap bencana	56	BPBD
	Persentase korban bencana yang tertangani	100	BPBD
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan kebakaran dalam kurun waktu <i>respon time</i> 15 menit	100%	BPBD
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang dibina	67,99%	Dinsos
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan	50%	Dinsos
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25,03	Dinsos
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase terpenuhinya pelayanan jaminan sosial bagi PMKS Yang valid	100%	Dinsos
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana daerah /kota	100%	Dinsos
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase pengelolaan TMP Raden Aria Wangsakara	100%	Dinsos
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih	5%	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase Lulusan Pelatihan BLK Yang Di Tempatkan	45%	Dinas Tenaga Kerja

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	15	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	26%	Dinas Tenaga Kerja
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	100%	DPPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan	100%	DPPPA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Kelembagaan PUG yang Aktif	18,48%	DPPPA
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah	100%	DPPPA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah seluruh klaster hak anak	100%	DPPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase Perlindungan Terhadap Anak	100%	DPPPA
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Cadangan Pangan	10%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan Yang Tertangani	12,73	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan	63,25	DLHK
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	0,85	DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	0,3	DLHK

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase tindaklanjut pengaduan pengelolaan LB3	100	DLHK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	350	DLHK
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasinya pembinaan dan pengelolaan lingkungan di Sekolah	45	DLHK
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasinya pembinaan kampung iklim	6	DLHK
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah terkelola	50	DLHK
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Perekaman KTP-el	100%	Disdukcapil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 18 tahun	100%	Disdukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	100%	Disdukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	Disdukcapil
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Tatakelola Pemerintah Desa yang Baik	20,33%	DPMPD
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	25%	DPMPD
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tersedianya model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan	0,04	DPPKB
	Presentase desa/kelurahan yang memiliki data dan infoemasi	0,04	DPPKB

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DPPKB
	Presentase PPKBD mandiri	4%	DPPKB
	Persentase KB Baru	4%	DPPKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Kelompok ketahanan yang aktif	136	DPPKB
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase jaringan trayek dan moda transportasi	96,55	Dinas Perhubungan
	Prosentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	100	Dinas Perhubungan
	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	80	Dinas Perhubungan
	Persentase Perlangkapan Jalan di Jalan Kabupaten	88	Dinas Perhubungan
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase layanan keterbukaan Daftar informasi publik	100%	Diskominfo
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase penyediaan layanan internet	100,00	Diskominfo
	Prosentase penyediaan layanan aplikasi	100,00	Diskominfo
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan.	29,25	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.	13,29	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase usaha yang terfasilitasi legalitas usaha	7,41	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	12,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan berusaha	20	DPMPSTP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investor	20	DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	90	DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Skor kepatuhan investor yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	70	DPMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	70	DPMPTSP
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda binaan	1500	Disporabudpar
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet cabang olahraga binaan	37	Disporabudpar
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah anggota pramuka yang dikembangkan	200	Disporabudpar
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase layanan ketersediaan data statistik sektoral	55%	Diskominfo
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan kemanan informasi	45%	Diskominfo
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Event kebudayaan yang dilaksanakan	10	Disporabudpar
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan	100%	DISPERPUSIP
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku, pemilahan arsip inaktif dan penyerahan arsip dari SKPD/BUMD/Lembaga ke Disperpusip	100%	DISPERPUSIP
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	0,50%	DISKAN
	Produktivitas Perikanan Eudidaya	5,4	DISKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pengetahuan Produksi Budidaya Ikan	80%	DISKAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	40,45	DISKAN
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase peningkatan daya tarik pariwisata	100	Disporabudpar
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	3	Disporabudpar
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Hewan Sakit yang Dapat Disembuhkan	5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Produk Hewan yang Memenuhi SNI	5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1,5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Peningkatan SDM Pertanian	1%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Pelaku Usaha Perdagangan dan IKM yang diawasi dalam memenuhi mekanisme dan prosedur ekspor	42,10%	Disperindag
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan	24	Disperindag
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Bersubsidi yang di Monitor/ di Pantau	35,71	Disperindag
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Pelaku Usaha yang memenuhi mekanisme dan prosedur ekspor	16,97%	Disperindag

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase Pelaku Usaha yang melaksanakan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP	11,68%	Disperindag
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Presentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pendampingan/Pembinaan dan Pelatihan	16,03	Disperindag
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelaku Usaha IKM yang memiliki izin/legalitas yang diawasi	33,59%	Disperindag
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi	19,24	Disperindag
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah calon transmigran yang terseleksi	0	Dinas Tenaga Kerja
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Penyelesaian Permasalahan dibidang Kesra	100%	SEKRETARIAT DAERAH
	Prosentase pemenuhan Administrasi Pemerintahan	100%	SEKRETARIAT DAERAH
	Prosentase Produk Hukum dan Penanganan Kasus/Perkara yang diselesaikan	100%	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Rumusan Kebijakan ekonomi yang di implementasikan	100%	SEKRETARIAT DAERAH
	Prosentase Rumusan Kebijakan Pembangunan yang di implementasikan	100%	SEKRETARIAT DAERAH
	Tercapainya Tingkat Kematangan UKPBJ	4	SEKRETARIAT DAERAH
4.02 SEKRETARIAT DPRD			
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		82,37%	Sekretariat DPRD
	Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu	86,89%	Sekretariat DPRD
	Jumlah produk hukum yang difasilitasi pembahasannya	77,85%	Sekretariat DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
PERENCANAAN			
		100%	Bappeda

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan		
	Presentase Dokumen Pelaporan Tepat Waktu	100%	Bappeda
	Prosentase Ketersediaan Data Pembangunan	80%	Bappeda
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	% hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan	100%	Bappeda
	% hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	100%	Bappeda
	% hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	100%	Bappeda
	% hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan bidang Perencanaan Prasarana Wilayah	100%	Bappeda
KEUANGAN			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tingkat kepatuhan Rasio Penganggaran	100%	BPKAD
	Persentase kinerja penyelenggaraan Akuntansi	96%	BPKAD
	Tingkat Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bcndahara SKPD	95%	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	95%	BPKAD
	Persentase Barang Milik Daerah yang digunauahakan	65%	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	Persentase Kepatuhan wajib pajak	77%	BAPENDA
	Persentase Pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah	100%	BAPENDA
	Persentase Capaian Target Pajak Daerah	100%	BAPENDA
	Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah	100%	BAPENDA
KEPEGAWAIAN			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan pengadaan ASN, Pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100%	BKPSDM
	Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN	100%	BKPSDM
	Prosentase peningkatan disiplin ASN	99,6 %	BKPSDM
	Persentase capaian pengembangan karir sesuai kompetensi ASN	100%	BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis, manajerial, fungsional dan latsar/ prajabatan	100%	BKPSDM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase Implementasi Kebijakan Hasil Litbang	100%	Bappeda
	Jumlah Inovasi Daerah yang diimplementasikan	45	Bappeda
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya Jumlah temuan hasil pemeriksaan	100%	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	31,522	Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01 KECAMATAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa	100	Kec. Tigaraksa
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa	96,2	Kec. Tigaraksa
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa	95,52	Kec. Cikupa
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cikupa	98	Kec. Cikupa
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Panongan	100%	Kec. Panongan
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Panongan	100%	Kec. Panongan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug	100	Kec. CURUG
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug	98,00	Kec. CURUG
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. Legok
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	90%	Kec. Legok
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. Pasar Kemis
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	90%	Kec. Pasar Kemis
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. Balaraja
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	Kec. Balaraja
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100	Kec. Kresek
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100	Kec. Kresek
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	95%	Kec. Kronjo
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	95%	Kec. Kronjo
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. Mauk
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	Kec. Mauk
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. Rajeg
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	Kec. Rajeg
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. SEPATAN
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	90%	Kec. SEPATAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. Teluknaga
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	Kec. Teluknaga
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cisoka	100%	Kec. Cisoka
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cisoka	100%	Kec. Cisoka
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. Pakuhaji
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	Kec. Pakuhaji
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. Kosambi
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	Kec. Kosambi
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	87,50%	Kec. Cisauk
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	85%	Kec. Cisauk
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. Gunung Kaler
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	Kec. Gunung Kaler
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Jambe	100%	Kec. Jambe
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Jambe	100%	Kec. Jambe
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. Jayanti
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	Kec. Jayanti
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. Kemiri
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	Kec. Kemiri

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. Mekar Baru
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	Kec. Mekar Baru
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. PAGEDANGAN
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	90%	Kec. PAGEDANGAN
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. Sepatan Timur
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	Kec. Sepatan Timur
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. Sindang Jaya
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	90%	Kec. Sindang Jaya
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Solear	95%	Kec. Solear
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Solear	95%	Kec. Solear
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	Kec. Sukamulya
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	Kec. Sukamulya
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100,0	Kec. Sukadiri
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100	Kec. Sukadiri
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kelapa Dua	100,00	Kec. Kelapa Dua
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kelapa Dua	100,00	Kec. Kelapa Dua
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	75%	Kec. Tigaraksa
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	75%	Kec. Cikupa

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	30	Kec. Panongan
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88%	Kec. CURUG
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	85%	Kec. Legok
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan	100%	Kec. Pasar Kemis
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88	Kec. Balaraja
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88	Kec. Kresek
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88	Kec. Kronjo
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88	Kec. Mauk
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88	Kec. Rajeg
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	85%	Kec. SEPATAN
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100%	Kec. Teluknaga
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88	Kec. Cisoka
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100%	Kec. Pakuhaji
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88	Kec. Kosambi
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	90%	Kec. Cisauk
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100%	Kec. Gunung Kaler
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88%	Kec. Jambe
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88%	Kec. Jayanti

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88%	Kec. Kemiri
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88%	Kec. Mekar Baru
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	85%	Kec. PAGEDANGAN
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100%	Kec. Sepatan Timur
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	85%	Kec. Sindang Jaya
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88%	Kec. Solear
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88%	Kec. Sukamulya
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88%	Kec. Sukadiri
	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88%	Kec. Kelapa Dua
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,43	Kec. Tigaraksa
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	70	Kec. Cikupa
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,40%	Kec. Panongan
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,43	Kec. CURUG
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	75%	Kec. Legok
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100	Kec. Pasar Kemis
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,40%	Kec. Balaraja
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,40	Kec. Kresek
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,40%	Kec. Kronjo

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,40%	Kec. Mauk
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,40%	Kec. Rajeg
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	75%	Kec. SEPATAN
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	Kec. Teluknaga
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,40%	Kec. Pakuhaji
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,40%	Kec. Kosambi
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	93%	Kec. Cisauk
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	Kec. Gunung Kaler
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71%	Kec. Jambe
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,40%	Kec. Jayanti
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,40%	Kec. Kemiri
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,40%	Kec. Mekar Baru
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	75%	Kec. PAGEDANGAN
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	Kec. Sepatan Timur
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	75%	Kec. Sindang Jaya
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,40%	Kec. Solear
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,40%	Kec. Sukamulya
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	75%	Kec. Sukadiri

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	71,4%	Kec. Kelapa Dua
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	91,67	Kec. Tigaraksa
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	92	Kec. Cikupa
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Panongan
	Prosentase peningkatan tata pemerintahan desa	88,88	Kec. Curug
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Legok
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	100	Kec. Pasar Kemis
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Balaraja
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	89	Kec. Kresek
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Kronjo
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Mauk
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Rajeg
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. SEPATAN
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	100%	Kec. Teluknaga
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Cisoka
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Pakuhaji
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Kosambi
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	90%	Kec. Cisauk

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	100%	Kec. Gunung Kaler
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	89%	Kec. Jambe
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Jayanti
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Kemiri
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Mekar Baru
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. PAGEDANGAN
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	100%	Kec. Sepatan Timur
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Sindang Jaya
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Solear
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Sukamulya
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Sukadiri
	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	88,88%	Kec. Kelapa Dua
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Capaian Efektifitas Penguatan nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa	80%	Kesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Capaian Efektifitas Penguatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	80%	Kesbangpol
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Capaian Efektifitas Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	70%	Kesbangpol

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Capaian Efektifitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	70%	Kesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Capaian Efektifitas Penyelenggaraan Kewaspadaan Nasional di Daerah	80%	Kesbangpol
X			
X.XX			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1. SEMUA OPD
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Dinas Pendidikan
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	Dinas Pendidikan
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	Dinas Kesehatan
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	DBMSDA
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	DTRB
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	DTRB
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	Satpol PP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Satpol PP
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	BPBD
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	BPBD
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	Dinsos
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Dinsos
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	DPPPA
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	DPPPA
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	DLHK
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	DLHK
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	DPMPD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	DPMPD
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Disdukcapil
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Disdukcapil
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	DPPKB
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	DPPKB
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100 Persen	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	Diskominfo
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Diskominfo
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	DPMPTSP
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	DPMPTSP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Disporabudpar
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Disporabudpar
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	DISPERPUSIP
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	DISPERPUSIP
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	DISKAN
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	DISKAN
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	99%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Disperindag
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Disperindag
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	SEKRETARIAT DAERAH

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Prosentase Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah	100%	SEKRETARIAT DAERAH
	Indeks Reformasi Birokrasi	65	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	86,01%	SEKRETARIAT DPRD
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	85,90%	SEKRETARIAT DPRD
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Bappeda
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Bappeda
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	BPKAD
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	BPKAD
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	BAPENDA
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	BAPENDA
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	BKPSDM
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	BKPSDM
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Inspektorat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Inspektorat
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Tigaraksa
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Tigaraksa
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Cikupa
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Cikupa
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Panongan	100%	Kec. Panongan
	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan	100%	Kec. Panongan
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Curug	100%	Kec. CURUG
	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan	100%	Kec. CURUG
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Legok
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Legok
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Pasar Kemis

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Pasar Kemis
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Balaraja
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Balaraja
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Kresek
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Kresek
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Kronjo
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Kronjo
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Mauk
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Mauk
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Rajeg
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Rajeg
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. SEPATAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. SEPATAN
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Teluknaga
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Teluknaga
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Cisoka	100%	Kec. Cisoka
	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Cisoka	100%	Kec. Cisoka
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Pakuhaji
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Pakuhaji
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Kosambi
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Kosambi
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	90%	Kec. Cisauk
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	90%	Kec. Cisauk
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Gunung Kaler

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Gunung Kaler
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Jambe	100%	Kec. Jambe
	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Jambe	100%	Kec. Jambe
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Jayanti
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Jayanti
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Kemiri
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Kemiri
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Mekar Baru
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Mekar Baru
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. PAGEDANGAN
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. PAGEDANGAN
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Sepatan Timur

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Sepatan Timur
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Sindang Jaya
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Sindang Jaya
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Solear	100%	Kec. Solear
	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan	100%	Kec. Solear
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Sukamulya
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Sukamulya
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Kec. Sukadiri
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	Kec. Sukadiri
	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan	100	Kec. Kelapa Dua
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kelapa Dua	100	Kec. Kelapa Dua
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	Kesbangpol

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100 Persen	Kesbangpol

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator kinerja secara lengkap dapat dilihat dalam buku lampiran Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan “Program Unggulan” sebagai program pembangunan daerah yang merupakan program berbasis isu strategis untuk mendongkrak langsung pencapaian Visi dan Misi yang diusung Kepala Daerah.

Tabel 5.2
Program Unggulan Daerah disertai Indikasi Kegiatan

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	OPD
1	TANGERANG RELIGI	Insentif Guru Ngaji	Tersedianya Penerima Insentif Guru Ngaji	Orang/Tahun	4,110	Setda
		Pengembangan Diri Siswa Baca Tulis Al Qur'an	Jumlah peserta didik SD dan SMP yang dapat Baca Tulis Al Qur'an	Siswa	10,000	Disdik
		Pembangunan sarana Sanitasi Pada Pondok Pesantren	Jumlah Pondok Pesantren yang mendapatkan bantuan	pondok pesantren	125	Kesra
		Peningkatan Pembangunan Sektor Ekonomi di Pondok Pesantren	Jumlah Pontren dibina pada bidang pertanian	pondok pesantren	10	Dinas Pertanian
		Peningkatan Pembangunan Sektor Ekonomi di Pondok Pesantren	Jumlah Pontren dibina dari sektor perekonomian bidang Perikanan	pondok pesantren	20	Dinas Perikanan
		Peningkatan Pembangunan Sektor Ekonomi di Pondok Pesantren	Jumlah Pontren dibina PHBS	pondok pesantren	150	Dinkes
2	GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKAN (GSM)	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun	USB	2	Disdik
		Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Ruang	50	Disdik
		Rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Ruang	50	Disdik
		Beasiswa Pendidikan Berprestasi dan MBR	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa	orang	4000	Disdik
		Fasilitas Sekolah Ramah Anak	Jumlah sekolah dibina menjadi ramah anak	sekolah	250	DP3A
		Sekolah KURASSAKI	Jumlah sekolah SD/SMP yang menerapkan kurassaki	sekolah	150	Disdik
		Sekolah SEHATI	jumlah sekolah SD/SMP yang menerapkan program Sehati	sekolah	30	Bappeda
3	GERAKAN TANGERANG SEHAT	Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu (Jamkesda)	Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui Jamkesda	orang	2,600	DINKES
		Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu (BPJS PBI)	Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui BPJS PBI	orang	100,000	DINKES
		Aksi Konvergensi Stunting	Jumlah Balita Stunting Di intervensi	persen	14	DINKES, Dinas Pertanian, Dinas

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	OPD
						Perikanan, Dinas Sosial, DPPKB Dan Disdik, DPPPA, DPPP
		Desa <i>ODF (open defecation free)</i>	Jumlah desa ODF	Desa	100	Pemdes,Perkim dan Dinkes
		Pembangunan RSUD Tigaraksa :				
		a.Feasibility study	Jumlah dokumen FS	Dokumen	0	DINKES
		b. Master plan dan Detail engineering design	Jumlah dokumen <i>Master plan</i>	Dokumen	0	DINKES
		c. penyediaan lahan	Luas Lahan	M ²	0	DINKES
		d. pembangunan	Jumlah Bangunan yang dibangun	Unit	6 (Penunjang Lanjutan)	DINKES
		Alat Kesehatan & Sarpras	Jumlah Paket Alat Kesehatan & Sarpras	Jenis	250	DINKES
		Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan	Orang	150	DINKES
		Obat dan BMHP	Jumlah Paket Obat & BMHP	Paket	2	DINKES
		Puskesmas Ramah Anak	Jumlah puskesmas yang dibina menjadi ramah anak	puskesmas	44	DINKES dan DPPPA
		Olahraga bersama Masyarakat dan Pelajar	Jumlah kelompok masyarakat dan pelajar yang berolahraga bersama	Kelompok	427	Kecamatan, Disporabudpar
			Jumlah kegiatan olahraga masyarakat dan pelajar	Kegiatan	5	Kecamatan, Disporabudpar
4	TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN (TANGERANG MANTAP)	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Jumlah produksi Holtikultura di kawasan Agropolitan	Ton	8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian	Jumlah sarana dan prasarana Produksi Pertanian di Kawasan Agropolitan	Jenis	163	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Jumlah luasan pertanian yang diberikan bantuan	Ha	100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Pelaksanaan Pembangunan Pusat Hortikultura :	pembangunan pusat hortikultura	<i>Persen</i>	100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN, DTRB

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	OPD
		1. Desain Pusat Hortikultura	Jumlah dokumen DED	DED	0	DTRB
		2. Pembangunan Pusat Hortikultura	Jumlah pusat hortikultura	Unit	0	DTRB
		3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana pusat Hortikultura	Paket	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Pemberian Insentif pada Lahan LP2B	Luas lahan LP2B yang diberikan bantuan	Ha	2,800	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Pekarangan Pangan Lestari (PPL)	Jumlah kelompok PPL	Kelompok	10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Pembangunan Daerah Irigasi	Lahan Pertanian Berkelanjutan Yang Terlayani Irigasi	Daerah Irigasi (DI)	4	DBMSDA
5	GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI (GERBANG MAPAN)	Konservasi Penanaman Mangrove	Jumlah Ha lokasi penanaman (Persentase Luasan Penanaman Mangrove)	Luasan (persentase)	15%	DLHK, Dinas Perikanan
		Pembangunan WANA WISATA TMC	% kaWASAN Wana wisata TMC terbangun	%	100%	DTRB
		Pembangunan Sentra Budidaya Perikanan (Urban Aqua Cultur)	%Terlaksananya Urban Aqua Cultur di Desa Ketapang	Persen	86%	DINAS PERIKANAN
		1. Desain Urban Aqua Cultur	Jumlah dokumen	DED/FS	0	DINAS PERIKANAN
		2. Pembangunan Urban Aqua Cultur	Jumlah Unit Urban Aqua Cultur yang dibangun	Unit	0	DINAS PERIKANAN
		3. Penataan Lahan Urban Aqua Cultur	Presentase Luasan Urban Aqua Cultur yang ditata	Persen	86%	DINAS PERIKANAN
		4. Pemeliharaan dan Operasionalisasi KUA	Porsentase yang dipelihara	Persen	20%	DINAS PERIKANAN
		Pemberdayaan Budidaya Ikan	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	150	DINAS PERIKANAN
			Jumlah unit kolam	unit kolam bulat	40	DINAS PERIKANAN
		Pemberdayaan Budidaya Ikan Hias	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	10	DINAS PERIKANAN

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	OPD
		Pemberdayaan Nelayan	Jumlah nelayan yang diberdayakan	Nelayan	150	DINAS PERIKANAN
			Jumlah alat penangkap ikan(API)	unit api	3500	DINAS PERIKANAN
		Pemberdayaan Pengolah Ikan	Jumlah Pengolah Yang dilatih	Kelompok	10	DINAS PERIKANAN
			Jumlah Bantuan Sarana Pengolahan ikan	Unit	10	DINAS PERIKANAN
		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Sarana Prasarana Terbangun	Kawasan		Perkim Dan Bappeda
			Jumlah DED	DED		Perkim Dan Bappeda
		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Sarana Prasarana Terbangun	Kawasan		
6	OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN MANAJEMEN ASSET (OPTIMA)	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	persentase realisasi penyelenggaraan perijinan secara online dan terintegrasi	Persen	100	DPMPSTP
		Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi	Persen	75	DISKOMINFO
		pengelolaan manajemen aset terintegrasi		%	100	BPKAD
		pengelolaan pendapatan daerah terintegrasi		%	100	BAPENDA
		pengelolaan manajemen SDM terintegrasi		%	100	BKPSDM
		pengelolaan perencanaan dan monev terintegrasi		%	100	BAPPEDA
		operasionalisasi e-office		%	100	DISKOMINFO
		integrasi data kependudukan		%	80	Disdukcapil
		integrasi pengelolaan perijinan		%	100	DPMPSTP
		Peningkatan Sistem Aplikasi Pengelolaan Aset	Jumlah sistem aset yang dikembangkan	%	100	BPKAD
			Sistem pengelolaan aset terintegrasi	%	100	BPKAD
		Pembangunan Sistem Informasi pengelolaan PAD Terintegrasi	Jumlah sistem pengelolaan PAD yang terintegrasi	%	100	BAPENDA

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	OPD
7	GEBRAK PAKUMIS PLUS (GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT KUMUH DAN MISKIN)	Bedah rumah berbasis Kawasan	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	rumah	1,300	DINAS PERKIM
			Pengurangan Kawasan Kumuh	Kawasan	90	DINAS PERKIM
		Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di kawasan kumuh	Jumlah kelompok P2L	Kelompok	10	Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan
		Pengembangan budi daya perikanan dikawasan kumuh	Jumlah pengembangan budi daya perikanan di Kawasan kumuh yang mendapatkan program perikanan	Kelompok	10	Perikanan
		Pengadaan Air Minum berbasis Kawasan	Jumlah Rumah tangga penerima air bersih	SR	500	DINAS PERKIM
		Sanitasi Masyarakat Berbasis Kawasan	Jumlah SR yang dibangun	SR	100	DINAS PERKIM
8	KITA PEDULI PERMASALAHAN SAMPAH (KIPRAH)	Optimalisasi TPS 3 R persampahan	Jumlah TPS 3 R yang dibina	TPS3R	2	DLHK
		Penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang dibina	Bank Sampah	10	DLHK
		Koordinasi dan Fasilitasi pengelolaan sampah berbasis bio conversi maggot	jumlah kelompok pengelola	Kelompok	20	Bappeda dan DLHK
		Revitalisasi TPA Jatiwaringin	persentase pengelolaan sampah berbasis waste to energy (Refuse derived fuel)	%	30	DLHK
9	PENGENDALIAN KEMACETAN LALU LINTAS (PEKATLANTAS)	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System)	Terbangunnya ATCS	titik	1	DISHUB
		FS ATCS	Tersedianya FS ATCS	dokumen	0	DISHUB
		DED ATCS	Tersedianya DED ATCS	dokumen	0	DISHUB
		Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten	Prosentase Infrastruktur jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	persen	92.08	DBMSDA
		Penanganan kemacetan lalu lintas	Titik kemacetan yang tertangani	Titik	5.00	DISHUB

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	OPD
10	PRODUK INOVATIF DAN KREATIF (PROAKTIF)	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pentas seni dan budaya	Kegiatan	5	DISPORA
		Bantuan Promosi Usaha Mikro	Usaha Mikro yang dipromosikan	Usaha Mikro	300	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Fasilitasi Usaha mikro	Fasilitasi Usaha Mikro di GTG dan di Lokasi Destinasi Wisata	Lokasi	3	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Optimalisasi GTG	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan	UM/IKM	200	INDAG/Diskum
			Pengembangan produksi UM dan IKM	UM/IKM	25	INDAG/Diskum
			Pengembangan E-commerce Kabupaten Tangerang	Persen	100	Diskominfo/Indag/Diskum
		pengembangan kluster Usaha Mikro	Terbentuknya kluster Usaha Mikro	kluster	1 (kluster Makan Minum)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembiayaan	koperasi	12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UMKM	Jumlah umkm yang mendapatkan pembiayaan	UMKM	1500	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Penilaian Koperasi yang Sehat	Jumlah koperasi yang sehat	koperasi	30	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Inovasi masyarakat	jumlah inovasi masyarakat yg terfasilitasi	Inovasi	9	Bappeda, DPMPD
		Digitalisasi Pelayanan UTTP	Presentase Pelaku Usaha yang di layani Secara Digital (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya)	Persen	75	INDAG
		kampung tematik	jumlah kampung tematik terbina	Lokasi	2	bappeda, dpmpd, pertanian, perikanan, perkim, Diskum

5.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian terdahulu, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.3

Capaian dan Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN								
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	66,52	70	86,69	80	80	100	Dinas Pendidikan
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	69,90	75	74,21	80	80	100	Dinas Pendidikan
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	68,09	75	82,49	80	80	100	Dinas Pendidikan
	BIDANG URUSAN KESEHATAN								
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	99,04	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh yang layak huni bagi korban bencana di rumah layak huni	15,00	20	62,50	30	35	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	30	66,27	60	50	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	100	100	100	Satuan Pol PP
100	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	59,56	70	61,70	80	100	100	BPBD
100111	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	100	BPBD
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	78,11	80	84,29	100	100	100	BPBD
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	78,36	90	86,38	100	100	100	BPBD
	BIDANG URUSAN SOSIAL								
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	20,29	40	75,82	60	70	100	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	17,28	40	84,82	60	70	100	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	17,47	40	84,63	60	70	100	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023	Target Nasional (%)	Perangkat Daerah
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	65,55	70	90,00	80	80	100	Dinas Sosial
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	40	60	69,91	80	80	100	Dinas Sosiai

Sumber : Laporan SPM Tahun 2021, 2022

Dalam rangka pemenuhan SPM, rencana sub kegiatan yang digunakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
A	SPM Bidang Pendidikan		
1	Pendidikan Dasar		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Penambahan Ruang Kelas Baru
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
			Pengadaan Mebel Sekolah
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga
			Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
2	Pendidikan Kesetaraan		
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Nonformal/Kesetaraan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
			Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
3	Pendidikan Anak Usia Dini		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
			Pengelolaan Dana BOP PAUD
B	SPM Bidang Kesehatan		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
4	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
6	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
7	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
8	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
9	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
10	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
C	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			dan Kelompok Masyarakat
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
			Pembangunan/Penyediaan Sistem
			Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
			Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
D	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota		
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
E	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum		
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
			Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan
			Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
2	Pelayanan informasi rawan bencana		
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
			Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan
			Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
F	SPM Bidang Sosial		
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Penyediaan Permakanan
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Alat Bantu
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga
			Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
			Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
			Pemberian Layanan Kedaruratan
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Makanan
			Penyediaan Sandang

5.3. Sinergitas Usulan Rencana Kegiatan Bersumber dari APBN Tahun 2023

Dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, Pemerintah mengalokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang sumber pendanaannya sepenuhnya berasal dari sumber Pemerintah yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan obligasi.

TKDD terdiri atas empat komponen, yaitu:

- 1) Dana Perimbangan yang terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Transfer Khusus yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik;
- 2) Dana Insentif Daerah (DID);
- 3) Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta;
- 4) Dana Desa.

Berdasarkan evaluasi perkembangan pelaksanaan TKDD maka kebijakan TKDD tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerjanya. Arah kebijakan umum TKDD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah;
2. Mendorong penggunaan DAU dan DBH untuk peningkatan kualitas layanan publik dan pemulihan ekonomi di daerah;
3. Mengalokasikan DBH dengan memperhatikan anggaran tahun sebelumnya untuk perencanaan penganggaran di daerah;

4. Meningkatkan efektivitas penggunaan DTK, penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah, dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan;
5. Memperbaiki perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja KL dan TKDD terutama DAK Fisik;
6. Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi dan sektor prioritas di desa.

Arah Kebijakan TKDD Tahun 2023 menurut jenis transfer sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil

Berdasarkan realisasi DBH tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya, maka arah kebijakan DBH tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki pengelolaan DBH berdasarkan prinsip by origin dan by actual revenue;
- b. Melanjutkan kebijakan penyelesaian Kurang Bayar yang memperhitungkan Lebih Bayar DBH dengan mengoptimalkan penggunaan Pagu DBH TA Berjalan;
- c. Melanjutkan kebijakan penyesuaian alokasi DBH untuk meminimalisir potensi Kurang/Lebih Bayar, dengan memperhatikan proyeksi DBH berdasarkan realisasi DBH minimal 3 tahun terakhir;
- d. Melanjutkan kebijakan penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dengan mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan negara dan capaian kinerja pemeliharaan lingkungan;
- e. Memperkuat implementasi penggunaan DBH Cukai Hasil Tambak untuk mendukung program JKN, perlinvos, dan penegakan hukum terkait peredaran BKC ilegal;
- f. Memperkuat implementasi DBH SDA Dana Reboisasi untuk mendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
- g. Mengoptimalkan penggunaan mandatory 25 persen DTU untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan manusia.

2. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan realisasi DAU tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya, maka arah kebijakan DAU tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat dinamis mengikuti Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto;
- b. Penyempurnaan formula DAU dengan melakukan evaluasi bobot variabel alokasi dasar, variabel kebutuhan fiskal, variabel kapasitas fiskal daerah, dan memperbaiki pengukuran indeks ketimpangan antarwilayah (Theil index);
- c. Penambahan komponen Alokasi Dasar dalam formula DAU dengan memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai ASN Daerah, termasuk gaji ke-13, THR, dan formasi Calon ASN Daerah;
- d. Penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah; dan
- e. Pengoptimalan penggunaan mandatory 25 persen DTU untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan sumberdaya manusia.

3. DAK Fisik

Berdasarkan realisasi DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya, maka arah kebijakan DAK Fisik tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan proses perencanaan dan penganggaran untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur layanan publik di daerah terutama pendidikan dan kesehatan;
- b. Refocusing dan reclusterung bidang/kegiatan DAK Fisik kedalam tema-tema prioritas nasional;
- c. Peningkatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya;
- d. Perbaikan mekanisme pengelolaan DAK Fisik di Pusat dan di Daerah; dan
- e. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik antara lain melalui penguatan pengelolaan berbasis kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pengawasan.

4. DAK Non fisik

Berdasarkan realisasi DAK Nonfisik tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya, maka arah kebijakan DAK Nonfisik tahun

2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pengalokasian DAK Nonfisik yang mampu mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan;
- b. Verifikasi pengalokasian DAK Nonfisik yang selektif dan sejalan dengan asaspembagian kewenangan dan arah prioritasnasional tahun 2023;
- c. Penyempurnaan besaran unit cost dengan penerapan unit cost majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan; dan
- d. Pengintegrasian aplikasi pelaporan antarkementerian agar dapat melakukan pemantauan capaian output/outcome di daerah secara bersama-sama dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah.

5. Dana Desa

Berdasarkan realisasi Dana Desa tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi atas pelaksanaannya, maka arah kebijakan Dana Desa tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa yang lebih mencerminkan keadilan melalui peningkatan bobot Alokasi Formula dan pembagian Alokasi Dasar berdasarkan klaster jumlah penduduk, serta mendorong kinerja desa;
- b. Penguatan Alokasi Kinerja dengan mempertajam indikator yang lebih mencerminkan kinerja desa;
- c. Peningkatan akurasi dan sinergi basis data sumber pengalokasian Dana Desa melalui koordinasi dengan K/L penyedia data;
- d. Melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dengan tetap tercatat di RKUD, dan memberikan reward penyaluran Dana Desa dalam 2 tahap kepada desa berstatus Mandiri;
- e. Memprioritaskan penggunaan Dana Dcsa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19, serta mendukung sektor prioritas di desa; dan
- f. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa dan pengembangan potensi desa.

Sinkronisasi serta keselarasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) setiap tahun sekali yang merupakan tahapan dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam Rakortekbang antara pemerintah pusat melalui K/L melakukan koordinasi dan kesepakatan terhadap usulan dari daerah yang sesuai dengan prioritas nasional tahun 2023. Berikut usulan yang disampaikan dalam Rakortekbang tahun 2022 untuk Tahun 2023 dari Kabupaten Tangerang.

Tabel 5.4

Usulan Daerah Rakortekbang Tahun 2023 Kabupaten Tangerang

NO	NASIONAL	USULAN DAERAH					DUKUNGAN KESIAPAN DAERAH		SKPD PENANGGUNGJAWAB
	MAJOR PROJECT	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	RINCIAN OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp.)/Milyard	DETAIL LOKASI	SUB KEGIATAN (APBD)	URAIAN DUKUNGAN	
1		Pembangunan Underpas Bitung	Panjang = 800 m	2023	150 M	Bitung Curug Kabupaten Tangerang	Pembangunan Jalan & Jembatan	1. Lahan Terbebaskan (peta bidang lahan) 2. Dokumen FS, DED, Kajian Hidrologi 3. Dokumen Andalalin 4. Dokumen Lingkungan	Balai Prasarana & Pemeliharaan Jalan Nasional (P2JN) Banten dan Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang
2	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	Normalisasi & Pembangunan sitepale Sungai Cisadane	Panjang = 10 Km	2023	150 M	1. Kecamatan Sepatan (Kp. Kelor s/d Kp. Bayur) 2. Kp. Kohoh & Tanjung Burung Teluknaga	Normalisasi Sungai	1. Rekomtek	1. Balai Besar Ciliwung & Cisadane (BBWS CC) 2. Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air
3	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Pembangunan IPA/Inteks SPAM Solear	Kapasitas 3,600 ltr/dt	2023	1,5 T	Kecamatan Solear	1. Pembangunan Intek/ IPA Solear 2. Pembangunan Jaringan Air Minum (SPAM)	1. Tersedia Lahan 10Ha 2. Dokumen FS, DED 3. Dokumen Lingkungan 4. Dokemen LARAP	1. Dinas Perumahan, Permukiman & pemakaman 2. Perumdam TKR

NO	NASIONAL	USULAN DAERAH					DUKUNGAN KESIAPAN DAERAH		SKPD PENANGGUNGJAWAB
	MAJOR PROJECT	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	RINCIAN OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp.)/Milyard	DETAIL LOKASI	SUB KEGIATAN (APBD)	URAIAN DUKUNGAN	
4	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Pembangunan IPLT Balaraja	Kapasitas 1.000 ltr/dt	2023	30 M	Kecamatan Balaraja	Pembangunan IPLT	1. Tersedia Lahan 1 Ha 2. Dokumen FS, DED 3. Dokumen Lingkungan	Dinas Perumahan, Permukiman & pemakaman

Sumber : Usulan Daerah Kab Tangerang, 2022

5.4 Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2023 dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif yang kemudian dikelompokkan kedalam prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah.

Rekapitulasi pagu anggaran pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan tahun 2023 disajikan dalam lampiran

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Indikator kinerja daerah ini merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung Perangkat Daerah yang merupakan target selama lima tahun dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Tangerang tahun 2019- 2023, target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator makro sebagai tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah terlihat pada Tabel 6.1:

Tabel 6.1
Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2023

No.	Uraian Indikator Makro	Satuan	Data Awal	Target RPJMD				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	LPE	Persen	5,93	5,45	-3,7	3,07	5,21	5,47
2	Inflasi	Persen	3,46	3,31	1,45	3,44	2,93	2,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,7	8,91	13,06	12,14	10,99	9,98
4	Kemiskinan	Persen	5,18	5,14	6,23	7,12	5,15	4,78
5	IPM	Nilai	71,59	71,93	71,92	72,29	72,82	73,26

Indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan OPD. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Perumusan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isustrategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019-2023 yang telah direncanakan, dimana tahun 2017 merupakan tahun dasar, tahun 2018 merupakan tahun transisi dan indikatornya ada yang sudah dirilis ada pula yang belum dirilis BPS, tahun 2019 merupakan tahun pertama RPJMD dan tahun 2023 merupakan tahun ke-5 RPJMD. Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan dalam tabel 6.2 berikut ini :

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja				Target	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	70%	101,86%	148,4%	100	100%	100%
Angka Harapan Hidup (AHH)	69,61	69,79	69,89	69,93	70,08	70,21
Prevalensi stunting	19%	12%	8,5%	7,3	16%	14%
Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC)	80%	80%	81%	83,21	87%	88%
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,25	61,54	61,53	71,12	62,05	62,11
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun)	8,27	8,28	8,39	8,61	8.45	8.49
Laju Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	2,98%	2,25%	3,69%	-0,84	5,27%	5,56%
Penambahan Kunjungan wisatawan	-	11%	-75%	2,03	4%	6%
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	77,3	-27,8	20,1	47,81	5,12	5,12

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja				Target	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,01%	66,07	65,43	63,95	68%	70%
Persentase koperasi aktif	78,83	49,92	56,80	39,9	55,00	60,00
Jmlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten	25.103	16.348	17.000	571	19.000	20.000
Nilai AKIP	61,87	70,13	70,75	0	71,99	72,61
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,05	83,66	86,36	85,95	83	89
Survey Eksternal Persepsi Korupsi	-	3,39	3,59	0	3,99	4,19
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	2,98	3	2,99	3,15	3,25
Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	85	87	89	71,4	93	95
Presentase Sumber Air Minum Rumah Tangga	39,53	42,35	41,59	83,13	50,00	60
Indeks Sanitasi	63	65,5	67,5	0	77,5	82,5
IKA (Indeks Kualitas Air)	-	67,29	63,49	56,43	57	57,5
Persentase timbulan sampah yang ditangani	23,63	24,13	24,63	25,2	25,63	26,13
Indeks Risiko Bencana	175,01	163,32	146,93	146,93	130	125
Jumlah inovasi yang diimplementasikan	-	5	10	77,78	40	45

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten
Tangerang Tahun 2022

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				Target		OPD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Pertumbuhan PDRB	Persen	5,8	5,58	-3,7	4,63	5,21	5,47	Bappeda
laju Inflasi	Persen	3,46	3,31	1,45	0,69	2,93	2,5	Bappeda
PDRB per kapita	Rupiah	35,16	36,93	34,79	44,089	37,09	38,24	Bappeda
Indeks Gini	Indeks	0,342	0,325	0,285	0,294	0,24	0,22	Bappeda
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	1,08	1,05	1,43*	1,21	1,25	1,3	Bappeda
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	94,82	94,86	93,77	94,36	94,85	95,22	Bappeda
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,59	71,93	71,92	72,29	73,14	74,09	Bappeda
Angka melek huruf	Persen	98,9	99,24	97,62	97,24	98,68	99,11	Dinas Pendidikan
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,27	8,28	8,39	8,61	8,45	8,49	Dinas Pendidikan
Angka usia harapan hidup	Tahun	69,64	69,79	69,89	69,93	70,08	70,21	Dinas Kesehatan
Persentase balita gizi buruk	Persen	0,33	0,29	1,1	0,64	0,56	0,37	Dinas Kesehatan
Prevalensi balita gizi kurang	Persen	2,51	2,28	3,9	2,34	2,89	2,53	Dinas Kesehatan
Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	85,22	85,45	85,82	86,12	86,42	86,72	Dinas Kesehatan
Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	63,5	66,69	66,64	63,95	66,93	67,67	Dinas Tenaga Kerja
Tingkat pengangguran terbuka	Persen	9,7	8,91	13,06	9,06	10,99	9,98	Dinas Tenaga Kerja
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	30,7	30,7	41,19	27,70	32,8	29,65	Dinas Sosial

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				Target		OPD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,45	83,66	86,36	81	91,39	93,91	Bagian Otala
Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	52,58	48,07	46,66	42,74	49,85	51,44	Bapenda
Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
Penguatan cadangan pangan	Ton	25.7	12.8	25	18.725	26.635,23	27.452,85	Dinas Pertanian dan KP
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	5,98	5,79	6,23	-0,84	6,64	6,84	Dinas Pertanian dan KP
Produksi sektor pertanian	Ton	526.047,00	419.941,00	438.060,00	438.607,58	439.846,64	440.742,83	Dinas Pertanian dan KP
Pertumbuhan Industri	Persen	2,66	3,24	-8,17	2,95	2,95	3,05	Dinas Perindustriandan Perdagangan
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Persen	73,53	73,52	34,23*	1,28	68,62	77,21	Dinas Perindustriandan Perdagangan
Rasio ketergantungan (Dependency Ratio)	Persen	44,86	44,86	44,46*	0.4112	44,06	43,86	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ASPEK PELAYANAN UMUM								
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR								
PENDIDIKAN								
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	43	40,3	47*	21,07	51	53	Dinas Pendidikan
Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	Persen	86,81	110,56	109,49	104.8	100	100	Dinas Pendidikan
Angka partisipasi kasar SMP/MTS/Paket B	Persen	96,27	92,57	90,64	77.59	93,56	95,02	Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				Target		OPD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Angka Partisipasi ditamatkan (APT) SD/MI	Persen	19,57	22,57	25,57	28,57	31,57	34,57	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi ditamatkan (APT) SMP/MTs	Persen	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64	13,64	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	95,84	98,98	98,87	94,61	100	100	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	79,06	81,62	81,56	54,53	83,41	84,33	Dinas Pendidikan
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,76	100	100	99,83	100	100	Dinas Pendidikan
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	96,69	97,19	97,69	97,90	98,69	99,19	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,07	0,06	0,04	0,03	0,03	0,02	Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	98,06	96,69	97,19	85,93	98,09	98,54	Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	83,98	84,03	84,08	114,93	84,18	84,23	Dinas Pendidikan
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Nilai	0,034	0,036	0,038	28	0,04	0,05	Dinas Pendidikan
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Nilai	0,034	0,036	0,038	29	0,04	0,05	Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				Target		OPD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Nilai	0,003	0,004	0,004	0.033	0	0,01	Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Nilai	0,003	0,004	0,004	0.037	0	0,01	Dinas Pendidikan
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Nilai	17,36	18,36	19,36	19,36	20,36	21,36	Dinas Pendidikan
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	96,76	96,8	96,82	96,85	96,88	96,9	Dinas Pendidikan
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	96,76	96,8	96,82	97,24	96,88	96,9	Dinas Pendidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	90	92,5	92,7	90,70	94,22	94,98	Dinas Pendidikan
KESEHATAN								
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Bayi	247	227	203	251	158	135,5	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jiwa	44	29	38	78	38	38	Dinas Kesehatan
Rasio posyandu per satuan balita	Nilai	0,63	0,6	0,6	0,791	0,58	0,57	Dinas Kesehatan
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	Nilai	0.0048	0,138	0,157	0,656	0,164	0,168	Dinas Kesehatan
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Nilai	0,0066	0,0067	0,0062	0.0000082	0,0064	0,0066	Dinas Kesehatan
Rasio dokter per satuan penduduk	Nilai	0,035	0,022	0,026	0,837	0,036	0,043	Dinas Kesehatan
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	93,2	91,4	90,7	80.6	100	100	Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				Target		OPD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	725,01	566,25	569,28	770,76	89,41	90,33	Dinas Bina Marga dan SDA
Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	92,6	91,75	93,93	94,6	95,73	96,63	Dinas Bina Marga dan SDA
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	54,52	59,52	64,52	69,52	74,52	79,52	Dinas Bina Marga dan SDA
Persentase areal kawasan kumuh	Persen	13,3	30,71	30,16	29,66	29,56	28,97	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PENATAAN RUANG								
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	13	16,61	16,61	97,61	98,17	98,59	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	13	16,61	16,61*	17,05	17,06	17,06	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	99,11	99,11	99,11*	99,11	99,11	99,11	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
Rasio rumah layak huni	Persen	92,6	98,17	94,45*	94,01	93,33	94,99	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
SOSIAL								
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	99,93	99,93	99,99*	99,95	99,96	99,97	Dinas Sosial
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR								
TENAGA KERJA								

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				Target		OPD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	8,94	36,1	14,64*	45,99	17,73	18,88	Dinas Tenaga Kerja
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	100	100	100*	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2,88	2,97	54,7	55,2	55,6	55,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	14	16	14	14,4	14,56	14,68	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	22,47	23,18	22,72*	22,83	24,01	24,34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	22,47	23,15	7,64*	16,7	21,07	21,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	101	108	100*	99,41	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	100	101	100*	97,4	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				Target		OPD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	100	100	99*	96,4	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	99	100	100*	96	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
PANGAN								
Ketersediaan pangan utama	Ton	596.351	429.941	448.491*	18.725	488.048,00	5091.16	Dinas Pertanian dan KP
Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kalori	126.233	131.148	136.148	141.106	146.084	151.052	Dinas Pertanian dan KP
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian dan KP
PERTANAHAN								
Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	75,4	76,4	11,35	16,35	21,35	26,35	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman
Penyelesaian izin lokasi	Persen	100	100	100*	100	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemukiman
LINGKUNGAN HIDUP								
Timbulan sampah yang ditangani	Persen	23,63	24,13	24,63	39,00	25,63	26,13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				Target		OPD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	96,89	96,23	85,52	91,21	93,72	96,76	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	91,86*	93,11	93,83	93,86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	3,01	2,93	1,26	1,47	2,83	2,4	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,32	2,32	2,552*	2,4	2,42	2,46	
Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Persen	48.48	57.57	62.90*	68.24	73.57	78.9	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	45	45	45	45	45	45	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	1,53	1,53	1,52	1,52	1,51	1,5	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				Target		OPD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	69,63	70,05	57,79*	68,36	68,74	69,13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Tahun	39,6	39,6	46,53*	41,91	40,18	40,32	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	6,71	6,5	6,36	6,36	6,03	5,86	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	15,44	15,44	26,44*	26,44	18,72	18,57	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	24,75	24,66	24,61	24,54	24,48	24,42	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	9,7	14,55	15,22	16,05	16,8	17,59	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	86,17	87,35	87,38	87,99	88,3	88,76	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	84,5	97,96	97,98	98,65	99	99,51	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	91,05	96,07	96,17	96,94	97,37	97,97	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	13,8	20,7	21,37	24,02	25,68	27,83	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	55,18	82,77	83,44	86,27	88,01	90,3	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				Target		OPD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	95,44	98,28	98,34	98,46	98,64	98,88	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	42	42	42	42	42	42	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	432,48	648,72	649,39	650,06	650,73	651,4	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	Persen	300,64	450,96	451,63	452,3	452,97	453,64	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	146,24	219,36	220,03	220,7	221,37	222,04	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	100	100	100	94	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	93,7	93,8	93,9	98,39	94,1	94,2	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				Target		OPD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	64,7	97,05	97,72	16,94	99,06	99,73	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Rata-rata usia kawin pertama wanita	Usia Rata-Rata	20,12	19,6	18	42	15,61	14,42	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	0,56	0,84	2,84	3,64	4,62	5,24	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
Persentase koperasi aktif	Persen	86,63	68,32	58,8	60,44	64,63	69,25	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	93,88	93,91	93,94	93,97	94	94,03	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PENANAMAN MODAL								
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	1716	2776	3951	3.596	6.215	7.347	DPMPSTSP
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	21.333,90	15.403,42	18.500,13	4.434.684,18	21.271	22.657	DPMPSTSP
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	26,85	-5,89	58,05	7,66	6,8	6,51	DPMPSTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	40	45	50	85	60	65	Disporabudpar

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				Target		OPD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase wirausaha muda	Persen	57	62	5	70	63	69	Disporabudpar
Cakupan pembinaan olahraga	Persen	38	38	0	75	38	38	Disporabudpar
Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	20	20	0	75	22	31	Disporabudpar
Jumlah atlet berprestasi	Orang	41	18	0	4	22	24	Disporabudpar
PERPUSTAKAAN								
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	304.358	335.707	72.256	15.582	132.507,4 0	145.758,14	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	60	68	111.363	112.147	157.471,4 8	175.914,87	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buah	60.12	68	111.363	112.147	157.404,2 8	175.820,79	Dinas Perpustakaan dan Arsip
KEARSIPAN								
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	66	63	64,5*	65,25	66	66,75	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	1	1*	1.00	1	2	Dinas Perpustakaan dan Arsip
LAYANAN URUSAN PILIHAN								
PARIWISATA								
Kunjungan wisata	Kunjungan	50.122	55.122	11.024*	27.129	31.092	48.472	Disporbudpar
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	15	15	2*	11	13	15	Disporbudpar
PERTANIAN								
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	5,98	5,79	6,23	-0,84	6,64	6,84	Dinas Pertanian dan KP
PERDAGANGAN								

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				Target		OPD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	Persen	99,07	100	100	100	100	100	Bappeda
Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	Bappeda
KEUANGAN								
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	10,73%	13,23%	11,51%	18,70	4,66%	0,00%	BPKAD
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0,58	0,58	0,48	8,48%	0,38	0,33	BPKAD
Belanja pendidikan (20%)	Juta Rupiah	872.472,58	744.540,23	653.110,62	0,43	606.290,11	593.954,87	BPKAD
Belanja kesehatan (10%)	Juta Rupiah	436.236,29	372.270,12	326.555,31	614.192,02	303.145,06	296.977,43	BPKAD
Perbandingan antara belanja operasi dengan belanja modal	Rasio	2,02	2,83	3,58	307.096,01	3,19	3,12	BPKAD
Belanja Operasi	Persen	66,76%	73,88%	73,25%	3,32	75,85%	75,41%	BPKAD
Belanja Modal	Persen	33,10%	26,08%	20,44%	76,53%	23,75%	24,20%	BPKAD
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	9,83%	11,36%	14,24%	23,05%	13,90%	13,77%	BPKAD
Penetapan APBD	n.a	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	14,01%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
PENGAWASAN								
Persentase tindak lanjut temuan	Persen	77,54	90	81,54	83,54	85,54	87,54	Inspektorat
SEKRETARIAT DEWAN								

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi				Target		OPD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini merupakan penjabaran teknis terhadap RPJMD 2019-2023, yang memuat visi- misi Bupati dan Wakil Bupati, dan akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 secara sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan nasional.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, sehingga RKPD Kabupaten Tangerang merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2023.

Akhirnya dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023 mampu mendorong pencapaian Visi, Misi, Prioritas, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tangerang.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR